BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Ekonomi Syariah

KAJIAN
EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH 2022

SINERGI DAN INOVASI
MENINGKATKAN KONTRIBUSI
EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Sinergi dan Inovasi digambarkan dalam sulur emas yang melambangkan semangat bersinergi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga Indonesia Emas dapat terwujud. Gambar Bintang 8 merupakan visual *(Rub Al Hizb)* sebagai lambang keuangan syariah dan lambang kesejahteraan. Warna merah pada *background* menggambarkan semangat dan keberanian. Keberadaan motif Burung Enggang (Rangkong, Kenyalang, Tingang atau Bungai) adalah satwa yang berasal dari pulau Kalimantan (Ibu Kota Negara baru). Menurut masyarakat Kalimantan (Dayak, Iban, Kenyah) burung Enggang merupakan penggambaran Tuhan yang menciptakan pohon kehidupan. Burung Enggang juga merupakan lambang kehidupan, kesetiaan, perdamaian dan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan sinergi dan kepemimpinan Bank Indonesia pada kebijakan utama untuk memperkuat ketahanan sehingga dapat bangkit menuju Indonesia maju.

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH 2022

SINERGI DAN INOVASI:
MENINGKATKAN KONTRIBUSI EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH

ISSN 2722-8665

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x

Prakata	xii
Tinjauan Umum	xiv
Daftar Istilah	175
Daftar Singkatan	184

Bab 1 — 1
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Perkembangan Ekonomi Syariah Global	4
1.2	Perkembangan Keuangan Syariah Global	8
1.3	Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global	11
Boks 1.1	Lanskap dan Tren Keuangan Syariah Global	13

Bab 2 — 17
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Kinerja Ekonomi Syariah Nasional	20
2.2	Kinerja Keuangan Syariah Nasional	32
2.3	Prospek Ekonomi Syariah Nasional Tahun 2023	44
Boks 2.1	Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* dalam Halal *Traceability*	46
Boks 2.2	Hasil Survei Pengaruh Sertifikasi Halal kepada Dunia Usaha	50

Bab 3 — 53
Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah untuk Mendorong Pemulihan	56
3.2	Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia	64
3.3	Sinergi Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional	98
Boks 3.1	Peran EKSyar dalam Mendukung Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022	103

Bab 4 — 107

Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

4.1	Asesmen Menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia	110
4.2	Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional	113
4.3	Kebijakan Bank Indonesia Mendukung Pencapaian Visi	117
Boks 4.1	Pengembangan Instrumen *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia	135

Bab 5 — 137

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional: Pariwisata Ramah Muslim

5.1	Perkembangan dan Potensi Pariwisata Ramah Muslim Global	140
5.2	Kerangka Strategi Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia	147
5.3	*Piloting* Program Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim	154
Boks 5.1	Resolusi Pariwisata Ramah Muslim dalam rangka Mewujudkan Cita Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata Kelas Dunia (7 Oktober 2022)	157
Boks 5.2	Kampung Kauman: Kuliner Wisata Halal Solo	158
Boks 5.3	Pembangunan Masjid di Kota Tua untuk Mendukung Pariwisata Ramah Muslim	159

Daftar Grafik

Bab 1
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Perkembangan Jumlah Kasus Baru dan Jumlah Kematian Baru Covid-19 Global	4
1.2	Perkembangan *Stringency Index* terkait Covid-19 di Dunia dan Negara Anggota OKI	4
1.3	Perkembangan Indeks Harga Komoditas Energi dan Pupuk	5
1.4	Perkembangan Impor Gandum Negara Anggota OKI dari Rusia dan Ukraina	5
1.5	Perkembangan Inflasi Komoditas Pangan sejumlah Negara Anggota OKI	6
1.6	Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan OKI	6
1.7	Perkembangan Nilai Transaksi Umat Islam Global pada Sektor Terkait Ekonomi Syariah	7
1.8	Perkembangan dan Proyeksi Neraca Perdagangan Produk terkait Ekonomi Syariah di Negara Anggota OKI	7
1.9	Perkembangan Neraca Perdagangan Komoditas Bahan Baku Tekstil Negara Anggota OKI Periode 2019-2021	7
1.10	Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Sejumlah Negara Anggota OKI Tahun 2022	8
1.11	Perkembangan dan Proyeksi Surplus (Defisit) Fiskal Sejumlah Negara Anggota OKI	9
1.12	Struktur Keuangan Syariah Global 2021	10
1.13	Perkembangan Penerbitan Sukuk Global	10
1.14	Persebaran Nilai Aset IKNB Syariah Global Berdasarkan Regional	10
1.15	Proyeksi Pertumbuhan Nilai Transaksi Sektor Ekonomi Syariah dan Aset Industri Keuangan Syariah Global 2021-2026	12
1.16	Pertumbuhan Rata-Rata Aset Industri Keuangan Syariah Global Periode 2016-2021	13
1.17	Paket Stimulus Fiskal Negara G20	13

Bab 2
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC	21
2.2	Sumber Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC	22
2.3	Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap PDB	22
2.4	Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap Total Sektor Prioritas HVC	23
2.5	Inflasi Komposit Makanan Minuman (Mamin) dan Penyediaan Mamin Restoran Halal	23
2.6	Inflasi Sektor HVC	23
2.7	Perkembangan Jumlah Produk Berketetapan Halal LPPOM MUI Pusat	24
2.8	Perkembangan Jumlah Produk Berketetapan Halal LPPOM MUI Daerah	24
2.9	Nominal Transaksi Produk Halal Melalui *E-commerce Marketplace*	24
2.10	Pangsa Produk Halal Melalui *E-commerce Marketplace* Berdasarkan Kategori Produk	25
2.11	Metode Pembayaran Transaksi *E-commerce Marketplace*	25
2.12	Volume Transaksi Produk Halal Melalui *E-commerce Marketplace*	26
2.13	Nilai Transaksi Makanan dan Minuman Halal Melalui *E-commerce*	26

2.14	Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui *E-commerce Marketplace*	26
2.15	Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia	27
2.16	Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2022 (Januari-November)	27
2.17	Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2022 (Januari-November)	27
2.18	Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia 2016 - 2022	28
2.19	Perkembangan Ekspor Impor Indonesia ke Negara Anggota OKI (Non Migas)	28
2.20	Pangsa Perdagangan Indonesia ke Negara Anggota OKI	28
2.21	Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia-OKI	29
2.22	Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia-OKI	29
2.23	Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia - OKI	29
2.24	Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia -	29
2.25	Perbandingan Kegiatan Usaha Responden SKDU Total dan SKDU Bersertifikasi Halal	30
2.26	Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Responden Bersertifikasi Halal dan SKDU Total	31
2.27	Perbandingan Kegiatan Investasi Responden SKDU Total dan Bersertifikasi Halal	31
2.28	Perkembangan Penerbitan Pembiayaan Hasil Penerbitan SBSN 2022	32
2.29	Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek 2013 - 2022	32
2.30	Alokasi Pembiayaan SBSN Berdasarkan Sektor Infrastruktur Tahun 2022	32
2.31	Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan	34
2.32	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 2022	34
2.33	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi per November 2022	34
2.34	Pembiayaan Perbankan Syariah *Growth* vs NPF	34
2.35	Perkembangan NPF Pembiayaan Perbankan Syariah per November 2022 (yoy)	35
2.36	Perkembangan LaR Pembiayaan Perbankan Syariah per November 2022 (yoy)	35
2.37	Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah 2022	35
2.38	Perkembangan PYD Nasional Per Sektor Ekonomi 2018-2022	36
2.39	Perkembangan PYD Regional Jawa Per Sektor Ekonomi 2018-2022	36
2.40	Perkembangan PYD Regional Sumatera Per Sektor Ekonomi 2018-2022	36
2.41	Perkembangan PYD Regional Kalimantan Per Sektor Ekonomi 2018-2022	37
2.42	Perkembangan PYD Regional Sulawesi, Maluku, Papua Per Sektor Ekonomi 2018-2022	37
2.43	Perkembangan PYD Regional Bali dan Nusa Tenggara Per Sektor Ekonomi 2018-2022	37
2.44	Perkembangan Sukuk Korporasi	37
2.45	Perkembangan IPO-ISSI per November 2022	38
2.46	Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia	38
2.47	Perkembangan DPK Bazis	39
2.48	Pengumpulan ZIS Melalui *E Commerce*	39
2.49	Perkembangan OMS Rupiah 2022 Berdasarkan Absorpsi dan Injeksi	40
2.50	Perkembangan OMS Berdasarkan OPT Syariah dan *Standing Facilities* Syariah	41

2.51	Perkembangan OMS Rupiah Berdasarkan Jenis Instrumen	41
2.52	Perkembangan Term Deposit (TD) Valas Syariah (Juta dolar AS)	41
2.53	Perkembangan Transaksi PUAS	42
2.54	Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS	42
2.55	Transaksi PUAS Berdasarkan Tenor	42
2.56	Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Pangsa Pembiayaan Syariah	43
2.57	Indeks Persyaratan Pembiayaan Perbankan Syariah	44
2.58	Omzet Responden Sertifikasi Halal dalam Setahun Terakhir	51
2.59	Responden Sertifikasi Halal Berdasarkan Sektor	51
2.60	Kemudahan Proses Pengurusan Sertifikasi Halal	51
2.61	Kecepatan Proses Pengurusan Sertifikasi Halal	51
2.62	Total Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal	51
2.63	Produk Usaha Tersertifikasi Halal Untuk Tujuan Ekspor Saat Ini	51
2.64	Manfaat Kepemilikan Sertifikasi Halal	52
2.65	Proporsi Responden yang Mengalami Kendala dalam Memperoleh Sertifikat Halal	52
2.66	Kendala dalam Memperoleh Sertifikasi Halal	52
2.67	Dukungan Pemerintah Terkait Sertifikasi Halal	52

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional: Pariwisata Ramah Muslim

5.1	Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim (yoy)	139
5.2	Perbandingan Pengeluaran Turis Domestik dan Internasional pada 2019 dan 2020	145
5.3	Pengeluaran Konsumsi Umat Muslim Dunia	145
5.4	Sebaran Populasi Muslim Dunia	145
5.5	Tren Peningkatan Peringkat Wisata Halal Indonesia	147
5.6	Tren Positif Peningkatan Jumlah Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Periode Agustus 2021-Agustus 2022	148
5.7	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2016 - 2021	148
5.8	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2021	148

Daftar Tabel

Bab 1
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

1.1	Daftar Negara dengan Kebijakan Pelarangan/Pembatasan Ekspor Komoditas Pangan yang Masih Berstatus Aktif	5
1.2	Daftar Negara dengan Fenomena USD *Shortage* dan Respon Kebijakan	8
1.3	Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sejumlah Negara Anggota OKI	11

Bab 2
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Legenda Grafik	37
2.2	Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf	40
2.3	Perkiraan Pertumbuhan PDB dan Sektor Prioritas HVC	44

Bab 3
Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Sebaran Ekosistem *Halal Value Chain* Program INFRATANI	65
3.2	Penyaluran Program Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan pada Pondok Pesantren	81
3.3	Implementasi *Best Practices* Komoditas Hortikultura pada Pondok Pesantren	81
3.4	Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan & Saprotan pada Pondok Pesantren	82

Bab 4
Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

4.1	Arahan Wakil Presiden dalam Rapat Pleno KNEKS	115
4.2	Lembaga Halal	118
4.3	Cakupan Kegiatan IN2MOTIONFEST	126

Bab 5
Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional: Pariwisata Ramah Muslim

5.1	Peringkat Wisata Halal Dunia Versi GMTI	147

Daftar Gambar

Tinjauan Umum

1	Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi	xviii

Bab 2
Kinerja dan Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

2.1	Perkembangan Survei Literasi Ekonomi Syariah Nasional	31
2.2	Rincian Proyek SBSN 2013 – 2022	33
2.3	Sebaran Proyek SBSN 2013 – 2022	33
2.4	Teknologi *Blockchain* dalam Halal *Traceability*	49
2.5	Halal *Traceability* dalam Industri Perunggasan	49

Bab 3
Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.1	Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah	56
3.2	Paradigma dan Asesmen Pengembangan Ekosistem 5 Sektor *Halal Value Chain*	64
3.3	Sebaran Mitra Program INFRATANI	67
3.4	Model Bisnis Program Juara Ekspor	68
3.5	Program IKRA Indonesia	69
3.6	Proses *Bootcamp* IKRA Indonesia	70
3.7	Sebaran Wilayah IKRA Indonesia	70
3.8	Sertifikasi Halal Reguler dan *Self-Declare*	73
3.9	Peta Sebaran Pondok Pesantren Binaan 2017-2022	74
3.10	Pengembangan Model Bisnis Pemberdayaan Usaha Syariah Tahun 2022	75
3.11	Model Bisnis Umum Pemberdayaan Usaha Syariah di Pesantren	76
3.12	Skema Implementasi Program Masjid Hijau	77
3.13	Peta Sebaran *Pilot Project* Program Masjid Hijau	78
3.14	Sebaran Wilayah Hebitren	79
3.15	Model Bisnis *Distribution Center*	79
3.16	Penyaluran Program Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan pada Pondok Pesantren	80
3.17	Implementasi *Best Practices* Komoditas Hortikultura pada Pondok Pesantren	81
3.18	Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan & Saprotan pada Pondok Pesantren	82
3.19	Capaian Kegiatan ZCP dan WCP	84
3.20	Gambaran Umum Skema Model Bisnis Pembiayaan APIF	86
3.21	Pemanfaatan QRIS dalam Keuangan Sosial Syariah	87
3.22	Penyaluran ZIS ke Wilayah 3T Bersinergi dengan BAZNAS dan TNI-AL dalam Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat	88
3.23	Buku Referensi Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar Awal	91
3.24	Kerangka Tema ISEF 2022 dalam Mendukung Presidensi Indonesia G20 2022	92
3.25	*Alignment* FESyar-ISEF 2022	93
3.26	*Opening Ceremony* FESyar 2022	93
3.27	Penyelenggaraan FESyar Tahun 2022	94

3.28 *Outcome* Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan ISEF 2022 94
3.29 Area Program Prioritas KNEKS 98
3.30 *The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment* 105

Bab 4

Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

4.1 *Gap Analysis* Menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia 111
4.2 Program Prioritas KNEKS 113
4.3 Kerangka Akselerasi Sertifikasi Halal 119
4.4 Strategi Akselerasi Sertifikasi Halal 120
4.5 Kerangka Penguatan Ekosistem Halal Orientasi Ekspor 122
4.6 Perkembangan *Modest Fashion* Indonesia dan Global 124
4.7 Perkembangan *Event Fashion Show* oleh Bank Indonesia 124
4.8 Kerangka Penguatan IN2MOTIONFEST 125
4.9 IN2MOTIONFEST 2022 127
4.10 Demografi Responden Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Tahun 2022 Berdasarkan Gender, Pendidikan Terakhir dan Kelompok Usia 134
4.11 Contoh Skema Transaksi Lindung Nilai Kompleks Beli 135
4.12 Alur Transaksi Lindung Nilai Syariah 136

Bab 5

Sektor Unggulan Ekonomi Syariah Nasional: Pariwisata Ramah Muslim

5.1 "Putrajaya Internasional Hot Air Balloon Fiesta" Salah Satu *Event* Wisata Ramah Muslim di Malaysia 141
5.2 Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Jepang 142
5.3 Aspek Penting yang Perlu Menjadi Perhatian dalam Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim 143
5.4 Proyeksi Pertumbuhan Muslim *Travel Market* 144
5.5 Segmen *Muslim Women Travelers* Semakin Penting dalam Industri Pariwisata Ramah Muslim 146
5.6 Sepuluh Destinasi Unggulan Pariwisata Halal Indonesia 149
5.7 Tujuh Sasaran Strategis Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim 150
5.8 Pemetaan Negara OKI sebagai Target Wisatawan Mancanegara 151
5.9 Empat Aspek Penting Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim 152
5.10 Konsep Pengembangan Model Ekosistem Rantai Nilai Halal Pariwisata Ramah Muslim 154
5.11 Model Bisnis Ekosistem Rantai Nilai Halal Berbasis Desa 155
5.12 *Roadmap* Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal PRM Berbasis Desa 156

Prakata

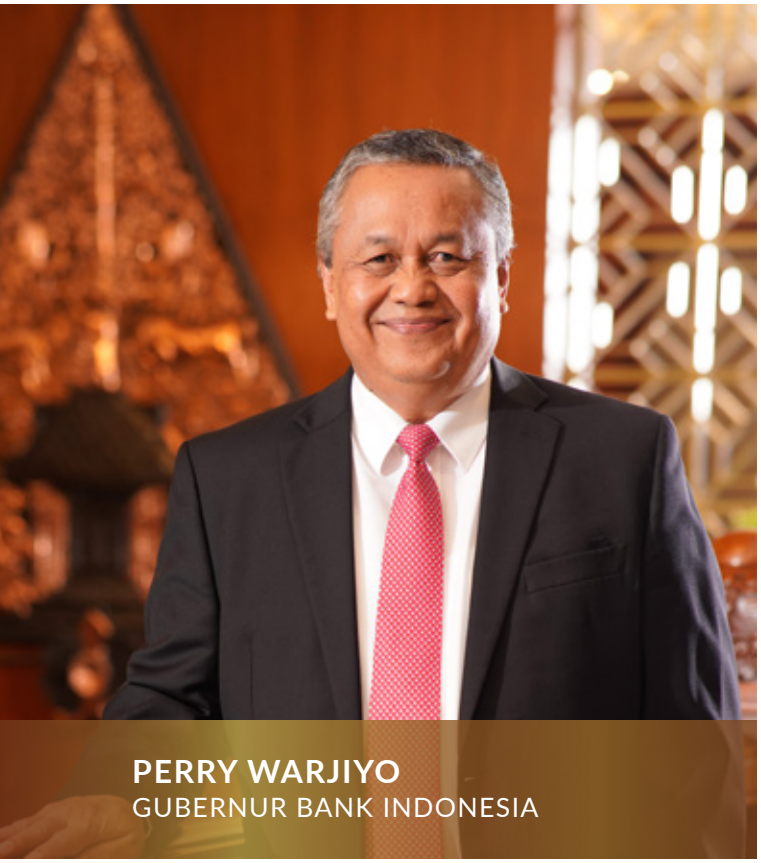

PERRY WARJIYO
GUBERNUR BANK INDONESIA

> "Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tanah air. Kebijakan pengembangan Bank Indonesia akan mengacu pada tiga pilar strategi utama, yaitu pengembangan ekonomi syariah, keuangan syariah dan edukasi."

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan petunjuk-Nya Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2022 ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah berjuang mengantarkan cahaya syariah hingga kita nikmati saat ini.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tiga tahun terakhir memaksa ekonomi global termasuk Indonesia terkontraksi cukup signifikan, kondisinya tahun ini terus membaik dan mendorong pemulihan aktivitas ekonomi. Namun begitu, tahun 2022 memiliki tantangan tersendiri bagi perekonomian. Diawali dengan tantangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang memperparah disrupsi rantai pasok komoditas pangan, kelangkaan suplai pupuk, bahan pangan dan energi, sehingga mendorong inflasi global melambung tinggi. Kondisi ini juga memicu proteksionisme pangan dari beberapa negara produsen. Tingginya inflasi global yang direspon dengan kebijakan moneter ketat yang agresif di beberapa negara maju, memberikan dampak pengetatan pada likuiditas syariah global.

Penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik dan kebijakan pelonggaran aktivitas ditingkat global maupun nasional, mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional termasuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Selain

itu, peningkatan literasi masyarakat terhadap aplikasi ekonomi dan keuangan syariah, serta semakin terbentuknya ekosistem *halal value chain*, mengantarkan ekonomi dan keuangan syariah untuk mampu menunjukkan kinerja yang baik ditengah tantangan global dan domestik. Namun, untuk mencapai visi Indonesia Pusat Industri Halal Dunia, dibutuhkan program akselerasi dan terobosan yang berdampak signifikan. *Necessary condition* menuju visi tersebut, yaitu perluasan sertifikasi halal belum terpenuhi secara maksimal. Peningkatan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha sebagai *sufficient condition* masih harus ditingkatkan lagi agar lebih kompetitif. Selain itu, perluasan *outlet* pasar produk halal terutama penetrasi produk halal Indonesia secara global, dan dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perlu terus diperkuat. Sebagai bentuk dukungan nyata, Bank Indonesia menginisiasi tiga program *flagship* untuk percepatan, yaitu penguatan ekosistem ekspor halal, akselerasi sertifikasi halal, serta perluasan dan penguatan In2MotionFest sebagai rujukan *modest fashion* dunia. Inovasi pembiayaan syariah, maupun digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah juga dapat menjadi *game changer* dalam upaya percepatan.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tanah air. Kebijakan pengembangan Bank Indonesia akan mengacu pada tiga pilar strategi utama, yaitu pengembangan ekonomi syariah, keuangan syariah dan edukasi. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dalam wadah KNEKS dan *stakeholders* lainnya menjadi faktor penting dalam pengembangan yang berdampak masif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital pada aplikasi ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi kunci dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2022 yang saat ini ada di tangan anda, diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, serta program pengembangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bersinergi bersama Pemerintah, otoritas, dan mitra strategis terkait. Kajian ini menjadi salah satu wujud tanggung-jawab Bank Indonesia dalam menyampaikan upaya dan capaian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Kami berharap, kajian ini bukan hanya memberikan gambaran umum perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tetapi juga dapat membantu perumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara khusus, dan juga kebijakan ekonomi nasional pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan-Nya atas langkah kita untuk mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Aamiin YRA.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

TINJAUAN UMUM

SINERGI DAN INOVASI MENINGKATKAN KONTRIBUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pemulihan ekonomi global pada 2022 yang mendapatkan momentum dari penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan mobilitas tertahan akibat konflik geopolitik yang memicu disrupsi rantai pasok global dan tingginya inflasi. Perkembangan ini juga berdampak pada negara OKI mitra dagang produk halal Indonesia, meski nilai transaksi di sektor unggulan ekonomi syariah global terus tumbuh meningkat. Di tengah berbagai tekanan global dan dampak rambatannya ke domestik, ekonomi syariah terus tumbuh meningkat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Likuiditas perekonomian yang relatif longgar menyediakan ruang yang cukup untuk penyaluran pembiayaan syariah dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi syariah. Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu menjaga peran ekonomi dan keuangan syariah dalam momentum pemulihan. Ke depan, seiring dengan pemulihan perekonomian domestik di tengah ketidakpastian yang masih harus diwaspadai, didukung sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional yang semakin erat, ekonomi syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 menuju perwujudan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia.

Pemulihan ekonomi global pada 2022 yang mendapatkan momentum dari penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan mobilitas mengalami stagnasi akibat konflik geopolitik yang memperparah disrupsi rantai pasok global, sehingga menyebabkan melambungnya inflasi. Perkembangan ini juga berdampak pada negara OKI mitra dagang produk halal Indonesia, meski nilai transaksi di sektor unggulan ekonomi syariah global tetap tumbuh meningkat. Di tengah berbagai tekanan global dan dampak rambatannya ke domestik, ekonomi syariah yang diwakili oleh sektor unggulan *halal value chain*, berhasil terus tumbuh meningkat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada sektor eksternal, kinerja ekspor bahan makanan halal tetap terjaga ditopang peningkatan harga komoditas pangan global. Dari sisi keuangan syariah, likuiditas perekonomian yang relatif longgar di tengah normalisasi, tetap menyediakan ruang yang cukup untuk penyaluran pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi syariah. Keuangan sosial syariah juga terus berperan secara inklusif, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan inflasi. Pada tahun 2023, ekonomi syariah nasional diperkirakan akan terus tumbuh di tengah berbagai faktor risiko dan ketidakpastian yang masih tinggi.

Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu menjaga peran ekonomi dan keuangan syariah dalam momentum pemulihan. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan Bank Indonesia melalui pengembangan ekosistem *halal value chain*, yang pada tahun 2022 sudah terbentuk dengan cukup lengkap, khususnya di sektor pertanian sebagai hulu pada rantai nilai. Tahun 2022 juga ditandai dengan berbagai inisiasi program akselerasi, diantaranya melalui penyelenggaraan perdana pagelaran *modest fashion* berkelas internasional dan pencanangan program *flagship* percepatan secara terfokus pada ISEF 2022, peluncuran instrumen *swap* lindung nilai syariah, serta inovasi model wakaf produktif sebagai implementasi keuangan sosial syariah. Sinergi nasional baik melalui wadah KNEKS, terutama pada berbagai program prioritas yang telah dicanangkan pada akhir tahun sebelumnya, maupun berbagai program kementerian dan lembaga lainnya, juga ditempuh sebagai upaya meningkatkan kontribusi ekonomi syariah pada perekonomian nasional. Sinergi yang semakin kuat juga tercermin pada penyelenggaraan rangkaian kegiatan Fesyar dan ISEF tahun ini, dengan pencapaian yang semakin meningkat.

Ke depan, kebijakan dan sinergi nasional diarahkan untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi, serta untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Upaya pencapaian visi tersebut membutuhkan penguatan dan percepatan, yang antara lain didukung oleh Bank Indonesia melalui implementasi pengembangan ekosistem Global Halal Hub, akselerasi sertifikasi halal, dan penguatan penyelenggaraan In2MotionFest sebagai program *flagship* yang telah dicanangkan pada 2022. Sinergi nasional dalam akselerasi program prioritas KNEKS, maupun upaya percepatan lainnya, membutuhkan dukungan dan komitmen berbagai pihak demi terwujudnya visi Indonesia Pusat Industri Halal Dunia.

Kinerja ekonomi keuangan syariah global melambat di tengah ketidakpastian

Peningkatan inflasi komoditas pangan terjadi secara global akibat disrupsi rantai pasok komoditas pangan, kelangkaan suplai pupuk yang selanjutnya memicu proteksionisme pangan. Kenaikan biaya hidup terjadi di berbagai negara, terutama disebabkan oleh naiknya biaya bahan pokok dan energi. Hal ini juga terjadi negara OKI mitra dagang Indonesia yang bahkan pada beberapa negara memicu krisis sosial dan politik akibat terjadinya krisis pangan, terutama pada negara dengan kebutuhan impor gandum yang tinggi. Disrupsi pasokan komoditas global diperburuk dengan meningkatnya risiko iklim pada sejumlah negara penyuplai komoditas yang memengaruhi produksi pertanian.

Peningkatan inflasi global yang direspon dengan kebijakan moneter ketat yang agresif di beberapa negara maju, memberikan dampak pengetatan pada likuiditas syariah global. Peningkatan *policy rate* Amerika yang agresif dan menyebabkan penguatan dolar Amerika, telah memicu pengetatan moneter di beberapa negara *emerging market*, termasuk negara OKI untuk menahan tekanan pada nilai tukarnya selain untuk mengatasi inflasi domestik yang dialami. Perkembangan ini berdampak pada likuiditas keuangan syariah global yang secara umum mengetat, dan pada gilirannya memengaruhi pasar keuangan syariah, khususnya pada cenderung melambatnya penerbitan sukuk global di paruh kedua 2022.

Berbagai perkembangan ini diperkirakan masih akan berlanjut ke depan, sehingga berdampak pada prospek perkonomian negara OKI yang diprakirakan akan melambat pada tahun 2023. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh pada 2,7% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2022 yang mencapai 3,2%. Hal ini sebagai dampak berlanjutnya pengetatan moneter untuk menstabilkan tekanan inflasi di berbagai negara, berlanjutnya kebijakan ketat Covid-19 di China, serta dampak lanjutan dari krisis geopolitik.[1] Seiring dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI juga diperkirakan melambat dari 5,1% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2023[2]. Hal ini seiring dengan proyeksi menurunnya harga komoditas global sehingga memengaruhi kinerja perdagangan negara-negara OKI penghasil komoditas, berlanjutnya pengetatan moneter sebagai upaya stabilisasi inflasi domestik dan nilai tukar, serta normalisasi fiskal untuk menunjang keberlanjutan keuangan publik. Sementara itu, sektor unggulan ekonomi syariah, yakni makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, PRM, dan media serta rekreasi diperkirakan masih akan tumbuh di atas 5% (yoy).

Pemulihan ekonomi syariah nasional berlanjut ditopang sektor unggulan dan didukung peningkatan pembiayaan syariah

Di tengah berbagai tekanan global, pemulihan ekonomi syariah domestik terus berlanjut seiring pemulihan ekonomi nasional meski diperkirakan akan melambat pada 2023. Ekonomi nasional terus bertumbuh dengan tinggi pada triwulan III 2022 sebesar 5,72% (yoy). Perkembangan positif tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap kuat dan didukung membaiknya konsumsi swasta maupun investasi karena peningkatan mobilitas serta daya beli masyarakat yang masih terjaga di tengah kenaikan inflasi. Seiring dengan perbaikan ini, sektor unggulan ekonomi syariah domestik juga terus tumbuh membaik mencapai 5,5% (yoy) pada triwulan III 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja sektor pertanian dan pariwisata ramah muslim (PRM) sejalan dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarat di tengah kasus Covid-19 yang mereda. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi syariah seiring dengan ekonomi nasional 2022 diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%, yang selanjutnya pada 2023 diprakirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ini didorong kinerja sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya sektor pertanian dan PRM dengan telah dicabutnya pemberlakuan PPKM, serta dengan dukungan pembiayaan syariah. Namun, sejumlah risiko akan kemungkinan gejolak dunia dengan segala dampak rambatan negatifnya,

1 IMF-WEO October 2022

2 SESRIC OIC Economic Outlook 2022

Gambar 1. Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi

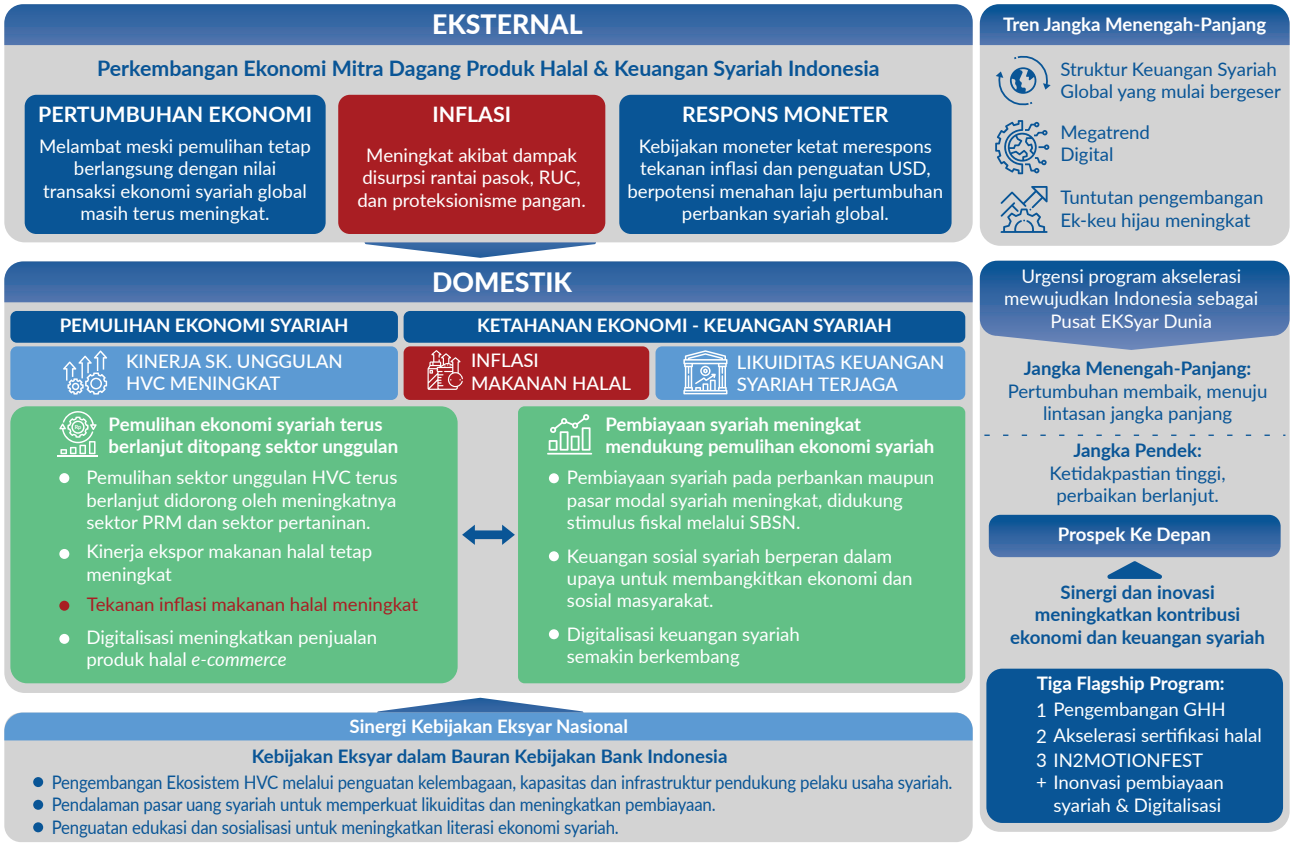

serta adanya risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian, perlu tetap diwaspadai.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor bahan makanan halal masih terus meningkat di tengah perlambatan ekonomi global. Peningkatan ekspor bahan makanan halal ini terutama ditopang oleh ekspor CPO, meski sempat menurun drastis pada triwulan II 2022 akibat larangan ekspor CPO yang ditetapkan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dengan perkembangan ini, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI juga menunjukkan peningkatan dimana CPO juga menjadi komoditas ekspor utama. Secara total neraca pedagangan non-migas Indonesia dengan negara mitra dagang anggota OKI mencatat peningkatan posisi net-ekspor Indonesia.

Tekanan inflasi makanan halal yang mencapai puncaknya pada Juli 2022 sebagai dampak rembetan konflik geopolitik global, kembali menunjukkan tren penurunan dan diperkirakan mereda pada 2023. Perkembangan inflasi komposit makanan, minuman, dan penyediaan makanan dan minuman/ restoran halal meningkat di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng, serta kendala cuaca di beberapa sentra produksi utama menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi di sektor makanan. Pelonggaran PPKM yang dituangkan dalam berbagai bentuk, turut memengaruhi inflasi pada sektor jasa pelayanan makanan dan minuman dengan meningkatnya permintaan. Sejalan dengan peningkatan produksi dan membaiknya pasokan, serta keberhasilan GNPIP, inflasi makanan halal diperkirakan akan kembali rendah pada 2023.

Peran digitalisasi pada kinerja perdagangan produk halal di *e-commerce* semakin nyata tercermin dari terus meningkatnya transaksi di tengah mobilitas masyarakat yang sudah mulai pulih. Peningkatan transaksi ini dicapai baik berdasarkan nilai nominal transaksi maupun berdasarkan jumlah produk yang ditransaksikan. Transaksi produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* didominasi oleh produk fesyen muslim dengan pangsa pasar mencapai 73,86% dari total nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce*. Peningkatan transaksi *e-commerce* yang terus terjadi

di tengah mobilitas masyarakat yang sudah mulai pulih memperlihatkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam berbelanja online.

Kondisi likuiditas di perekonomian, termasuk pada perbankan syariah, relatif longgar sehingga mendukung penyaluran pembiayaan syariah untuk mendorong pemulihan. Sebagai bagian respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, Bank Indonesia selama 2020 dan 2021 melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) dalam jumlah besar ke industri perbankan secara umum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha. Pada perbankan syariah, relatif longgarnya kondisi likuiditas ini menyediakan ruang yang cukup untuk pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK syariah. Pertumbuhan pembiayaan pada November 2022 tercatat sebesar 21,99% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis pembiayaan dan seluruh sektor ekonomi. Pembiayaan modal kerja tumbuh tinggi sebesar 14,54% (yoy) sementara pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi masing-masing tumbuh 34,14% (yoy) dan 24,04% (yoy). Memasuki triwulan III 2022, sebagai respon terhadap pengetatan moneter yang dilakukan beberapa negara maju, normalisasi likuiditas keuangan domestik dilakukan secara bertahap melalui kenaikan giro wajib minimum dan kenaikan suku bunga kebijakan. Di tengah normalisasi lukiditas ini, likuiditas perbankan syariah tetap terjaga, sehingga pembiayaan yang diberikan tetap tumbuh meningkat.

Kondisi likuiditas perekonomian yang relatif longgar ini juga mendukung pembiayaan syariah untuk pembangunan melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN). Sepanjang tahun 2022 Pemerintah telah menerbitkan SBSN sebesar Rp224 triliun (per November 2022). SBSN tersebut dialokasikan untuk membiayai 180 proyek di 26 satuan kerja setingkat eselon I pada 13 (tigabelas) Kementerian/Lembaga dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp29,53 triliun. Sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.593 proyek, terutama pada proyek infrastruktur transportasi, sumber daya air, infrastruktur pendidikan, sosial/perumahan, serta riset dan teknologi. Pangsa SBSN terhadap total surat berharga negara yang terus meningkat, mencapai 30,82% pada November 2022, memperlihatkan dukungan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah nasional.

Di tengah meningkatnya tekanan inflasi, peran keuangan sosial dalam menopang daya beli masyarakat menjadi semakin penting. Sesuai dengan prinsip pengunaannya, peran zakat dalam menopang daya beli masyarakat menjadi semakin penting di tengah terjadinya peningkatan tekanan inflasi. Sementara infak, sedekah, dan wakaf dapat menjalankan perannya sebagai komplemen sumber pembiayaan bagi perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Pada November 2022 indikator total dana pihak ketiga lembaga amil zakat pada industri perbankan mencapai 5,62 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penggalangan dana zakat, infak dan sedekah melalui *e-commerce* juga mengalami tren yang relatif stabil dengan adanya peningkatan musiman pada periode bulan suci Ramadhan dan Idul Adha. Khusus pada segmen donasi, terdapat pertumbuhan yang cukup baik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Kemudahan dalam berdonasi secara online menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya donasi oleh masyarakat, di samping itu penggunaan sarana digital juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi.

Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah: Menjaga momentum dan meningkatkan kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi bauran kebijakan nasional, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah terus diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah pada pemulihan ekonomi nasional sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif. Dalam kerangka kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia, upaya pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah terus ditempuh melalui tiga pilar strategi, yakni pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem *halal value chain*, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendorong pembiayaan syariah, serta penguatan

riset, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Pada pilar pertama, pengembangan *halal value chain* dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku dan model bisnis syariah, penguatan aspek kelembagaan, maupun penguatan infrastruktur pendukung, termasuk dukungan akselerasi proses sertifikasi halal. Pada tahun 2022, kebijakan tersebut difokuskan terutama pada sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya sektor makanan halal dan fesyen muslim. Pada sektor makanan dan minuman halal, penguatan ditempuh melalui pengembangan model bisnis komoditas pangan berbasis komunitas untuk peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas penyumbang inflasi dan komoditas substitusi bahan baku impor. Dukungan pendampingan untuk akselerasi proses sertifikasi produk halal juga terus ditempuh. Pada sektor fesyen muslim, akselerasi pengembangan antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan perdana *Indonesia International Modest Fashion Festival* (In2MotionFest) sebagai *event* rujukan *modest fashion* dunia pada *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) ke-9 tahun 2022, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional ini merupakan perwujudan upaya pengembangan sektor fesyen muslim Indonesia secara *end-to-end*, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, sampai dengan perluasan akses pasar. Berbagai upaya pengembangan ini telah berhasil membangun ekosistem yang cukup lengkap dan siap direplikasi, terutama pada sektor pertanian yang merupakan hulu dari sektor makanan dan minuman halal. Pencapaian ini menciptakan stimulus bagi pihak lain untuk masuk dan bergabung, sehingga mempercepat pembentukan ekosistem secara utuh.

Pada pilar pendalaman pasar keuangan syariah, pengembangan instrumen pasar uang syariah, penguatan regulasi, dan perluasan transaksi terus ditempuh untuk mendukung peningkatan pembiayaan syariah. Pengembangan instrumen antara lain ditempuh dengan menerbitkan Sukuk BI (SukBI) Inklusif untuk mendukung pengembangan instrumen moneter dan pasar uang syariah. SukBI Inklusif ini adalah Sukuk BI yang diterbitkan Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying* SBSN inklusif, yakni SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan inklusif tertentu seperti program kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi hijau. SukBI Inklusif juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi ketentuan kebijakan makroprudensial, termasuk Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Bank Indonesia juga telah mengembangkan instrumen *swap* lindung nilai syariah bank kepada Bank Indonesia guna mendukung manajemen pengelolaan nilai tukar perbankan syariah dalam rangka memperkuat pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang. Tersedianya *swap* lindung nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko bank syariah dan memberikan keyakinan kepada perbankan syariah untuk melakukan transaksi valas guna mendukung pembiayaan ekonomi. Standardisasi perjanjian kerja sama untuk transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), serta dukungan peningkatan transaksi *outright* surat berharga syariah di pasar sekunder maupun *underlying* untuk SiPA dan repo syariah juga telah dilakukan untuk mendukung perluasan transaksi pembiayaan syariah. Dukungan infrastruktur dan regulasi keuangan syariah terus diperkuat melalui penerbitan ketentuan di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, penguatan sektor keuangan sosial juga terus dikedepankan. Upaya penguatan dilakukan baik melalui penguatan tata kelola, maupun melalui pengembangan model integrasi keuangan komersial dan sosial berupa model wakaf produktif – bekerja sama dengan *Awqaf Properties Investment Fund* – Islamic Development Bank (APIF-IsDB) – serta pengumpulan dan penyaluran ZIS non-tunai. Bank Indonesia, bersinergi dengan berbagai pihak terkait mendorong pengembangan keuangan sosial syariah secara inklusif, termasuk mitra strategis di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Pada pilar riset, edukasi dan sosialisasi, sinergi penyelenggaraan rangkaian kegiatan Fesyar dan ISEF pada tahun 2022, termasuk penguatan riset, diperkuat sehingga semakin berkontribusi nyata pada kemajuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia secara konsisten menerbitkan jurnal internasional ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan kualitas riset dan kajian untuk memperkuat formulasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendorong sosialisasi di daerah, Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022 diselenggarakan sebagai

rangkaian kegiatan menjelang ISEF di tiga wilayah, yakni Makassar untuk wilayah Timur Indonesia, Aceh untuk wilayah Sumatera, dan Surabaya untuk wilayah Jawa. Pelaksanaan ISEF ke-9 tahun 2022 ini juga diperkuat dengan pencanangan program akselerasi untuk memajukan ekonomi syariah nasional ke depan. Dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian/ lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya, rangkaian kegiatan ISEF ke-9 tahun 2022 membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF tahun ini diikuti oleh lebih dari 560 ribu pengunjung dan 950 peserta, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi selama penyelenggaraan FESyar dan ISEF juga meningkat mencapai Rp27,6 triliun yang mencakup antara lain pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi antar pelaku usaha (*business to business*), transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*), dan ZISWAF. Bank Indonesia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersama-sama mendukung kesuksesan penyelenggaraan FESyar dan ISEF 2022 dalam rangka memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi ini berhasil meningkatkan indeks literasi ekonomi syariah masyarakat yang meningkat dari 16,3% pada 2019, menjadi 23,3% pada 2022.

Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional antara lain ditempuh melalui pelaksanaan program prioritas KNEKS. Untuk mengakselerasi perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia, telah dirumuskan tiga belas program kerja prioritas KNEKS yang terbagi dalam empat klaster, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Sebagai anggota KNEKS, Bank Indonesia berkomitmen untuk secara aktif mendukung tercapainya program prioritas KNEKS tersebut. Dalam implementasinya, telah dilakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, baik kementerian dan lembaga dalam wadah KNEKS, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta pihak terkait lainnya. Di samping program prioritas KNEKS tersebut, berbagai program kementerian dan lembaga lainnya, juga ditempuh untuk memperkuat sinergi nasional dalam upaya meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah.

Arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia 2024

Bank Indonesia akan terus mendukung peningkatan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi, serta upaya akselerasi pencapaian visi. Akselerasi implementasi ekosistem *halal value chain*, baik lokal maupun global, semakin diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Fokus pengembangan ekosistem *halal value chain* ini akan tetap diutamakan pada sektor unggulan makanan halal dan fesyen muslim, serta sektor PRM dengan berakhirnya pemberlakukan PPKM.

Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui implementasi instrumen transaksi valas dan Sukuk BI inklusif, serta pengembangan instrumen lainnya. Dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor unggulan ekonomi syariah tersebut, terus didorong, terutama melalui wakaf produktif termasuk dengan dukungan digitalisasi. Di samping itu, peningkatan *business linkage* dalam rangkaian kegiatan Fesyar di tiga wilayah (Jawa, Sumatera, Wilayah Indonesia Timur) dan ISEF bertaraf internasional. Penguatan riset dan keilmuan ekonomi dan keuangan syariah juga terus ditingkatkan, melalui pendidikan tinggi, sebagai bagian penting dalam implementasi strategi pengembangan dan peningkatan literasi masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam KNEKS maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, serta para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Dalam upaya mencapai terwujudnya visi Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia berbagai tantangan dari domestik maupun global harus dihadapi. Untuk menjadi pusat industri halal, pemenuhan aspek kehalalan yang tersertifikasi menjadi *necessary condition*, baik dalam pemenuhan pasar domestik maupun global. Meningkatnya permintaan atas produk halal di pasar domestik dan global, menjadikan upaya akselerasi pemenuhan jaminan produk halal menjadi semakin penting. Di sisi lain, masih rendahnya penetrasi industri halal Indonesia pada pasar produk halal global, membutuhkan dukungan ekosistem ekspor yang kuat, termasuk dalam peningkatan daya saing produk halal nasional. Dari sisi pembiayaan syariah, masih rendahnya variasi produk membutuhkan inovasi instrumen maupun kebijakan yang tepat untuk menjawab kebutuhan pengembangan industri halal. Sementara itu, perkembangan global yang memperlihatan semakin meningkatnya kebutuhan akan pemenuhan aspek keberlanjutan memberikan peluang bagi keuangan syariah yang secara inheren telah memiliki prinsip dasar yang menjunjung kelestarian dan keseimbangan.

Sebagai bagian untuk mendukung upaya akselerasi mewujudkan visi Indonesia Pusat Industri Halal Dunia, Bank Indonesia berkontribusi aktif mendorong sinergi melalui tiga *flagship* program. Ketiga *flagship* program akselerasi telah dicanangkan pada ISEF ke-9 sebagai program yang fokus dan *targeted* untuk mendukung kebutuhan akselerasi. Ketiga program tersebut, yaitu pertama, pengembangan Global Halal Hub yang merupakan ekosistem sinergi produk halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global. Kedua, pencanangan Akselerasi Sertifikasi Halal yang ditujukan untuk mempercepat pemenuhan jaminan produk halal secara nasional melalui sinergi erat antar pemangku kebijakan dan mitra strategis pelaku usaha syariah. Ketiga, pencanangan In2MotionFest sebagai event *modest fashion* rujukan dunia yang akan dilakukan secara simultan, masif dan kolaboratif. Di samping ketiga *flagship* tersebut, peningkatan literasi eksyar, inovasi model bisnis pembiayaan syariah, pengembangan sektor pariwisata ramah muslim, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah, turut memperkuat upaya akselerasi. Berbagai upaya akselerasi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dari berbagai pihak, berjamaah bersama dalam mewujudkan visi.

BAB I

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Perekonomian global 2022 yang mendapatkan momentum dari penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan mobilitas secara global menjadi terhambat akibat konflik geopolitik global. Konflik geopolitik yang kemudian berdampak pada disrupsi pasokan komoditas global, diikuti adanya faktor dampak perubahan iklim, mendorong kebijakan proteksionisme pada berbagai negara. Kondisi tersebut memicu inflasi global yang tinggi dan direspon dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral yang mendorong pengetatan likuiditas pada pasar keuangan global di tengah tren normalisasi kebijakan fiskal pemerintah. Di tengah situasi tersebut, pemulihan ekonomi negara-negara OKI sebagai mitra dagang produk halal Indonesia tetap berlanjut sehingga mampu menopang pemulihan sektor-sektor terkait ekonomi dan keuangan syariah, meskipun cenderung melambat seiring perlambatan perekonomian global. Sektor-sektor terkait ekonomi syariah seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata ramah muslim, dan media serta rekreasi tetap tumbuh ditopang permintaan konsumen muslim global yang kuat, meskipun ketergantungan pada produk impor yang masih tinggi. Sementara itu, dari sisi keuangan syariah, pertumbuhan keuangan syariah diperkirakan tetap berlanjut. Pertumbuhan ditopang oleh pembiayaan berbasis sukuk yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pembiayaan domestik, investasi pada *Islamic funds* yang meningkat, serta perkembangan *fintech* syariah yang mendorong inovasi dan digitalisasi pada IKNB Syariah. Di sisi lain, tren kenaikan suku bunga kebijakan diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah global.

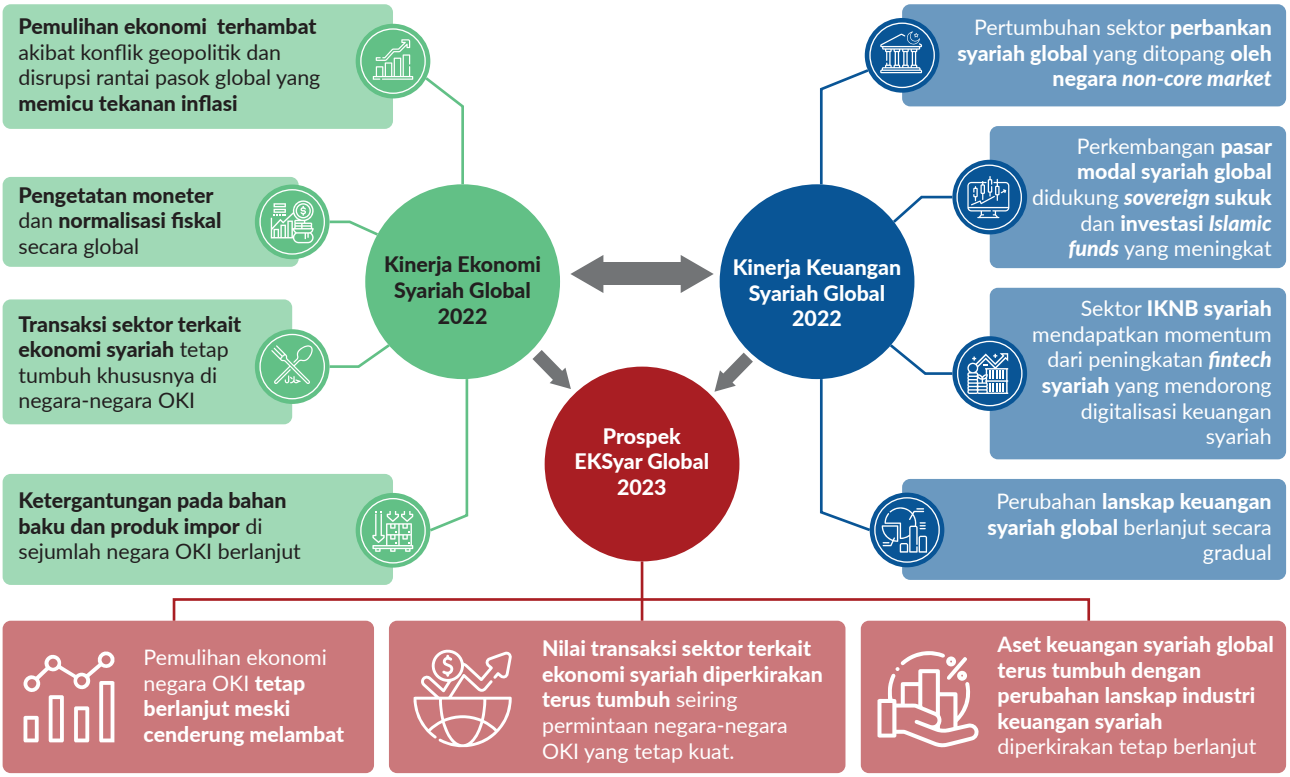
Pemulihan ekonomi terhambat akibat konflik geopolitik dan disrupsi rantai pasok global yang memicu tekanan inflasi
Pengetatan moneter dan normalisasi fiskal secara global
Transaksi sektor terkait ekonomi syariah tetap tumbuh khususnya di negara-negara OKI
Ketergantungan pada bahan baku dan produk impor di sejumlah negara OKI berlanjut
Kinerja Ekonomi Syariah Global 2022
Kinerja Keuangan Syariah Global 2022
Prospek EKSyar Global 2023
Pertumbuhan sektor perbankan syariah global yang ditopang oleh negara non-core market
Perkembangan pasar modal syariah global didukung sovereign sukuk dan investasi Islamic funds yang meningkat
Sektor IKNB syariah mendapatkan momentum dari peningkatan fintech syariah yang mendorong digitalisasi keuangan syariah
Perubahan lanskap keuangan syariah global berlanjut secara gradual
Pemulihan ekonomi negara OKI tetap berlanjut meski cenderung melambat
Nilai transaksi sektor terkait ekonomi syariah diperkirakan terus tumbuh seiring permintaan negara-negara OKI yang tetap kuat.
Aset keuangan syariah global terus tumbuh dengan perubahan lanskap industri keuangan syariah diperkirakan tetap berlanjut

1.1

Perkembangan Ekonomi Syariah Global

Periode pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menunjukkan penurunan seiring tingkat vaksinasi global yang merata, mendorong pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di hampir seluruh negara di dunia. Secara umum tingkat vaksinasi global yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 serta jumlah kasus Covid-19 global yang cenderung stabil pada tahun 2022[3] (Grafik 1.1) mendorong pelonggaran pembatasan mobilitas di hampir seluruh negara di dunia[4] (Grafik 1.2), kecuali China yang masih menerapkan *Zero Covid Policy* hingga menjelang akhir tahun 2022[5]. Kondisi ini secara umum memberikan ruang bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi global.

Pemulihan ekonomi global menuju ke arah yang lebih baik terhambat akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk bagi negara-negara OKI. Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik Rusia-Ukraina (*Russia-Ukraine Conflict*/RUC) sejak 24 Februari 2022 menjadi faktor yang kembali mengancam momentum pemulihan ekonomi global. RUC membawa implikasi yang luas pada perdagangan global, seperti komoditas energi, pupuk, dan pangan.

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kasus Baru dan Jumlah Kematian Baru Covid-19 Global

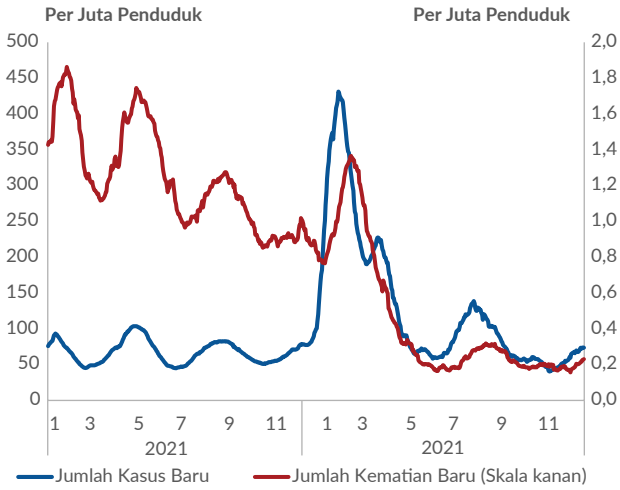

Sumber: *Our World in Data*, diolah

3 Our World in Data: Daily Covid-19 Cases per Million Populatio

4 Our World in Data: Oxford Stringency Index

5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/china-eases-covid-restrictions-in-major-shift-in-virus-policy

Grafik 1.2. Perkembangan Stringency Index terkaid Covid-19 di Dunia dan Negara Anggota OKI

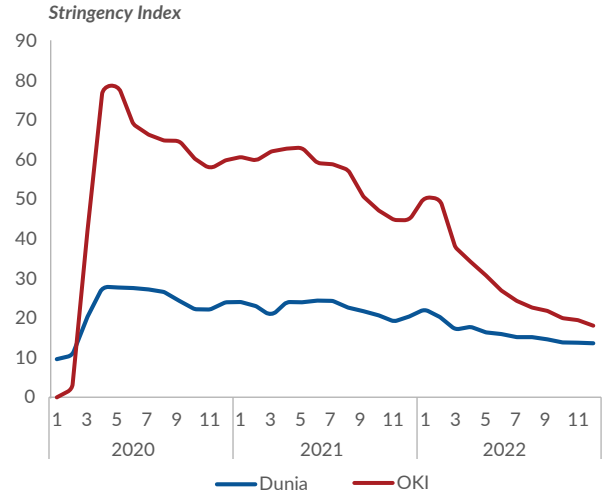

Sumber: *Our World in Data*, diolah

Pada komoditas energi, RUC menyebabkan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, termasuk penghentian impor komoditas energi, baik minyak bumi maupun gas alam dari negara tersebut. Pada saat bersamaan, Rusia dan Ukraina juga merupakan penyuplai global sejumlah unsur kimia pembentuk pupuk sehingga harga komoditas pupuk global juga meningkat drastis pada saat awal konflik. Kondisi di atas memicu kenaikan harga komoditas energi dan pupuk global (Grafik 1.3)[6].

Konflik geopolitik global juga membawa disrupsi pada keamanan pangan, termasuk di negara-negara OKI, yang semakin diperburuk dengan meningkatnya risiko dampak perubahan iklim. Rusia dan Ukraina merupakan negara penyuplai utama gandum dunia, termasuk untuk negara-negara OKI (Grafik 1.4)[7]. Terbatasnya pasokan gandum menyebabkan harga gandum global mengalami kenaikan sejak RUC berkecamuk, dan baru mencapai kestabilan di bulan Juli[8] pada saat perjanjian ekspor gandum Ukraina tercapai antara Rusia dan Ukraina. Upaya global untuk menanggulangi dampak dari disrupsi pasokan komoditas, khususnya pada komoditas pangan telah dilakukan sejumlah negara, di antaranya melalui impor

6 World Bank Pink Sheet, November 2022

7 ITC Trade Map

8 World Bank Pink Sheet, November 2022

Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Harga Komoditas Energi dan Pupuk

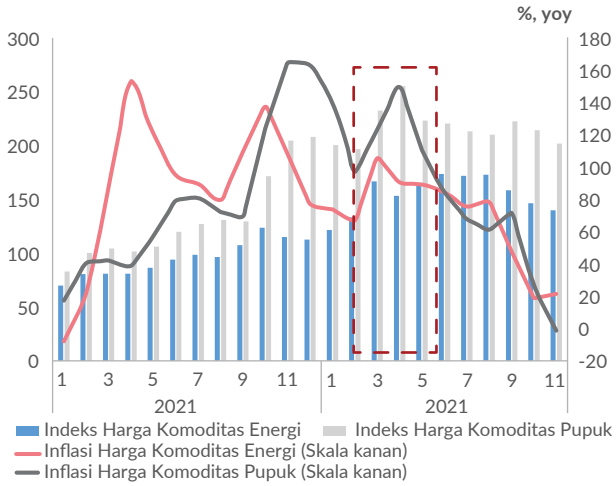

Sumber: *World Bank Pink Sheet*, diolah

Grafik 1.4. Perkembangan Impor Gandum Negara Anggota OKI dari Rusia dan Ukraina

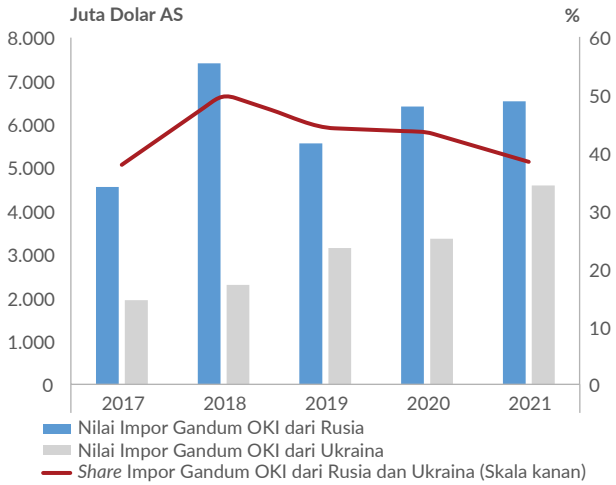

Sumber: *ITC Trade Map*, diolah

bahan pangan dari negara penyuplai lain. Namun, perubahan iklim mulai menunjukkan dampaknya. Fenomena *triple dip La Nina*[9] menyebabkan banjir besar di Pakistan. Sementara, pada saat bersamaan kawasan lain seperti Afrika Timur, Afghanistan, dan kawasan Timur Tengah seperti Tunisia dan Irak mengalami kekeringan, serta penyusutan wilayah panen akibat berkurangnya curah hujan dan cadangan air di bendungan, sehingga memengaruhi produksi pangan pada masa mendatang[10].

Kelangkaan pasokan kebutuhan pokok khususnya pangan dan energi memicu kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Sejumlah negara, termasuk negara-negara OKI memberlakukan kebijakan proteksionisme seiring dengan kelangkaan pangan di tingkat global yang dikhawatirkan membawa dampak buruk ke domestik. Hingga akhir tahun 2022 terdapat 25 negara yang telah memberlakukan kebijakan proteksionisme berupa pelarangan ekspor untuk 46 jenis produk dan 9 negara yang memberlakukan kuota ekspor bagi 11 jenis produk[11], dengan beberapa kebijakan tersebut masih aktif setidaknya hingga pertengahan Desember 2022 (Tabel 1.1). Beberapa komoditas yang mendapatkan kebijakan proteksionisme ialah makanan pokok/serealia (beras, gandum, jagung), kentang, minyak nabati, gula, daging unggas, dan daging sapi[12]. Kondisi ini memperburuk situasi pasokan pangan global khususnya bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan impor pangan yang tinggi seperti Mesir.

Tabel 1.1. Daftar Negara dengan Kebijakan Pelarangan/Pembatasan Ekspor Komoditas Pangan yang Masih Berstatus Aktif

Komoditas Pangan (termasuk turunannya)	Daftar Negara dengan Kebijakan Pelarangan Ekspor yang masih aktif*	Jumlah Negara dengan Kebijakan Pelarangan Ekspor yang masih aktif
Gandum	Afghanistan, Aljazair, Belarusia (kuota ekspor), Kamerun, Georgia, India, Kosovo, Kuwait, Lebanon, Rusia (pajak ekspor)	10
Beras	Bangladesh, India	2
Jagung	Burkina Faso, Kosovo, India	2
Kedelai	Argentina, Rusia (pajak ekspor)	
Gula	Aljazair, Kosovo, Lebanon, Pakistan	4
Minyak Nabati	Kamerun, Kuwait, Rusia (pajak ekspor), Serbia, Turki	5
Daging (ruminansia maupun unggas)	Argentina, Turki	2

Sumber: *World food food Security Update* 15 Desember 2022, diolah

*Per 13 Desember 2022

9 https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2022/11/18/the-weather-system-that-influences-the-world

10 World Bank, Food Security Update 1 December 20

11 https://www.foodsecurityportal.org/tools/Covid-19-food-trade-policy-tracker

12 World Bank, Food Security Update 15 December 2022

Melemahnya pasokan global di tengah meningkatnya permintaan paska pelonggaran mobilitas masyarakat mendorong inflasi yang meningkat pada mayoritas negara di dunia, termasuk negara-negara OKI. Tren inflasi yang meningkat secara global tidak terlepas dari disrupsi pasokan komoditas pangan dan energi global, akibat konflik geopolitik yang diperparah dengan risiko iklim dan kebijakan proteksionisme. Hal ini merupakan eskalasi dari kondisi yang terjadi sejak 2021, yakni merangkaknya inflasi seiring peningkatan permintaan yang lebih cepat daripada pasokan global, serta peningkatan harga komoditas[13]. Pada negara-negara OKI, inflasi yang terjadi secara umum lebih tinggi dibandingkan inflasi global, khususnya pada inflasi komoditas pangan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada komoditas pangan impor, pelemahan nilai mata uang, hingga bencana alam seperti yang dialami Pakistan (Grafik 1.5)[14].

Di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan inflasi, pemulihan ekonomi negara-negara OKI pada tahun 2022 tetap berjalan meskipun mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 3,2% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2021 yang mencapai 6% (yoy)[15] sebagai dampak disrupsi rantai pasok global, tekanan inflasi, dan pengetatan kebijakan moneter selama tahun 2022. Sejalan dengan kondisi ini, perekonomian negara-negara OKI juga diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat dari 5,4% (yoy) pada tahun 2021 menjadi 5,1% (yoy) pada tahun 2022 (Grafik 1.6).

Di tengah perlambatan ekonomi global, sektor-sektor terkait ekonomi syariah terus mengalami pertumbuhan. Tingkat belanja umat Islam pada sektor-sektor terkait ekonomi syariah diperkirakan masih meningkat pada tahun 2022. Hal ini seiring pelonggaran kebijakan terkait Covid-19 dan berlanjutnya pemulihan ekonomi di negara-negara OKI. Sektor makanan dan minuman masih menjadi sektor ekonomi syariah dengan nilai terbesar dibandingkan sektor lainnya, sementara sektor pariwisata ramah muslim (PRM) di tataran global diperkirakan akan mencatatkan perkembangan pesat antara tahun 2021 dan 2022 (Grafik 1.7). Selain faktor makroekonomi, sejumlah faktor menjadi pendorong meningkatnya nilai transaksi oleh konsumen muslim global, baik dari sisi konsumsi, investasi, kerja sama perdagangan, maupun kebijakan pemerintah (Lampiran 1).

Salah satu kendala dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah global adalah tingginya nilai impor. Peningkatan nilai konsumsi dan belanja umat Islam, khususnya di negara-negara OKI belum sepenuhnya dibarengi dengan kemandirian

Grafik 1.5. Perkembangan Inflasi Komoditas Pangan Sejumlah Negara Anggota OKI

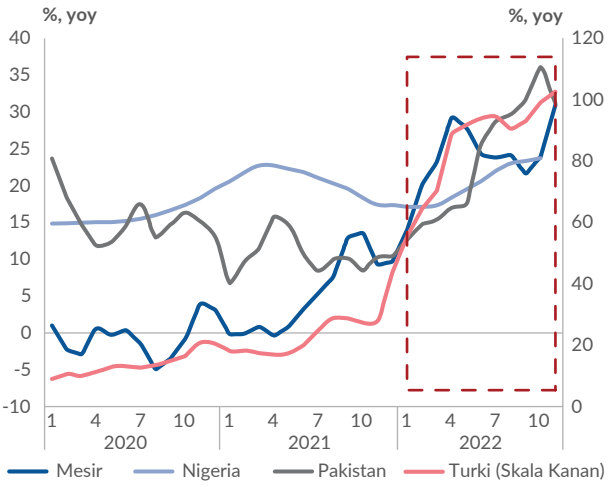

Sumber: *CEIC*, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan OKI

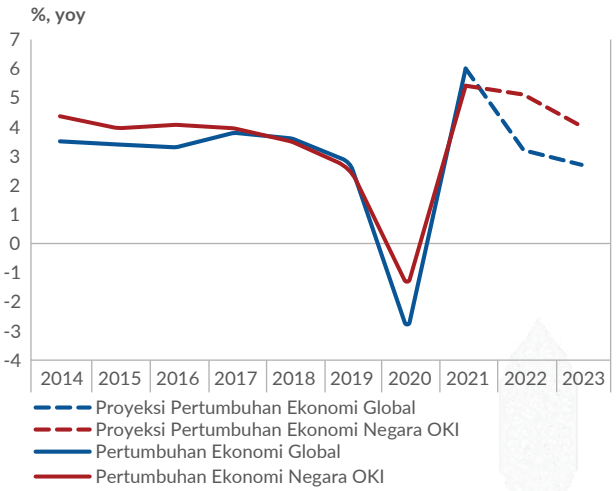

Sumber: *IMF WEO October 2022*, diolah

13 SESRIC OIC Economic Outlook 2022
14 CEIC
15 IMF, WEO October 2022

Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Transaksi Umat Islam Global pada Sektor Terkait Ekonomi Syariah

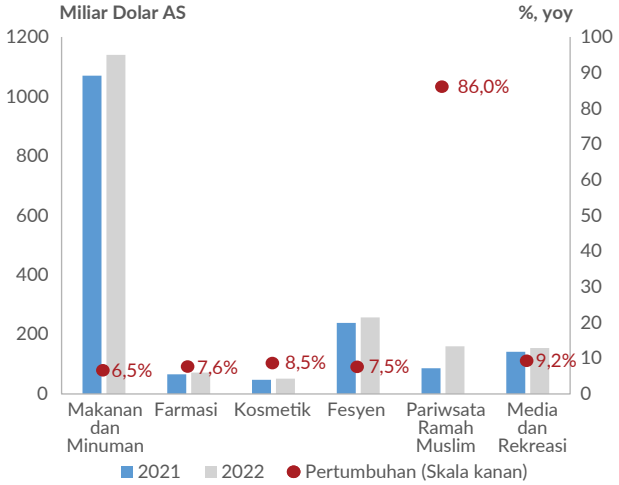

Sumber: *ICDT-OIC Annual Halal Economy Report 2022*, diolah

penyediaan produk sektor ekonomi syariah oleh negara-negara tersebut. Hal ini terutama terjadi pada sektor makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik yang pada tahun 2021 masing-masing memiliki defisit perdagangan sebesar 69 miliar dolar AS, 51,2 miliar dolar AS, dan 9,26 miliar dolar AS (Grafik 1.8). Pada sektor makanan dan minuman, tercatat impor yang tinggi khususnya pada komoditas gandum yang menjadi bahan makanan pokok di wilayah MENA (Middle East and North Africa). Dari sektor farmasi, terjadi peningkatan impor, khususnya vaksin, dan obat-obatan untuk keperluan ritel. Hal ini seiring dengan kesadaran masyarakat yang menguat untuk menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19.

Grafik 1.8. Perkembangan dan Proyeksi Neraca Perdagangan Produk terkait Ekonomi Syariah di Negara Anggota OKI

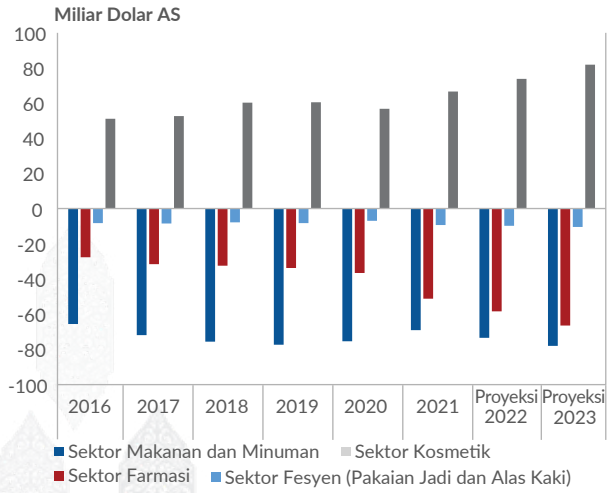

Sumber: *ICDT-OIC Annual Halal Economy Report 2022*, diolah

Sementara itu, peningkatan impor kosmetik didorong oleh kebutuhan kosmetik yang ramah lingkungan dan minim risiko kesehatan *transdermal*, produk perawatan kulit dan rias, serta parfum. Khusus pada produk *modest fashion*, negara-negara OKI konsisten menunjukkan surplus perdagangan yang mencapai 66,6 miliar dolar AS pada tahun 2021. Hal ini seiring dengan ekspor produk fesyen yang meningkat dari negara-negara OKI ditopang oleh peningkatan permintaan *modest fashion*. Perlu digarisbawahi bahwa surplus perdagangan ini terjadi pada segmen pakaian dan alas kaki siap pakai atau sisi hilir dari sektor *modest fashion*. Adapun dari sisi hulu, yakni bahan baku tekstil khususnya berbagai jenis serat, negara-negara OKI tercatat masih mengalami defisit perdagangan (Grafik 1.9).

Grafik 1.9. Perkembangan Neraca Perdagangan Komoditas Bahan Baku Tekstil Negara Anggota OKI Periode 2019-2021

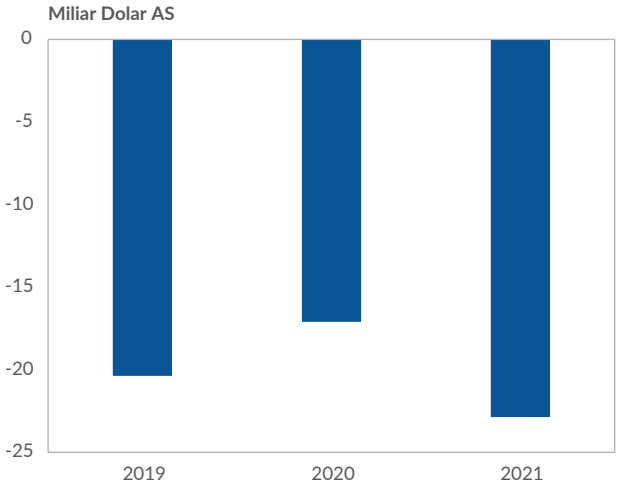

Sumber: *ITC Trade Map*, diolah

1.2

Perkembangan Keuangan Syariah Global

Merespon ketidakpastian global yang meningkat akibat tekanan inflasi, mayoritas bank sentral melakukan pengetatan kebijakan moneter, termasuk sejumlah negara anggota OKI. Penanganan inflasi melalui pengetatan moneter dilakukan oleh mayoritas negara di dunia. Di negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa, pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga kebijakan dilakukan sebagai respon atas meningkatnya inflasi seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Sementara itu, di negara-negara berkembang termasuk sejumlah negara OKI, langkah pengetatan moneter dilakukan selain untuk meredam gejolak inflasi domestik yang meningkat juga sebagai upaya untuk menstabilkan tekanan dari sisi nilai tukar (Grafik 1.10)[16]. Selain itu, kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga kebijakan secara agresif selama tahun 2022 mendorong *capital outflow* dari negara-negara berkembang, termasuk negara-negara OKI sehingga sejumlah negara OKI mengalami fenomena kekurangan pasokan dolar atau *USD Shortage* sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional[17]. Hal ini mendorong negara-negara tersebut melakukan berbagai kebijakan untuk menstabilkan nilai tukarnya.

Grafik 1.10. Perkembangan Suku Bunga Kebijakan Sejumlah Negara Anggota OKI Tahun 2022

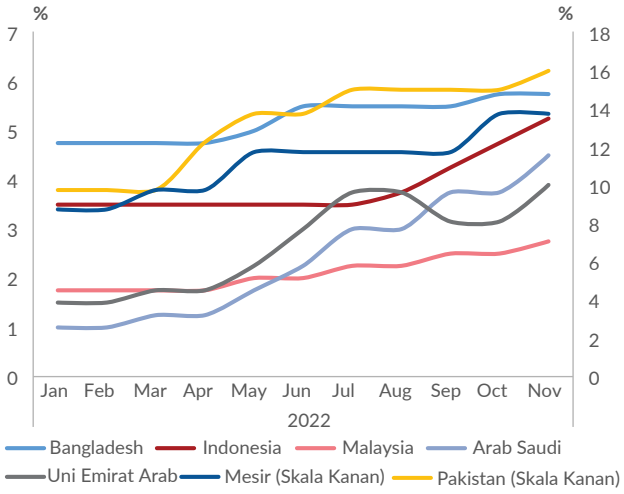

Sumber: *CEIC*, diolah

Selain melalui mekanisme pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga kebijakan, sejumlah kebijakan lain terkait stabilisasi nilai tukar juga dilakukan, antara lain pembatasan impor maupun pembayaran impor menggunakan dolar AS untuk menjaga pasokan cadangan devisa, pembatasan penarikan simpanan valas penduduk, hingga permintaan bantuan likuiditas kepada IMF (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Daftar Negara dengan Fenomena *USD Shortage* dan Respon Kebijakan

Negara	Fenomena	Respon Kebijakan
Bangladesh	Menurunnya pendapatan ekspor dan remitansi pekerja migran di tengah biaya impor yang meningkat	1. Pinjaman IMF 4.5 miliar dolar AS 2. Pembatasan impor barang mewah 3. Penertiban lembaga Kupva BB terkait manipulasi nilai valas
Pakistan	1. Turunnya produksi komoditas ekspor akibat banjir 2. Krisis politik domestik 3. Utang China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).	1. Pembatasan penerbitan L/C dan *forward booking* USD bank 2. Pembatasan impor secara umum 3. Negosiasi pinjaman IMF dan restru utang dengan China
Turki	Penurunan suku bunga kebijakan saat tingginya inflasi dan apresiasi USD terhadap Lira Turki	Program konversi simpanan valas menjadi Lira Turki dengan suku bunga dijamin pemerintah
Mesir	1. Turunnya pendapatan pariwisata 2. Kenaikan harga impor pangan	1. Pembatasan pembayaran impor dalam miliar 2. Pinjaman 3 miliar dolar AS dari IMF dan 5 miliar dolar AS dari negara mitra

16 Forbes, CEIC
17 Trading Economics

Negara	Fenomena	Respon Kebijakan
Ghana	Utang publik yang meningkat untuk mendukung kebijakan fiskal	1. Pinjaman IMF 3 miliar dolar AS 2. Negosiasi restrukturisasi utang publik denominasi domestik
Lebanon	Krisis ekonomi dan politik sejak Oktober 2019	1. Permohonan pinjaman IMF 3 miliar dolar AS 2. Rencana devaluasi *pegging* nilai tukar 3. Pembatasan penarikan simpanan valas oleh penduduk

Sumber: *Bloomberg*, *Reuters*, dan berbagai sumber lainnya, diolah.

Di sisi kebijakan fiskal, terdapat kecenderungan normalisasi kebijakan fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal paska pandemi Covid-19. Kebijakan fiskal yang ekspansif oleh pemerintah global, termasuk di negara-negara OKI menyebabkan terjadinya defisit fiskal yang besar khususnya pada tahun 2020 sebagai upaya *counter-cyclical* atas terjadinya kontraksi ekonomi akibat pandemi. Seiring kegiatan ekonomi yang mulai pulih kembali, secara bertahap sejak tahun 2021 pemerintah berbagai negara di dunia mulai melakukan normalisasi fiskal dan berlanjut pada tahun 2022. Kondisi ini ditunjukkan oleh rasio defisit fiskal terhadap PDB yang cenderung menurun secara global maupun di negara-negara OKI. Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan mencatat defisit fiskal terhadap PDB relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, negara eksportir migas seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar diperkirakan akan memiliki surplus fiskal pada tahun 2022 seiring kenaikan harga minyak mentah global yang membawa dampak langsung bagi penerimaan di negara-negara tersebut. Namun, sejumlah negara OKI mencatatkan tren yang berbeda. Pakistan yang pada tahun 2022 dilanda banjir besar, serta Bangladesh yang mengalami tekanan akibat kenaikan harga energi, ketergantungan impor pangan, dan penurunan pendapatan remitansi, diperkirakan mengalami kenaikan rasio defisit fiskal dibandingkan tahun 2021[18] (Grafik 1.11).

Di tengah tren pengetatan moneter dan normalisasi fiskal, industri keuangan syariah global masih bertumbuh didominasi oleh perbankan syariah, dengan kontribusi negara-negara *non-core market* dari industri perbankan syariah global. Industri keuangan syariah global masih bertumbuh dengan dominasi sektor perbankan syariah (Grafik 1.12). Perkembangan perbankan syariah global selama masa pandemi Covid-19 setidaknya digerakkan oleh tiga faktor utama. Pertama, dampak positif dari berlanjutnya stimulus pemerintah pada sektor-sektor yang dianggap terdampak Covid-19. Kedua, adanya peningkatan efisiensi dari penggunaan teknologi digital seperti *branchless banking*, serta kolaborasi bersama dengan lembaga *Financial Technology* (FinTech). Ketiga, berlanjutnya peningkatan permintaan bagi layanan perbankan syariah. Dari sisi spasial, negara-negara yang tergolong baru dalam industri perbankan syariah global mencatatkan pertumbuhan yang tinggi seperti Tajikistan (84%), Burkina Faso (27%) dan Ethiopia (26%)[19].

Secara umum, pasar modal syariah global masih didominasi oleh penerbitan sukuk pemerintah sebagai bagian dari pembiayaan fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Penerbitan sukuk global pada Semester 1 2022 mencapai 100,9 miliar dolar AS,

Grafik 1.11. Perkembangan dan Proyeksi Surplus (Defisit) Fiskal Sejumlah Negara Anggota OKI

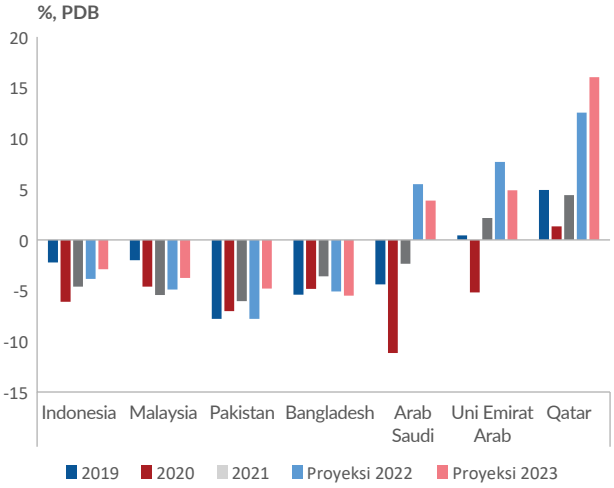

Sumber: *IMF WEO dan IMF Fiscal Monitor October 2022*, diolah

18 IMF Fiscal Monitor, October 2022

19 Refinitiv, IFDI Report 2022

Grafik 1.12. Struktur Keuangan Syariah Global 2021

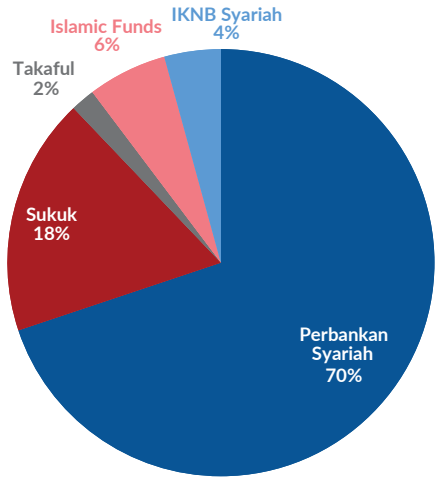

Sumber: *ICD-Refinitiv Islamic Development Report 2022*, diolah

sedikit berkurang dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai 104,2 miliar dolar AS (Grafik 1.13). Penerbitan sukuk global masih didominasi oleh tiga negara, yaitu Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia khususnya *sovereign sukuk*. Namun sejak pertengahan tahun 2022, penerbitan sukuk khususnya *corporate sukuk* menghadapi tekanan seiring kenaikan suku bunga kebijakan[20]. Sementara itu, pertumbuhan sektor *Islamic funds* global didominasi oleh pertumbuhan substansial *Asset under Management* (AuM) oleh *money market funds* dari Arab Saudi, dan *equity funds* dari Malaysia yang mendapatkan momentum dari pemulihan ekonomi seiring pelonggaran kebijakan terkait Covid-19[21].

Grafik 1.13. Perkembangan Penerbitan Sukuk Global

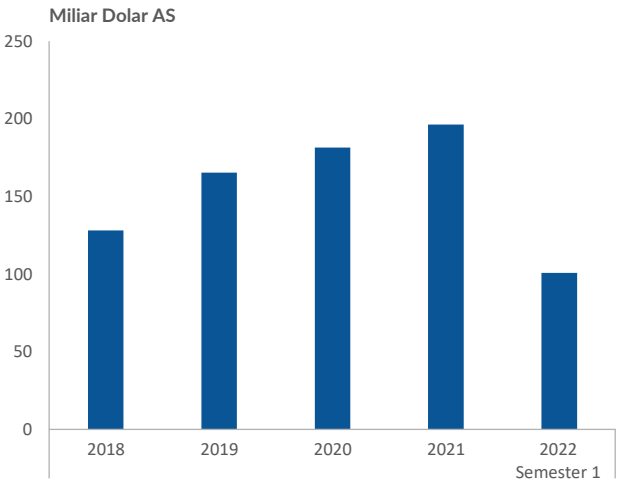

Sumber: *Refinitiv Sukuk Perceptions and Forecast Study 2022*, diolah

Perkembangan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah mendapatkan momentum dari penetrasi *Fintech* syariah, meski cenderung masih terpusat pada negara OKI di Asia Tenggara dan GCC. Tren digitalisasi global, khususnya kemunculan *fintech* membawa dampak bagi perkembangan keuangan syariah global. Perkembangan industri *fintech* syariah salah satunya didukung oleh iklim bisnis yang kondusif, khususnya pada negara-negara *core-market* keuangan syariah seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia seiring konsentrasi kehadiran IKNB syariah global pada wilayah Asia Tenggara dan GCC (Grafik 1.14). Namun secara sektoral industri *fintech* masih memiliki *share* yang rendah relatif terhadap perbankan syariah dan pasar modal syariah (khususnya sukuk). Sementara, sektor takaful global juga masih bertumbuh meskipun menghadapi persaingan ketat dari sektor asuransi konvensional, terutama akibat peningkatan klaim pada takaful sektor kesehatan dan takaful kendaraan khususnya di wilayah GCC[22]. Berbagai dinamika tersebut mendorong terjadinya perubahan struktur keuangan syariah global secara gradual. Meskipun sektor perbankan syariah masih dominan dalam lanskap keuangan syariah global, peningkatan pembiayaan berbasis sukuk khususnya oleh pemerintah, serta perkembangan investasi *Islamic funds* mendorong pergeseran struktur keuangan syariah global (Boks 1.1).

Grafik 1.14. Pesebaran Nilai Aset IKKNB Syariah Global Berdasarkan Regional

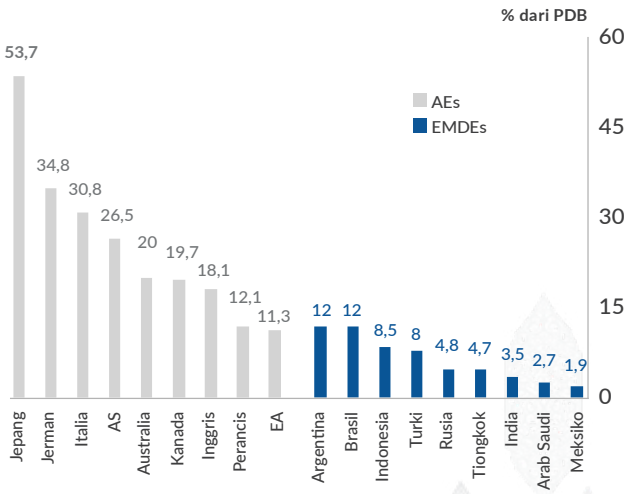

Sumber: IMF, Statista (publikasi Nov 2021 untuk data Mei 2021)

20 Refinitiv, Sukuk Perceptions and Forecast Study 2022

21 Refinitiv, IFDI Report 2022 dan Fitch Ratings

22 Refinitiv, IFDI Report 2022

1.3

Prospek Ekonomi dan Keuangan Syariah Global

Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI pada tahun 2023 diprediksi akan melanjutkan pemulihan meskipun melambat. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,7% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2022 yang mencapai 3,2%.[23] Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI diperkirakan tetap melanjutkan tren pemulihan meskipun melambat dari 5,1% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2023. Hal ini seiring dengan proyeksi menurunnya harga komoditas global yang memengaruhi kinerja perdagangan negara-negara OKI penghasil komoditas, berlanjutnya pengetatan moneter sebagai upaya stabilisasi inflasi domestik dan nilai tukar, serta normalisasi fiskal untuk menunjang keberlanjutan keuangan publik.[24]

Perkembangan sektor-sektor terkait ekonomi syariah diperkirakan terus tumbuh positif meski terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai. Sektor-sektor ekonomi syariah, yakni makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, PRM, serta media dan rekreasi diperkirakan akan tumbuh di atas 5% per tahun hingga 2026 (Grafik 1.15). Prakiraan ini seiring dengan permintaan konsumen muslim global yang diproyeksikan tetap kuat, serta ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah di negara-negara OKI yang mendukung pengembangan ekonomi syariah seperti kewajiban sertifikasi halal, dan kerja sama perdagangan antar negara OKI yang meningkat. Namun, terdapat sejumlah faktor risiko seperti berlanjutnya inflasi yang memengaruhi daya beli konsumen dan masih tingginya ketergantungan negara-negara OKI pada produk impor.

Perkembangan keuangan syariah global diperkirakan masih akan bertumbuh, salah satunya ditopang oleh perkembangan industri perbankan syariah baru di Afrika Utara dan Asia Tengah maupun negara non OKI. Aset keuangan syariah global diperkirakan tumbuh mencapai 5.900 miliar dolar AS atau memiliki tingkat pertumbuhan mencapai sekitar 8,3%%

Tabel 1.3. Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sejumlah Negara Anggota OKI

Negara	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Share PDB (PPP) terhadap OKI (2021) (%)
Arab Saudi	0.3%	-4.1%	3.2%	7.6%	3.7%	8.2%
Bangladesh	5.6%	5.2%	7.1%	7.0%	6.0%	5.5%
Iran	-3.1%	3.3%	4.7%	3.0%	2.0%	6.8%
Malaysia	4.4%	-5.5%	3.1%	5.4%	4.4%	4.5%
Mesir	5.5%	3.5%	3.3%	6.6%	4.4%	6.8%
Nigeria	2.2%	-1.8%	3.6%	3.2%	3.0%	5.4%
Pakistan	3.1%	-0.9%	5.7%	6.0%	3.5%	6.2%
Turki	0.8%	1.9%	11.4%	5.0%	3.0%	13.8%
Uni Emirat Arab	3.4%	-4.8%	3.8%	5.1%	4.2%	3.4%
OKI	2.6%	-1.5%	5.4%	5.1%	4.0%	

Sumber: *IMF WEO October 2022*, diolah

23 IMF-WEO October 2022
24 SESRIC OIC Economic Outlook 2022

(CAGR) antara 2021-2026. Proyeksi pertumbuhan ini salah satunya didasari oleh rencana strategis pengembangan keuangan syariah oleh berbagai otoritas di negara-negara *core-market* keuangan syariah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Sejumlah negara juga baru akan mulai membuka industri perbankan syariah seperti Rusia dan Filipina, serta layanan keuangan syariah yang terus meningkat di Afrika Utara seperti Aljazair. Selain itu, digitalisasi perbankan syariah di berbagai negara serta upaya membentuk sistem perbankan syariah secara penuh di Afghanistan dan Pakistan juga diperkirakan akan memperkuat pertumbuhan perbankan syariah pada masa mendatang. Sektor perbankan syariah global diperkirakan akan tumbuh mencapai 7,8% (CAGR) hingga 2026.[25]

Pertumbuhan sukuk diperkirakan masih berlanjut khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan domestik, sementara perkembangan *fintech* syariah diperkirakan akan mendorong pertumbuhan IKNB syariah global. Pertumbuhan pembiayaan syariah berbasis sukuk selama periode 2021-2026 diperkirakan mencapai 9,8% (CAGR) (Grafik 1.15). Pertumbuhan ini utamanya bersumber dari penerbitan *sovereign sukuk* untuk pembiayaan fiskal dalam menghadapi risiko penguatan dolar pada masa mendatang[26]. Sementara itu, pertumbuhan IKNB syariah global diproyeksikan akan mencapai 4,8% (CAGR) hingga tahun 2026, utamanya digerakkan oleh perkembangan *fintech* yang diperkirakan akan terus tumbuh, khususnya pada layanan *crowdfunding*, layanan intermediasi keuangan, serta jasa sistem pembayaran digital.[27] Selain itu, perkembangan keuangan mikro syariah juga diperkirakan akan memperkuat sektor IKNB syariah global.[28]

25 Refinitiv, IFDI Report 2022
26 Refinitiv, Sukuk Perceptions and Forecast Study 2022
27 Salaam Gateway, GIFT Report 2021
28 Refinitiv, IFDI Report 2022

Grafik 1.15. Proyeksi Pertumbuhan Nilai Transaksi Sektor Ekonomi Syariah dan Aset Industri Keuangan Syariah Global 2021-2026

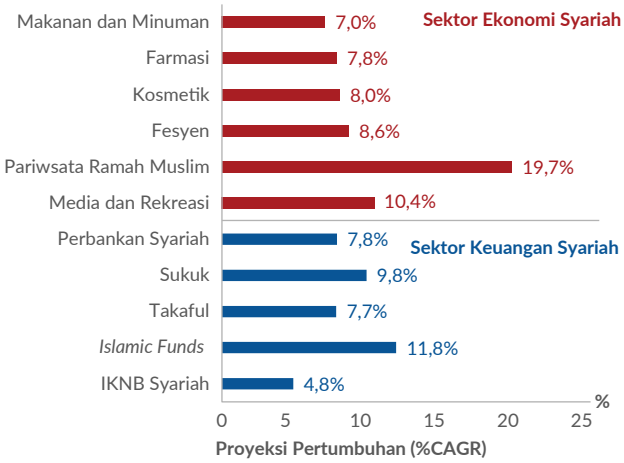

Sumber: *ICDT-OIC Annual Halal Economy Report 2022* dan *ICD-Refinitiv Islamic Development Report 2022*, diolah

Sejumlah faktor penghambat perlu diwaspadai terkait perkembangan keuangan syariah global ke depan. Beberapa faktor seperti berlanjutnya tekanan inflasi global yang akan mendorong tren pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga, serta normalisasi fiskal perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi perkembangan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan penerbitan sukuk. Selain itu, sektor takaful perlu didorong ke arah inovasi yang lebih kuat agar dapat berjalan kompetitif di tengah persaingan yang ketat dengan asuransi konvensional serta risiko kesehatan masyarakat yang meningkat.

Boks 1.1

Lanskap dan Tren Keuangan Syariah Global

Pertumbuhan aset keuangan syariah global diiringi dengan perubahan struktur lanskap keuangan syariah secara gradual. Aset industri keuangan syariah global selama periode 2016-2021 tumbuh sebesar 11% (CAGR), dengan pertumbuhan sukuk dan *Islamic Funds* yang naik di atas rata-rata industri, masing-masing mencapai 15.4% (CAGR) dan 19.2% (CAGR) (Grafik 1.16). Pertumbuhan keuangan syariah global ini juga diikuti dengan perubahan lanskap struktur keuangan syariah secara gradual. Pada tahun 2014, IFSB mencatat sektor perbankan syariah mendominasi struktur keuangan syariah global dengan pangsa mencapai 76% dari total aset industri keuangan syariah global, disusul oleh sukuk (15%), *Islamic Funds* dan IKNB syariah (masing-masing 4%) dan takaful (1%). Pada tahun 2021, tercatat pangsa perbankan syariah menurun menjadi sekitar 70% diikuti dengan peningkatan pangsa pada sukuk (18%), *Islamic Funds* (6%), dan takaful (2%). Pada tahun 2026, diproyeksikan pangsa perbankan syariah kembali menurun menjadi 68% diikuti proyeksi kenaikan pangsa sukuk (19%) dan *Islamic Funds* (7%), dengan pangsa IKNB syariah (4%) dan takaful (2%) yang cenderung tetap akan sama (Grafik 1.17).

Grafik 1.16. Pertumbuhan Rata-Rata Aset Industri Keuangan Syariah Global Periode 2016-2021

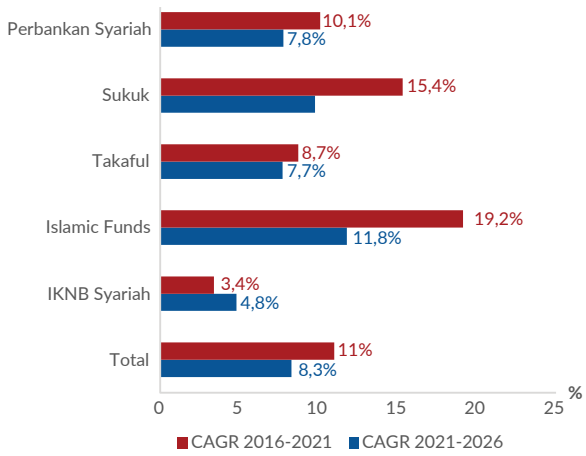

Sumber: *ICD-Refinitiv Islamic Development Report 2022*, diolah

Pertumbuhan tinggi pada sukuk dan *Islamic Funds* ditopang oleh penerbitan sukuk untuk pembiayaan fiskal pemerintah dan minat investor yang meningkat pada investasi reksadana syariah (*Islamic mutual funds*). Selama periode 2016-2021, terjadi peningkatan pesat pada pertumbuhan *outstanding* sukuk. Akselerasi terjadi pada saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah berbagai

Grafik 1.17. Paket Stimulus Fiskal Negara G20

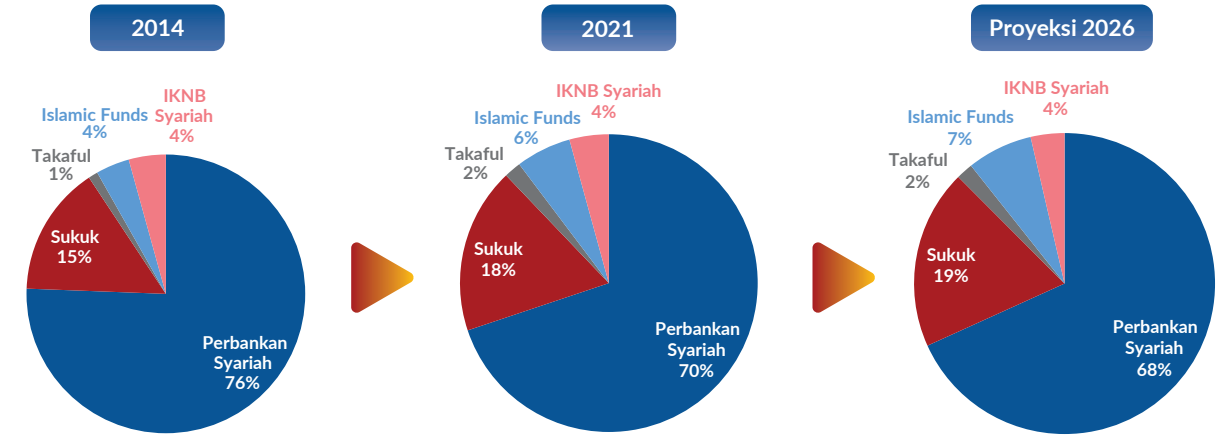

Sumber: IFSB dan ICD-*Refinitiv Islamic Development Report 2022*, diolah

negara di dunia meningkatkan defisit fiskal untuk membiayai kebijakan penanggulangan pandemi. Tercatat Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab mengalami kenaikan *outstanding* sukuk pada tahun 2020, masing-masing mencapai 33,9% (yoy), 28,2% (yoy), dan 28,2% (yoy)[29]. Di samping itu, pemerintah dan korporasi di negara-negara GCC seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mendorong investasi yang ramah lingkungan serta transisi energi melalui penerbitan sukuk. Pada sektor *Islamic funds*, kenaikan signifikan nilai *Asset under Management* (AuM) terjadi pada hampir seluruh negara-negara *top-markets* selama periode 2016-2021 (CAGR), seperti Iran (22,2%), Arab Saudi (20,3%), Malaysia (13,5%), bahkan UK mengalami pertumbuhan 100% (CAGR) selama 5 tahun tersebut[30]. *Islamic funds* global didominasi oleh investasi pada aset pasar modal dan pasar uang yang meningkat khususnya selama periode tingkat suku bunga global yang cenderung rendah khususnya selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan investasi pada *Islamic funds* menjadi atraktif. Pertumbuhan sukuk dan *Islamic funds* selama periode 2021-2026 diperkirakan masih akan tumbuh mencapai 9,8% dan 11,8% (CAGR), lebih lambat dibandingkan periode 2016-2021 namun masih akan berada di atas proyeksi pertumbuhan perbankan syariah.

Sementara itu, perkembangan perbankan syariah, takaful, dan IKNB syariah cenderung lebih lambat dari rata-rata industri, salah satunya akibat dampak pandemi Covid-19. Perbankan syariah masih terus bertumbuh dan mendominasi lanskap industri keuangan syariah global. Namun dengan pertumbuhan perbankan syariah global yang mencapai 10,1% (CAGR) selama periode 2016-2021, hanya Iran (17,5%) dan Arab Saudi (10,3%) negara di jajaran lima besar global yang memiliki tingkat pertumbuhan di atas rata-rata industri selama periode yang sama[31]. Perlambatan pertumbuhan perbankan syariah salah satunya diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kinerja perekonomian sehingga memengaruhi kinerja perbankan syariah. Pertumbuhan sektor perbankan syariah sendiri diperkirakan akan lebih lambat selama periode 2021-2026 sebesar 7,8% (CAGR), salah satunya akibat dampak dari tren menguatnya suku bunga kebijakan di berbagai negara. Kondisi serupa terjadi pada sektor takaful, dengan adanya peningkatan risiko akibat kompetisi yang tajam dengan asuransi konvensional serta meningkatnya klaim akibat kasus kesehatan yang meningkat paska pandemi Covid-19, khususnya di negara-negara GCC. Sektor takaful sendiri selama periode 2016-2021 masih tumbuh mencapai 8,7% (CAGR) dan

29 IFDI Report pada berbagai edisi, diolah.
30 IFDI Report pada berbagai edisi, diolah.
31 IFDI Report pada berbagai edisi, diolah.

diperkirakan akan melambat menjadi 7,7% (CAGR) selama periode 2021-2026. Sementara itu, sektor IKNB syariah yang mencakup antara lain *fintech* syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan pembiayaan syariah, hingga lembaga keuangan khusus (seperti lembaga pengelola dana haji) tumbuh sebesar 3,4% (CAGR) selama periode 2016-2021. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan IKNB syariah adalah peningkatan kontribusi *fintech* syariah khususnya di wilayah GCC, Iran, dan Malaysia serta menguatnya peran lembaga keuangan mikro syariah di luar wilayah *core-market* IKNB syariah di atas, seperti Indonesia dan Afrika. Sektor IKNB syariah diperkirakan akan tumbuh lebih cepat selama periode 2021-2026 yakni sebesar 4,8% (CAGR) ditopang oleh digitalisasi yang menguat di negara-negara OKI yang mendorong munculnya *fintech* syariah baru maupun perkembangan dari pelaku *existing*.

Perubahan lanskap keuangan syariah global memperlihatkan perubahan arah investasi pada keuangan syariah. Semakin tingginya *share* sub-sektor keuangan syariah yang terkait dengan pasar modal, yakni sukuk dan *Islamic funds* sebagaimana diproyeksikan akan terjadi hingga tahun 2026 (Grafik 1.15), menunjukkan adanya peningkatan kecenderungan investor untuk berinvestasi pada instrumen keuangan syariah yang berorientasi jangka panjang. Hal ini dapat mengurangi risiko *mismatch* pada pembiayaan ekonomi karena sisi surplus dana menginvestasikan dananya untuk dikelola secara jangka panjang, sesuai dengan karakter pembangunan ekonomi yang cenderung membutuhkan waktu jangka panjang. Meski saat ini peran pemerintah masih cukup besar, struktur pasar modal ke depannya diharapkan dapat lebih berimbang dengan semakin besarnya peran korporasi. Percepatan IKNB syariah khususnya pada segmen *fintech* syariah yang menyediakan layanan berbasis digital menunjukkan bahwa digitalisasi juga dapat menjadi *game changer* bagi perkembangan keuangan syariah global masa mendatang. Namun hal ini diperkirakan masih akan terkonsentrasi pada negara-negara OKI yang tergolong lebih maju perekonomian dan industri keuangan syariahnya seperti negara-negara GCC dan Asia Tenggara.

BAB II

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH NASIONAL

Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional yang terus berlanjut, ekonomi syariah tumbuh menguat di tengah kenaikan permintaan meski tekanan inflasi makanan halal meningkat. Sektor unggulan *Halal Value Chain*, melanjutkan perbaikan didorong kinerja pariwisata ramah muslim dan sektor pertanian. Dalam mendukung perkembangan usaha syariah tersebut, pembiayaan syariah baik di sektor Pemerintah maupun publik, juga terus tumbuh. Pembiayaan syariah pada perbankan maupun pasar modal syariah meningkat, didukung stimulus fiskal melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tidak hanya dari industri keuangan komersial, keuangan sosial syariah juga berperan dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi nasional. Perkembangan ini juga diperlihatkan oleh meningkatnya pangsa aktivitas usaha syariah terhadap perekonomian nasional, serta digitalisasi keuangan syariah yang semakin berkembang. Sementara itu, pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah meningkat, tercermin dari meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah Indonesia. Pada 2023, optimisme pemulihan kinerja ekonomi nasional terus berlanjut meski sedikit melambat seiring perlambatan ekonomi global. Sejalan dengan perekonomian nasional, perbaikan ekonomi syariah juga akan terus berlanjut dan diperkirakan kembali didorong oleh kinerja sektor pertanian dan pariwisata ramah muslim dengan dukungan pembiayaan syariah, serta sinergi kebijakan nasional yang semakin kuat. Namun, potensi dampak gejolak ekonomi dunia dan dampak perubahan iklim, khususnya terhadap kinerja sektor pertanian, perlu tetap diwaspadai.

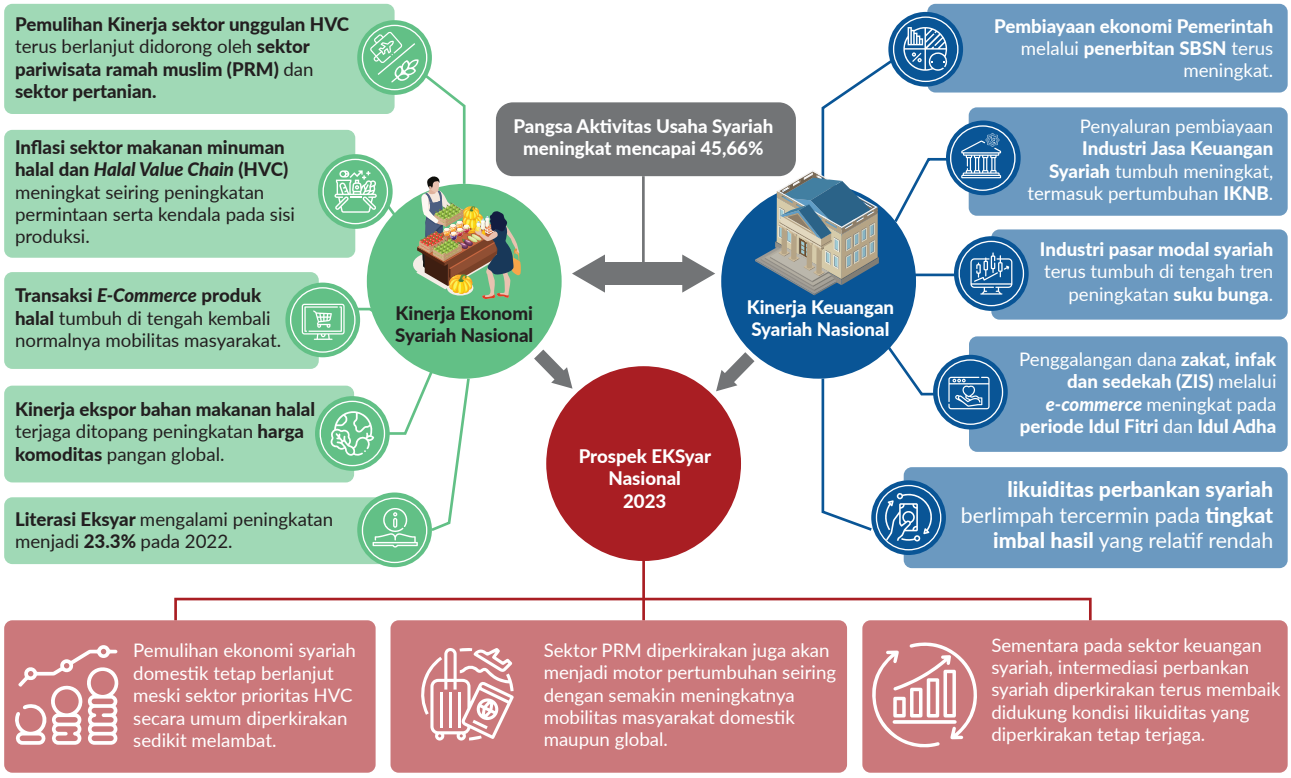
Pemulihan Kinerja sektor unggulan HVC terus berlanjut didorong oleh sektor pariwisata ramah muslim (PRM) dan sektor pertanian.
Inflasi sektor makanan minuman halal dan Halal Value Chain (HVC) meningkat seiring peningkatan permintaan serta kendala pada sisi produksi.
Transaksi E-Commerce produk halal tumbuh di tengah kembali normalnya mobilitas masyarakat.
Kinerja ekspor bahan makanan halal terjaga ditopang peningkatan harga komoditas pangan global.
Literasi Eksyar mengalami peningkatan menjadi 23.3% pada 2022.
Kinerja Ekonomi Syariah Nasional
Pangsa Aktivitas Usaha Syariah meningkat mencapai 45,66%
Kinerja Keuangan Syariah Nasional
Pembiayaan ekonomi Pemerintah melalui penerbitan SBSN terus meningkat.
Penyaluran pembiayaan Industri Jasa Keuangan Syariah tumbuh meningkat, termasuk pertumbuhan IKNB.
Industri pasar modal syariah terus tumbuh di tengah tren peningkatan suku bunga.
Penggalangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui e-commerce meningkat pada periode Idul Fitri dan Idul Adha
likuiditas perbankan syariah berlimpah tercermin pada tingkat imbal hasil yang relatif rendah
Prospek EKSyar Nasional 2023
Pemulihan ekonomi syariah domestik tetap berlanjut meski sektor prioritas HVC secara umum diperkirakan sedikit melambat.
Sektor PRM diperkirakan juga akan menjadi motor pertumbuhan seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat domestik maupun global.
Sementara pada sektor keuangan syariah, intermediasi perbankan syariah diperkirakan terus membaik didukung kondisi likuiditas yang diperkirakan tetap terjaga.

2.1

Kinerja Ekonomi Syariah Nasional

Perkembangan Sektor Prioritas
Halal Value Chain

Kinerja sektor unggulan HVC menunjukkan tren pemulihan yang terus berlanjut didorong oleh meningkatnya sektor pariwisata ramah muslim (PRM) seiring peningkatan mobilitas masyarakat, serta terus meningkatnya kinerja sektor pertanian. Penguatan kinerja ini tercermin dari pertumbuhan sektor prioritas *halal value chain* (HVC), yang terdiri dari sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan PRM, selama triwulan I sampai dengan triwulan III 2022 terus bergerak dalam fase *recovery*, sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional (Grafik 2.1). Pemulihan kinerja sektor HVC terus berlanjut mulai triwulan I 2022 yang perlahan meningkat hingga triwulan III 2022 sebesar 5,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 1,69% (yoy). Pemulihan ini ditopang oleh kinerja sektor pertanian dan PRM yang terus meningkat sepanjang 2022.

Pertumbuhan sektor pertanian halal terutama dikontribusikan oleh subsektor tanaman hortikultura, perkebunan, dan perikanan. Kinerja sektor pertanian halal sepanjang triwulan I 2022 hingga triwulan III 2022 konsisten tumbuh positif. Pada triwulan III 2022, sektor pertanian halal tercatat sebesar 1,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 1,37% (yoy). Kinerja sektor pertanian halal pada triwulan III 2022 ditopang oleh subsektor perikanan seiring peningkatan produksi perikanan tangkap, serta subsektor tanaman perkebunan yang mengalami kenaikan produksi sawit dan permintaan komoditas teh.

Perkembangan sektor PRM terus membaik seiring kebijakan pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin pulih. Kinerja sektor PRM pada triwulan I 2022 hingga triwulan III 2022 terus meningkat yaitu sebesar 19,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 0,37% (yoy). Pemulihan kinerja sektor PRM ini ditandai dengan pelonggaran syarat perjalanan, penyelenggaraan *event* internasional dan aktivitas keagamaan sehingga mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Selain itu, pemulihan sektor PRM juga terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di seluruh moda transportasi, serta tumbuhnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Pada April 2022, Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0549.GR.01.01 tentang kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi. Menurut aturan yang mulai berlaku 6 April 2022 tersebut, wisatawan dari negara-negara ASEAN kembali bebas visa saat masuk ke Indonesia. Pemberlakuan *visa on arrival* (VOA) juga diperluas bagi wisatawan dari 43 negara yang beberapa di antaranya merupakan negara muslim seperti Arab Saudi, Qatar, UEA, Turki, Tunisia, Brunei, hingga Malaysia. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) di Indonesia.

Demi memanfaatkan momentum positif dari sektor PRM ini, diperlukan dukungan dan sinergi antar *stakeholder* terkait untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Salah satu dukungan tersebut melalui peluncuran program *Islamic Creative Economy Founders Fund* (ICEFF) 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. ICEFF merupakan program pengembangan bisnis para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di industri halal untuk memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga keuangan dan juga investor. Dukungan lainnya dalam bentuk peresmian tiga Pelabuhan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang didanai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dukungan tersebut sejalan dengan status Wakatobi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan adanya peran pembiayaan syariah dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional, sekaligus diharapkan dapat mengintegrasi ekosistem wisata ramah muslim di Indonesia.

Sektor makanan dan minuman halal terus memberikan kontribusinya yang tinggi, didukung masih terjaganya daya beli masyarakat untuk mendorong aktivitas konsumsi. Kinerja sektor makanan halal pada triwulan III 2022 cenderung melambat tercatat sebesar 3,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode triwulan II 2022, yang mencapai 3,68% (yoy). Terganggunya rantai pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik yang meningkatkan harga bahan baku impor, menahan laju pemulihan sektor makanan dan minuman halal, terutama melalui kinerja usaha skala UMKM. Di sisi lain, ketergantungan atas bahan baku gandum impor membuka peluang baru untuk berkembangnya komoditas sorgum sebagai substitusi gandum impor. Menurut Badan Pangan Nasional, pangan lokal berpotensi untuk mensubstitusi 10 hingga 30 persen kebutuhan gandum untuk terigu. Pengembangan sorgum ini menjadi tantangan inovasi bagi industri pengolahan makanan halal. Selain itu, seiring disrupsi pasokan gandum serta tingkat produksi sorgum yang rendah, Presiden RI memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk membuat peta jalan dan mendorong peningkatan produksi serta hilirisasi sorgum sebagai komoditas pengganti gandum untuk menopang sektor pangan, sumber bioetanol serta pelengkap protein pakan ternak. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor pertanian dan makanan halal di Indonesia.

Perkembangan positif sektor makanan dan minuman halal pada tahun 2022 didukung penguatan infrastruktur pendukung industri halal. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria pernyataan *self declare*. Program SEHATI tersebut sebagai upaya untuk melakukan akselerasi 10 juta produk bersertifikat halal untuk mendukung Indonesia menjadi produsen produk halal terkemuka di dunia pada tahun 2024. Berdasarkan data https://sehati.halal.go.id/ yang diakses pada 27 Desember 2022, tercatat sebanyak 53.123 sertifikat halal telah terbit diikuti oleh pelaku usaha yang terdaftar sejumlah 118.275. Di samping itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan KNEKS telah meresmikan fasilitas riset pangan Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia. Fasilitas ini merupakan komponen penting dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Infrastruktur ini akan memperkuat pengembangan produk pangan halal baru yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha syariah. Peresmian fasilitas ini diharapkan meningkatkan ekosistem sektor makanan dan minuman halal, termasuk pada aspek SDM, riset, dan lainnya.

Kinerja sektor fesyen secara berangsur mulai pulih meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Pertumbuhan sektor fesyen muslim pada triwulan II 2022 sebesar 13,64% (yoy), lebih tinggi dibanding periode sebelumnya sebesar 11,67% (yoy). Peningkatan pertumbuhan sektor fesyen didorong oleh pola musiman saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) utamanya saat Bulan Ramadhan 1443H dan meningkatnya permintaan seragam seiring dibukanya pertemuan tatap muka di sekolah. Namun, pada triwulan III 2022 tumbuh melambat yaitu sebesar 9,01% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan utilisasi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di tengah tantangan produk impor yang memenuhi pasar domestik. Penurunan pasokan bahan baku lokal seperti *purified terephthalic acid* (PTA), ketergantungan impor pada bahan seperti *methyl ethyl glycol*, serta terganggunya suplai kapas impor, menahan pertumbuhan industri TPT sehingga berdampak pada sektor fesyen muslim.

Grafik 2.1. Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC

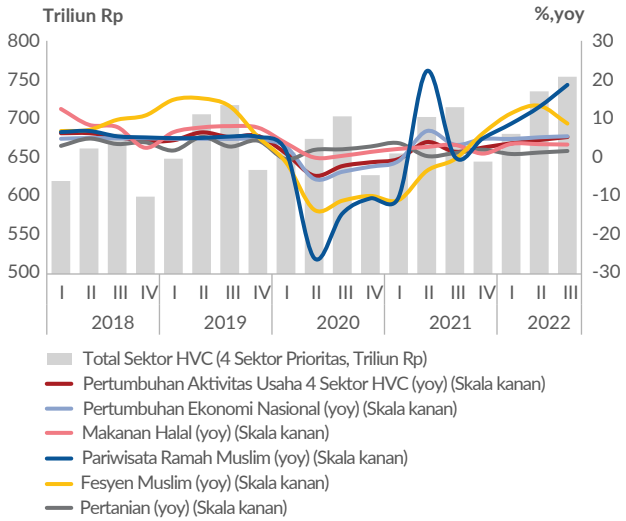

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Sumber pertumbuhan sektor prioritas HVC pada 2022 utamanya disumbang oleh kontribusi sektor PRM, pertanian, dan makanan halal. Kontribusi sektor PRM selama triwulan I 2022 hingga triwulan III 2022, konsisten tumbuh positif terhadap pertumbuhan sektor prioritas HVC seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat (Grafik 2.2). Sementara itu, kontribusi pertumbuhan dari sektor pertanian konsisten meningkat hingga triwulan III 2022, meskipun level kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh situasi ketegangan geopolitik dari invasi Rusia terhadap Ukraina yang berdampak pada terganggunya pasokan pupuk impor maupun kenaikan harga pupuk global. Saat ini produksi pupuk anorganik nasional masih tergantung pada bahan baku impor dari negara lain termasuk Rusia, sebagai salah satu negara utama penghasil bahan baku pupuk, seperti *Potassium Chloride* (KCl) dan *Ammonium Nitrat* (AN). Berdasarkan komposisi pangsa input pupuk di sektor pertanian, bahwa kebutuhan pupuk terbesar yaitu untuk subsektor tanaman pangan, diikuti hortikultura dan perkebunan. Selain itu, berdasarkan data BPS bahwa indeks harga yang dibayar petani dari sisi Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan sejak awal 2022 hingga Desember 2022 masih mengalami peningkatan di setiap bulannya. Untuk itu dibutuhkan inovasi produk pupuk organik dan penggunaannya juga perlu ditingkatkan secara bertahap untuk tetap menjaga kualitas produk pertanian.

Pangsa sektor prioritas HVC terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional (Grafik 2.3). Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kenaikan pangsa ekonomi syariah nasional utamanya didorong oleh sektor pertanian dan makanan halal (Grafik 2.4). Hal ini didorong oleh permintaan produk sawit dan turunannya yang masih tinggi disertai dibukanya kembali izin ekspor sejak pertengahan triwulan II 2022 seiring semakin stabilnya harga minyak goreng dalam negeri. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat paling besar digunakan untuk pengeluaran kelompok makanan dan minuman yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan kontribusi sektor prioritas HVC ini seiring dengan pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga, sehingga mendorong aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

Grafik 2.2. Sumber Pertumbuhan Sektor Prioritas HVC

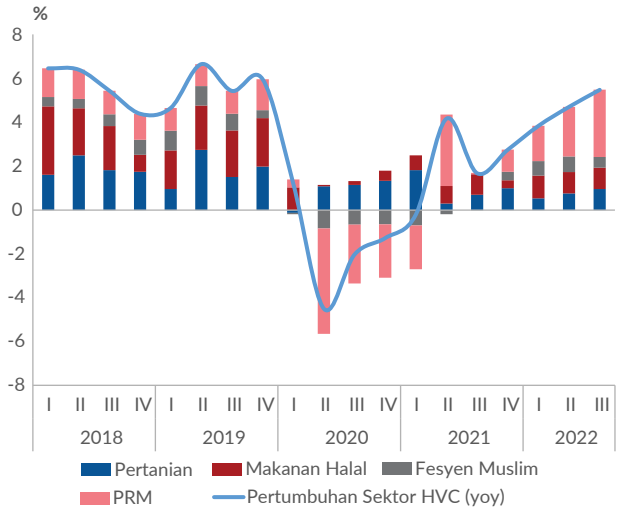

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3. Perkembangan Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap PDB

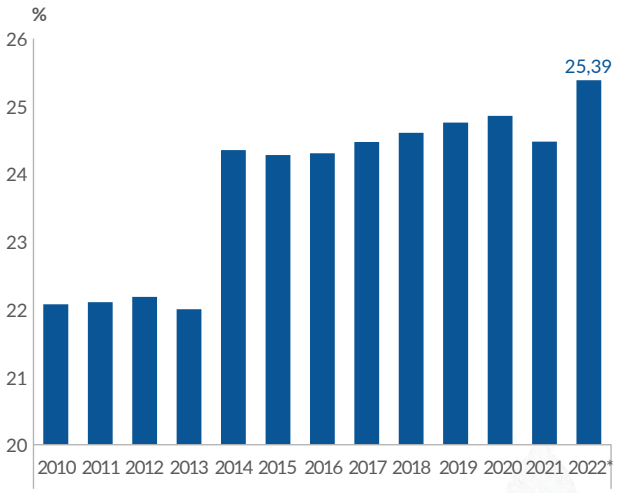

*Posisi akhir triwulan III 2022

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.4. Pangsa Sektor Prioritas HVC terhadap Total Sektor Prioritas HVC

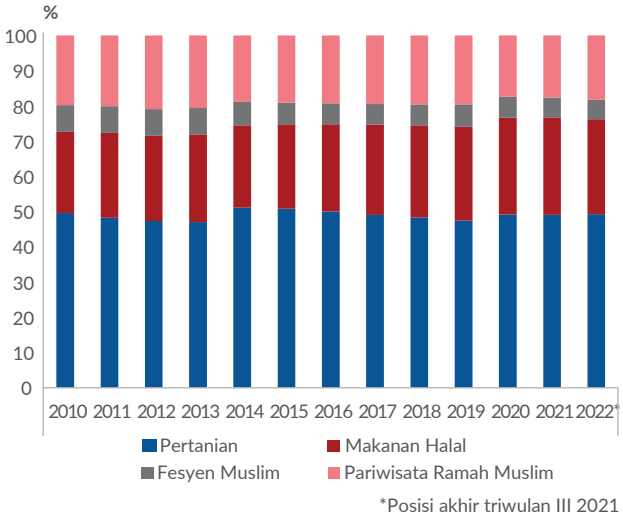

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Perkembangan Inflasi Makanan Halal

Seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi nasional, perkembangan inflasi sektor halal menunjukkan peningkatan. Secara tahunan, perkembangan inflasi komposit makanan, minuman, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran halal meningkat di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 2.5). Pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sejak 16 Maret 2022, memberikan andil tinggi terhadap inflasi pada Maret hingga Juni 2022. Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan pada sektor makanan dan minuman halal di antaranya, beras, telur ayam ras, bawang merah, dan nasi dengan lauk. Inflasi komoditas telur ayam ras terjadi karena kondisi apkir dini ternak ayam dan peningkatan permintaan. Sementara untuk harga beras dipengaruhi oleh efek musiman penurunan produksi beras pada akhir tahun dan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Permintaan di sektor restoran meningkat gradual seiring dengan kebijakan pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Peningkatan inflasi pada sektor *Halal Value Chain* (HVC) didorong permintaan yang meningkat serta adanya kendala pada sisi produksi. Secara tahunan, perkembangan inflasi sektor HVC lebih tinggi pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 2.6). Tingginya inflasi sektor HVC didorong oleh sektor makanan dan sektor jasa pelayanan

Grafik 2.5. Inflasi Komposit Makanan Minuman (Mamin) dan Penyediaan Mamin Restoran Halal

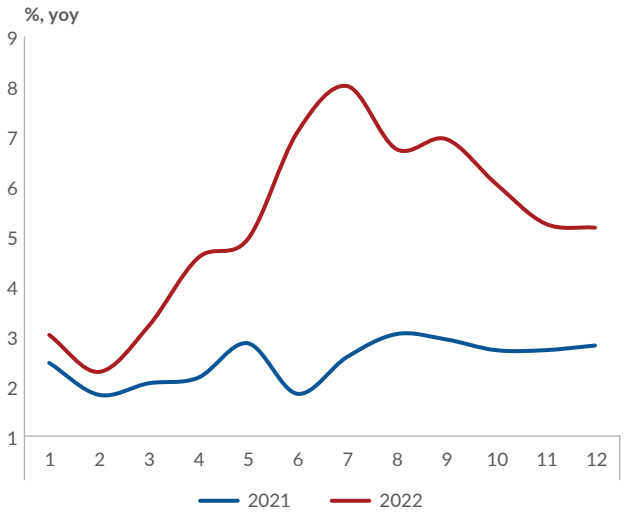

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

makanan dan minuman. Kendala cuaca di beberapa sentra produksi utama menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi di sektor makanan. Pelonggaran PPKM antara lain pada perjalanan domestik dan ketentuan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri juga memengaruhi inflasi pada sektor jasa pelayanan makanan dan minuman.

Perkembangan Sertifikasi Halal

Perkembangan sertifikasi halal mengalami peningkatan seiring pemberlakuan kewajiban halal secara bertahap oleh Pemerintah. Perkembangan jumlah produk berketetapan halal (KH) yang masih berlaku di salah satu lembaga pemeriksa halal

Grafik 2.6. Inflasi Sektor HVC

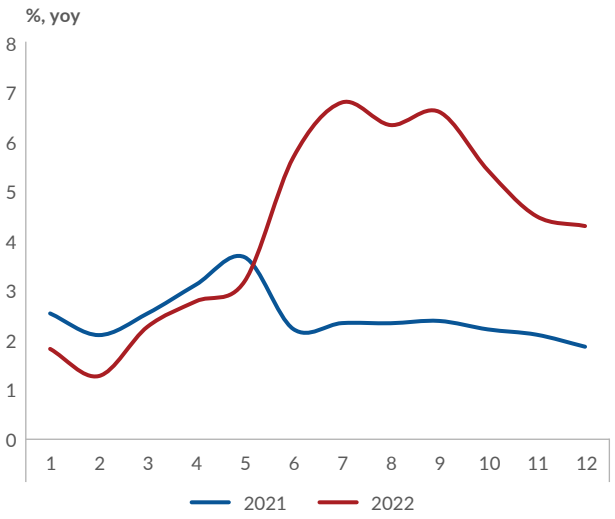

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

(LPH), LPPOM-MUI pusat maupun daerah, terus mengalami peningkatan (Grafik 2.7 dan 2.8). Hal ini seiring dengan upaya akselerasi Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) bagi UMK. Selain itu adanya pemberlakuan kewajiban halal secara bertahap mulai dari sektor makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan, kemudian produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal sejalan dengan capaian kenaikan peringkat Indonesia pada sektor makanan halal di tingkat global yang utamanya didorong oleh digitalisasi sertifikasi halal. Tidak hanya pemanfaatan digitalisasi sertifikasi halal, tetapi juga penggunaan teknologi lainnya dapat mendorong efisiensi termasuk pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam *halal tracebility* (boks 2.1). Ke depannya, pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendorong percepatan serta mempermudah dalam perkembangan sertifikasi halal.

Grafik 2.7. Perkembangan Jumlah Produk Berketetapan Halal LPPOM MUI Pusat

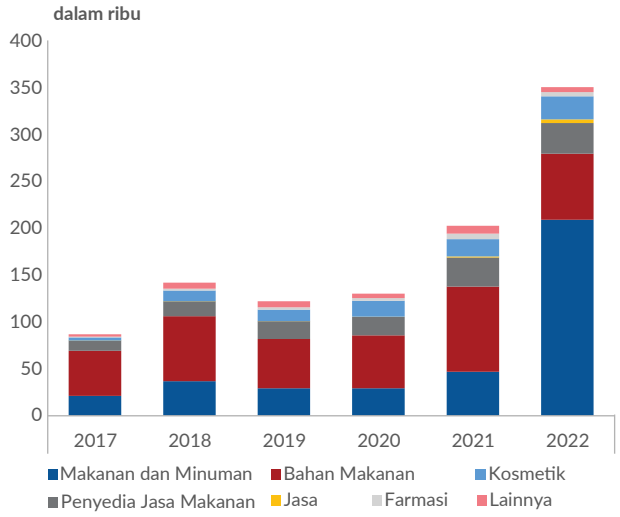

Sumber: LPPOM MUI, diolah

Grafik 2.8. Perkembangan Jumlah Produk Berketetapan Halal LPPOM MUI Daerah

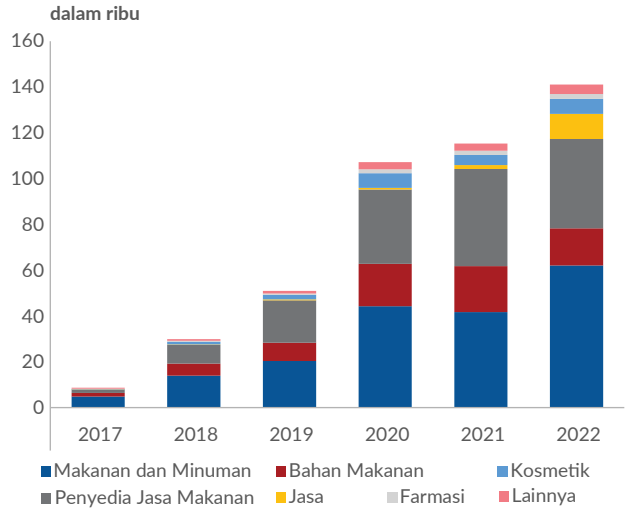

Sumber: LPPOM MUI, diolah

Perkembangan Transaksi *E-Commerce* Produk Halal

Industri e-*commerce* yang mendapatkan momentum pertumbuhan di tengah pandemi, terus menunjukkan peningkatan di tengah mobilitas masyarakat berangsur kembali normal. Transaksi *e-commerce* semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat bahkan menjadi kebiasaan baru. Tren tersebut dapat terlihat berdasarkan nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace*. Pada Januari sampai dengan November 2022, nominal transaksi produk halal mencapai Rp20,45 triliun (Grafik 2.9) atau meningkat 29,93% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Lonjakan transaksi terjadi pada April 2022 karena faktor musiman yaitu merupakan periode bulan Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H.

Transaksi produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* didominasi oleh produk fesyen. Berdasarkan data per November 2022, transaksi produk halal ditopang oleh produk fesyen dengan pangsa pasar mencapai 73,86% dari total nominal transaksi melalui *e-commerce* (Grafik 2.10). Jumlah transaksi tersebut meningkat 19,73%

Grafik 2.9. Nominal Transaksi Produk Halal Melalui *E-Commerce Marketplace*

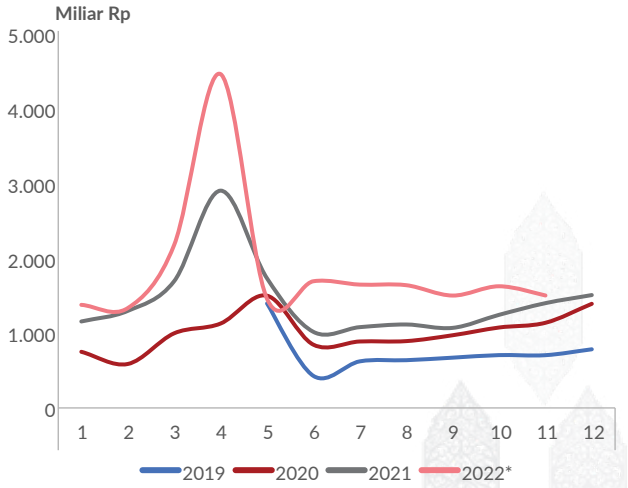

Sumber: Bank Indonesia, diolah

*Periode Januari - November 2022

Grafik 2.10. Pangsa Produk Halal Melalui *E-Commerce Marketplace* Berdasarkan Kategori Produk

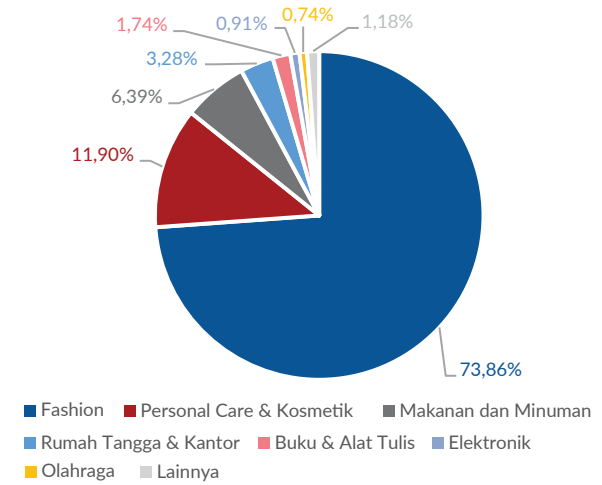

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.11. Metode Pembayaran Transaksi *E-Commerce Marketplace*

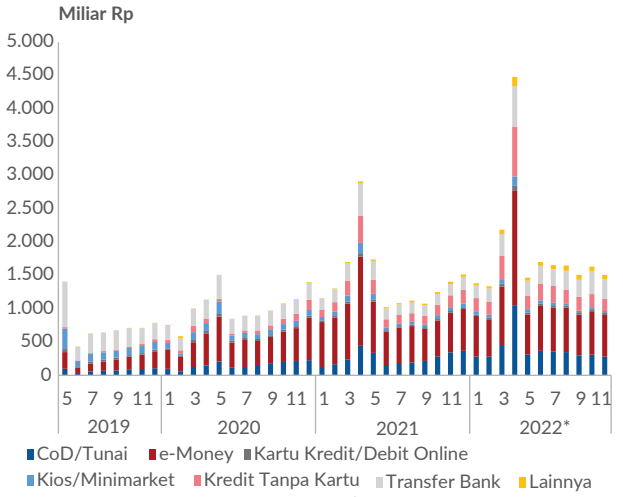

Sumber: Bank Indonesia, diolah

*Periode Januari-November 2022

dibandingkan tahun 2021 dengan periode yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penjualan produk fesyen muslim secara *online* mengalami perkembangan yang lebih pesat. Era pandemi merupakan momentum yang telah berhasil mendorong adopsi digital oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat melakukan aktivitas ekonomi. Kebiasaan baru masyarakat mengubah perilaku berbelanja dan meningkatnya kepercayaan konsumen menjadi katalis utama dalam mendorong peningkatan transaksi *e-commerce* sektor fesyen.

Perkembangan teknologi khususnya pada *e-commerce marketplace* mendorong kebiasaan baru masyarakat dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan data per November 2022, uang elektronik (*e-money*) dan transfer bank menjadi dua metode pembayaran digital utama dalam transaksi produk halal di *e-commerce* dengan pangsa masing-masing sebesar 40,17% dan 15,77% (Grafik 2.11). Terdapat beberapa tren yang menarik dimana 2 (dua) transaksi digital tumbuh tinggi yaitu metode penggunaan kartu kredit/debit online dan pembayaran kredit tanpa kartu, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 39,95% (yoy) dan 53,56% (yoy). Namun di sisi lain, terdapat peningkatan pangsa metode pembayaran *cash on delivery* (CoD) atau tunai dengan pertumbuhan sebesar 37,82% (yoy). Promosi penggunaan uang elektronik oleh bank digital yang bekerja sama dengan *e-commerce* semakin mendorong masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran digital. Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia melakukan penambahan kepesertaan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sejak diluncurkan pada 21 Desember 2021. Berdasarkan data per tanggal 28 November 2022, dilakukan penambahan kepesertaan gelombang (*batch*) kelima sebanyak 29 bank. Perluasan kepesertaan BI-FAST yang terus dilakukan, diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk *stakeholders* BI terhadap layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal).

Terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan upaya menumbuhkan ekonomi nasional melalui peningkatan volume transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace*. Penetrasi pasar *e-commerce* yang sejalan dengan pergeseran preferensi dan perilaku masyarakat dalam berbelanja *online*, secara langsung meningkatkan volume transaksi *online* produk halal. Sampai dengan November 2022, volume transaksi produk halal melalui *e-commerce* tercatat mencapai 217,17 juta transaksi, atau meningkat 31,49% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (Grafik 2.12). Tren kenaikan tersebut diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia. Implementasi BSPI 2025 tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan proses transaksi ekonomi yang efektif dan efisien.

Kebijakan PPKM memengaruhi peningkatan nilai transaksi makanan dan minuman halal melalui *e-commerce*. Sampai dengan November 2022, total

Grafik 2.12. Volume Transaksi Produk Halal Melalui *E-Commerce Marketplace*

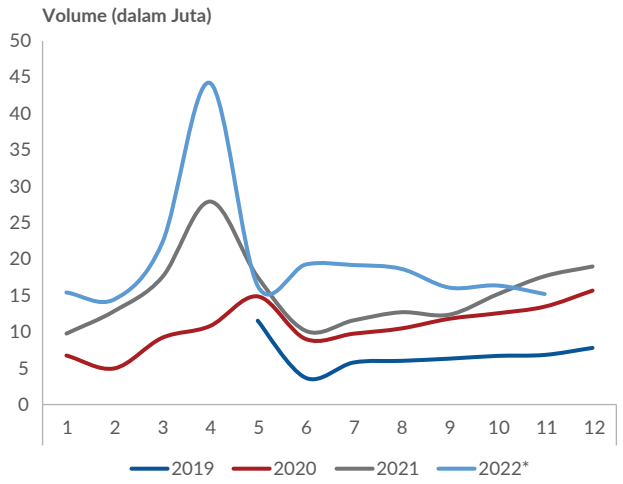

Sumber: Bank Indonesia, diolah *Periode Januari-November 2022

nilai transaksi pembelian makanan dan minuman halal mencapai Rp1,31 triliun (Grafik 2.13). Pemberlakuan PPKM berlevel baik di wilayah Jawa-Bali maupun wilayah luar Jawa-Bali, mendorong peningkatan transaksi melalui *e-commerce* khususnya pada sektor makanan dan minuman halal. Tren nilai transaksi bulanan makanan dan minuman halal tertinggi tercatat pada bulan Maret, April, dan Agustus 2022 dengan total nilai transaksi mencapai Rp500,60 miliar atau meningkat 17,57% (yoy) dari periode yang sama tahun 2021.

Nilai transaksi fesyen muslim melalui *e-commerce* mencatatkan peningkatan signifikan pada 2022. Sampai dengan November 2022, akumulasi nilai transaksi produk fesyen muslim melalui *e-commerce* tumbuh sebesar 19,73% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 dengan total nilai transaksi sebesar Rp15,10 triliun (Grafik 2.14). Adanya penetapan kebijakan PPKM tidak hanya mendorong peningkatan nilai transaksi makanan dan minuman halal, melainkan juga mendorong peningkatan nilai transaksi fesyen muslim melalui *e-commerce*. Lonjakan transaksi pada bulan April disebabkan adanya periode bulan Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H.

Perkembangan Sektor Eksternal

Di tengah melambatnya perekonomian global, kinerja ekspor bahan makanan halal tetap terjaga ditopang peningkatan harga komoditas pangan global. Ekspor sektor makanan halal sampai dengan November 2022 mencapai 46,94 miliar dolar AS, atau tumbuh 9,73% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2021. Pertumbuhan ekspor tersebut masih menjadikan negara Indonesia menjadi negara net-ekspor untuk bahan makanan halal (Grafik 2.15). Kontributor utama kelompok komoditas yang mendorong pertumbuhan ekspor makanan sampai dengan November 2022 yaitu komoditas *Animal or Vegetable Fats, Oils & Waxes; including Palm Oil* (kode HS 15) sebesar 30,32 miliar dolar AS dengan pangsa 64,60% terhadap total ekspor bahan makanan halal (Grafik 2.16). Sementara dari sisi impor, dua kelompok komoditas penyumbang impor terbesar makanan sampai dengan November 2022, ialah *Food Products & Beverages* (Kode HS 16-24) sebesar 9,63 miliar dolar AS dengan pangsa 42,09% dan *Vegetables & Products of Vegetable Origin* (Kode HS 06-14) dengan pangsa 39,71% (Grafik 2.17).

Grafik 2.13. Nilai Transaksi Makanan dan Minuman Halal Melalui *E-Commerce*

Sumber: Bank Indonesia, diolah *Periode Januari-November 2022

Grafik 2.14. Nilai Transaksi Fesyen Muslim Melalui *E-Commerce Marketplace*

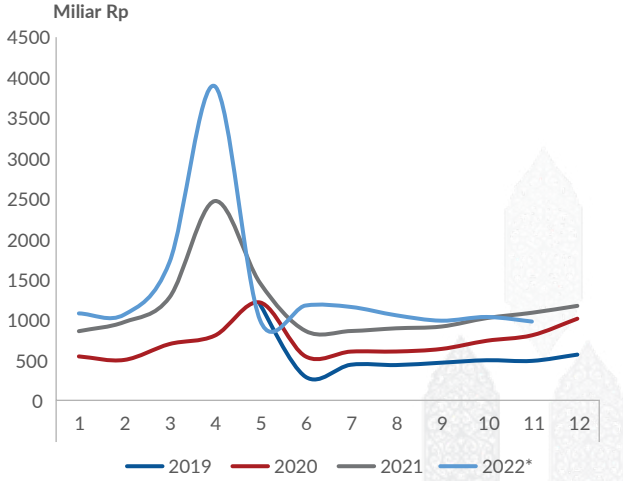

Sumber: Bank Indonesia, diolah *Periode Januari s.d November 2022

Grafik 2.15. Perkembangan Ekspor Impor Makanan Halal Indonesia

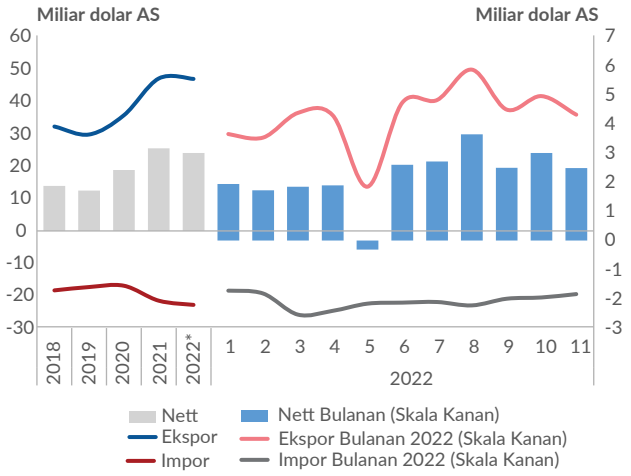

*Periode Januari s.d November 2022

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 2.16. Pangsa Ekspor Bahan Makanan Halal Tahun 2022 (Januari-November)

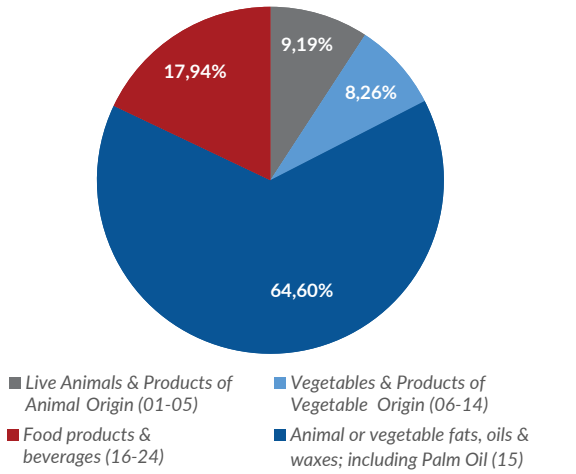

*Periode Januari s.d November 2022

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Meski secara tahuan ekspor terus meningkat, sempat terjadi penurunan yang drastis pada Mei 2022. Penurunan ini terjadi akibat adanya larangan Pemerintah terhadap ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sejak 28 April 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Mengingat CPO merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar dunia. Kinerja ekspor mengalami peningkatan signifikan terutama didorong oleh kembali naiknya ekspor produk sawit setelah harga kebutuhan pokok di dalam negeri semakin stabil sehingga pelarangan ekspor produk sawit dicabut. Tetap terjaganya kinerja sektor eksternal ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Grafik 2.17. Pangsa Impor Bahan Makanan Halal Tahun 2022 (Januari-November)

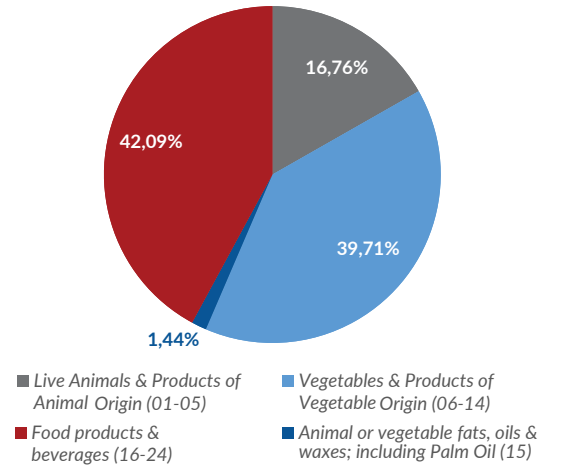

*Periode Januari s.d November 2022

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Perkembangan Ekspor Impor Indonesia - OKI

Performa neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus di tengah melambatnya ekonomi global, begitupun kinerja perdagangan Indonesia dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 2022 yang menunjukkan peningkatan. Mulai dari triwulan I tahun 2021 hingga triwulan III tahun 2022, performa neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus (Grafik 2.18). Tekanan yang kuat dari konflik geopolitik menghambat pemulihan laju ekonomi dunia, sehingga berdampak pada perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang. Namun, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI tetap mempertahankan posisi sebagai net eksportir tanpa komoditas minyak dan gas (Grafik 2.19). Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor non minyak dan gas (non migas) Indonesia ke negara anggota OKI sepanjang Januari hingga November 2022 tercatat mencapai 32,10 miliar dolar AS, sementara impor sebesar 11,19 miliar dolar AS. Indonesia sendiri merupakan eksportir terbesar ke-empat dalam perdagangan intra negara anggota OKI. Komoditas utama ekspor Indonesia ke negara anggota OKI yaitu produk lemak dan minyak hewani atau nabati dan produk turunannya, dan lemak siap saji

Grafik 2.18. Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia 2016 - 2022

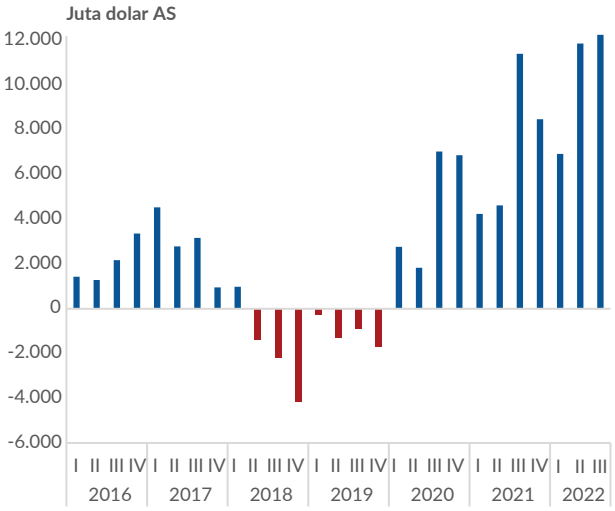

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.19. Perkembangan Ekspor Impor Indonesia ke Negara Anggota OKI (Non Migas)

*Periode Januari s.d Novembe

Sumber: Bank Indonesia

yang dapat dimakan. Sementara produk bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingannya masih menjadi komoditas utama impor Indonesia. Di sisi lain, pangsa ekspor Indonesia ke negara anggota OKI sepanjang Januari hingga November 2022 sebesar 12,74%, sementara pangsa impor Indonesia terhadap seluruh total impor negara anggota OKI mencapai 6,20% (Grafik 2.20). Perbaikan kinerja ini harus terus dijaga seiring dengan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Tren perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara anggota OKI sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan. Sampai dengan November 2022, Indonesia masih menjadi negara net eksportir ke negara anggota OKI. Peningkatan permintaan produk lemak dan minyak hewan atau nabati ke beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Malaysia dan Pakistan, menjadi penopang dari tingginya kinerja ekspor Indonesia ke negara anggota OKI. Komoditas impor terbesar dari negara anggota OKI adalah plastik dan barang berbahan dasar plastik. Profil perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara anggota OKI terkonsentrasi pada 5 (lima) negara mitra dagang teratas, mencapai 70% lebih terhadap total ekspor dan impor dengan negara anggota OKI. Malaysia menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor dan impor masing-masing sebesar 39,07% dan 51,83% pada tahun 2022.

Mitra dagang Indonesia dengan negara anggota OKI cenderung stabil terutama yang berpangsa besar. Profil perdagangan Indonesia dengan top 5 (lima) negara anggota OKI dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari sisi ekspor rata-rata mencapai 71,36%, sementara impor rata-rata mencapai 79,38% (Grafik 2.21 dan 2.22). Malaysia dan Uni Emirat Arab merupakan mitra utama perdagangan Indonesia dengan negara anggota OKI baik ekspor maupun impornya. Ekspor Indonesia ke Malaysia dan Pakistan mendominasi pasar ekspor hingga total keduanya sudah mencapai 50% pangsa ekspor Indonesia ke seluruh negara anggota OKI (Grafik 2.23). Sementara itu, pada sisi impor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab mendominasi dengan total pangsa impor lebih dari 60% (Grafik 2.24). Terkonsentrasinya perdagangan internasional antara

Grafik 2.20. Pangsa Perdagangan Indonesia ke Negara Anggota OKI

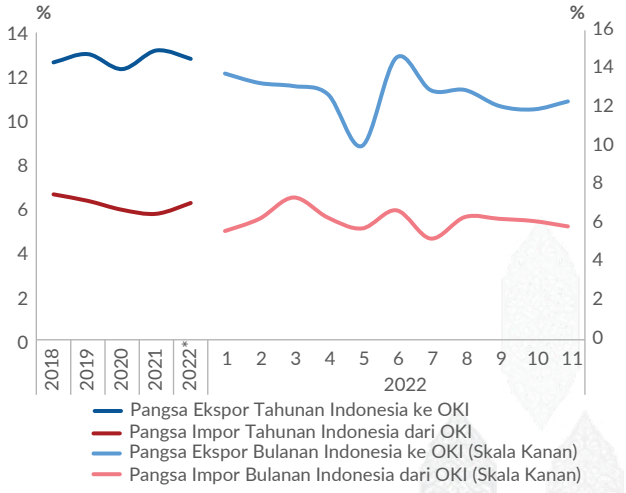

*Periode Januari s.d November 202

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.21. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia-OKI

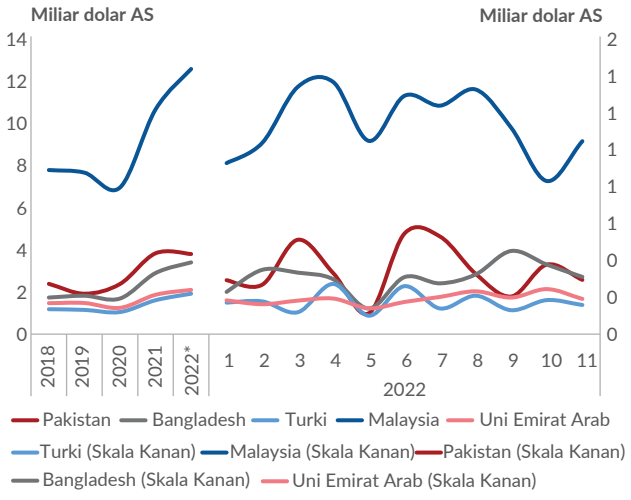

Sumber: Bank Indonesia

*Periode Januari s.d November 2022

Grafik 2.22. Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia-OKI

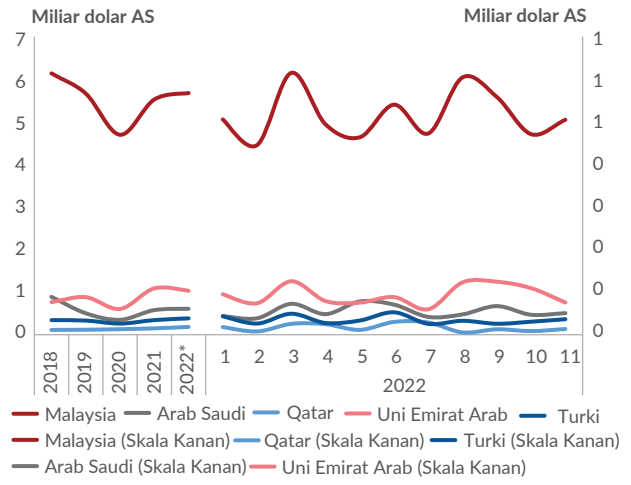

Sumber: Bank Indonesia

*Periode Januari s.d November 202

Grafik 2.23. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Ekspor Indonesia - OKI

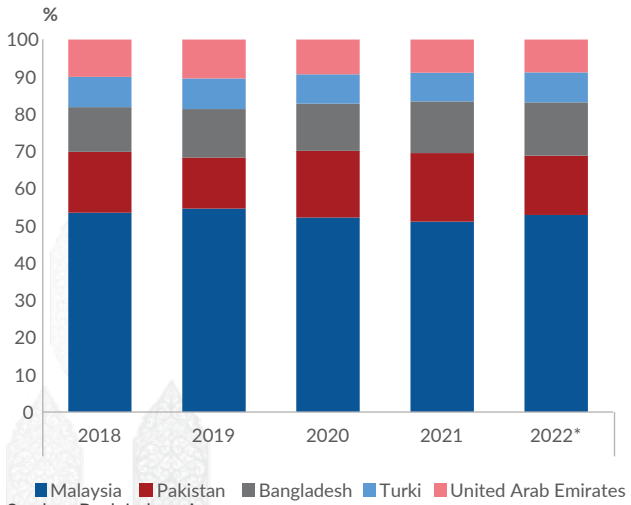

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.24. Pangsa Pasar Lima Negara Teratas sebagai Mitra Dagang Impor Indonesia - OKI

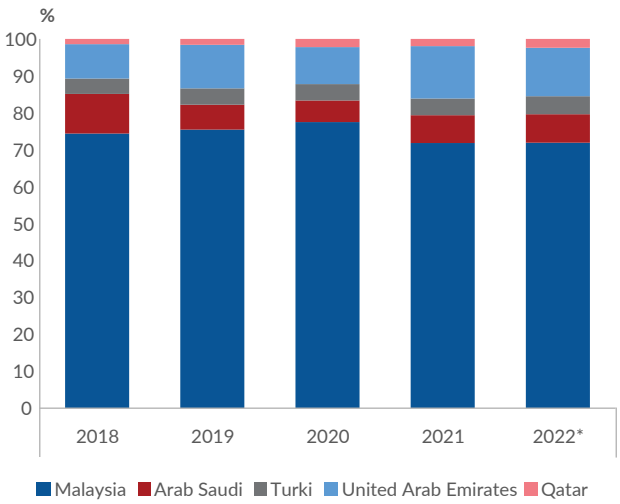

Sumber: Bank Indonesia

Indonesia dengan negara anggota OKI membuat kinerja perekonomian domestik masing-masing negara mitra dagang menjadi penentu utama dari volatilitas dan kinerja ekspor dan impor kedua belah pihak.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk Industri Bersertifikat Halal

Terjaganya kinerja ekonomi syariah nasional utamanya didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, serta kegiatan dunia usaha bersertifikat halal mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik.

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2022 sebesar 120,3 atau lebih tinggi dibandingkan 117,2 pada bulan sebelumnya. Angka tersebut secara konsisten tetap berada di zona optimis (IKK>100). Kenaikan IKK terpantau pada seluruh kategori pengeluaran, kelompok usia, serta kategori pendidikan responden. Meningkatnya optimisme konsumen pada Oktober 2022 didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen, baik terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Bank Indonesia juga melaksanakan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk mendapatkan informasi dini perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil. Survei tersebut dilakukan secara triwulanan. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan responden survei adalah pelaku usaha di sembilan sektor ekonomi.[32] Hasil SKDU mengindikasikan perkembangan sektor usaha secara triwulanan (qtq). Indikasi yang diperoleh dari SKDU di antaranya adalah kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja, dan kondisi investasi. Metode perhitungan untuk ketiga aspek tersebut dilakukan dengan metode Saldo Bersih Tertimbang (SBT).[33]

Kegiatan usaha bersertifikat halal mengindikasikan kinerja yang tetap kuat pada triwulan IV 2022 sejalan dengan kegiatan usaha secara total. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU bersertifikat halal pada triwulan IV 2022 sebesar 7,88%, lebih tinggi dari SBT pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 3,43%. Sektor usaha yang mendorong masih terjaganya ekspektasi kegiatan usaha bersertifikasi halal yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Sektor Jasa Keuangan, sejalan dengan peningkatan permintaan saat HBKN dan libur akhir tahun. Responden memprakirakan peningkatan kegiatan usaha bersertifikat halal pada triwulan I 2023 akan berlanjut dengan SBT sebesar 12,90% (Grafik 2.25) seiring tren pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan ekspektasi kegiatan usaha diprakirakan terjadi pada Sektor Pertanian (SBT 3,40%) sejalan dengan masuknya musim panen yang dimulai pada bulan Maret 2023, Sektor Industri Pengolahan (SBT 1,92%), dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 2,44%) sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan yang didukung kapasitas penyimpanan dan ketersediaan sarana produksi. Kegiatan usaha responden bersertifikat halal pada triwulan I 2023 diprakirakan masih akan tercatat positif dan meningkat. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ekspektasi produsen bahwa kegiatan usaha masih akan membaik, ditandai dengan proporsi responden yang optimis meningkat dibandingkan triwulan IV 2022.

Grafik 2.25. Perbandingan Kegiatan Usaha Responden SKDU Total dan SKDU Bersertifikasi Halal

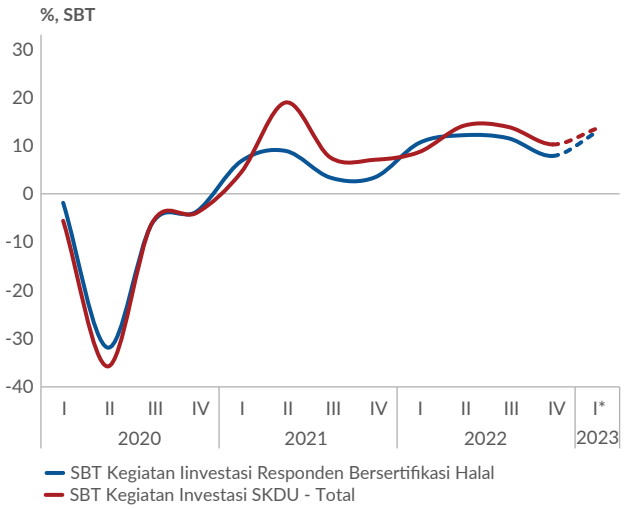

Sumber: SKDU Bank Indonesia dan BPS, diolah

Penggunaan tenaga kerja responden SKDU bersertifikat halal pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Perlambatan terjadi pada beberapa sektor, seperti Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang sejalan dengan perlambatan pada kegiatan usahanya. Ekspektasi penggunaan tenaga kerja oleh responden bersertifikat halal diprakirakan mulai membaik pada triwulan I 2023 (SBT 3,92%) seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat (Grafik 2.26). Perbaikan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pengunaan tenaga kerja pada Sektor Pertanian, Konstruksi, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Kegiatan investasi responden bersertifikat halal terus membaik sepanjang tahun 2022. Realisasi investasi responden bersertifikat halal pada triwulan IV 2022 memiliki nilai SBT sebesar 4,73%, lebih tinggi dari SBT pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 0,80% (Grafik 2.27). Berdasarkan sektor ekonomi,

32 Sektor yang tercakup dalam SKDU meliputi: 1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3. Sektor Industri Pengolahan; 4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5. Sektor Konstruksi; 6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan; 9. Sektor Jasa-Jasa.

33 Metode Saldo Bersih adalah menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". Metode Saldo Bersih Tertimbang adalah mengalikan Saldo Bersih sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

Grafik 2.26. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Responden Bersertifikasi Halal dan SKDU Total

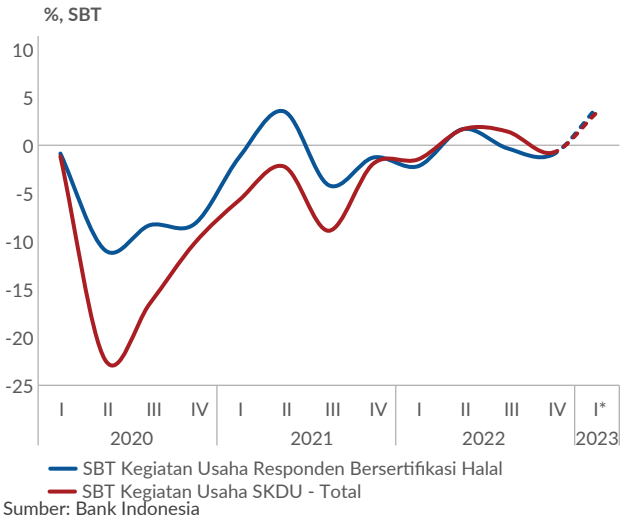

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.27. Perbandingan Kegiatan Investasi Responden SKDU Total dan Bersertifikasi Halal

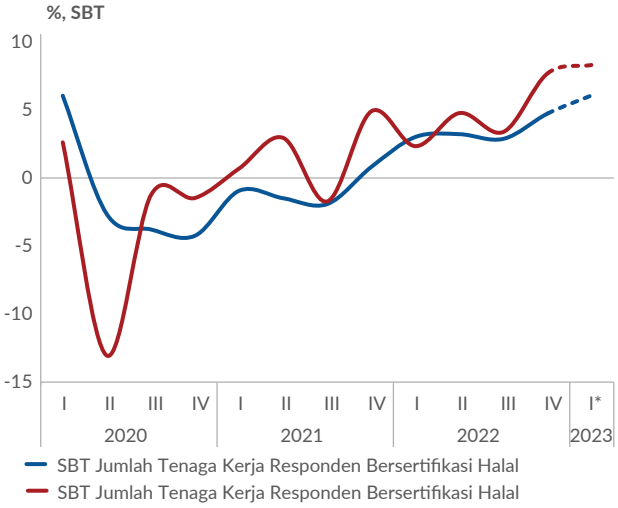

Sumber: Bank Indonesia

peningkatan kegiatan investasi terindikasi pada sebagian sektor terutama Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Responden menginformasikan investasi tersebut digunakan untuk pengembangan teknologi, penambahan sarana dan prasarana, pembelian alat/mesin baru serta *maintenance* mesin. Pada triwulan I 2023 responden memprakirakan investasi meningkat (SBT 6,06%) melanjutkan tren peningkatan di periode sebelumnya. Peningkatan terjadi pada Sektor Pertanian (SBT 1,28%), Industri Pengolahan (SBT 1,35%), Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 1,54%). Penggunaan investasi ini akan digunakan oleh responden untuk keberlanjutan pengembangan teknologi, pembelian alat baru serta perluasan lahan pertanian.

Perkembangan Literasi Ekonomi Syariah Nasional

Literasi ekonomi syariah mengalami peningkatan namun masih terbuka ruang untuk mencapai angka yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, telah dilakukan survei ekonomi syariah yang menghasilkan indeks sebesar 23,3% atau meningkat sebesar 7% dari sebelumnya sebesar 16,3% (2019). Dapat diasumsikan 23 orang dari 100 penduduk muslim di Indonesia, memiliki literasi ekonomi syariah yang tergolong "*well literate*" (Gambar 2.1). Literasi ekonomi syariah adalah pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*Economic & Financial knowledge*) yang sesuai dengan prinsip Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama Islam. Peningkatan literasi ekonomi syariah memiliki peran penting dalam upaya merubah perilaku masyarakat untuk turut serta dalam pengembangen ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi ekonomi syariah bersinergi dengan otoritas dan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Gambar 2.1. Perkembangan Survei Literasi Ekonomi Syariah Nasional

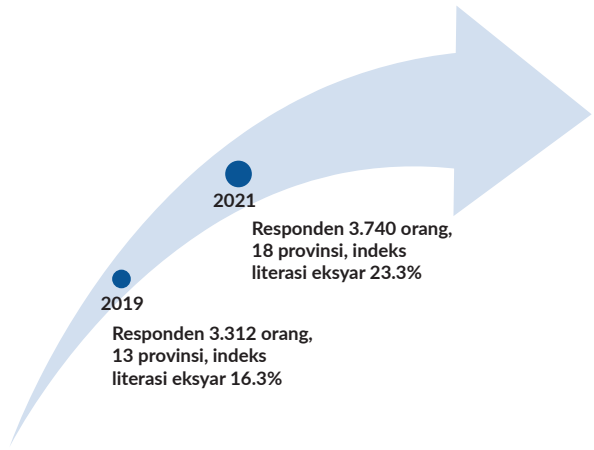

Sumber: Bank Indonesia

2.2

Kinerja Keuangan Syariah Nasional

Pembiayaan ekonomi Pemerintah melalui penerbitan SBSN terus meningkat, meski secara tahunan nilai yang diterbitkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam membiayai APBN, maka penerbitan difokuskan pada SBN yang tidak mempersyaratkan *underlying* dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima. Implementasi dari strategi tersebut memberikan dampak pada penurunan jumlah penerbitan SBSN, dimana yang diterbitkan sepanjang 2022 (per November 2022) menjadi Rp224 triliun atau turun -16,90% (ytd) dibandingkan akhir periode 2021 (Grafik 2.28). Pada tahun 2022, sejumlah pembiayaan SBSN tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 180 proyek di 26 satuan kerja setingkat eselon I pada 13 Kementerian/Lembaga dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp29,53 triliun (Grafik 2.29). Sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.593 proyek dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp173,873 triliun. Alokasi pembiayaan SBSN terdiri dari infrastruktur transportasi (55%) dan Sumber Daya Air (SDA) (18 %) dan infrastruktur pendidikan (15%), riset teknologi (4%), dan sosial/ perumahan (9%) yang tersebar di 34 Provinsi (Gambar 2.2 dan Gambar 2.3).

Grafik 2.28. Perkembangan Penerbitan Pembiayaan Hasil Penerbitan SBSN 2022

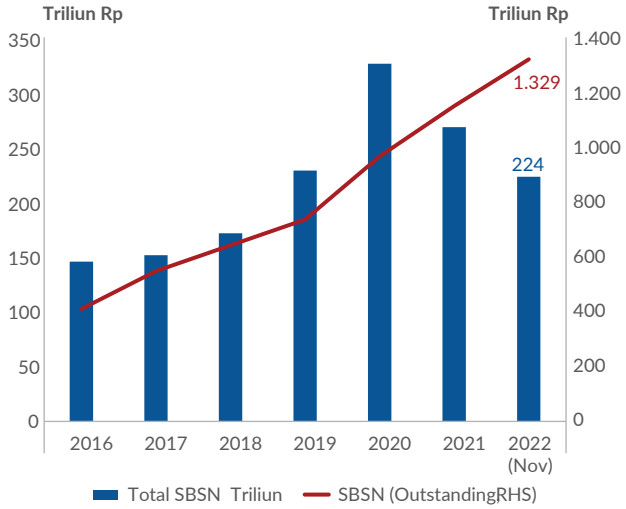

Sumber: Bank Indonesia & DJJPR Kemenkeu RI, diolah

Grafik 2.29. Perkembangan Alokasi Belanja SBSN Proyek 2013 - 2022

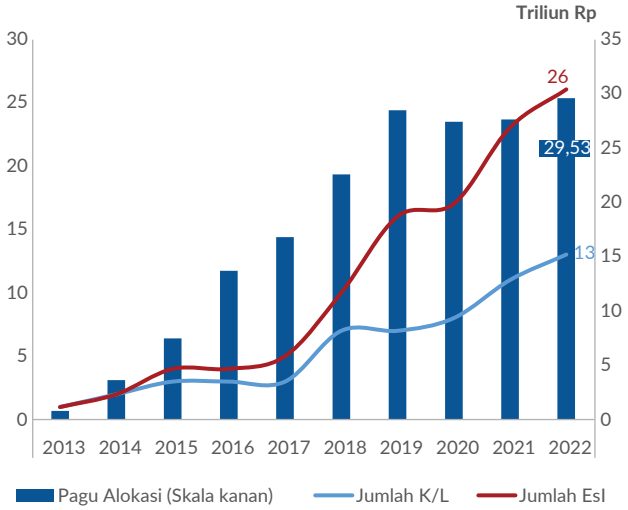

Sumber: Bappenas

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, masih tetap mendorong pertumbuhan pembiayaan industri jasa keuangan syariah yang meningkat sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp524 triliun atau tumbuh 14,80% (ytd) (Grafik 2.31). Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus meningkat baik dari

Grafik 2.30. Alokasi Pembiayaan SBSN Berdasarkan Sektor Infrastruktur Tahun 2022

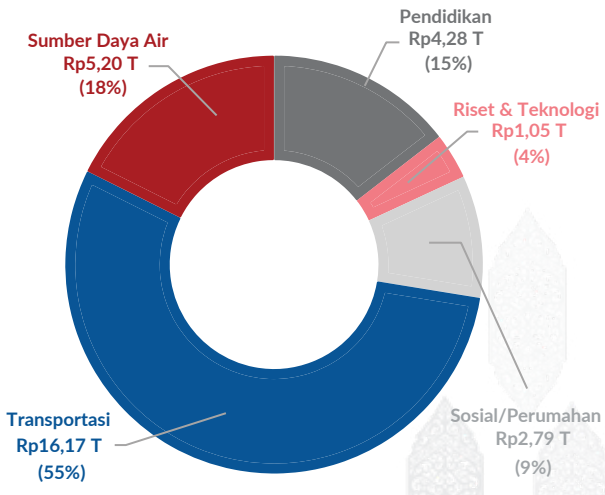

Sumber: Bappenas

Gambar 2.2. Rincian Proyek SBSN 2013 – 2022

Sumber: Bappenas

Gambar 2.3. Sebaran Proyek SBSN 2013-2022

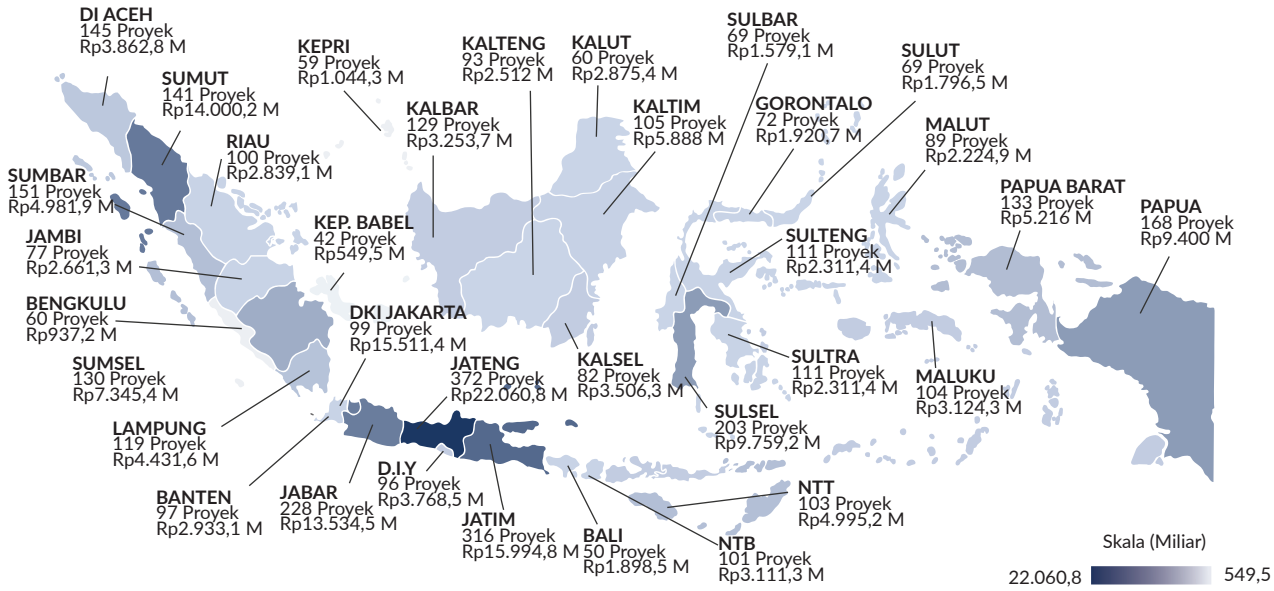

Sumber: DJJPR Kemenkeu RI

kategori Bank Umum Syariah (BUS) termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor Industri Keuangan Non Bank sebesar (IKNB) Rp39 triliun atau 13,70% (ytd) jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan syariah Industri Keuangan Non Bank tersebut secara keseluruhan mencerminkan bahwa debitur syariah telah bangkit dan permintaan akan produk keuangan syariah telah kembali pulih.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah konsisten tumbuh di tengah proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Hingga November 2022, penyaluran pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 2.32). Pertumbuhan tersebut meningkat mencapai 21,99% (yoy) atau 19,25% (ytd), melampaui penyaluran kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 11,43%

Grafik 2.31. Perkembangan Pembiayaan Industri Jasa Keuangan

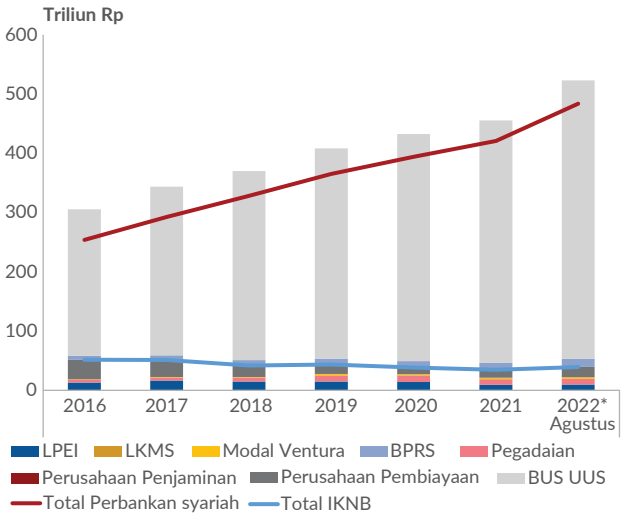

Sumber: OJK, diolah

(yoy) atau 10,26% (ytd).[34] Tumbuhnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sampai dengan saat ini terbatas pada transaksi kegiatan dalam negeri dan belum secara aktif menggarap pasar untuk transaksi kegiatan ekspor impor. Penyaluran pembiayaan masih didominasi transaksi kegiatan domestik dengan porsi 99,01%, sedangkan porsi transaksi kegiatan ekspor hanya sebesar 0,55% dan impor sebesar 0,44%. Pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi masih tercatat dari sektor pertambangan, diikuti oleh sektor pertanian. Dan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah bersumber dari sektor listrik, gas, dan air (Grafik 2.33).

Grafik 2.32. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 2022

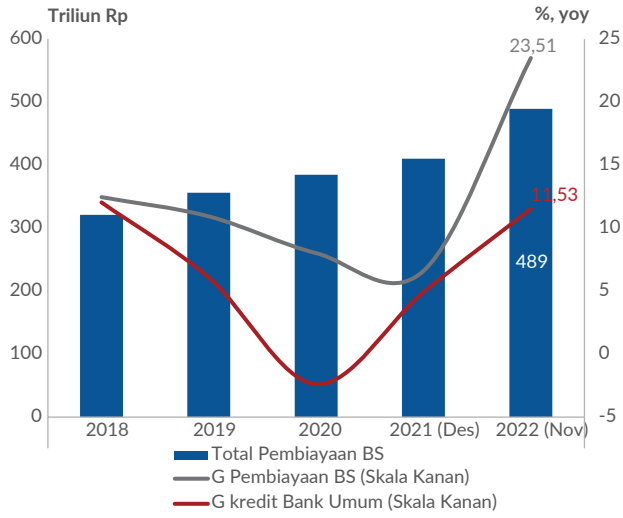

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

34 Angka pertumbuhan tahunan pembiayaan perbankan syariah ini juga dipengaruhi adanya konversi BPD Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah pada Agustus 2022.

Grafik 2.33. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi per November 2022

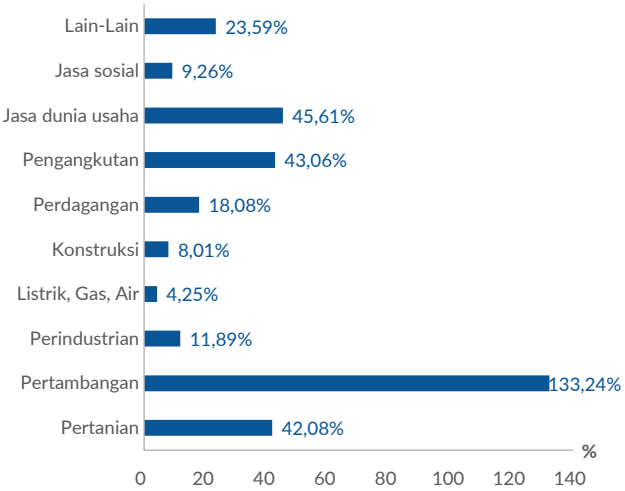

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Perkembangan pembiayaan syariah ke sektor unggulan HVC terus meningkat dengan kualitas yang terus membaik. Pertumbuhan pembiayaan sektor unggulan HVC bahkan lebih tinggi dibandingkan sektor non-HVC (Grafik 2.34). Perkembangan ini memperlihatkan dukungan perbankan syariah pada sektor unggulan HVC. Peningkatan pembiayaan tertinggi disertai perbaikan kualitas pembiayaan terbesar, terlihat pada sektor pertanian, diikuti sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) dan makanan halal. Sementara untuk sektor fesyen muslim, kualitas pembiayaan masih cukup tinggi, meski sudah membaik. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan belum meningkatnya pembiayaan ke sektor tersebut.

Grafik 2.34. Pembiayaan Perbankan Syariah *Growth* vs NPF

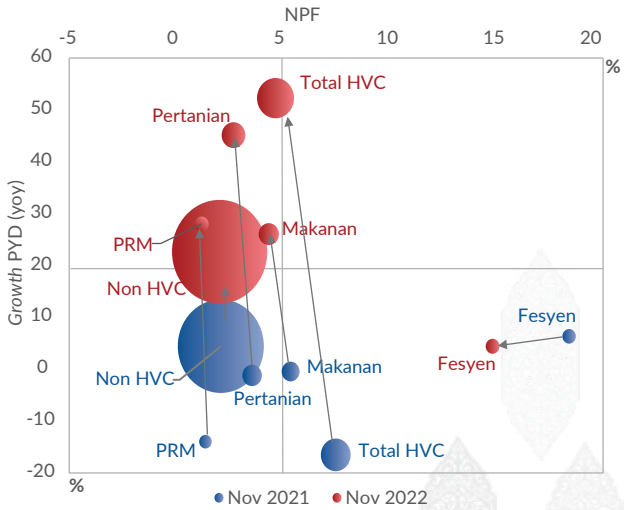

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Tingkat ketahanan perbankan syariah tetap terjaga di tengah peningkatan penyaluran pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh membaiknya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) dan rasio *Loan at Risk* (LaR). NPF perbankan syariah pada November 2022 sebesar 2,42%, atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 2.35). Rasio NPF terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2022. Penurunan NPF perbankan syariah didorong oleh penurunan rasio NPF berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 yang juga menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Rasio kredit berisiko atau LaR juga menunjukkan perbaikan sejalan dengan penurunan *outstanding* pembiayaan restrukturisasi (grafik 2.36). Selain itu, Penurunan LaR juga didukung oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan yang diperpanjang hingga Maret 2024. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut dilakukan secara *targeted* dan sektoral diantaranya, (i) segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor, (ii) sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, dan (iii) beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dampak lanjutan pandemi Covid-19.

Pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM tumbuh konsisten di tengah dukungan pemulihan UMKM dari dampak Covid-19. Per November 2022, pembiayaan UMKM meningkat 17,77% (yoy) menjadi Rp86,58 triliun yang didorong oleh berbagai kebijakan

Grafik 2.35. Perkembangan NPF Pembiayaan Perbankan Syariah per November 2022 (yoy)

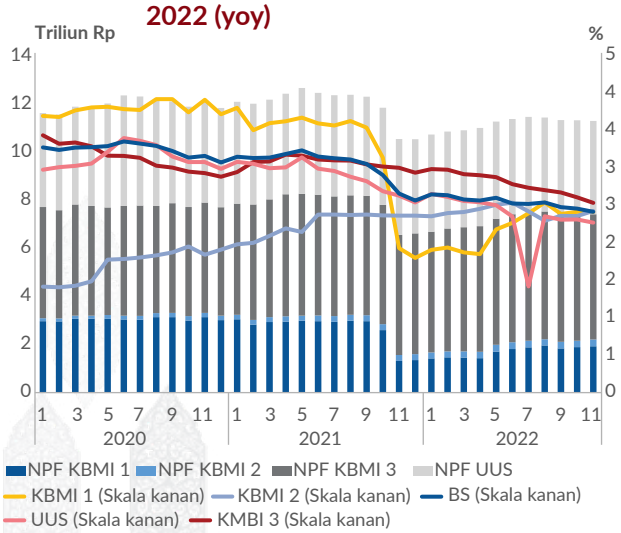

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.36. Perkembangan LaR Pembiayaan Perbankan Syariah per November 2022 (yoy)

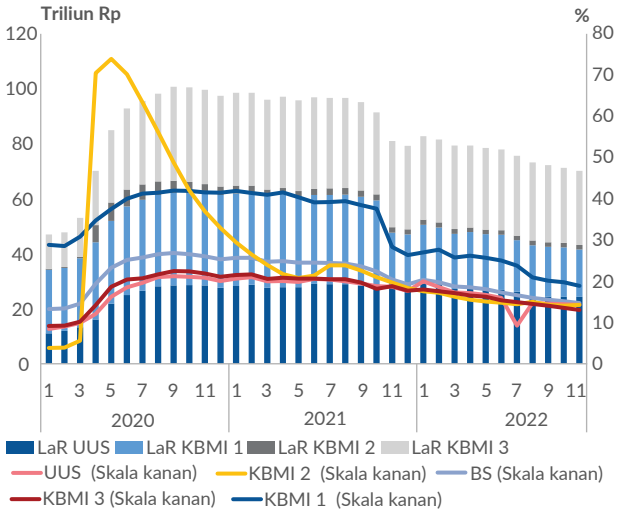

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

penyaluran pembiayaan kepada UMKM terdampak pandemi Covid-19 (Grafik 2.37). Perkembangan ini merupakan salah satu bentuk komitmen perbankan syariah dalam mendukung UMKM yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Namun demikian, pangsa pembiayaan UMKM masih berada di bawah 20% dari total pembiayaan perbankan syariah. Untuk mendorong peningkatan pembiayaan kepada UMKM, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan PBI RPIM bagi Bank Umum Konvensional, BUS, dan UUS yang diterbitkan untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM. Tujuan penyempurnaan RPIM ini untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan

Grafik 2.37. Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah 2022

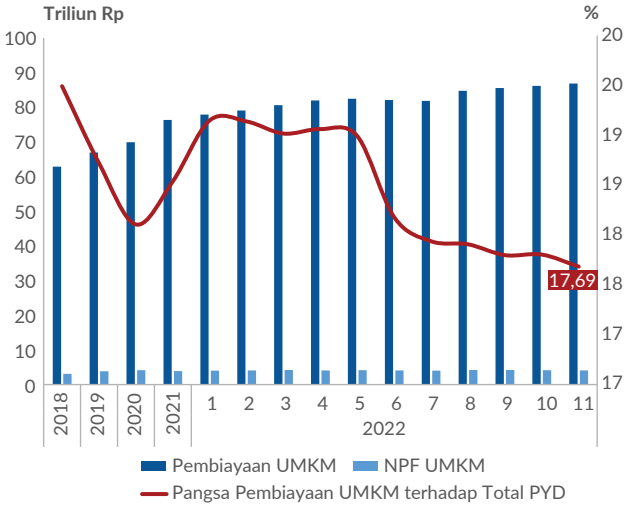

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kualitas pembiayaan, perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan kredit terdampak Covid-19 oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2024 dapat menjaga level *Non Performing Financing* (NPF) UMKM dalam koridor sesuai ketentuan di bawah 5%.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pembiayaan syariah tersebut masih didominasi oleh sektor rumah tangga, baik secara nasional maupun spasial regional (Grafik 2.38). Tingkat kepadatan penduduk, domisili kantor pusat dari banyak industri yang berada di pulau Jawa, mendorong tingginya penyaluran pembiayaan di regional tersebut (Grafik 2.39). Termasuk di antaranya untuk sektor industri pengolahan, pembiayaan syariah mayoritas terpusat di pulau Jawa, diikuti oleh pulau Sumatera. Hal tersebut sejalan dengan lokasi kantor pusat dan fasilitas pabrik dari industri yang berada di wilayah Jawa dan Sumatera, sehingga komitmen pembiayaan sebagian besar tercatat pada kedua wilayah tersebut. Secara spasial, peningkatan penyaluran pembiayaan terlihat signifikan pada regional Sumatera pada Agustus 2022. Peningkatan ini didukung pasca konversi BPD Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (Grafik 2.40). Bank Riau Kepri Syariah didorong sebagai penyokong dan penguat pertumbuhan semua sektor ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Provinsi Riau.

Grafik 2.38. Perkembangan PYD Nasional Per Sektor Ekonomi 2018-2022

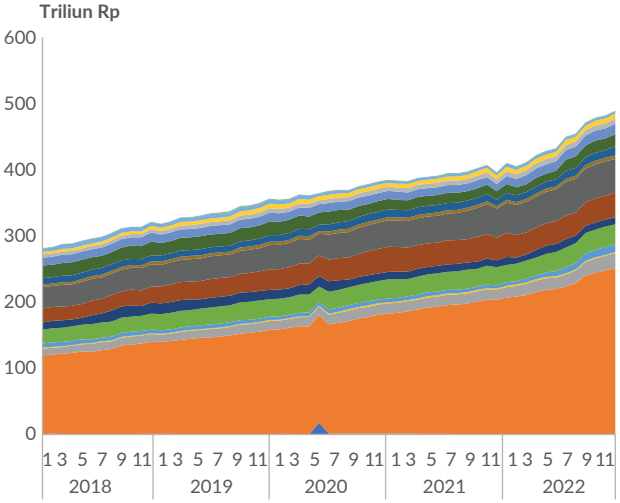

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.39. Perkembangan PYD Regional Jawa Per Sektor Ekonomi 2018-2022

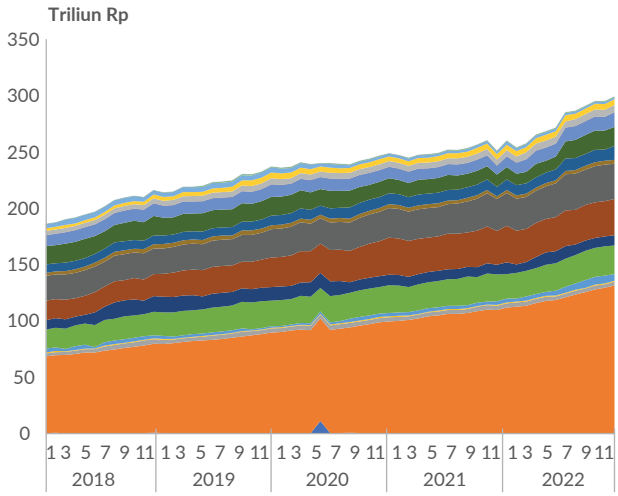

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Pembiayaan ekonomi melalui industri pasar modal syariah terus tumbuh meningkat di tengah tren peningkatan suku bunga pada 2022. Di tengah perkembangan likuiditas industri perbankan syariah yang cenderung mengetat, kehadiran pasar modal syariah mampu menjadi solusi alternatif yang cukup menarik bagi perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan. Peningkatan pembiayaan melalui pasar modal juga tercermin dari penerbitan sukuk korporasi yang terus tumbuh meningkat hingga per November 2022, dimana terdapat 221 jumlah sukuk *outstanding* dan 396 jumlah penerbitan sukuk (Grafik 2.44). Jika dilihat dari sisi penerbitan efek per November 2022, dari 54 saham *Initial Public Offering* (IPO), sebanyak 47 IPO merupakan saham syariah atau mencerminkan 87% dari total pencatatan saham syariah baru di BEI

Grafik 2.40. Perkembangan PYD Regional Sumatera Per Sektor Ekonomi 2018-2022

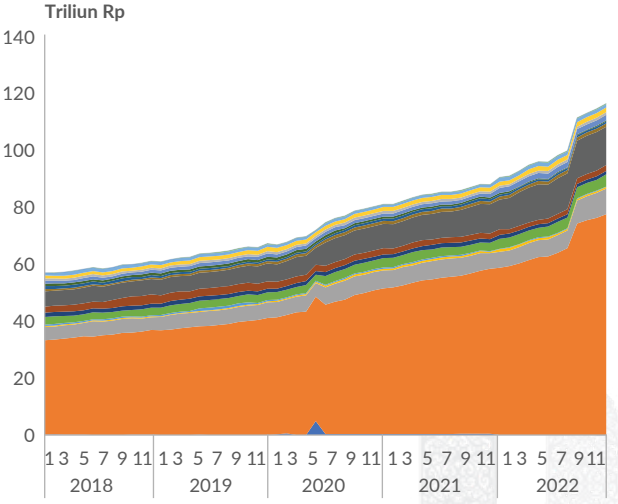

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.41. Perkembangan PYD Regional Kalimantan Per Sektor Ekonomi 2018-2022

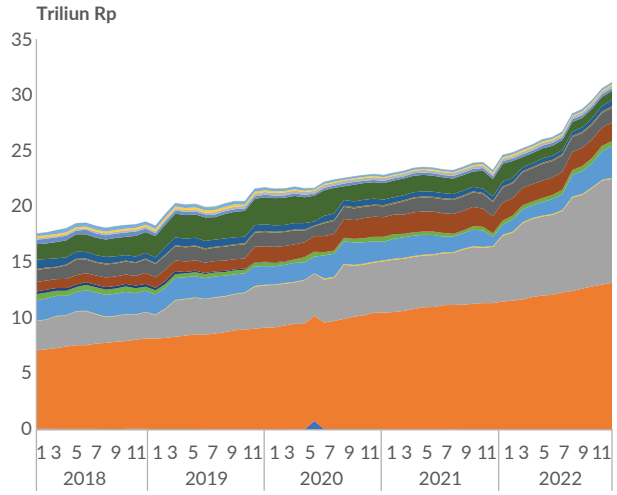

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.42. Perkembangan PYD Regional Sulawesi, Maluku, Papua Per Sektor Ekonomi 2018-2022

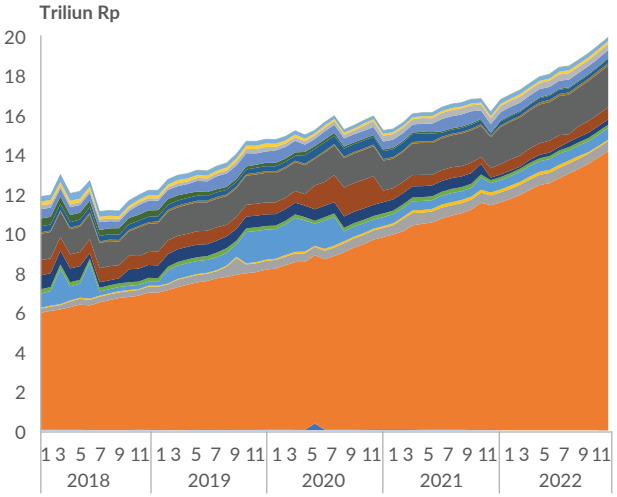

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.43. Perkembangan PYD Regional Bali dan Nusa Tenggara Per Sektor Ekonomi 2018-2022

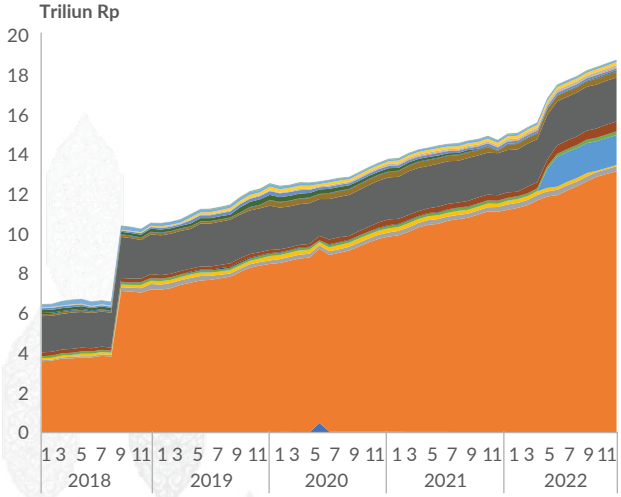

Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.44. Perkembangan Sukuk Korporasi

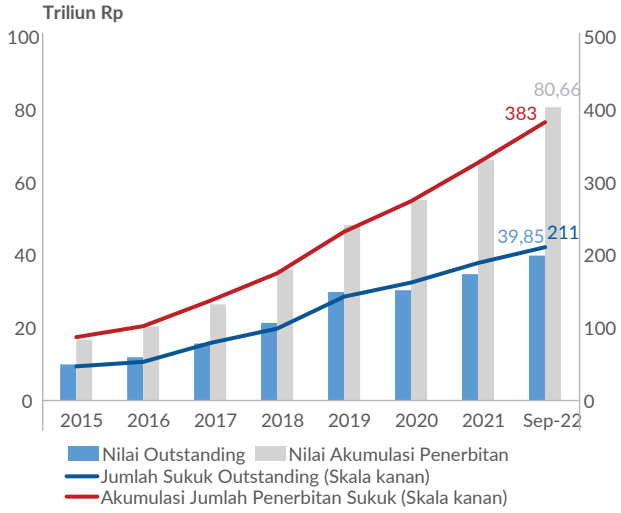

Sumber: OJK, diolah

Tabel 2.1. Legenda Grafik

- Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
- Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
- Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Pendidikan
- Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
- *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- Perantara Keuangan
- Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
- Perdagangan Besar dan Eceran
- Konstruksi
- Listrik, Gas dan Air
- Industri Pengolahan
- Pertambangan dan Penggalian
- Perikanan
- Pertanian, perburuan, dan kehutanan
- Rumah Tangga
- Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya

(Grafik 2.45). Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sekitar 85%. Secara nominal, total perolehan dana dari saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) per November 2022 mencapai sebesar Rp127,96 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perolehan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp203,04 triliun. Hal ini dipengaruhi harga dan *market size* perusahaan yang IPO pada masing-masing tahun. Tren yang membaik pada pasar modal syariah juga didukung oleh penambahan jumlah sekuritas yang memberikan fasilitas sistem *online trading* syariah (SOTS). Pada tahun 2022 ini, terdapat 8 (delapan) perusahaan sekuritas di Indonesia yang memiliki fasilitas SOTS.

***Fintech* syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik dan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dengan dukungan pasar dan kelengkapan ekosistem yang semakin berkembang.** Secara jumlah, pelaku *fintech* yang berizin OJK relatif terbatas meski meningkat setiap tahunnya (Grafik 2.46) dan memiliki potensi untuk terus tumbuh meningkat. Hal ini terlihat dari posisi Indonesia pada *Global Islamic Fintech Report* 2022 yang meraih peringkat ketiga dengan skor indeks sebesar 65, setelah Arab Saudi dan Malaysia dengan skor indeks masing-masing sebesar 80 dan 81. Peringkat ini dinilai berdasarkan 19 indikator dari 5

Grafik 2.45. Perkembangan IPO-ISSI per November 2022

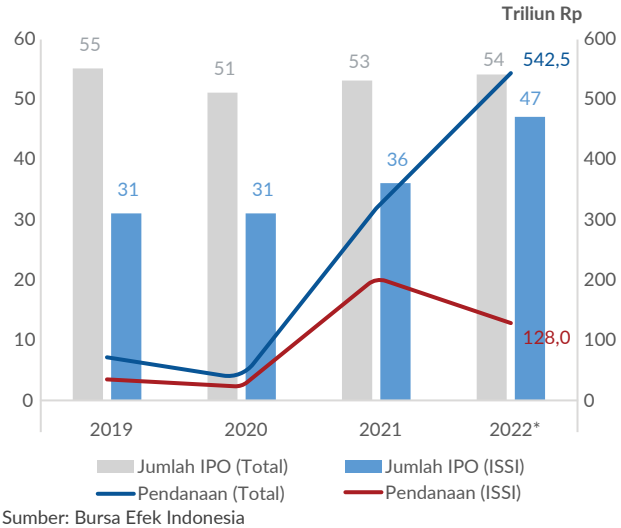

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Grafik 2.46. Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia

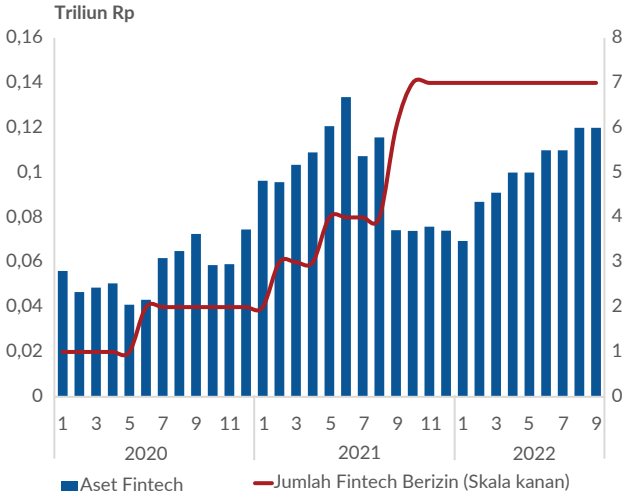

Sumber: OJK, diolah

(lima) kategori yang berbeda untuk masing-masing 64 negara. Kelima kategori tersebut adalah *talent*, regulasi, infrastruktur, pasar dan ekosistem, serta modal. Kategori tersebut dibobot untuk mendapatkan skor secara keseluruhan, dengan bobot terbesar diberikan pada kategori pasar dan ekosistem sebagai kategori yang menunjukkan sejauh mana kondusifitas suatu negara terhadap *fintech* syariah. Selanjutnya, dalam penilaian indeks tersebut dilakukan survei yang mencerminkan kondisi pengembangan ekosistem yang dinilai dari 8 pilar yaitu 1) *market share*, 2) regulasi, 3) *shariah compliance*, 4) *access for International fintech*, 5) *proximinity by customer*, 6) *talent*, 7) *capital* dan 8) *bank participation*. Dari hasil survei ini, Indonesia meraih nilai yang tinggi untuk *market share*, regulasi dan kepatuhan syariah/*shariah compliance*. *Global Islamic Fintech Report* juga menilai ekosistem fintech di Indonesia merupakan yang paling cepat berkembang, khususnya di Asia Tenggara. Salah satu pendorongnya, yakni penerbitan regulasi Fintech *Peer-to-Peer* (P2P) pertama oleh OJK pada 2016, sehingga kepercayaan masyarakat semakin besar. Selain itu, Indonesia memiliki ekosistem pendukung yaitu 4 (empat) asosiasi *fintech* yang diakui dan ditunjuk sebagai *Self-Regulatory Organizations* (SRO) oleh regulator. 4 (empat) asosiasi tersebut diklasifikasikan menurut jenis layanan atau model bisnis diantaranya P2P Asosiasi (AFPI), Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), dan Keuangan Digital Asosiasi Inovasi (AFTECH & AFSI).

Perkembangan Keuangan Sosial Syariah

Keuangan sosial Indonesia telah memiliki reputasi dunia. Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia melalui *World Giving Index* 2022 (WGI 2022) yang diluncurkan oleh Charities Aid Foundation (CAF). Indonesia berada di peringkat pertama dengan perolehan total skor tertinggi yaitu 68 persen. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan salah satu keberhasilan para pegiat filantropi, khususnya badan dan lembaga pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam menggalang, mengelola dan mendayagunakan dana keuangan sosial syariah.

Keberadaan keuangan sosial syariah terus berperan penting sebagai bagian dari upaya membangkitkan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk dalam menjaga daya beli di tengah kenaikan inflasi. Instrumen Zakat, Infak dan Sedekah merupakan bagian dari dana keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat. Indikator total DPK Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada November 2022 menunjukkan pertumbuhan yang relatif terbatas dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp5,62 triliun atau -2,62% (yoy). Meskipun DPK Bazis Bank syariah secara pangsa relatif kecil dibandingkan total keseluruhan yaitu sebesar 27,21%, namun mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya (Grafik 2.47).

Penggalangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui *e-commerce* mengalami tren yang relatif stabil dengan adanya peningkatan musiman pada periode bulan suci Ramadhan dan Idul Adha. Pada bulan April 2022 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, pengumpulan dana donasi dan zakat mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya menjadi Rp8,75 miliar. Peningkatan tersebut didorong inisiasi masyarakat yang ingin menyalurkan zakat mal dan fitrahnya melalui layanan digital yang disediakan oleh *e-commerce*. Meski terjadi peningkatan secara musiman pada bulan-bulan tertentu, penggalangan dana ZIS secara total pada bulan Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar -17% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan mulai adanya pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada bulan Juli 2022 yang bertepatan HBKN Idul Adha 1433H, terdapat peningkatan penghimpunan khususnya pada segmen kurban. Sehingga secara total semua segmen mencatatkan nilai penghimpunan sebesar Rp15 miliar atau 238% (yoy) dari periode sebelumnya (Grafik 2.48). Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan utilisasi transaksi dengan uang elektronik antara umat dengan lembaga sosial melalui *e-commerce*.

Khusus pada segmen donasi, terdapat pertumbuhan yang cukup baik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2022, segmen donasi mencatatkan nilai donasi sebesar Rp 13,48 miliar atau naik 5,83% dibandingkan

Grafik 2.47. Perkembangan DPK Bazis

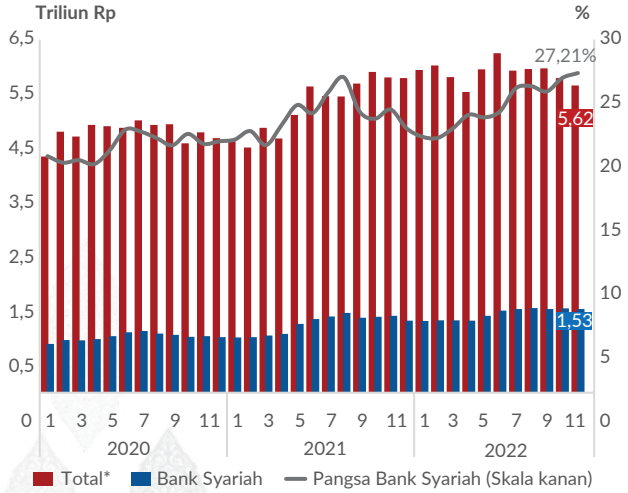

Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.48. Pengumpulan ZIS Melalui *E Commerce*

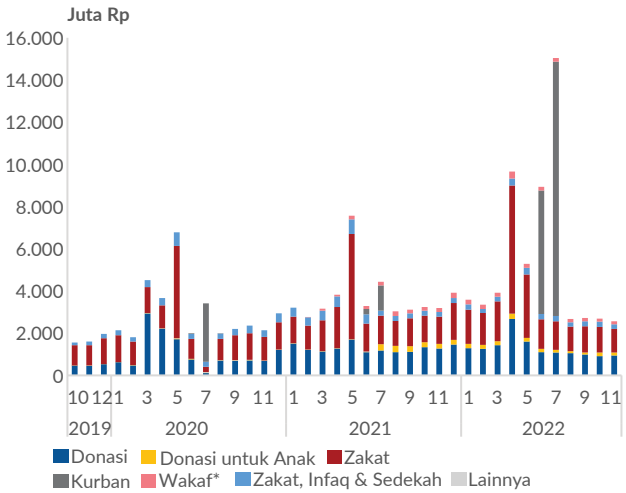

Sumber: Bank Indonesia, diolah

periode yang sama pada tahun 2021. Pertumbuhan donasi secara digital diprakirakan akan terus tumbuh seiring dengan terbiasanya perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital selama masa pandemi. Kemudahan dalam berdonasi secara *online* menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya donasi oleh masyarakat, di samping itu penggunaan sarana digital juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi.

Penguatan tata kelola aset wakaf dan optimalisasi aset wakaf juga dilakukan melalui sertifikasi aset wakaf dan peningkatan pengumpulan wakaf uang. Proses sertifikasi tanah wakaf secara konsisten meningkat, seiring peningkatan aset wakaf. Sampai dengan bulan November 2022, total aset wakaf mencapai sebanyak 440.512 unit dengan pemanfaatan yang masih didominasi untuk masjid dan mushola. Dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) membentuk Lemdiklat dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI yang merupakan LSP Wakaf pertama di dunia. Hingga tahun 2022, LSP BWI telah memberikan Sertifikasi Kompetensi Nazhir kepada 1.140 orang dari 24 provinsi di Indonesia.

Tabel 2.2. Alokasi Penggunaan Tanah Wakaf

Jenis Penggunaan	*Share* (%)	Jumlah lokasi
Sekolah	10,77%	47.443
Mushola	27,90%	122.903
Sosial Lainnya	9,37%	41.276
Pesantren	4,10%	18.061
Makam	4,35%	19.162
Masjid	43,51%	191.667
Total	100,00%	440.512

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), diolah

Perkembangan Bauran Kebijakan Moneter dan Pembiayaan PUAB berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan OMS rupiah sepanjang 2022 cenderung stabil dengan tren penurunan menjelang akhir tahun di tengah kondisi pandemi yang mulai mereda. Penurunan kegiatan OMS rupiah dipengaruhi antara lain oleh penurunan kelebihan likuiditas perbankan syariah akibat meningkatnya permintaan pembiayaan ke sektor riil. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan aktivitas usaha, permintaan pembiayaan ke sektor riil semakin meningkat dan menjadi salah satu faktor penurunan penempatan perbankan syariah pada instrumen penyerapan likuiditas (absorpsi) seperti SukBI dan FASBIS. Di sisi lain, kegiatan OMS rupiah yang didominasi oleh instrumen absorpsi memperlihatkan kondisi likuiditas syariah yang masih melimpah. Kegiatan penambahan likuiditas (injeksi) OMS rupiah untuk pemenuhan likuiditas perbankan syariah tetap dilakukan melalui instrumen Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), yang volumenya relatif kecil sepanjang tahun 2022 (Grafik 2.49).

Grafik 2.49. Perkembangan OMS Rupiah 2022 Berdasarkan Absorpsi dan Injeksi

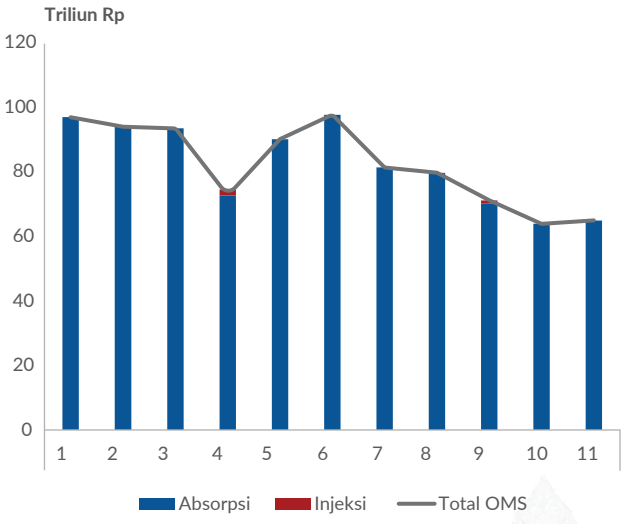

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.50. Perkembangan OMS Berdasarkan OPT Syariah dan *Standing Facilities* Syariah

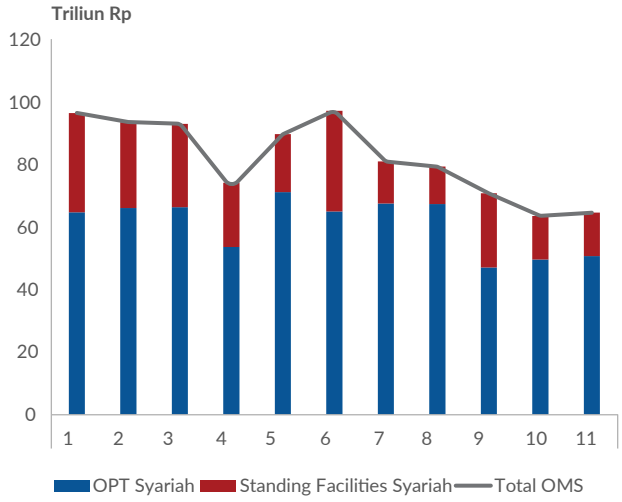

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) kembali mendominasi kegiatan OMS pada tahun 2022. SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah menerbitkan instrumen SukBI inklusif sebesar Rp2 triliun pada bulan November dan Desember 2022. Sementara itu, dari sisi kegiatan OMS injeksi hanya instrumen PASBI yang ditransaksikan oleh perbankan syariah dengan nominal yang relatif kecil (Grafik 2.51).

Kegiatan OMS valas menunjukkan tren penurunan seiring adanya penurunan dana *idle* valas yang dimiliki perbankan syariah. Dalam rangka kegiatan OMS valas, saat ini hanya tersedia instrumen absorpsi dalam bentuk Term Deposit (TD) valas syariah dengan tenor 1 (satu) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan. Total *outstanding* TD valas syariah pada November 2022 sebesar 146 Juta dolar AS, menurun 79,81% dibanding posisi Januari 2022 (Grafik 2.52). Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat penurunan dana pihak ketiga valas di perbankan syariah yang menyebabkan penurunan dana *idle* valas yang dapat ditempatkan di Bank Indonesia. Kompetisi suku bunga valas yang terjadi di domestik dan luar negeri, serta menguatnya dolar Amerika secara global menjadi penyebab utama menurunnya dana pihak ketiga valas.

Volume transaksi PUAS stabil dengan tren penurunan yang didorong oleh pengetatan likuiditas perbankan syariah. Volume transaksi PUAS pada November 2022 sebesar Rp19,86 triliun, menurun 69,98% dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp66,16 triliun (Grafik 2.53). Menurunnya volume transaksi PUAS ditengarai karena adanya pengetatan likuiditas perbankan syariah, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan normalisasi rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah. Transaksi di pasar uang syariah dioptimalisasi oleh perbankan syariah umumnya untuk pengelolaan likuiditas jangka pendeknya yang tercermin dari peningkatan frekuensi transaksi khususnya pada tenor *overnight*. Transaksi PUAS masih didominasi oleh transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), namun sejak April 2022 beberapa bank syariah mulai melakukan transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) sebagai alternatif transaksi

Grafik 2.51. Perkembangan OMS Rupiah Berdasarkan Jenis Instrumen

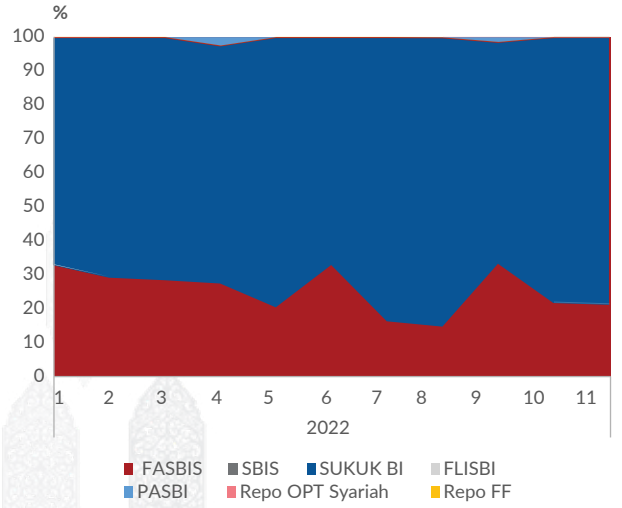

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.52. Perkembangan Term Deposit (TD) Valas Syariah (Juta dolar AS)

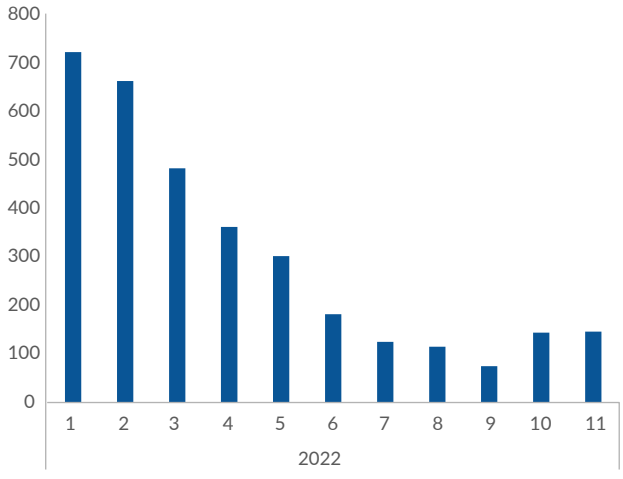

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.53. Perkembangan Transaksi PUAS

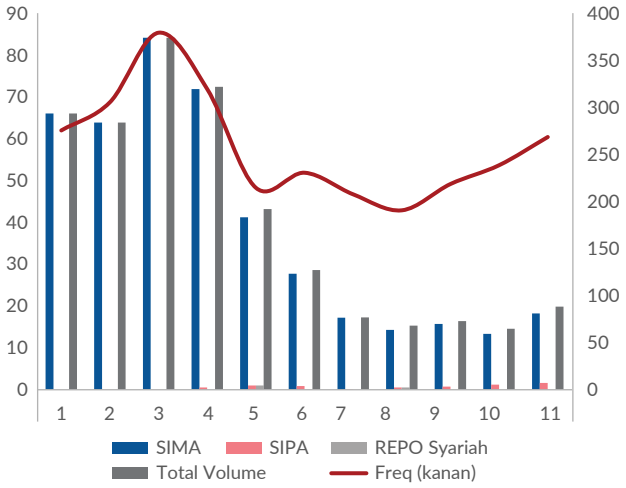

Sumber: Bank Indonesia, diolah

keuangan yang bersifat *secured*. Transaksi SiPA oleh perbankan mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun seiring dengan bertambahnya bank syariah dan bank konvensional yang melakukan perjanjian kerja sama SiPA.

Meski cenderung mengetat, kondisi likuiditas perbankan syariah yang masih melimpah juga tercermin pada tingkat imbal hasil yang relatif rendah walau terus meningkat. Rata-rata tertimbang (RRT) tingkat indikasi imbal hasil berada pada posisi 4,73% pada November 2022 atau masih berada di bawah kisaran suku bunga PUAB dan BI7DRR (Grafik 2.54). Peningkatan RRT tingkat indikasi imbal hasil sejalan dengan penurunan volume transaksi PUAS. Dari sisi tenor, volume PUAS pada tahun 2022 masih didominasi oleh tenor *overnight* (Grafik 2.55). Hal

Grafik 2.54. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS

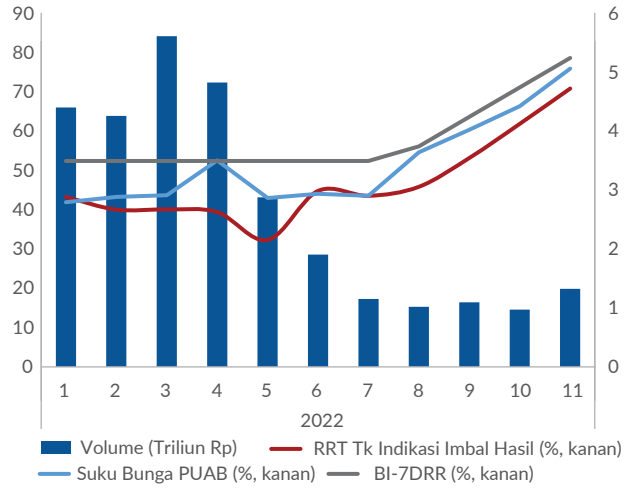

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.55. Transaksi PUAS Berdasarkan Tenor

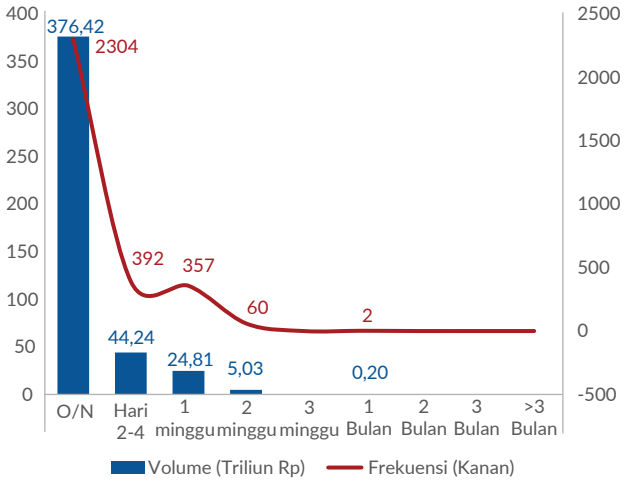

Sumber: Bank Indonesia, diolah

ini menggambarkan adanya kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang mengarah pada kebutuhan jangka pendek.

Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah

Perkembangan pangsa aktivitas usaha syariah dan pangsa pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional tetap tumbuh positif. Pangsa aktivitas usaha syariah merupakan indikator makro yang memberikan gambaran perkembangan kegiatan usaha syariah dalam skala nasional. Cakupan kegiatan usaha syariah pada tahap ini mempertimbangkan 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek dimensi produk dan aspek dimensi sumber pembiayaan. Pada aspek dimensi produk, kesesuaian terhadap prinsip syariah dilihat dari kandungan zat produk yang dihasilkan. Sementara aspek dimensi sumber pembiayaan mempertimbangkan kesesuaian terhadap prinsip syariah atas sumber dana atau kontrak transaksi yang digunakan dalam operasional proses produksi maupun kegiatan usaha. Indikator yang mewakili dimensi sumber pembiayaan adalah pangsa pembiayaan yang sesuai prinsip syariah terhadap nilai total pembiayaan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, cakupan aktivitas usaha syariah pada hakikatnya perlu secara bertahap memenuhi prinsip syariah secara *end-to-end*, sehingga sektor riil dan keuangan dapat terintegrasi dan mampu

memberikan manfaat ataupun hasil yang diharapkan. Pangsa pembiayaan syariah pada triwulan II 2022 meningkat menjadi 46,99% dari sebelumnya 45,46% pada periode yang sama tahun 2021 (Grafik 2.56). Hal tersebut ditandai dengan nilai pembiayaan syariah yang meningkat 13,90% (yoy) seiring dengan peningkatan pembiayaan yang berasal dari sukuk pemerintah. Sejalan dengan itu, pangsa aktivitas usaha syariah pada triwulan II 2022 meningkat menjadi 45,66% dari sebelumnya 44,13% pada periode yang sama tahun 2021.

Grafik 2.56. Pangsa Aktivitas Usaha Syariah dan Pangsa Pembiayaan Syariah

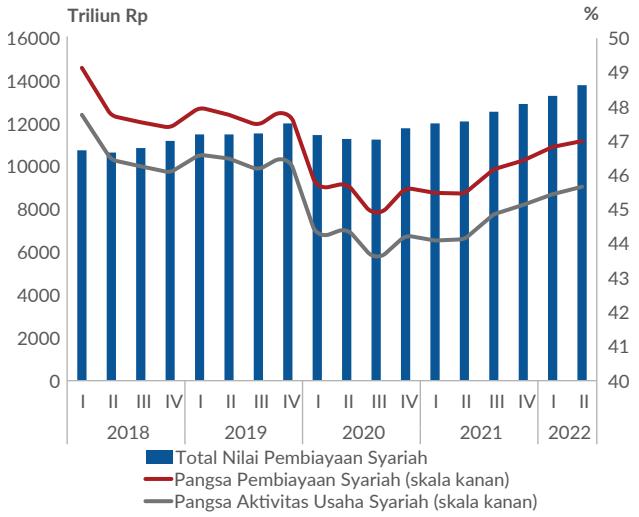

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah

2.3

Prospek Ekonomi Syariah Nasional Tahun 2023

Dalam jangka pendek perbaikan ekonomi dan keuangan syariah nasional akan terus berlanjut di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, menunjukkan proses pemulihan ekonomi domestik terus berlangsung.[35] Sejalan dengan perekonomian nasional yang diprakirakan terus tumbuh pada kisaran 4,5% – 5,3% (yoy) ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi, tetap kuatnya ekspor, serta daya beli masyarakat yang masih terjaga, ekonomi syariah pada 2023 diprakirakan juga akan terus mengalami pertumbuhan. Namun, seiring dengan melambatnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi syariah pada 2023 yang diwakili sektor prioritas HVC secara umum diperkirakan sedikit melambat (Tabel 2.3). Pertumbuhan sektor unggulan HVC pada 2023 diprakirakan kembali akan didorong oleh sektor pertanian dan sektor PRM. Sektor pertanian diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 3,7% – 4,5% (yoy) ditopang kenaikan produktivitas sub sektor perkebunan sejalan dengan implementasi peremajaan kebun sawit, serta intensifikasi pertanian. Di samping itu sektor PRM diperkirakan juga akan menjadi motor pertumbuhan seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat domestik dengan telah dicabutnya pemberlakuan PPKM pada tanggal 30 Desember 2022, maupun mobilitas masyarakat global. Sementara pada sektor keuangan syariah, intermediasi perbankan syariah diperkirakan terus membaik didukung kondisi likuiditas yang diperkirakan tetap terjaga, meski faktor ketidakpastian masih tinggi. Perkiraan peningkatan intermediasi ini ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor unggulan HVC dan permintaan sektor rumah tangga, serta didukung oleh melonggarnya persyaratan pembiayaan bank syariah (Grafik 2.57). Berdasarkan perkembangan tersebut, pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh mencapai 14% - 16% (yoy).

Dalam jangka menengah, didukung sinergi kebijakan eksyar nasional yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah terus membaik menuju lintasan jangka panjangnya. Sinergi, inovasi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik dalam wadah KNEKS maupun lainnya, serta dengan pelaku industri dan komunitas masyarakat, menjadi kunci dalam mendukung penguatan eksyar nasional. Selain itu, literasi masyarakat yang semakin meningkat akan mendorong basis pengguna aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam jangka panjang, dukungan dan sinergi kebijakan eksyar nasional, literasi masyarakat yang semakin meningkat, serta meluasnya digitalisasi eksyar akan mengakselerasi pertumbuhan sektor

Tabel 2.3. Perkiraan Pertumbuhan PDB dan Sektor Prioritas HVC

Komponen	2022 (%)	2023 (%)
Produk Domestik Bruto	4,5 - 5,3	4,5 - 5,3
Total Sektor Prioritas HVC	4,5 - 5,3	4,5 - 5,3
Pertanian Halal	1,6 - 2,4	3,7 - 4,5
Makanan Halal	3,4 - 4,2	3,6 - 4,4
Fesyen Muslim	3,4 - 4,2	3,6 - 4,4
Pariwisata Ramah Muslim	11,5 - 12,3	7,6 - 8,4

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022 – Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.57. Indeks Persyaratan Pembiayaan Perbankan Syariah

Sumber: Bursa Efek Indonesia

35 Laporan Perekonomian Indonesia 2022, Bank Indonesia

prioritas *halal value chain* pada ekonomi syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Sejumlah risiko perlu diwaspadai ke depan untuk memastikan ketahanan ekonomi syariah Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Waspada akan kemungkinan gejolak dunia masih akan berlangsung lama, dengan segala dampak rambatan negatifnya terhadap kinerja perekonomian nasional, serta adanya risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian sebagai sektor unggulan ekonomi syariah. Karena itu, sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga dengan berbagai mitra strategis, serta komunitas masyarakat akan terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Boks 2.1

Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* dalam Halal *Traceability*

Sektor industri halal telah menjadi bagian dari ekosistem dengan potensi kontribusi ekonomi yang sangat besar baik saat ini ataupun ke depan. Berdasarkan laporan dari *State of Global Islamic Economic Report* 2021-2022, tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2 triliun dolar AS yang terserap di sektor pangan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,9%(yoy) dari tahun 2020, dengan aset keuangan syariah yang diprakirakan tumbuh menjadi 3,6 triliun dolar AS pada tahun 2021, naik 7,8%, dari 3,4 triliun dolar AS pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar 9,1% (yoy) meski di tengah-tengah pemulihan Covid-19 dan ketidakpastian global.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain utama dalam sektor industri halal khususnya menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Hal ini tidak hanya tercermin dari jumlah populasi Indonesia yang mayoritas adalah muslim, tapi juga tercermin pada potensi produk halal di dalam negeri yang diharapkan dapat mendukung dan memperkuat pasar industri halal Indonesia di kancah internasional. Namun, kondisi Indonesia saat ini dalam memperlakukan produk halal masih belum terjamin 100% halal karena masalah rantai pasokan serta masalah pergerakan dan penyimpanan selama proses distribusi yang sebagian besar proses penyaluran produknya masih dilakukan secara tradisional. Padahal logistik halal sangat penting dalam memastikan dan menjaga persyaratan halal suatu produk dari produksi hingga konsumsi.

Sebagai upaya Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia, terdapat empat strategi[36] untuk memperkuat ekosistem industri halal, salah satunya yaitu pengembangan *halal traceability* dalam proses produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi industri halal Indonesia dan menjaga kenyamanan konsumen produk halal. Dengan adanya pembangunan sistem *halal traceability* pada produk-produk makanan halal, mulai dari ketertelusuran produk setengah jadi hingga produk akhir yang siap didistribusikan kepada konsumen dan terjamin halal pada proses *traceability*-nya, dapat membuat konsumen lebih yakin atas produk yang dikonsumsinya.

Penerapan *halal traceability* pada perusahaan produk makanan halal digunakan sebagai sistem pelacak status kehalalan produk makanan, sistem ini bekerja dengan merekam informasi lengkap proses produksi mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga produk makanan halal akan sampai pada konsumen dengan jaminan ketertelusuran produk yang halal dan berkualitas tinggi. Dengan adanya pertumbuhan potensi bisnis makanan halal di Indonesia saat ini, sangat penting adanya penerapan sistem keterlacakan halal yang dapat diimplementasikan dalam produksi makanan halal.

Oleh karena itu, transformasi digital sangat dibutuhkan sepanjang rantai pasokan halal nuntuk menjamin bahwa proses secara *end to end* di proses secara baik. Adopsi teknologi yang saat ini berkembang yaitu penggunaan *blockchain* dalam *halal traceability*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi penyimpanan data *peer to peer* dalam bentuk sistem terdistribusi. Sistem ini dapat memberikan transparansi dan kemampuan penelusuran yang dapat menjadi solusi untuk menyediakan data. Setiap *peer* atau pihak berwenang dan memiliki identitas asli bisa melakukan transaksi dan verifikasi informasi secara langsung dengan pihak lain, tanpa melalui pihak ketiga. *Blockchain* mempunyai sistem verifikasi data bersifat konsensus dan sistem pengamanan catatan

36 Empat strategi untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional. Pertama, mempercepat sertifikasi halal. Kedua, merumuskan model bisnis industri halal. Ketiga, pengembangan halal traceability dalam proses produksi, dan keempat kerjasama antar lembaga sesuai dengan perannya masing-masing dalam sertifikasi halal.

transaksi bernama *cryptography*.

Keunggulan penggunaan teknologi *blockchain* yaitu:

1. **Terpercaya (*Trusted*)**
   Blockchain membuat sistem menjadi terintegrasi. Setiap transaksi dari hulu ke hilir dicatat dengan baik dengan sistem yang terpercaya.
2. **Transparan (*Transparent*)**
   Setiap catatan transaksi dapat dilihat dan harus divalidasi (disahkan) oleh semua *peer* (peserta), tidak memungkinkan terjadinya kecurangan. Karena data dapat disimpan di sebuah sistem yang terbuka sehingga baik konsumen ataupun auditor proses halal dapat memantau keseluruhan proses.
3. **Tertelusuri (*Traceable*)**
   Setiap data yang ada di dalam *blockchain* dapat ditelusuri asal usulnya dan adanya mekanisme *attestation* (kesaksian dari penginput data) membuat setiap data yang dimasukkan menjadi akuntabel dan memudahkan proses audit.

Dalam laporan *State of Global Islamic Economic Report* 2021-2022, sejumlah inisiatif yang berfokus pada pengoptimalan rantai pasokan telah dilakukan beberapa negara, salah satunya penggunaan *blockchain*. Seperti pada malakat ekosistem di Malaysia yang telah mengembangkan dunia jaringan *blockchain* halal pertama untuk melacak asal-usul daging sapi impor, dan Kamar Dagang Arab-Brasil yang meluncurkan Platform Ellos Blockchain untuk membantu membangun penelusuran jaminan halal ke dalam ekspor Brasil.

Implementasi *halal value chain* dengan *blockchain* di Indonesia sendiri masih sangat sedikit digunakan, mengingat masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya sebagai berikut:

1. **Teknologi**
   a. Saat ini, industri halal di Indonesia masih belum menyediakan sistem ketelusuran yang baik, dapat diandalkan dan terpercaya.
   b. Sistem yang belum terintegrasi
   c. Membutuhkan inovasi teknologi *blockchain* dan AI yang dapat menghadirkan ala-alat cerdas untuk industri halal
2. ***Mindset* dan *Leadership***
   a. Mahalnya penerapan teknologi blockchain
   b. Transparansi dianggap membahayakan perusahaan
3. ***Knowledge* dan *Skill***
   a. Kurangnya sosialisasi tentang *Halal Value Chain* dengan *Blockchain*
   b. Kurangnya SDM yang menguasai *Blockchain* karena kesenjangan pemahaman di sektor pendidikan dengan perusahaan
   c. Penguasaan teknologi dan sistem informasi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih beragam dan belum terstandardisasi
4. **Infrastruktur dan *Skill***
   a. Regulasi dalam teknologi *blockchain* dan AI, di Indonesia belum dirumuskan secara rinci
   b. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan platform *Halal Blockchain*
   c. Infrastruktur di tingkat pedesaan tidak memadai

Saat ini, penggunaan *blockchain* dalam *halal traceability* di Indonesia baru diimplementasikan pada bidang usaha rumah potong ayam yang telah mendapatkan sertifikasi dari MUI bersertifikat halal. Namun secara umum dapat diterapkan untuk proses

hewan ternak yang dikonsumsi masyarakat. Melalui *halal blockchain* ini para pelanggan dan konsumen dapat mengakses proses potong hewan secara transparan mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan hidup saat masuk ke rumah potong. Adapun prosedur halal atau *tracking* yang dapat dilihat oleh konsumen sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan Hewan**
   Proses pemeriksaan Kesehatan hewan dilakukan secara menyeluruh yaitu *antemortem* dan *postmortem*. *Antemortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih dan *postmortem* adalah proses untuk memastikan produk karkas yang dihasilkan benar-benar sehat dan berkualitas.
2. **Pengontrolan Bobot Hewan**
   Pengontrolan bobot ayam dilakukan untuk mengetahui tingkat keseragaman hewan. Kontrol bobot dilakukan dengan cara penimbangan dan pengukuran sampel hewan hidup yang dikirimkan.
3. **Penyembelihan Halal**
   Penyembelihan dilakukan secara alami dengan memutuskan pembuluh darah, saluran pencernaan dan saluran pernapasan yang disertai dengan pengucapan kalimat *basmalah*. Penyembelihan dilakukan oleh pihak yang terlatih dan bersertifikat JULEHA (Juru Sembelih Halal) sesuai dengan fatwa MUI.
4. **Penisiran dan Pengolahan Limbah Darah**
   Penisiran darah dilakukan secara tiga menit. Untuk mencapai waktu tersebut, maka alur *shackle* pada proses penisiran darah diatur sekian rupa, sehingga cukup waktu untuk penuntasan darah sebelum hewan masuk ke *scalder*.
5. **Pendingin Karkas**
   Pada proses selanjutnya adalah proses *postmortem*, dimana dilakukan pemeriksaan jerohan dan karkas setelah disembelih. Dalam proses ini terdapat tanki pendingin yang berfungsi untuk membersihkan dan membilas karkas, yang dilakukan secara berputar seperti sekrup (*screw*) dan diteruskan menuju tangki pendingin kedua (*chillingtank*).

Penerapan teknologi tepat guna untuk menjamin *halal traceability* merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia. *Halal traceability* tidak saja memberikan jaminan perlindungan konsumen terhadap produk halal, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk pasar global. Untuk itu diperlukan komitmen berbagai pihak dalam upaya peningkatan reputasi industri halal Indonesia yang salah satunya dapat ditempuh melalui pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk *halal traceability*.

Sumber:

- Dinar Standard, 2022, State of the Global Islamic Economy Report
- Arkeman, Yandra, 2022 Model Bisnis Implementasi dan Pengembangan Halal Value Chain di Indonesia, materi disampaikan pada Seminar nasional Traceability halal Value Chain 9th ISEF, 30 September 2022
- Sreeya Sewu Indonesia, 2022, Halal Blockchain, materi disampaikan pada Seminar nasional Traceability halal Value Chain 9th ISEF, 30 September 2022.

Gambar 2.4. Teknologi *Blockchain* dalam Halal *Traceability*

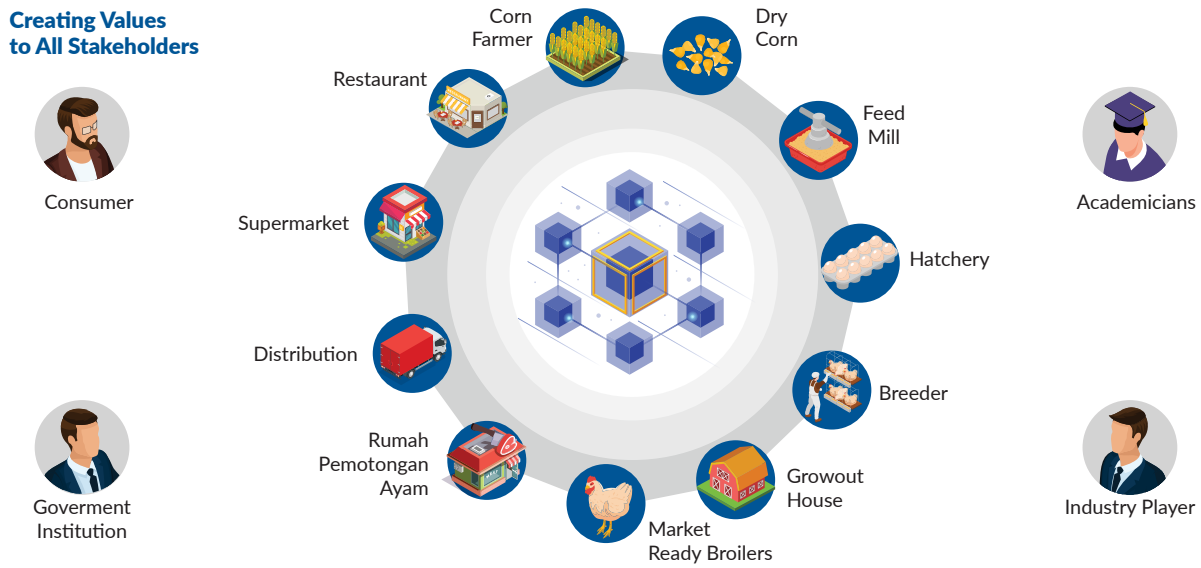

Gambar 2.5. Halal *Traceability* dalam Industri Perunggasan

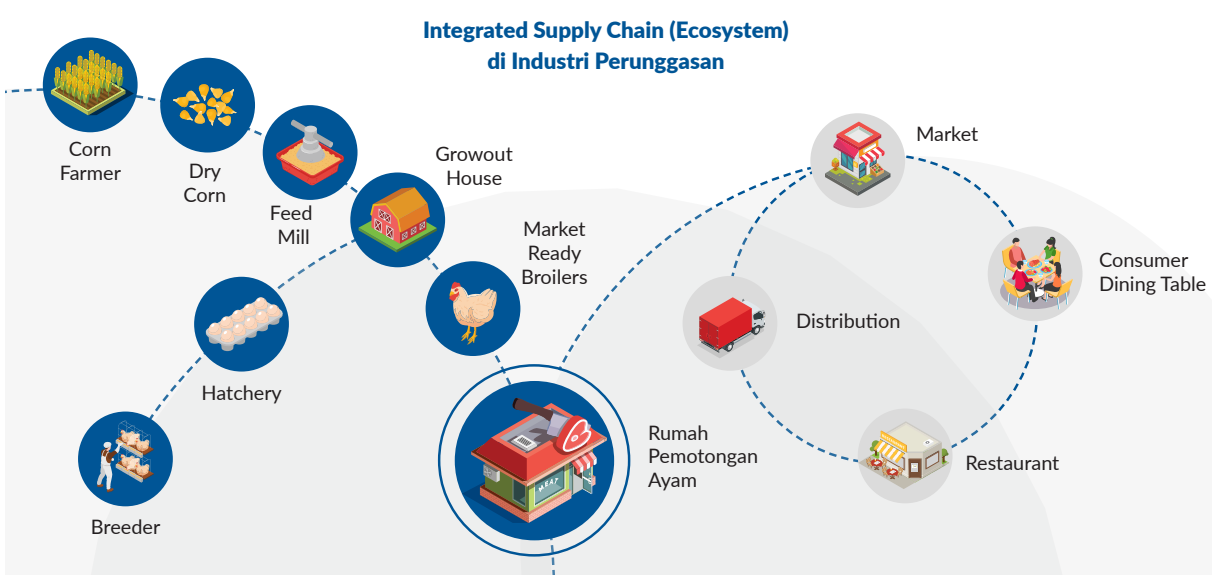

Boks 2.2

Hasil Survei Pengaruh Sertifikasi Halal Kepada Dunia Usaha

Bank Indonesia melaksanakan Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) mengenai pengaruh sertifikasi halal kepada dunia usaha.[37] Dalam rangka optimalisasi peran Bank Indonesia sebagai akselerator pengembangan ekonomi syariah salah satunya melalui program penguatan rantai nilai halal, serta untuk mengimplementasikan UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dibutuhkan informasi terkait sertifikasi halal. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan potensi yang besar dalam pasar rantai nilai halal. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman perkembangan lebih lanjut tidak hanya untuk pengembangan sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh otoritas terkait, tetapi juga perkembangan korporasi yang memiliki sertifikasi halal serta literasi masyarakat terhadap sertifikasi halal. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pelaku usaha terhadap kemudahan proses sertifikasi halal, kendala yang dihadapi, manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal, serta mengetahui besaran biaya pengurusan sertifikasi halal.

Kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta sebagai *value added* suatu produk. Berdasarkan hasil survei dari total 397 responden yang telah menjalankan prosedur sertifikasi halal, didominasi (72,5%) oleh pelaku usaha mikro dengan omzet setahun terakhir ≤ Rp 2 miliar (Grafik 2.58) yang sebagian besar berada di sektor industri pengolahan sebesar 57,9% (Grafik 2.59). Sebagian besar pelaku usaha (80,9%) berpendapat bahwa proses sertifikasi halal cukup mudah untuk dilakukan (Grafik 2.60). Sementara persepsi terkait kecepatan dari awal melakukan pendaftaran produk hingga menerima sertifikat halal, sebagian besar pelaku usaha (62,5%) menyatakan cukup cepat prosesnya (Grafik 2.61). Dari segi biaya, mayoritas responden (42,3%) menyatakan tidak mengeluarkan biaya untuk pengurusan sertifikat halal (Grafik 2.62). Saat ini sebagian besar produk usaha tersertifikasi halal untuk tujuan ekspor masih minim yaitu hanya sebesar 17,4% (Grafik 2.63).

Sertifikasi halal dapat mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha dalam menjangkau pangsa pasar yang lebih luas baik domestik maupun global. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan telah mendapat manfaat dari kepemilikan sertifikat halal, antara lain kemudahan dalam pemasaran produk (89,7%), peningkatan omzet produk tersertifikasi halal (69,3%), serta perluasan pasar domestik (62,7%) (Grafik 2.64). Pada umumnya sebagian besar responden (75,3%) menyatakan tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikat halal (Grafik 2.65). Sedangkan responden (24,7%) yang mengalami kendala, menyatakan bahwa proses pengurusannya rumit dan membutuhkan waktu lama (67,3%), serta biaya yang mahal (66,3%) merupakan kendala yang paling umum terjadi dalam proses memperoleh sertifikat halal (Grafik 2.66). Mayoritas responden (36,0%) menyatakan bahwa dukungan pemerintah yang paling banyak dibutuhkan adalah bantuan perluasan akses pasar (global maupun domestik) (Grafik 2.67). Hal tersebut sejalan dengan rata-rata orientasi penjualan masih didominasi domestik (95.9%).

37 Metodologi dalam survei SKSR ini menggunakan analisa deskriptif yang disajikan sebagai output dalam bentuk raw data dan tabulasi hasil survei. Responden survei terdiri dari Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar, dan Unit Usaha Pondok Pesantren yang bergerak di lapangan usaha/sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa; serta sektor lainnya. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* dengan memperhatikan skala usaha/korporasi dan kriteria target responden.

Grafik 2.58. Omzet Responden Sertifikasi Halal dalam Setahun Terakhir

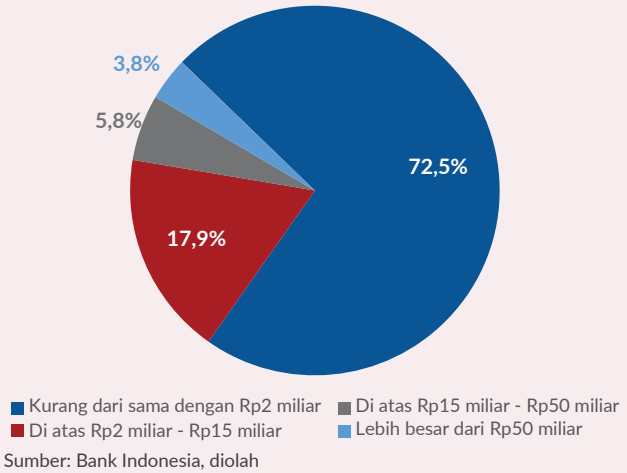

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.59. Responden Sertifikasi Halal Berdasarkan Sektor

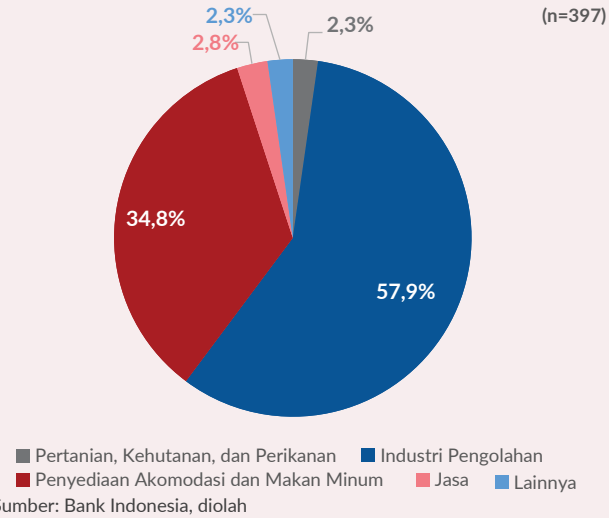

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.60. Kemudahan Proses Pengurusan Sertifikasi Halal

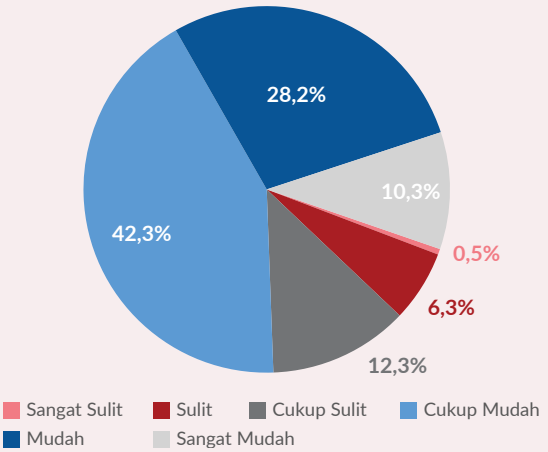

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.61. Kecepatan Proses Pengurusan Sertifikasi Halal

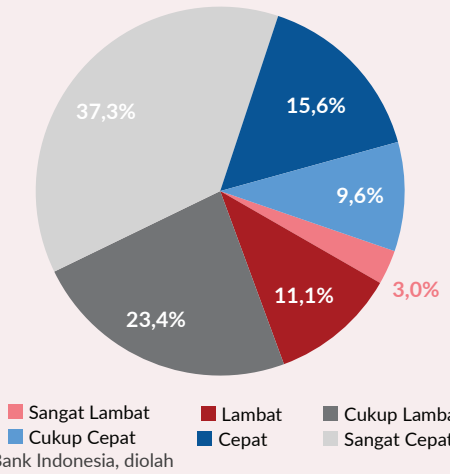

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.62. Total Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal

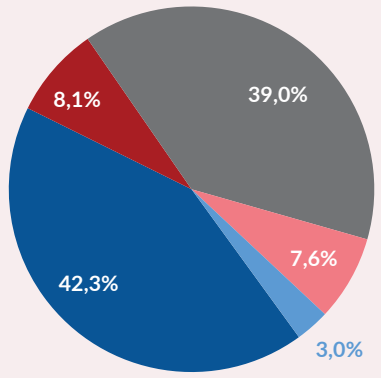

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.63. Produk Usaha Tersertifikasi Halal Untuk Tujuan Ekspor Saat Ini

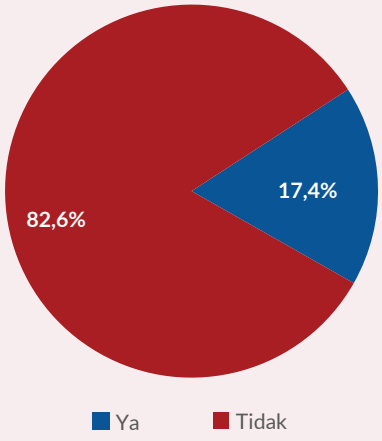

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.64. Manfaat Kepemilikan Sertifikasi Halal

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.65. Proporsi Responden yang Mengalami Kendala dalam Memperoleh Sertifikat Halal

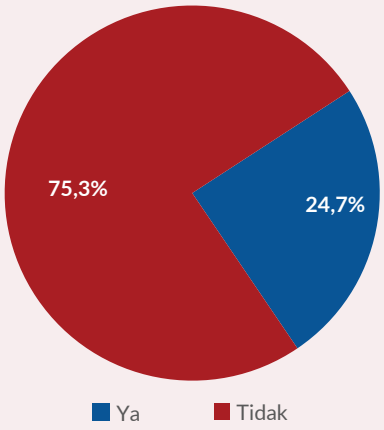

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.66. Kendala dalam Memperoleh Sertifikasi Halal

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.67. Dukungan Pemerintah Terkait Sertifikasi Halal

Sumber: Bank Indonesia, diolah

BAB III

SINERGI KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi syariah nasional serta meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia bersama pemerintah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi untuk mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga kestabilan sistem keuangan. Disisi kebijakan, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dan makroprudensial syariah untuk mendorong penyaluran pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter secara bertahap dilakukan dengan tetap memperhatikan likuiditas perbankan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan untuk mendorong pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia berfokus pada tiga pilar pengembangan dengan pendekatan ekosistem, yakni pengembangan *halal value chain*, pengembangan keuangan syariah baik keuangan komersial maupun keuangan sosial, serta edukasi dan sosialisasi . Dukungan, sinergi dan akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam membentuk ekosistem *halal value chain* pada 2022 semakin membaik dan lengkap. Pengembangan model bisnis pertanian sebagai bagian dari sektor unggulan makanan halal serta pengembangan sektor fesyen muslim yang telah dilakukan sebelumnya terus dilanjutkan dengan cakupan wilayah pengembangan yang lebih luas dan partisipasi pelaku usaha semakin meningkat baik pelaku usaha berbasis pesantren maupun non pesantren. Disisi keuangan sosial, dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor unggulan ekonomi syariah terus didorong, terutama melalui wakaf produktif. Sementara itu, upaya edukasi dan sosialisasi keuangan syariah terus ditingkatkan . Rangkaian FESyar di tiga wilayah (Jawa, Sumatera dan Wilayah Indonesia Timur) dan gelaran ISEF 2022 di Jakarta diharapkan semakin mendukung pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, edukasi dan literasi masyarakat juga diperkuat melalui publikasi riset ekonomi dan keuangan syariah, penguatan kurikulum ekonomi keuangan syariah, kewirausahaan, hingga kampanye gaya hidup halal. Di internasional, kiprah Indonesia di kancah ekonomi dan keuangan syariah global terus ditingkatkan melalui keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam fora internasional sehingga turut memberi arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global.

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional dilakukan secara berjamaah untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah pada perekonomian nasional. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional ditempuh melalui sinergi kebijakan berbagai otoritas dan lembaga, berjamaah bersama berbagai *stakeholder* terkait, baik para ulama, pelaku usaha syariah, akademisi, maupun masyarakat umum. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan, baik melalui kebijakan moneter dan makroprudensial dengan prinsip syariah, pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem *halal value chain* dengan pelaku usaha syariah pesantren dan non pesantren, pengembangan keuangan sosial syariah, penguatan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan literasi, maupun peningkatan peran di fora syariah internasional. Berbagai upaya tersebut, diselaraskan dengan program prioritas KNEKS dalam sinergi kebijakan nasional untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap ekonomi Indonesia.

3.1

Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah Untuk Mendorong Pemulihan

Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial diarahkan untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak rambatan ekonomi global sekaligus memanfaatkan momentum pemulihan. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Hal yang sama juga ditempuh melalui kebijakan moneter dan makroprudensial sesuai prinsip syariah. Bank Indonesia melanjutkan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan GWM Rupiah secara bertahap dengan tetap menjaga kondisi likuiditas dan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Langkah normalisasi ini dilakukan bersamaan dengan kebijakan pemberian insentif GWM Rupiah bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM.

3.1.1. Penguatan Strategi OMS yang Terintegrasi dengan Kebijakan Moneter dan PPU

Untuk mendukung kelancaran manajemen likuiditas syariah, Bank Indonesia terus memperkuat Operasi Moneter Syariah (OMS) yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang syariah. Instrumen OMS dan pasar uang syariah diharapkan tersedia secara memadai untuk menghadapi kondisi perekonomian khususnya di masa pemulihan ekonomi pascapandemi dan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Di saat likuiditas cukup melimpah ataupun saat likuiditas cenderung mengetat pascanormalisasi kebijakan likuiditas, instrumen OMS dan pasar uang syariah yang tersedia setiap saat menjadi sarana dalam membantu perbankan syariah melakukan pengelolaan likuiditas sesuai dengan kondisi masing-masing bank.

Untuk mencapai stabilitas moneter, OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara menyerap (*absorpsi*) likuiditas dan/atau menambah (injeksi) likuiditas. Instrumen *absorpsi* likuiditas rupiah antara lain berupa SukBI dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), sedangkan instrumen injeksi likuiditas antara lain berupa Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI). Sejalan dengan perkembangan likuiditas di perbankan

Gambar 3.1. Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah

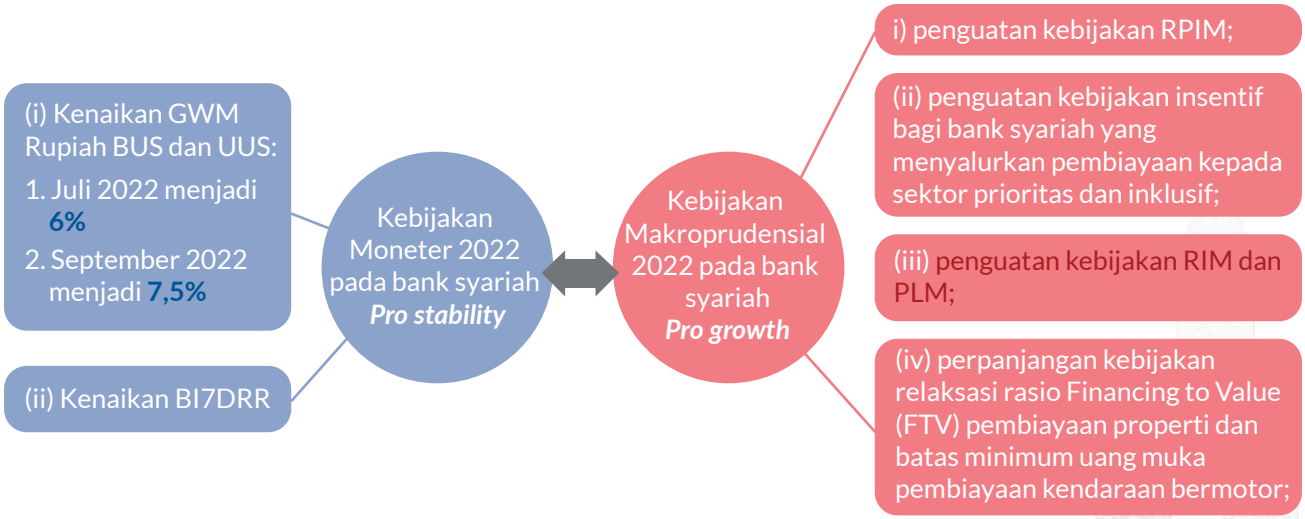

Sumber: -

syariah yang masih melimpah, transaksi bank syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka OMS masih didominasi oleh transaksi yang bersifat absorpsi likuiditas.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter syariah, Bank Indonesia menyediakan OMS Rupiah yang telah memiliki kelengkapan tenor sebagaimana instrumen OMK Rupiah. Tenor instrumen OMS rupiah saat ini telah tersedia mulai dari tenor *overnight* sampai dengan 1 (satu) tahun. Meskipun OMS telah memiliki tenor yang lengkap, untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah, Bank Indonesia selalu berupaya dan mengarahkan agar perbankan syariah tetap mengoptimalkan transaksi di *market* sedangkan akses perbankan syariah kepada instrumen Bank Indonesia diharapkan menjadi alternatif terakhir dalam hal perbankan syariah tidak memperoleh akses di *market*.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia mengembangkan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah berupa transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia mengembangkan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah sejalan dengan upaya mencapai kondisi pasar keuangan yang ideal yaitu pasar keuangan yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi valuta asing oleh perbankan syariah yang mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Instrumen ini menjadi pelengkap instrumen OMS valas syariah yang telah ada yaitu *Term Deposit* (TD) Valas syariah yang tersedia untuk tenor 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan serta instrumen lindung nilai syariah yang telah ada di pasar uang syariah sehingga bank syariah memiliki alternatif dalam pengelolaan likuiditas valas.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan yang salah satunya dengan mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas. Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui penyesuaian secara bertahap kebijakan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah bagi perbankan syariah dengan dengan tetap menjaga kemampuan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk perbankan syariah naik secara bertahap menjadi 6,0% mulai 1 Juli 2022 dan 7,5% mulai 1 September 2022. Bank Indonesia juga memberikan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau pemenuhan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensil (RPIM).

3.1.2. Mendorong Pasar Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Mendukung Penguatan Efektivitas Transmisi dan Pembiayaan Ekonomi

Pasar uang syariah yang dalam, likuid, dan efisien memiliki peran strategis untuk turut memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang dalam, likuid, dan efisien. Pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter namun juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dengan melakukan pengelolaan likuiditas yang lebih baik akan memperkuat manajemen risiko bank syariah sehingga perbankan syariah dapat fokus menyediakan pembiayaan dengan tenor yang lebih panjang dan *pricing* yang lebih efisien untuk mendukung peningkatan sisi *supply* yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan produktivitas sektor riil serta kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Sejalan dengan *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, pengembangan pasar uang syariah dilakukan dengan pendekatan *product*, *pricing*, *participants*, dan *infrastructure* (3P dan 1I). Pengembangan *product* dilakukan melalui ditujukan untuk menambah

atau menguatkan instrumen yang telah ada sesuai dengan kebutuhan, pengembangan *pricing* dilakukan melalui pemanfaatan *benchmark rate* untuk pasar uang, pengembangan *participant* ditujukan untuk memperluas basis penerbit dan investor pelaku pasar uang syariah, dan pengembangan *infrastructure* ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan dan transaksi di pasar uang syariah. Pengembangan *product*, *pricing*, dan *participants* pasar uang syariah dilakukan secara terpisah dengan pasar uang konvensional sedangkan pengembangan *infrastructure* dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang konvensional. Terciptanya ekosistem pasar uang syariah baik dari sisi *product*, *pricing*, dan *participants* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung terciptanya ketahanan pasar sehingga dapat menjadi katalis bagi tersedianya pasar keuangan syariah yang dalam dan berkembang.

Untuk mendukung pengembangan aspek *product* pasar uang syariah, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi instrumen Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA). SiPA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Penguatan implementasi SiPA dilakukan antara lain melalui penyusunan standardisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS), peningkatan jumlah bank yang melakukan penandatanganan PKS, dan pelaksanaan *coaching clinic* mekanisme *pledge* surat berharga syariah yang menjadi agunan SiPA di BI-SSSS.

Untuk mendukung pengembangan aspek *product* pasar uang syariah valas, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan transaksi di pasar valas syariah. Penyempurnaan ketentuan transaksi di pasar valas dilakukan melalui penerbitan PBI No.24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing yang mengintegrasikan beberapa ketentuan di pasar valas menjadi satu ketentuan yang mengatur secara prinsip (*principal-based*) untuk memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar dan mendorong *supply* dan *demand* valas yang optimal. Petunjuk pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dalam PADG No.24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang antara lain mencakup pengaturan mengenai ruang lingkup dan jenis transaksi di pasar valas, penggunaan *forward agreement* dalam transaksi lindung nilai syariah, pengaturan terkait jumlah transaksi (*threshold*) dan *underlying* transaksi, jenis *underlying* dan dokumen transaksi, penyelesaian (*settlement*) transaksi dan sanksi kewajiban membayar.

Untuk mendukung penguatan aspek *participant* pasar uang syariah, Bank Indonesia memperkuat integritas dan kredibilitas pelaku pasar uang syariah melalui kewajiban penerapan kode etik pasar dan sertifikasi tresuri. Kewajiban penerapan kode etik

pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri berlaku bagi pelaku transaksi di pasar uang yang berbentuk bank, perusahaan pialang, dan perusahaan efek. Kode etik pasar untuk pelaku transaksi di pasar uang syariah mengacu pada *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICoC) yang diterbitkan oleh *Indonesia Islamic Global Market Association*. Sementara itu, kewajiban sertifikasi tresuri dilakukan sesuai tingkatannya yaitu tingkat dasar untuk pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya, tingkat menengah untuk pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan, dan tingkat lanjut untuk direksi dan pegawai 1 (satu) tingkat di bawah direksi dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan. Di sisi lain, untuk mendorong perluasan basis pelaku dan peningkatan kapabilitas serta kredibilitas pasar uang syariah, Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan *refreshment*/pelatihan pelaku pasar uang syariah serta berkolaborasi dengan asosiasi tresuri syariah dan lembaga penyelenggara sertifikasi tresuri menyempurnakan modul ajar dan modul uji sertifikasi tresuri syariah sebagai acuan dalam kegiatan penyelenggaraan pelatihan maupun uji sertifikasi tresuri syariah.

Untuk mendukung penguatan aspek *pricing* pasar uang syariah, Bank Indonesia melanjutkan asesmen *benchmark rate* pasar uang syariah. *Benchmark rate* pasar uang syariah memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi di pasar uang syariah karena merupakan cerminan tingkat imbal hasil transaksi yang riil terjadi di pasar uang syariah sehingga diharapkan dapat menjadi referensi/acuan dalam transaksi di pasar uang syariah. Asesmen *benchmark rate* pasar uang syariah yang masih merupakan konsep awal mencakup antara lain konsep, cakupan, formula, dan sumber data perhitungan *benchmark* rate pasar uang syariah dan hasil simulasi. Sumber data untuk simulasi perhitungan *benchmark rate* pasar uang syariah berasal dari laporan transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang dilaporkan secara harian dan menjadi bagian dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Oleh karena itu, tingkat akurasi laporan dari perbankan syariah menjadi kunci agar dapat terbentuk *benchmark rate* yang valid dan *reliable*.

Untuk mendorong perkembangan pasar uang syariah, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan otoritas terkait dan pelaku pasar uang syariah. Pengembangan pasar uang syariah membutuhkan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan berbagai inisiatif kebijakan dan sinergi dengan otoritas terkait dan pelaku pasar. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang selaras antara otoritas dan pelaku pasar, baik dari aspek instrumen, ketentuan yang berlaku maupun kendala dan tantangan yang dihadapi pelaku pasar uang syariah. Selain itu,

sebagai wujud komitmen mendukung pembiayaan ke sektor infrastruktur, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementrian/Lembaga terkait dan KNEKS telah menyusun asesmen model bisnis pembiayaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah. Pembiayaan syariah dalam skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan/ pembiayaan proyek infrastruktur.

3.1.3. Mendorong Pasar Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Mendukung Penguatan Efektivitas Transmisi dan Pembiayaan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna tetap menjaga ketahanan sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial akomodatif. Penguatan kebijakan makroprudensial antara lain melanjutkan pemberian insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor prioritas dan inklusif, menyempurnakan kebijakan RPIM untuk mendorong kontribusi perbankan terhadap pembiayaan inklusif sesuai keahlian dan model bisnis, serta melanjutkan pelonggaran kebijakan *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP) dan batasan Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) syariah, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) syariah, dan rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB).

Untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) serta mendorong kontribusi bank secara optimal, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan RPIM. Penyempurnaan ketentuan RPIM meliputi kewajiban pemenuhan RPIM oleh bank dan penetapan target RPIM oleh bank berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dituangkan dalam rencana bisnis bank. Setiap bank diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan RPIM sesuai keahlian dan model bisnis masing-masing dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selain itu, penyempurnaan juga mencakup perluasan opsi bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang meliputi pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui SBPI. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah untuk mencapai rasio kredit/pembiayaan UMKM perbankan termasuk perbankan syariah sebesar 30% pada tahun 2024.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global maupun domestik dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif. Kebijakan insentif bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan dengan fokus pada kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Penerapan kebijakan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata diberikan kepada perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM. Sejak 1 September 2022, guna mendorong peranan perbankan termasuk perbankan syariah dalam pembiayaan kepada sektor prioritas, Bank Indonesia memperluas cakupan sektor prioritas yang sebelumnya mencakup 38 subsektor menjadi 46 subsektor yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok berdaya tahan (*resilience*), kelompok pendorong pertumbuhan (*growth driver*), dan kelompok penopang pemulihan (*slow starter*). Selain itu, besaran insentif ditingkatkan dari yang semula maksimal sebesar 1% menjadi maksimal sebesar 2% dengan rincian: (i) insentif atas penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas dari maksimal sebesar 0,5% menjadi maksimal sebesar 1,5%; dan (ii) insentif atas pencapaian target RPIM tetap maksimal sebesar 0,5%.

Untuk memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan pembiayaan khususnya kepada sektor prioritas yang belum pulih dan pembiayaan hijau, Bank Indonesia menyempurnakan kembali kebijakan insentif GWM. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 21-22 Desember 2022 telah memutuskan untuk melakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan insentif GWM yang mencakup 4 (empat) hal. *Pertama*, reklasifikasi 46 subsektor prioritas 3 (tiga) kelompok sektor usaha, yaitu kelompok yang berdaya tahan (*Resilience*), kelompok penggerak pertumbuhan

(*Growth Driver*), dan kelompok penopang pemulihan (*Slow Starter*), sesuai kondisi terkini dengan mempertahankan *threshold* pertumbuhan pembiayaan yang mendapatkan insentif untuk *Slow Starter* tetap minimal 1%, serta meningkatkan *threshold* untuk kelompok *Resilience* dan *Growth Driver* dari semula minimal 1% menjadi masing-masing minimal 5% dan 3%. *Kedua*, peningkatan dua kali lipat besaran insentif GWM kepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM menjadi paling besar 1% disertai dengan penambahan kelompok bank berdasarkan pencapaian RPIM, yaitu di atas 30% - 50%, dan di atas 50%. *Ketiga*, pemberian insentif terhadap penyaluran pembiayaan hijau, yaitu pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan paling besar 0,3%. *Keempat*, peningkatan besaran total insentif GWM yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200bps menjadi paling besar 280bps. Penyempurnaan kebijakan insentif tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2023.

Untuk mendukung upaya pemulihan nasional, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP) dan batasan Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan pelonggaran rasio FTV untuk PP menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti dan batasan uang muka untuk PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, yang semula berakhir pada 31 Desember 2022 diperpanjang menjadi 31 Desember 2023. Berlanjutnya kebijakan pelonggaran ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, khususnya di sektor properti dan otomotif.

Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif berupa kebijakan RIM syariah dan PLM syariah. Bank Indonesia tetap mempertahankan target RIM syariah di kisaran 84% - 94% untuk mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dan mempertahankan besaran PLM syariah sebesar 4,5% untuk memperkuat ketahanan likuiditas industri perbankan syariah.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan CCyB akomodatif. Dengan kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berlebihan dan menimbulkan potensi sistemik, Bank Indonesia mempertahankan rasio CCyB sebesar 0% sehingga tidak terdapat kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal.

3.1.4. Pelonggaran Makroprudensial Syariah

Dalam rangka dalam rangka meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna tetap menjaga ketahanan sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kebijakan makroprudensial akomodatif. Penguatan kebijakan makroprudensial antara lain melanjutkan pemberian insentif bagi bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan inklusif dan menyempurnakan kebijakan RPIM untuk mendorong kontribusi perbankan terhadap pembiayaan inklusif sesuai keahlian dan model bisnis. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIMS), Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM), dan rasio *Countercyclical Capital Buffer* Syariah (CCyB).

Untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) serta mendorong kontribusi bank secara optimal, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan RPIM. Penyempurnaan ketentuan RPIM meliputi kewajiban pemenuhan RPIM oleh bank dan penetapan target RPIM oleh bank berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dituangkan dalam rencana bisnis bank. Setiap bank diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan RPIM sesuai keahlian dan model bisnis masing-masing dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selain itu, penyempurnaan juga mencakup perluasan opsi bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang meliputi pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung,

dan perluasan opsi pembiayaan melalui SBPI. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah untuk mencapai rasio kredit/pembiayaan UMKM perbankan termasuk perbankan syariah sebesar 30% pada tahun 2024.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global maupun domestik dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif. Kebijakan insentif bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan dengan fokus pada kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Penerapan kebijakan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata diberikan kepada perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM. Sejak 1 September 2022, guna mendorong peranan perbankan termasuk perbankan syariah dalam pembiayaan kepada sektor prioritas, Bank Indonesia memperluas cakupan sektor prioritas yang sebelumnya mencakup 38 subsektor menjadi 46 subsektor yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok berdaya tahan (*resilience*), kelompok pendorong pertumbuhan (*growth driver*), dan kelompok penopang pemulihan (*slow starter*). Selain itu, besaran insentif ditingkatkan dari yang semula maksimal sebesar 1% menjadi maksimal sebesar 2% dengan rincian: (i) insentif atas penyaluran pembiayaan kepada sektor prioritas dari maksimal sebesar 0,5% menjadi maksimal sebesar 1,5%; dan (ii) insentif atas pencapaian target RPIM tetap maksimal sebesar 0,5%.

Untuk memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan pembiayaan khususnya kepada sektor prioritas yang belum pulih dan pembiayaan hijau, Bank Indonesia menyempurnakan kembali kebijakan insentif GWM. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 21-22 Desember 2022 telah memutuskan untuk melakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan insentif GWM yang mencakup 4 (empat) hal. *Pertama*, reklasifikasi 46 subsektor prioritas 3 (tiga) kelompok sektor usaha, yaitu kelompok yang berdaya tahan (*Resilience*), kelompok penggerak pertumbuhan (*Growth Driver*), dan kelompok penopang pemulihan (*Slow Starter*), sesuai kondisi terkini dengan mempertahankan *threshold* pertumbuhan pembiayaan yang mendapatkan insentif untuk *Slow Starter* tetap minimal 1%, serta meningkatkan *threshold* untuk kelompok *Resilience* dan *Growth Driver* dari semula minimal 1% menjadi masing-masing minimal 5% dan 3%. *Kedua*, peningkatan dua kali lipat besaran insentif GWM kepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM menjadi paling besar 1% disertai dengan penambahan kelompok bank berdasarkan pencapaian Rasio

Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yaitu di atas 30% - 50%, dan di atas 50%. *Ketiga*, pemberian insentif terhadap penyaluran pembiayaan hijau, yaitu pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan paling besar 0,3%. *Keempat*, peningkatan besaran total insentif GWM yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200bps menjadi paling besar 280bps. Penyempurnaan kebijakan insentif tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2023.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP) dan batasan Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan pelonggaran rasio FTV untuk PP menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti dan batasan uang muka untuk PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, yang semula berakhir pada 31 Desember 2022 diperpanjang menjadi 31 Desember 2023. Berlanjutnya kebijakan pelonggaran ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, khususnya di sektor properti dan otomotif.

Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif berupa kebijakan RIM syariah dan PLM syariah. Bank Indonesia tetap mempertahankan target RIM syariah di kisaran 84% - 94% untuk mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dan mempertahankan besaran PLM syariah sebesar 4,5% untuk memperkuat ketahanan likuiditas industri perbankan syariah.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan CCyB akomodatif. Dengan kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berlebihan dan menimbulkan potensi sistemik, Bank Indonesia mempertahankan rasio CCyB sebesar 0% sehingga tidak terdapat kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal.

3.2

Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah Bank Indonesia ditempuh melalui pengembangan ekosistem di sektor prioritas ekonomi syariah, baik pada pelaku usaha syariah pesantren maupun non pesantren. Pengembangan ekosistem di 5 sektor prioritas ekonomi syariah yaitu (i) pertanian terintegrasi, (ii) mamin halal, (iii) fesyen muslim, (iv) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan (v) Pariwisata Ramah Muslim (PRM) dilakukan melalui penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Penguatan ekosistem juga dilakukan dengan memastikan keterkaitan antar sektor. Sektor pertanian terintegrasi menjadi pusat rantai pasok untuk mendukung sektor mamin halal dan fesyen muslim. Namun pada fase awal pengembangan, difokuskan untuk mendukung sektor mamin halal. Sektor PRM (pariwisata Ramah Muslim) sebagai *extended services* bagi wisatawan muslim menjadi *outlet* bagi sektor mamin halal dan fesyen muslim. Sementara sektor EBT diharapkan menjadi sumber energi bagi keempat sektor lainnya, guna mendukung energi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Prinsip pengembangan ekosistem dilakukan melalui proses *piloting* untuk mendapatkan satu model ekosistem yang utuh dan *robust*, untuk kemudian dapat direplikasi dan diimplementasikan secara nasional.

3.2.1. Pengembangan Ekosistem *Halal Value Chain* (HVC)

Ekosistem *halal value chain* di 5 sektor prioritas sudah mulai terbangun terutama disektor pertanian dan siap untuk direplikasi serta dikembangkan. Saat ini, ekosistem di sektor pertanian sudah lengkap, mulai dari aspek pelaku komunitas usaha Ponpes yang masif, didukung pendampingan penguatan

Gambar 3.2. Paradigma dan Asesmen Pengembangan Ekosistem 5 Sektor *Halal Value Chain*

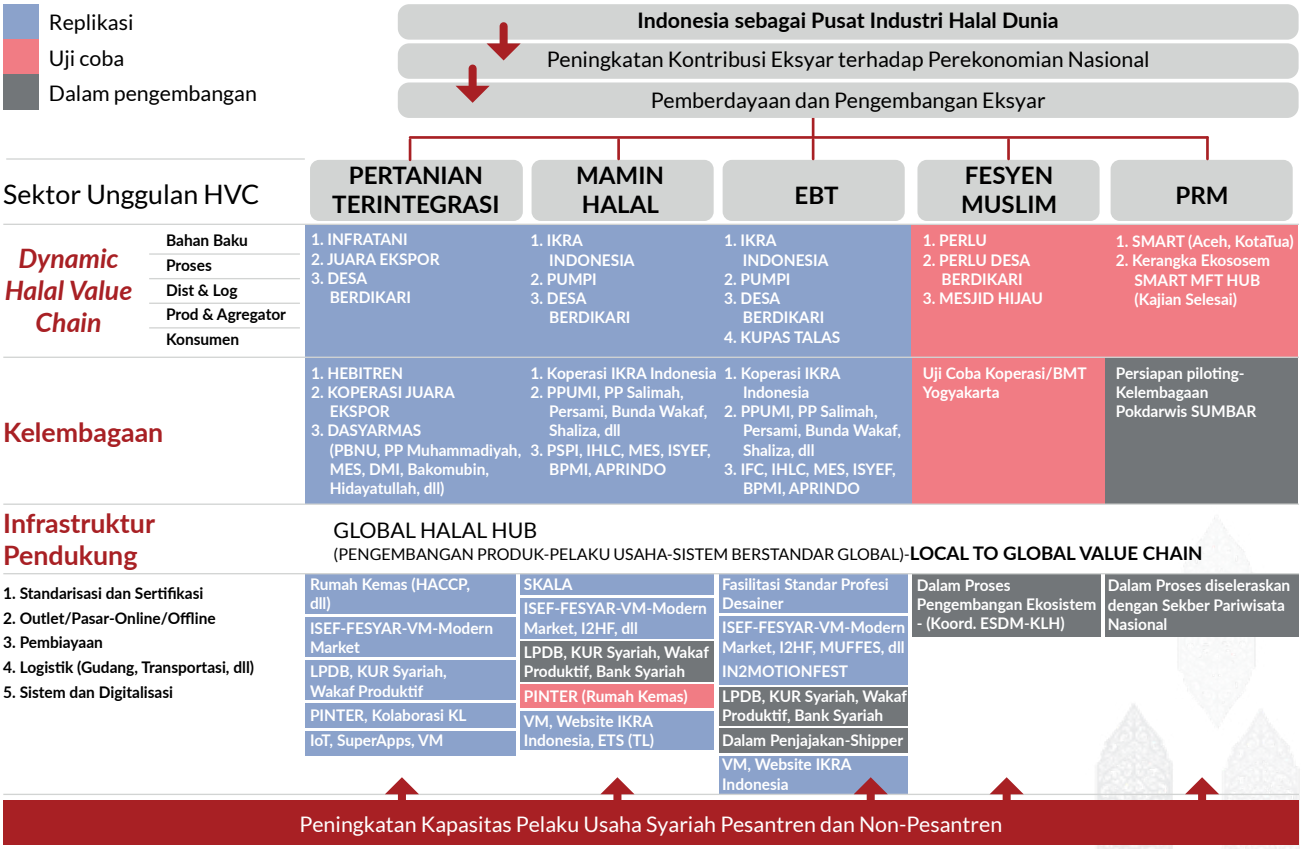

Sumber: Bank Indonesia

kelembagaan dan SDI, pembangunan *distribution center* dan *center of excellence* (pusat kajian bersama), dukungan logistik dan jaringan, pasar *offline* dan *online* salah satunya melalui virtual market seperti alifmart online (https://alifmart.online) dan e-*commercial* yang lain.

Ekosistem *Halal Value Chain* sudah mulai lengkap terbentuk dimana Bank Indonesia membangun pengembangan ekosistem *halal value chain* dari hulu ke hilir sehingga menciptakan stimulus pihak lain untuk masuk dan bergabung. Sebagai contoh pada salah satu program *Integrated Farming with Technology and Information* (INFRATANI), dimana penguatan ekosistem dari sisi Hulu Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur budi daya berbasis *Internet of Things*, *distribution center*, pengembangan *virtual market*, pelatihan dan pendampingan di 65 ponpes yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Solo, Lampung, Riau.

Upaya perluasan budidaya ditujukan untuk mendapatkan skala ekonomi tertentu untuk meningkatkan daya saing produk ke pasar modern.

Tabel 3.1. Sebaran Ekosistem *Halal Value Chain* Program INFRATANI

No	Mitra Strategis	Komoditas	Jenis Teknologi	Wilayah	Jumlah pesantren binaan	Nama Ponpes Binaan
1	Pesantren Al-Ittifaq	Melon	Greenhouse Hortikultura	Jawa Barat	25	Ponpes Al Hikamussalafiyah, Ponpes Al Qodiryah, Ponpes Baitunnajah, Ponpes Al Musthafa, Ponpes Minatul Huda, Ponpes Nurussalam, Ponpes Cadang Pinggang, Ponpes Al Mizan, Ponpes Nurul Hidayah, Ponpes Riyadlul Hidayah, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Al Istiroq, Ponpes Nurul Umma, Ponpes Banu Mansur, Ponpes Al Musri, Ponpes Assafeiyah, Ponpes Hidayatul Mubtadiin, Ponpes Nurul Fatta, Ponpes Al Muhajirin, Ponpes Banyulana, Ponpes Jamanis, Ponpes Al Kautsar, Ponpes Nurul Falah, Ponpes Bustanul Uluum, Ponpes An Najatain
				Riau	7	Ponpes Darul Arofah, Ponpes At Thohriyah, Ponpes Al Amin Dumai, Ponpes Darul Huda Pelalawan, Ponpes Ibnu Sina Siak, Ponpes Yazid Bonai, Ponpes Daarul Qur'an Darussalam
				Lampung	14	Ponpes Nurul Fatah, Ponpes Al Hidayat, Ponpes Hidayatul Mubtain, Ponpes Darul Islam, Ponpes Minhadlul Uluum, Ponpes Al Mujaddid, Ponpes Nurul Ikhlas, Ponpes An Nur, Ponpes Darul Amal, Ponpes Matlaul Anwar, Ponpes Roudhotul Sholihin, Ponpes Ushuludin, Ponpes Darul Ulum, Ponpes Al Amin
				Solo	5	Ponpes Putri Ar Ruqoyyah, Ponpes Daarul Qur'an, Ponpes Darul Hasan, Ponpes Ta'mirul Islam, Ponpes Kyai Ageng Selo
				DIY	4	Ponpes Madania, Ponpes Darul Qur'an Wal Irsyad, Ponpes Nurul Ummah, Ponpes Hidayatul Mubtadiien
2.	Pesantren Al-Ittifaq	Cabai	Greenhouse	Jawa Barat	7	Ponpes Al Amin, Ponpes Al Mashum, Ponpes Al Jihad, Ponpes Al Ma'ruf, Ponpes Asyariatul Ulum, Ponpes Nurul Huda, Ponpes As Sururon
				Tangsel & Banten	3	Ponpes Ainurrohmah, Ponpes Roudhotul Ikhwan, Ponpes Roudhotul Ihsan Lebak

Sumber: Bank Indonesia

Penguatan ekosistem dari sisi pembiayaan didukung oleh PT. Bank Syariah Indonesia senilai Rp 2,1 milyar per akhir tahun 2022 untuk petani dan ponpes, LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) - Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp 12 milyar untuk dukungan biaya *working capital* serta dana PKBL BUMN sebesar Rp 5,2 miliar untuk 37 petani. Ekosistem ini di-*lead* oleh HEBITREN Jawa Barat dengan Ponpes yang juga bertindak sebagai *offtaker* yaitu Ponpes Al Ittifaq. Penguatan ekosistem lainnya merupakan kontribusi LPDB - Kemenkop yaitu penguatan *learning center*, penguatan transportasi dari Kementerian Pertanian, dan penguatan jaringan listrik dari PLN untuk kestabilan mesin listrik IOT, serta penguatan pasar melalui jaringan ritel modern, termasuk alifmart online (https://alifmart.online).

Berbagai dukungan, sinergi dan akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, secara perlahan menuju proses terbentuknya ekosistem HVC yang semakin baik dan lengkap. Berbagai program pengembangan ekosistem HVC menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis Bank Indonesia yang bersinergi dengan KNEKS dan pihak lainnya. Program pengembangan ini ditempuh baik pada pelaku usaha syariah di pesantren, maupun non pesantren. Pada sisi hulu, pengembangan model bisnis dan *piloting* terus dilakukan pada sektor pertanian, sebagai bagian dari ekosistem sektor makanan halal. Dalam mempersiapkan rantai nilai di sisi hilir, penguatan dilakukan melalui program IKRA Indonesia untuk mempersiapkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas usaha syariah dengan produk siap memasuki pasar global dan menggantikan produk substitusi impor. Melalui IKRA Indonesia, pelaku usaha syariah memperoleh perluasan akses pasar dan akses pembiayaan. Selama 2022, Bank Indonesia mendukung perluasan akses pasar dengan mengadakan *event* atau berpartisipasi dalam berbagai promosi perdagangan dan *business linkage* baik di dalam maupun luar negeri.

Kepastian pengelola sumber daya dan ekosistem yang sudah terbentuk, memudahkan institusi penyedia pembiayaan untuk berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem. Fasilitasi akses pembiayaan dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan baik komersil dan sosial. Di tahun 2022, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM memberikan pembiayaan dengan skema syariah. Pembiayaan syariah LPDB KUMKM dimulai dari sisi hulu, yaitu pembelian bibit, pupuk, pembangunan rumah bibit, penyediaan penambahan perlengkapan saprodi dan *greenhouse*; sampai hilir, yaitu pengemasan dan gudang, serta sarana transportasi untuk mendukung distribusi dan pemasaran. Skema pembiayaan syariah terdiri dari skema mudharabah dan murabahah. Model bisnis pembiayaan syariah yang dikembangkan efektif berperan sebagai tahapan sebelum pelaku usaha syariah mengakses pembiayaan komersial syariah, seperti KUR Syariah.

Terdapat tantangan dalam memastikan keberhasilan program sebagai lokomotif pengembangan ekosistem secara berjamaah. Belum terdapatnya pemahaman yang sama antara K/L atau otoritas terkait, asosiasi, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha syariah dalam penguatan ekosistem *halal*

value chain sebagai target pemberdayaan ekonomi syariah merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang intensif hingga terbentuk manajemen yang baik untuk pengelolaan unit usaha lebih lanjut. Selain itu, upaya untuk membangun skala ekonomi yang besar hanya dapat dilakukan melalui penyatuan unit-unit usaha antar pelaku usaha. Namun proses integrasi pelaku usaha tidak mudah, salah satu faktornya adalah antar pelaku usaha masih memandang sebagai kompetitor (tantangan berjamaah), sehingga diperlukan satu skema insentif yang tepat agar para pelaku usaha dapat berkolaborasi secara erat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia secara optimis akan terus melakukan penguatan pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan berbagai program untuk mendukung terbentuknya ekosistem yang lebih lengkap dan luas.

Penguatan Program INFRATANI dan JUARA EKSPOR Pada Sektor Pertanian

Melanjutkan program pada tahun sebelumnya, penguatan program INFRATANI diutamakan pada penyediaan sumber-sumber daya baik lahan maupun sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan input yang produktif dan berkelanjutan. Tahun 2022 program INFRATANI diperluas implementasi dan wilayahnya dengan melibatkan juga Kelompok Tani Wanita (KWT) serta mulai bermitra dengan pondok pesantren yang berada di Indonesia Timur yaitu Maluku. Diharapkan perluasan wilayah program INFRATANI di Indonesia Timur dapat meningkatkan kapasitas produksi dan dapat membentuk hub penjualan baru di sektor pertanian hortikultura Timur Indonesia.

Program Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor (JUARA EKSPOR) merupakan pengembangan program INFRATANI berbasis komunitas dengan orientasi pasar global. Sesuai dengan *tagline*-nya, program ini dirancang sebagai respon untuk menangkap peluang permintaan pasar global terhadap hasil pertanian organik yang mencapai 100 miliar dolar AS, namun di satu sisi masih terdapat lahan pertanian organik potensial di Indonesia yang belum dioptimalkan dan tersertifikasi. Program pengembangan ekosistem Juara Ekspor mulai diinisiasi sejak tahun 2020 dengan berfokus pada komoditas hortikultura ekspor khususnya cabai merah dan jahe merah untuk pasar eskpor.

Gambar 3.3. Sebaran Mitra Program INFRATANI

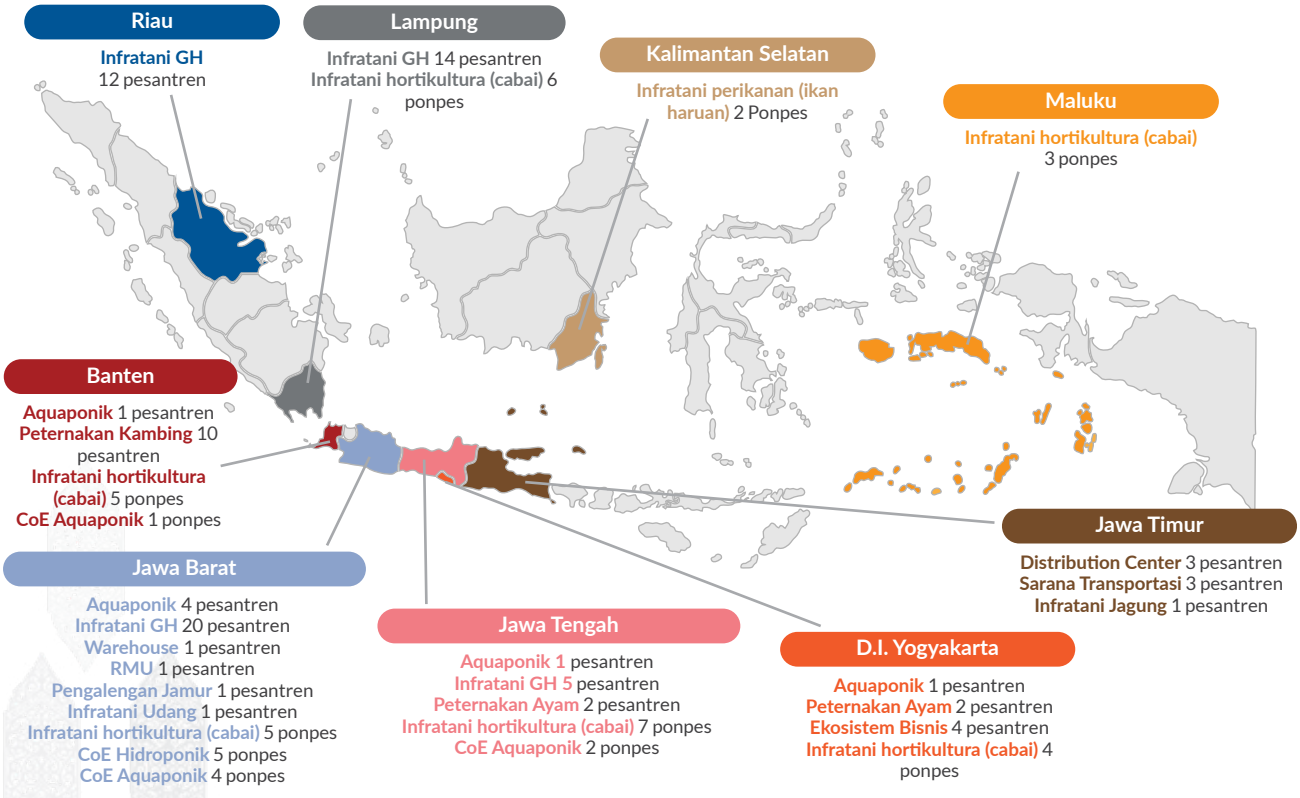

Sumber: Bank Indonesia

Program INFRATANI sebagai program ekosistem *halal value chain* berbasis pertanian terintegrasi bagi pesantren telah secara konsisten dikembangkan oleh Bank Indonesia. Tanggal 5 Februari 2022 Gubernur Bank Indonesia meresmikan program penguatan ekosistem *halal value chain* berbasis pertanian terintegrasi bagi pesantren di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Solo, Jawa Tengah yang juga dihadiri secara fisik oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Kementerian Agama dan Ketua Hebitren, serta anggota Hebitren di seluruh Indonesia secara virtual.

Program Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor (JUARA EKSPOR) mengedepankan kerja sama dengan *off-taker* yang memiliki jaringan pasar halal global. *Off-taker* tersebut tidak hanya bertanggung jawab untuk proses *marketing* kepada *potential market*, tetapi juga di proses distribusi dan logistik, yang mencakup penyimpanan, transportasi, pengemasan dan pemberian label. Selain itu, *off-taker* juga berkontribusi di sisi produksi melalui pendampingan dan pelatihan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh *buyer*. Sementara itu, Bank Indonesia dan *stakeholders* terkait lainnya memberikan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, akses pembiayaan dan bantuan teknis kepada pesantren yang menjadi produsen utama komoditas/produk.

Penguatan pada sektor makanan dan fesyen melalui Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia

Penguatan sektor muslim fesyen serta sektor makanan dan minuman halal melalui penguatan program IKRA Indonesia. Keterlibatan pelaku usaha syariah yang menjadi anggota IKRA Indonesia dalam berbagai kegiatan di dalam dan luar negeri serta semakin luasnya kolaborasi program dengan berbagai Kementerian dan/atau Lembaga dan semakin bertambah anggota IKRA Indonesia (saat ini jumlah anggota IKRA sebanyak 669 pelaku usaha yang tersebar di 46 KPw DN), maka penguatan sektor fesyen muslim maupun sektor makanan dan minuman halal dilakukan dengan penguatan di program IKRA Indonesia (Gambar 3.5).

Penguatan program IKRA Indonesia ditempuh untuk menjaring pelaku usaha syariah dengan produk halal berkualitas dan premium dari seluruh Indonesia. Dimulai dari proses pendaftaran seleksi calon anggota IKRA Indonesia yang semula hanya diperuntukan bagi pelaku usaha syariah binaan Bank Indonesia, menjadi terbuka luas bagi masyarakat umum. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan Dewan IKRA Indonesia periode 2022-2024 dengan menggaet para ahli dan profesional yang memiliki pandangan yang sama dengan visi program IKRA. Tugas utama Dewan IKRA

Gambar 3.4. Model Bisnis Program Juara Ekspor

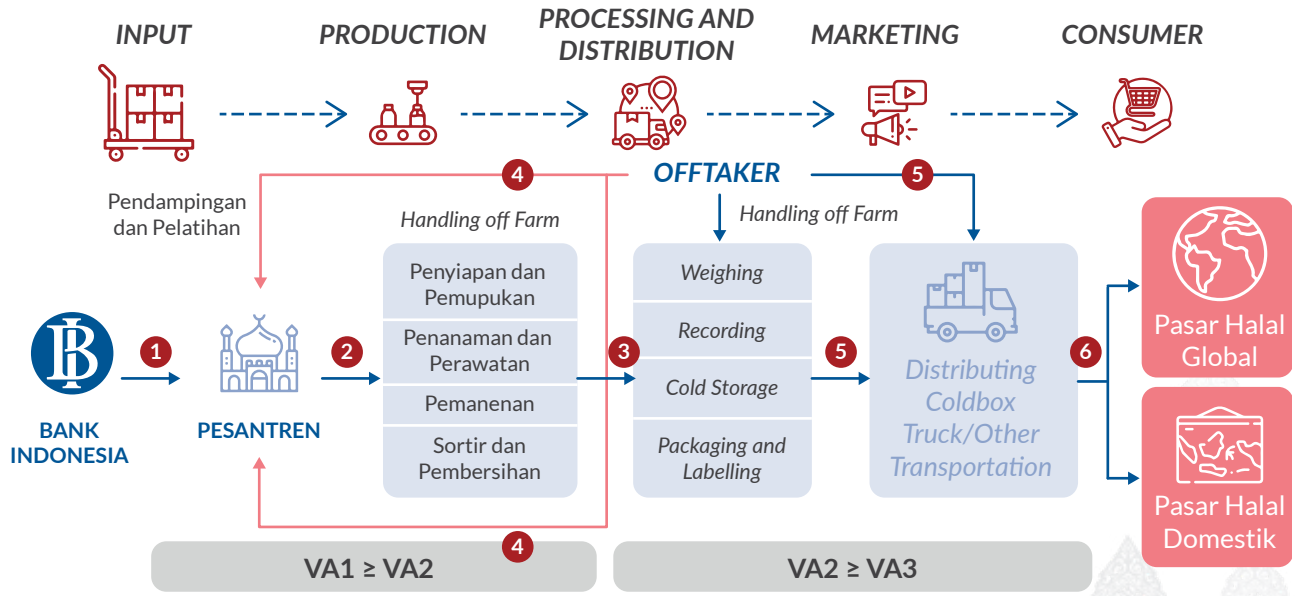

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.5. Program IKRA Indonesia

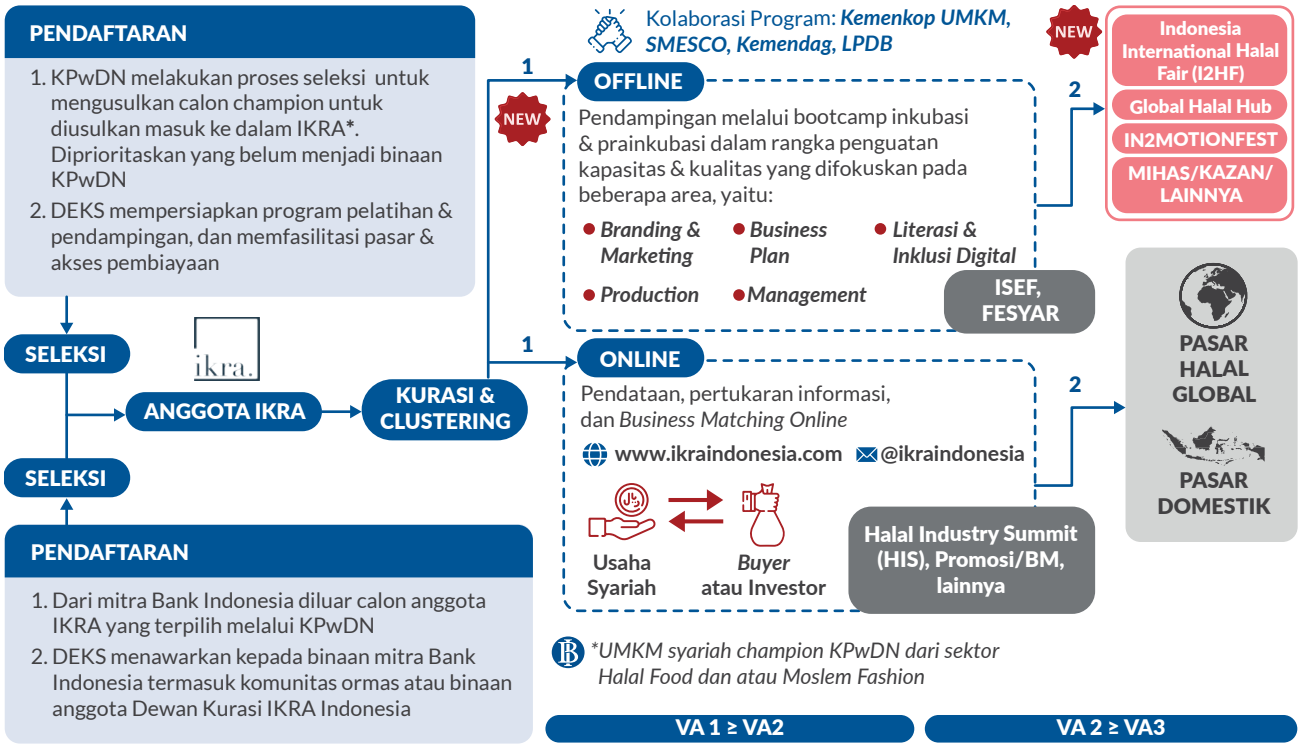

Sumber: Bank Indonesia

adalah melakukan proses seleksi dan kurasi usaha syariah sesuai kriteria, serta memberikan masukan untuk keberlangsungan program. Penguatan terhadap pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia dilakukan melalui kegiatan *bootcamp* pra inkubasi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui pendampingan, serta *bootcamp* inkubasi bagi anggota yang telah disaring melalui *sales pitching* yang dinilai oleh tim penilai dari Dewan IKRA Indonesia, Bank Indonesia dan aggregator, serta lembaga pembiayaan syariah. Pada 2022 penyelenggaraan *bootcamp* IKRA dilakukan melalui kerja sama dengan Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia (PSPI) untuk sektor makanan halal, dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) untuk sektor *fashion*. Pada 2023 akan dilakukan program pendampingan melekat bagi anggota IKRA Indonesia 2022 yang lolos seleksi *bootcamp*, untuk persiapan ekspor produk halal. Pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia juga akan berperan dan berkontribusi dalam rangkaian kegiatan IN2MOTIONFEST serta dalam ekosistem Global Halal Hub.

Penguatan program dilakukan melalui dukungan perluasan pasar dan akses pembiayaan serta *business linkage*. Dukungan tersebut diberikan kepada anggota IKRA Indonesia dengan mengikuti berbagai *event* promosi perdagangan, *showcasing* produk pelaku usaha syariah, *business meeting/matching* baik di dalam maupun di luar negeri. Selama tahun 2022, Bank Indonesia mengikutsertakan ratusan anggota IKRA Indonesia dalam berbagai kegiatan, diantaranya World Expo Dubai 2022, Muffest, Halal Center Indonesia, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) dan The 1st International Conference on Women dan Sharia Community Empowerment (1st ICWSC 2022).[38]

38 Lihat Tabel xx pada Lampiran

Gambar 3.6. Proses *Bootcamp* IKRA Indonesia

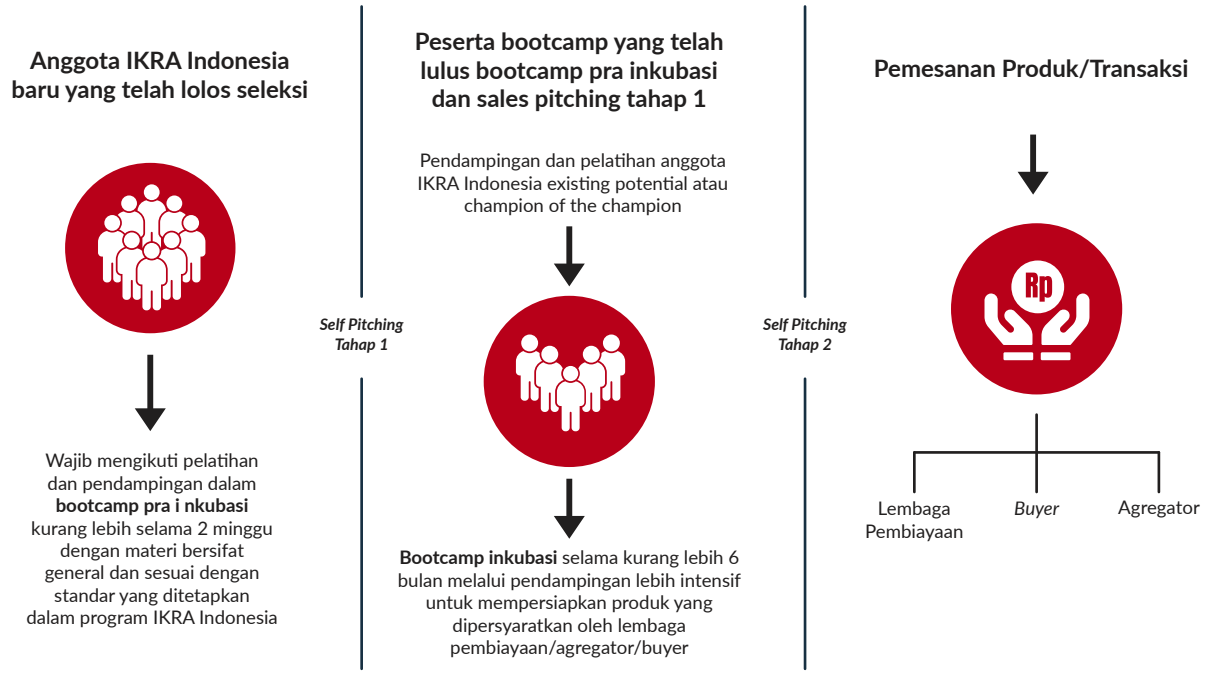

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.7. Sebaran Wilayah IKRA Indonesia

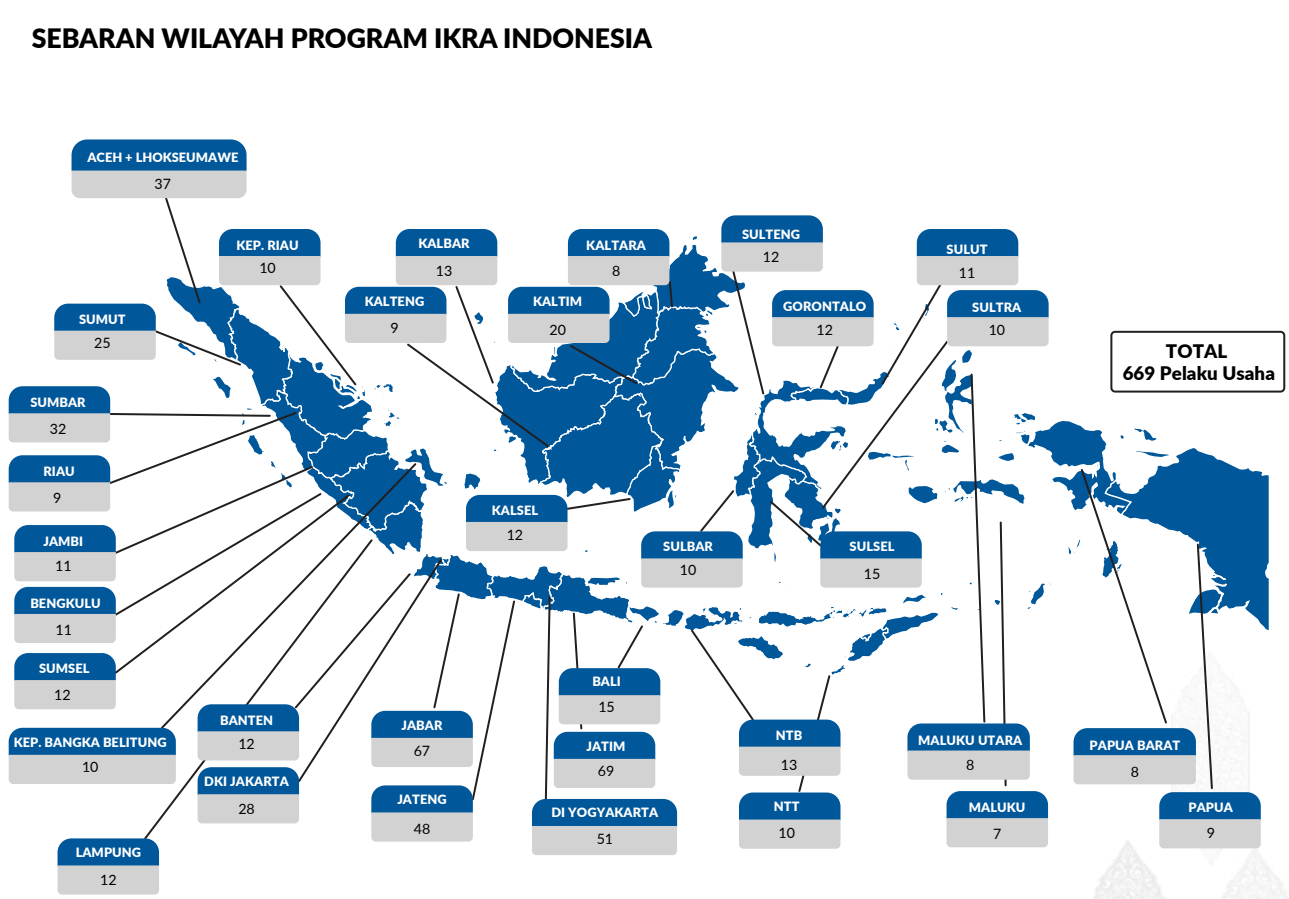

Sumber: Bank Indonesia

World Expo Dubai 2022

Halal Center Indonesia (HCI)

Malaysia International Halal Showcase (MIHAS)

Model Penguatan Ekosistem Jaminan Produk Halal

Dalam ekosistem rantai nilai halal, sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian jaminan halal kepada masyarakat. Melalui Undang-undang No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), negara mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk halal atau mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk apabila menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sertifikasi halal ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi masyarakat, tetapi juga menambah daya saing produk seiring dengan semakin meningkatnya permintaan produk halal dan sehat di tingkat global.

Bank Indonesia terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta berbagai pihak untuk mengakselerasi sertifikasi halal melalui implementasi program Sertifikasi Makanan dan Minuman Halal (SKALA). Pada tahun 2021, BPJPH meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2022 BPJPH bekerja sama dengan K/L terkait menargetkan 10 juta produk tersertifikasi halal dan pembentukan 100.000 pendamping halal. Sejalan dengan hal tersebut, melalui program SKALA (Sertifikasi Makanan dan Minuman Halal), Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak mengakselerasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha melalui pendekatan Asosiasi, Perguruan Tinggi dan K/L lainnya.

Upaya memberikan kepastian jaminan halal kepada masyarakat juga dilakukan melalui wadah KNEKS dengan menetapkan program Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman dan Sehat). Keberadaan zona kuliner halal, aman dan sehat turut mendukung perkembangan ekonomi**.** Pada perkembangannya kehalalan tidak hanya terkait budaya atau agama, akan tetapi sudah menjadi bagian dari pasar global untuk memperluas segmentasi pasar khususnya di bidang wisata kuliner. Dengan dibentuknya kawasan kuliner halal, diharapkan industri mamin halal dapat memberikan pelayanan yang mampu menjamin makanan dan minuman yang dikonsumsi memenuhi kehalalan, kesehatan dan kenyamanan bagi pengunjung. Zona KHAS diharapkan tidak hanya sebagai tempat makan semata, tetapi juga dapat menjadi salah satu tujuan wisata ramah muslim serta turut mendorong literasi halal dan ekonomi syariah. Pada bulan Desember 2021, KNEKS bersama Kementerian Kesehatan, BPJPH, Kementerian Koperasi & UKM, menyelenggarakan acara seremoni stikerisasi aman dan sehat menuju Zona KHAS di Rasuna Garden Food Street sebagai penanda lokasi *pilot project* pertama dalam pembentukan Zona KHAS[39]. Dalam rangka mengakselerasi program tersebut, selama tahun 2022 Bank Indonesia turut melakukan pengembangan Zona KHAS di Makassar, bekerja sama dengan UIN Alauddin Makassar dan Universitas Muslim Indonesia serta mendirikan kantin halal bekerja sama dengan Institut Agama Islam Tazkia, Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Padjajaran.

Sejalan dengan sinergi program Pemerintah, Bank Indonesia terus melakukan akselerasi sertifikasi halal melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerja sama dengan asosiasi telah dilakukan diantaranya dengan PPUMI, PP Salimah, PERSAMI, Shaliza, WITA dan Bunda Wakaf untuk melakukan akselerasi sertifikasi halal bagi para UMKM binaan organisasi tersebut. Sebanyak lebih dari 1500 pelaku usaha telah mendaftar untuk mengikuti rangkaian pelatihan yang dilaksanakan selama bulan Juni – Agustus 2022. Adapun selain dengan pelatihan sertifikasi halal, para pelaku usaha binaan juga mendapatkan pelatihan mengenai sistem pembayaran digital, peningkatan kualitas produk dan kemasan, dan pelatihan pencatatan keuangan. Sampai dengan 16 November 2022, sudah terdapat 906 sertifikat halal yang telah terbit sebagai hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, kerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi juga terus dilakukan dengan penguatan halal *center* dalam rangka menguatkan SDM Halal serta pemberian pendampingan kepada pelaku usaha. Sampai dengan tahun 2022, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan UGM, UIN Jakarta, UIN Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Syiah Kuala, dan Politeknik Negeri Batam.

Dalam mengakselerasi sertifikasi halal, Bank Indonesia bekerja sama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku perangkat

39 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (www.kneks.go.id)

utama sistem JPH dalam menetapkan fatwa terkait dengan kehalalan suatu produk. Bank Indonesia bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI melakukan *workshop* bagi Komisi fatwa provinsi untuk mendorong akselerasi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) dan memfasilitasi pertemuan antara Komisi Fatwa MUI dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) di Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan *workshop* tersebut yaitu: (i) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan penguatan kinerja Komisi Fatwa MUI dalam bidang penetapan produk baik di tingkat pusat dan provinsi dalam rangka percepatan pembahasan produk halal sesuai dengan regulasi yang ada; (ii) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan penguatan kinerja Komisi Fatwa MUI dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, khususnya terkait pelaporan hasil pendampingan proses produk halal bagi UMKM yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare*; (iii) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan penguatan kinerja pelaksanaan sidang produk halal Komisi Fatwa MUI dalam rangka implementasi percepatan pembahasan produk halal baik melalui jalur regular dan *self-declare*.

Dukungan Bank Indonesia terhadap Pariwisata Ramah Muslim (PRM)[40]

Di tengah aktivitas pariwisata yang semakin meningkat, Bank Indonesia bersinergi dalam mendukung kinerja sektor pariwisata ramah muslim (PRM) di Indonesia. Dalam mendukung sektor pariwisata, dengan semangat berjamaah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Enhaii Halal Tourism Center Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung melakukan riset terhadap kajian model bisnis PRM. Hasil dari kajian mencakup rekomendasi rencana uji coba model bisnis pengembangan pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat. Pariwisata Ramah Muslim (PRM) adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan pengalaman wisatawan muslim (EHTC, 2022). Pada kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 bulan Oktober 2022 telah dilaksanakan rangkaian (5x) *Forum Group Discussion* (FGD) akselerasi pengembangan PRM yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Gambar 3.8. Sertifikasi Halal Reguler dan *Self-Declare*

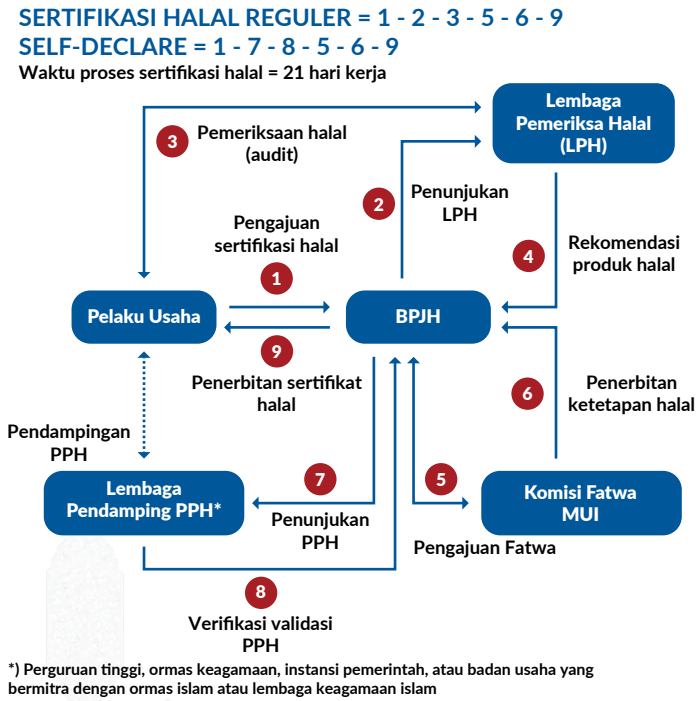

Aspek	Reguler	Self-Declare
Jenis produk	Semua jenis produk	Khusus produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah terjamin kehalalannya
Alur Proses	Melibatkan BPJPH - LPH - Komisi Fatwa	Tidak melibatkan LPH, tetapi Lembaga Pendamping PPH
Kategori pelaku usaha	Semua kelompok usaha	Khusus untuk usaha mikro dan kecil
Biaya yang ditanggung pelaku usaha	Sesuai ketetapan tarif	Gratis

Sumber: Bank Indonesia

40 Lihat "Bab 5 Sektor Unggulan Ekonomi Syariah: Pariwisata Ramah Muslim" untuk elaborasi lebih lanjut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Barekraf, Kementerian Dalam Negeri, ME-KNEKS, DSN-MUI, Kemenag - BPJPH, Asosiasi/ pelaku industri pariwisata ramah muslim di Indonesia (PPHI, PHRI dan Global Manajemen Halal), serta EHTC-Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Rangkaian FGD tersebut menghasilkan resolusi strategi pengembangan PRM Indonesia yang telah disepakati dan ditandatangani oleh lintas K/L, asosiasi, dan para pelaku usaha di sektor pariwisata ramah muslim. Berdasarkan resolusi tersebut, disepakati bahwa Secara singkat resolusi tersebut bahwa dalam mewujudkan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia yang dapat meningkatkan devisa dan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan: 1) Penguatan regulasi terkait dengan panduan penyelenggaraan dan instrumen penilaian; 2) Penciptaan inovasi dan kreasi produk halal; 3) Peningkatan kualitas kunjungan wisatawan; dan 4) Peningkatan indeks daya saing destinasi, industri dan performa kelembagaan. (pokok-pokok resolusi tersebut terdapat pada Boks 5.1 Resolusi Pariwisata Ramah Muslim (7 Oktober 2022). Selanjutnya di tahun 2023, akan dilakukan dengan memperkuat uji coba dukungan penguatan ekosistem pada hasil kajian PRM dengan tujuan wisata di Sumatera Barat diantaranya membangun infrastruktur untuk mendukung pengembangan program ini.

3.2.2. Penguatan Ekonomi dan Bisnis Pondok Pesantren

Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha Syariah Pondok Pesantren

Program pengembangan usaha pondok pesantren Bank Indonesia secara nasional hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 711 pondok pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatan jumlah pesantren yang dikembangkan sebanyak 153 pesantren atau sebesar 27,42%. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, jumlah pondok pesantren mencapai lebih dari 37 ribu dengan jumlah santri sebanyak lebih dari 4,7 juta orang, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk mendorong potensi ekonomi pondok pesantren yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

SDM pondok pesantren yang unggul, inovatif, dan berdaya saing merupakan kunci Utama dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Pondok pesantren memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia

Gambar 3.9. Peta Sebaran Pondok Pesantren Binaan 2017-2022

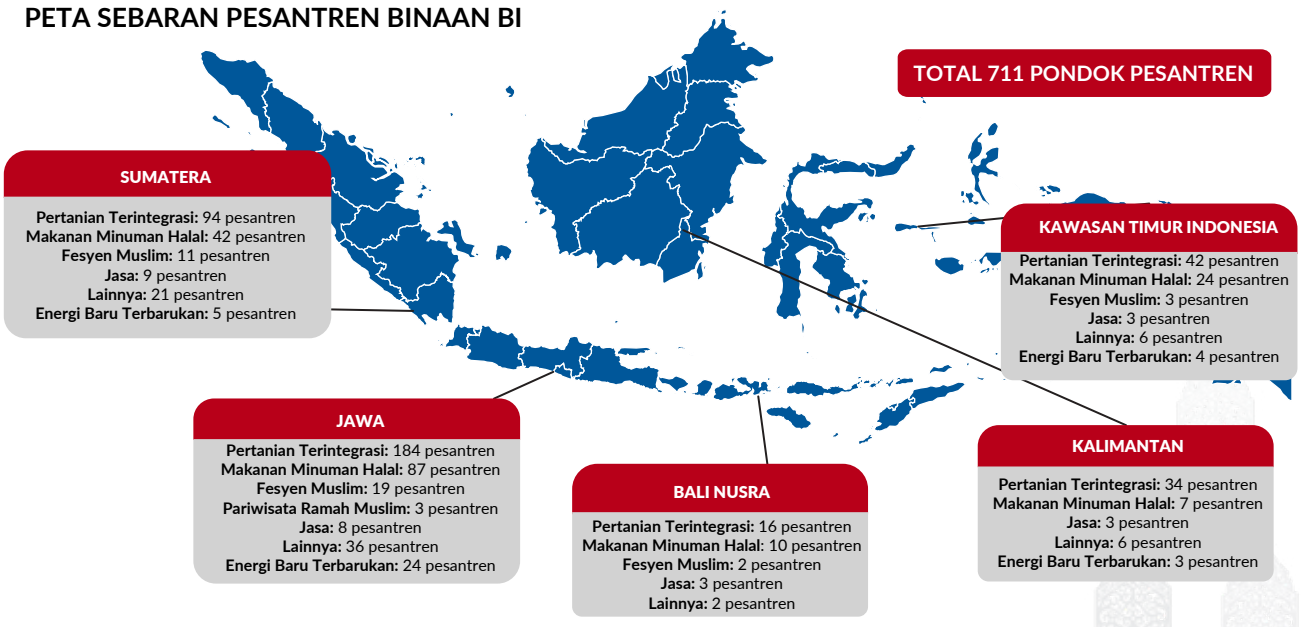

Sumber: Bank Indonesia

mengujicobakan berbagai macam model bisnis usaha syariah di pondok pesantren yang bertujuan (i) mendorong penguatan manajemen dan operasional usaha melalui penanaman nilai *entrepreneurship* bagi para santri dan pengelola pesantren untuk mencapai kemandirian dan (ii) membentuk *community economic hub* yang dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan *(center of excellence)* serta inkubasi bisnis dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembentukan *community economic hub* bertujuan agar kemandirian pesantren tidak hanya berdampak positif bagi pesantren, tetapi juga oleh masyarakat sekitar sehingga terbentuk satu kesatuan ekosistem yang saling terkait dan berpotensi terbukanya akses pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2022 Bank Indonesia mengembangkan tiga model bisnis sebagai bentuk pelatihan kepada SDM pondok pesantren yang difokuskan pada jenis usaha yang mendukung ketahanan pangan dan upaya pengendalian inflasi. Ketiga jenis model bisnis tersebut yaitu model bisnis makanan olahan kedelai, model bisnis perikanan air tawar, dan model bisnis budidaya burung puyuh. Pengembangan ketiga model bisnis tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain yaitu, tingginya potensi pasar, kemudahan pengembangan, kemudahan replikasi, dan potensi pengurangan biaya operasional pondok pesantren. Pengembangan model bisnis usaha pesantren diharapkan dapat menjadi *repository knowledge* sehingga dapat dengan mudah direplikasi oleh unit usaha pondok pesantren di tempat lain. Model bisnis yang baik diharapkan juga mampu menekan biaya operasional pondok pesantren sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pengembangan model bisnis yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada pondok pesantren difokuskan mulai dari sisi hulu hingga hilir. Pada sisi hulu, model bisnis difokuskan untuk menyediakan bahan baku usaha, baik melalui skema budidaya ataupun kemitraan. Pada sisi produksi, pesantren diberikan pendampingan baik *hardskill* maupun *softskill* usaha, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat memenuhi ekspektasi pasar yang kemudian dilanjutkan dengan

Gambar 3.10. Pengembangan Model Bisnis Pemberdayaan Usaha Syariah Tahun 2022

Sumber: Bank Indonesia

pendampingan pasca produksi. Sisi pemasaran didorong melalui inisiasi kerja sama *business linkage* dengan UMKM dan korporasi serta optimasi teknologi pemasaran digital.

Teknologi pemasaran digital pada pondok pesantren didorong melalui peningkatan jumlah pengguna virtual market pondok pesantren. Menindaklanjuti perluasan pengguna yang telah dilakukan pada tahun 2021 di wilayah Jawa Barat, tahun 2022 Bank Indonesia dan Koperasi Al-Ittifaq, kembali melakukan perluasan di wilayah Lampung bekerja sama dengan HEBITREN Lampung dengan kepesertaan 21 pesantren. Hal ini diharapkan dapat mengoptimasi penjualan produk pondok pesantren antar wilayah.

Penguatan SDM pondok pesantren juga diberikan dalam bentuk pengenalan proses pembenahan pembukuan yayasan pondok pesantren yang mengacu pada pedoman akuntansi pondok pesantren. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pada yayasan pondok pesantren, pada tahun 2017 Bank Indonesia bekerja sama dengan IAI telah menerbitkan pedoman akuntansi pondok pesantren yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 yang kemudian disesuaikan mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dan PSAK 112. Pedoman akuntansi pesantren tersebut dapat diimplementasikan pada pondok pesantren yang memiliki unit usaha yang tidak terpisah dari entitas yayasan pondok pesantren. Sedangkan unit usaha pondok pesantren yang memiliki badan usaha yang terpisah dari yayasan pondok pesantren dapat menggunakan pedoman akuntansi yang telah ada unit badan hukum lainnya (koperasi/PT/CV/ perusahaan lainnya). Dengan menerapkan pedoman akuntansi pesantren, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren dalam mengoptimalkan aset pesantren sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan peningkatkan kualitas, meningkatkan terwujudnya tata kelola di lingkungan pesantren, serta meningkatkan eksistensi lembaga pesantren sebagai lembaga yang kredibel.

Untuk memudahkan mengaplikasikan pedoman akuntansi pondok pesantren, Bank Indonesia dan *stakeholder* terkait meluncurkan aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI). Pada tahun 2022, dilakukan perluasan penggunaan SANTRI pada 7 (tujuh) pondok pesantren binaan BI di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. Mempertimbangkan bahwa proses pencatatan keuangan merupakan hal yang fundamental, maka

Gambar 3.11. Model Bisnis Umum Pemberdayaan Usaha Syariah di pesantren

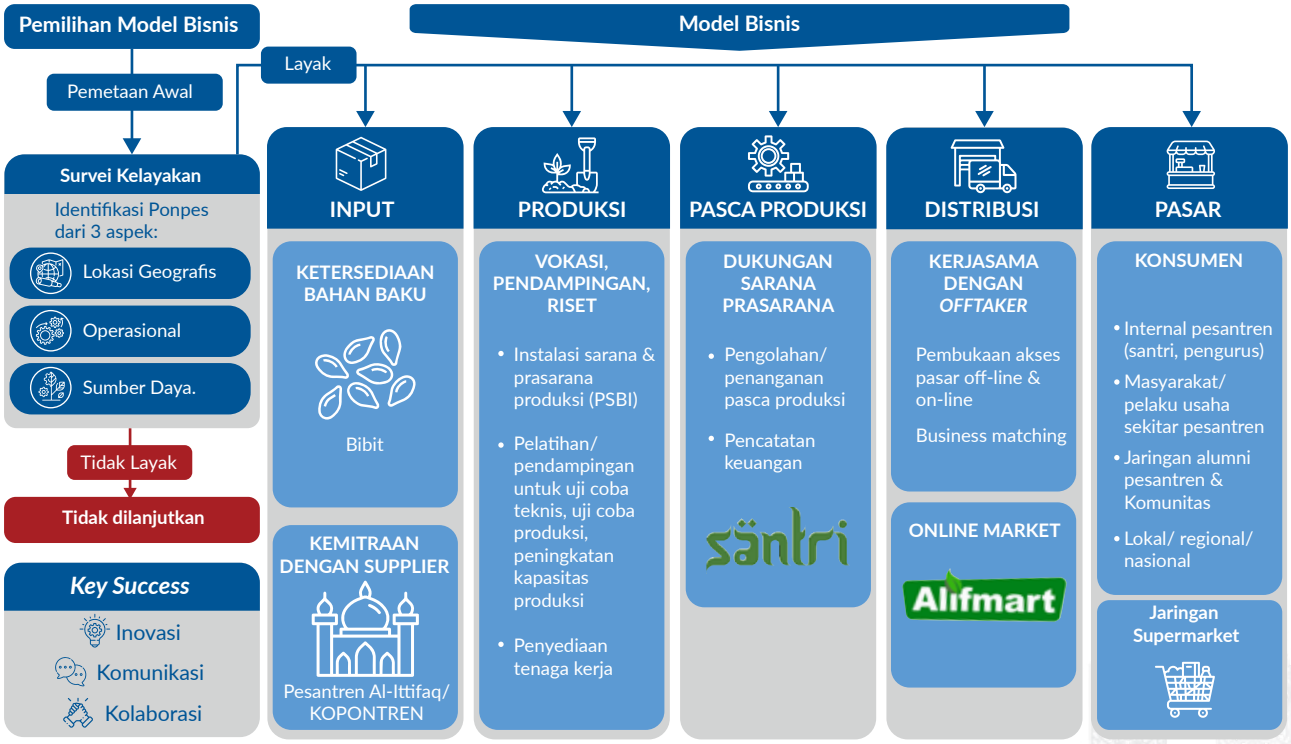

Sumber: Bank Indonesia

pada tahun 2023 akan dilakukan penguatan sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Agama sehingga proses perluasan penggunaan pedoman akuntansi pesantren dapat lebih diakselerasi.

Perwujudan *Center of Excellence* dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren, dilakukan melalui penerbitan beberapa buku sebagai bentuk *repository knowledge*. Buku yang diterbitkan pada 2022 memuat tahap pelaksanaan model bisnis yang telah diujicobakan pada 2021. Hal ini ditujukan untuk memudahkan proses replikasi di berbagai macam pondok pesantren. Beberapa buku yang diterbitkan pada 2022, yaitu (i) buku "Direktori Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Tahun 2022" yang memuat berbagai program pengembangan yang telah dilakukan di pesantren, (ii) buku "Model Bisnis Usaha Konveksi di Pesantren", dan (iii) buku "Model Bisnis Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Energi Terbarukan. Penerbitan buku tersebut merupakan salah satu bentuk *repository knowledge* yang memuat (i) studi kelayakan bisnis bagi pondok pesantren yang akan menjalankan bisnis konveksi dan menerapkan energi terbarukan, (ii) pengalaman kesuksesan unit usaha pesantren, (iii) faktor keberhasilan bisnis konveksi dan penentu optimalisasi *cost reduction* dengan penerapan energi terbarukan, dan (iv) faktor-faktor penting (*critical points*) dalam memulai usaha konveksi dan penerapan energi terbarukan di pesantren. Berbagai informasi di atas dapat diakses melalui www.bi.go.id.

Penguatan Usaha Syariah berbasis Komunitas Masjid dan Desa melalui Pemanfaatan EBT

Program penguatan pelaku usaha syariah berbasis masjid melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) diwujudkan melalui PLTS Atap. Pemanfaatan PLTS Atap berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi berbasis masjid melalui penghematan biaya operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan emisi CO_2 yang dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Upaya *cost reduction* dan *resource efficiency* melalui pemanfaatan PLTS Atap pada usaha syariah berbasis masjid sejalan dengan fokus pengembangan sektor usaha syariah 2020-2024 yang telah dirumuskan oleh KNEKS. Dalam hal ini, upaya pemanfaatan PLTS Atap diharapkan mampu

Gambar 3.12. Skema Implementasi Program Masjid Hijau

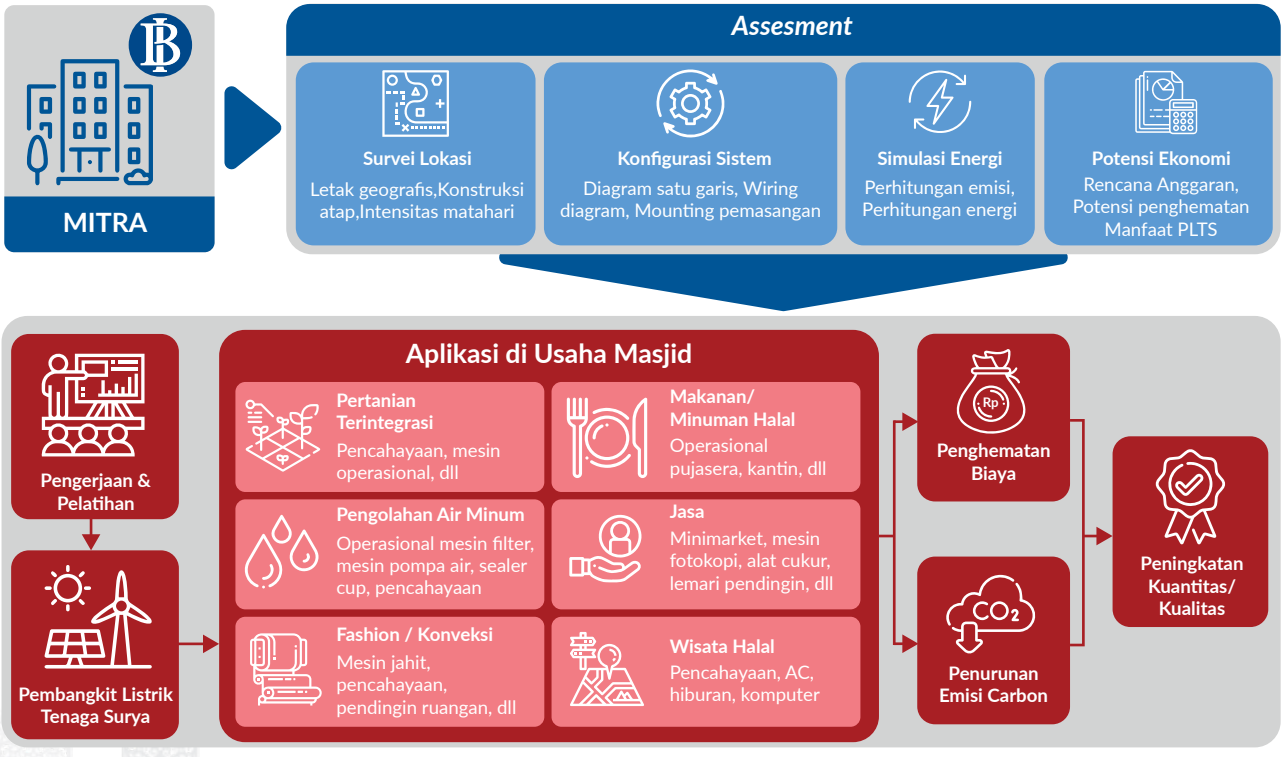

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.13. Peta Sebaran *Pilot Project* Program Masjid Hijau

Sumber: Bank Indonesia

mendorong usaha syariah berbasis masjid untuk menjaga konsistensi keberlangsungan proses bisnis dan produk yang dihasilkan, serta meningkatkan skala usaha berbasis masjid. Program ini juga ditujukan untuk menambah referensi model bisnis usaha syariah berbasis masjid yang dapat direplikasi di berbagai wilayah indonesia. Program Masjid Hijau Bank Indonesia pada tahun 2022 diimplementasikan di 12 (dua belas) masjid *beneficiaries*.

Penguatan Kelembagaan Himpunan Bisnis Pesantren (HEBITREN)

Sejak deklarasi pembentukan pada November 2019 sampai dengan 2022, HEBITREN telah dikelola secara professional dan menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Sampai periode akhir tahun 2020, telah terbentuk sembilan HEBITREN wilayah tingkat provinsi yang meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Riau, Lampung, Sulawesi Papua (Sulapa), Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pada akhir 2021, terdapat penambahan pengukuhan HEBITREN wilayah di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan NTB dan akhir tahun 2022 terdapat penambahan 8 HEBITREN Wilayah di Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Maluku Utara serta telah dikukuhkannya 28 DPD HEBITREN dan lebih dari 2.500 pondok pesantren yang tergabung dalam HEBITREN.

Pendekatan *holding* bisnis pesantren HEBITREN, secara konsisten mendorong penguatan ekosistem HVC berbasis unit usaha pondok pesantren. Penguatan ekosistem HVC melalui HEBITREN dilakukan pada sektor pertanian terintegrasi seperti tanaman pangan dan hortikultura. Seiring dengan bertambahnya jumlah kelembagaan wilayah HEBITREN, serta anggota pesantren yang bergabung, maka model pengembangan bisnis pesantren berdasarkan sektor usaha unggulan daerah akan diperluas. Hal ini dilakukan antara lain pada ekosistem pertanian hortikultura berbasis teknologi *greenhouse* di 39 pesantren yang sebagian besar tergabung dalam HEBITREN wilayah Sumatera dan Jawa dengan produk pertanian berupa sayuran dan buah hortikultura, tanaman biofarmaka, dan perikanan (akuaponik). Selain itu, penguatan jalur distribusi dan pengemasan produk telah mulai di inisiasi tahun 2022 melalui pembangunan *distribution center* dan *packaging house* di DPP Hebitren dengan fasilitasi dari Bank Indonesia. Kelembagaan HEBITREN juga diperkuat dengan terbentuknya lembaga Wakaf, Infak, Zakat, Sodaqoh Pesantren (WIZSTREN) pada 31 Januari 2022 dan pendirian Koperasi Konsumen HEBITREN pada 24 Maret 2022. Di tahun 2023, akan terus dilakukan kerja sama dalam inisiatif pengembangan usaha produktif dan mendorong keterlibatan kantor regional BI dalam membangun kerja sama dengan HEBITREN Wilayah.

Gambar 3.14. Sebaran Wilayah Hebitren

Sumber: Bank Indonesia

Program Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi (PINTER) diinisiasi untuk semakin mengoptimalkan dan memperluas pangsa pasar bagi produk unggulan pesantren. Pengembangan program dilakukan dengan membangun sistem jaringan, manajemen dan strategi pemasaran yang komprehensif, agar tercipta keselarasan antara produsen dan konsumen, serta untuk akselerasi pendukung ekosistem melalui pembangunan infrastruktur. *Piloting* program dimulai pada bulan November 2022 melalui pengembangan model bisnis jaringan bisnis ekonomi pesantren berupa pembangunan *distribution center* bekerja sama dengan DPP HEBITREN. *Distribution center* ini bertujuan sebagai pusat distribusi untuk menyimpan dan mengelola produk unggulan dari pesantren dan kemudian didistribusikan kembali kepada pesantren, pengecer, distributor, grosir atau langsung kepada pembeli akhir (Gambar 3.15).

Pemberdayaan Pesantren di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)

Pemberdayaan usaha syariah pesantren di wilayah 3T berbasis energi terbarukan (*solar panel*) dilakukan mempertimbangkan rata-rata intensitas harian radiasi sinar matahari di wilayah tersebut yang cukup besar (sekitar 4.8 kWh/m^2) yang berpotensi menghasilkan sekitar 207.9 GWp (Gigawatt-peak) listrik. Dengan intensitas radiasi sebesar itu, berpotensi besar untuk dapat dimanfaatkan menjadi listrik untuk dapat mendukung pengembangan usaha pondok

Gambar 3.15. Model Bisnis *Distribution Center*

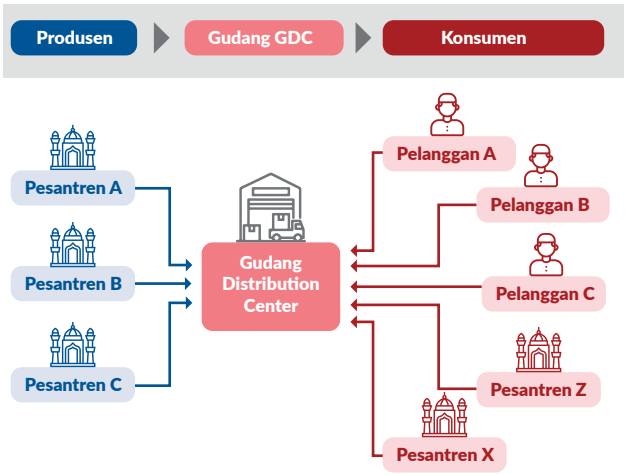

Sumber: Bank Indonesia

pesantren serta kegiatan operasional pesantren. Pada tahun 2022, pemberdayaan usaha syariah di wilayah 3T dilakukan di 3 pondok pesantren di Kepulauan Riau, Kaltara, dan Maluku. Dukungan terhadap pemberdayaan desa tertinggal, terdepan dan terluar juga dilakukan melalui riset model bisnis pemberdayaan masyarakat desa di wilayah 3T untuk implementasi *pilot project* Desa Berdikari bekerja sama dengan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSPP UMJ). Adapun riset dilakukan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara dan Pulau Paloh Sambas, Kalimantan Barat. Riset ini juga menindaklanjuti nota kesepahaman Bank Indonesia dengan Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Penguatan Pelaku Usaha Syariah Pesantren Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam pengembangan ekosistem *halal value chain*, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk menggali potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta mendorong peranan pelaku usaha syariah untuk turut andil dalam pengendalian inflasi. Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) telah berkomitmen untuk mewujudkan sinergi dan inovasi program pengendalian inflasi serta membangun ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh daerah, termasuk melalui sinergi program dengan para pelaku usaha syariah di daerah.

Sinergi program GNPIP pada tahun 2022 terus digaungkan secara masif, integratif, dan berdampak nasional, dengan mengangkat 7 (tujuh) program unggulan. Implementasi program unggulan tersebut meliputi (1) Optimalisasi anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk Operasi Pasar (OP) serta Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk menjaga daya beli; (2) Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); (3) Optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut; (4) Memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya, antara lain melalui gerakan tanam cabai di pekarangan dan implementasi replikasi *best practices* pengembangan klaster pangan secara *end-to-end*; (5) Peningkatan pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dalam rangka mendukung pengembangan klaster pangan; (6) Penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi, data dan informasi pangan; serta (7) Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pelaku usaha syariah khususnya pondok pesantren telah berperan aktif dan berkontribusi dalam implementasi berbagai program unggulan GNPIP. Hal tersebut merupakan wujud penguatan peran pelaku usaha syariah dalam memperkuat ketahanan komoditas hortikultura. Bank Indonesia telah mendorong keterlibatan 119 pondok pesantren yang tersebar di 22 provinsi, yang mencakup implementasi tiga program GNPIP yaitu gerakan tanam cabai di pekarangan, replikasi *best practices* pengembangan klaster pangan, dan peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan untuk mengembangkan komoditas hortikultura.

Dalam gerakan tanam cabai di pekarangan, Bank Indonesia telah menyalurkan bibit cabai sebanyak 139.500 *polybag* kepada 99 pondok pesantren. Kegiatan tersebut tersebar di 18 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Hasil dari budidaya cabai di lingkungan pondok pesantren tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan cabai untuk konsumsi di internal maupun lingkungan sekitar pesantren.

Gambar 3.16. Penyaluran Program Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan pada Pondok Pesantren

Sumber: Bank Indonesia

Pondok pesantren juga turut andil dalam mengimplementasikan *best practice* pengembangan komoditas hortikultura untuk mendorong produksi pangan strategis di daerah. Sebanyak 12 pondok pesantren yang terdapat di 6 provinsi (Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Gorontalo, dan Maluku) telah mengimplementasikan berbagai model bisnis *best practice* dari sisi hulu ataupun hilir, antara lain *integrated farming*, *digital farming*, penggunaan bibit unggul, pupuk organik, serta pembuatan *green house*.

Program GNPIP peningkatan pemanfaatan alsintan & saprotan juga turut diimplementasikan di pondok pesantren untuk mengakselerasi penguatan ketahanan pangan strategis di daerah. Bank Indonesia telah mendorong peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan pada 26 pondok pesantren yang tersebar di 13 provinsi. Berbagai infrastruktur pengembangan komoditas pangan strategis telah diterapkan pada pondok pesantren tersebut, antara lain berupa pemanfaatan mekanisasi pertanian, mesin hilirisasi produk turunan, mesin pembuatan pupuk organik, dan optimalisasi penerapan *digital farming*.

Tabel 3.2. Penyaluran Program Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan pada Pondok Pesantren

No	Wilayah	Jumlah Pesantren	Jumlah Bibit Cabai (*polybag*)
1	Sumatera	20	86.200
2	Jawa	30	26.850
3	Kalimantan	9	2.400
4	Balinusra	8	9.500
5	Sulampua	32	14.550
	Total	**99**	**139.500**

Sumber: -

Gambar 3.17. Implementasi *Best Practices* Komoditas Hortikultura pada Pondok Pesantren

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3.3. Implementasi *Best Practices* Komoditas Hortikultura pada Pondok Pesantren

No	Wilayah	Jumlah Pesantren	Implementasi *Best Practices*
1	Sumatera	6	*Integrated farming*, bibit unggul, pupuk organik, *green house*
2	Jawa	2	*Integrated farming*, *digital farming*
3	Sulampua	4	*Integrated farming*, *digital farming*, bibit unggul, pupuk organik, *green house*
	Total	**12**	

Sumber: -

Gambar 3.18. Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan & Saprotan pada Pondok Pesantren

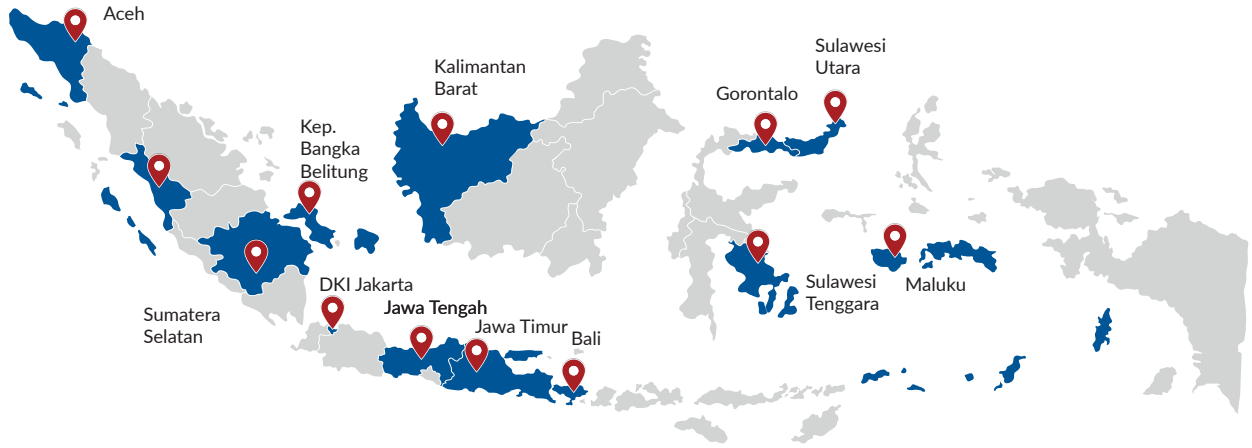

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3.4. Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan & Saprotan pada Pondok Pesantren

No	Wilayah	Jumlah Pesantren	Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan & Saprotan
1	Sumatera	15	*Hand tractor*, mesin pompa air, pupuk organic, *greenhouse aquaponic*, hidroponik, kandang ternak, kolam ikan, mesin pakan ikan, mesin hilirisasi produk pangan, toko penyangga inflasi
2	Jawa	6	*Green house*, peralatan *digital farming*, hidroponik
3	Kalimantan	1	Mesin pertanian
4	Balinusra	1	Infrastruktur pupuk organic
5	Sulampua	3	Peralatan *digital farming*, rumah kompos, sumur bor
	Total	**26**	

Sumber: -

3.2.3. Penguatan Keuangan Sosial Syariah

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Zakat yang disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerimanya berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat menopang sektor konsumsi dalam perekonomian nasional. Peran zakat dalam menopang daya beli masyarakat ini menjadi semakin penting di tengah terjadinya peningkatan tekanan inflasi. Sementara infak, sedekah, dan wakaf memainkan perannya untuk menopang kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perekonomian, serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Untuk dapat mengoptimalisasi peran keuangan sosial syariah tersebut, dibutuhkan dukungan tata kelola yang baik, inovasi produk integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, termasuk digitalisasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya. Peran lembaga keuangan sosial syariah dan regulator dalam mendorong pengembangan keuangan sosial syariah terus dilakukan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait, termasuk mendukung inklusi keuangan sosial syariah melalui penyaluran zakat ke berbagai wilayah pelosok di Indonesia.

Penyusunan dan Implementasi Tata Kelola Keuangan Sosial Syariah

Penerapan tata kelola yang baik pada lembaga keuangan sosial syariah akan meningkatkan kepercayaan publik yang menjadi prasyarat dalam pengembangan keuangan sosial syariah. Bank Indonesia bersama dengan BAZNAS berupaya untuk terus meningkatkan kerja sama dalam menerapkan Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Zakat (*Zakat Core Principles* atau ZCP) yang telah diterbitkan pada 23 Mei 2016. Kerja sama tersebut dilakukan melalui penyusunan indeks implementasi ZCP dan pelaksanaan *pilot project* implementasi ZCP pada lembaga amil zakat. Selain kerja sama dalam pengembangan zakat, upaya yang sama juga dilakukan untuk mengembangkan wakaf melalui kerjasama dengan BWI dalam menerapkan Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf (*Waqf Core Principles* atau WCP) yang diterbitkan pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali tahun 2018. Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pendampingan dalam melakukan implementasi WCP pada lembaga wakaf. Penerapan prinsip-prinsip dalam ZCP dan WCP sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat dan wakaf agar semakin efektif dalam mengelola dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia.

Implementasi tata kelola keuangan sosial syariah dilakukan dengan tahapan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan dan *piloting* ke sejumlah lembaga pengelola zakat dan wakaf yang ada di berbagai daerah. Setelah penerbitan ZCP dan WCP, pedoman yang lebih rinci dalam bentuk *technical notes* (TN) perlu disusun untuk memberikan gambaran teknis dan prosedur agar prinsip-prinsip yang ada dalam ZCP dan WCP dapat diimplementasikan secara operasional oleh lembaga zakat dan lembaga wakaf. Sampai saat ini, telah disusun 5 (lima) TN ZCP, yaitu *Good Amil Governance*, *Risk Management*, *Sharia Control & Internal Audit*, *Disclosure & Transparency* dan *Financial Reporting & External Audit*, serta 1 (satu) TN WCP yaitu *Risk Management*. Pada tahun 2022 fokus dari penyusunan TN ZCP dan TN WCP adalah pada aspek tata kelola yang secara umum masih menjadi isu utama yang dihadapi oleh lembaga zakat dan wakaf, sehingga disusun 2 (dua) TN ZCP yakni *Zakat Collection Management* dan *Zakat Disbursement Management*, serta 1 (satu) TN WCP yaitu *Good Nazhir Governance*. Penyusunan TN ZCP dan TN WCP dilakukan dengan tahapan: (i) Kajian pustaka; (ii) *Focus Group Discussion* bersama akademisi/pakar/praktisi; serta (iii) *Public Hearing* dengan para pemangku kepentingan zakat dan wakaf. Penyusunan TN ZCP dan TN WCP sebagai pedoman teknis yang dapat diimplementasikan oleh lembaga zakat dan wakaf secara internasional maka dalam penyusunnya melibatkan tenaga ahli dan praktisi di bidang *Islamic Social Finance* dari berbagai negara. TN ZCP dan TN WCP yang disusun tersebut telah disahkan dalam World Zakat and Waqf Forum di Leeds, Inggris pada bulan September 2022. Dengan telah dipublikasikannya berbagai TN ZCP dan TN WCP, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan ZCP dan WCP untuk meningkatkan tata kelola di lembaga pengelola zakat dan wakaf seluruh dunia.

Pilot project implementasi ZCP dan WCP dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat dan wakaf di Indonesia. Pada tahun 2022, BI bersinergi dengan BAZNAS melaksanakan *pilot project* Implementasi Indeks ZCP (IIZCP) yang dilaksanakan di 8 (delapan) Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yakni BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS Provinsi Banten, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, LAZ Nurul Hayat, LAZ Baitulmaal Muamalat dan LAZ Yayasan Al-Azhar. Indeks implementasi ZCP terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu tata kelola, manajemen operasional, dasar hukum dan syariah, fungsi intermediasi penghimpunan, fungsi intermediasi penyaluran, dan laporan keuangan. Hasil asesmen *piloting* menunjukkan nilai indeks implementasi yang berada pada kisaran yang cukup tinggi yaitu 0,751 hingga 0,933 atau Baik (skala 0 – 1). Tingginya nilai IIZCP terutama pada fungsi intermediasi pengumpulan. Hal ini ditunjang oleh keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sosialisasi dan edukasi terkait zakat yang dilakukan oleh para LPZ. Adapun ruang untuk perbaikan dapat dilakukan pada dimensi tata kelola dan manajemen operasional yang memiliki nilai indeks terendah.

Pelaksanaan ***piloting*** implementasi ZCP tersebut dilaksanakan bersamaan dengan implementasi Indeks Kesehatan OPZ yang masih merupakan turunan dari

prinsip-prinsip ZCP. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur kemampuan LPZ dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai dari aspek faktor keuangan dan manajemen. Faktor keuangan terdiri atas variabel Aktivitas, Operasional, Likuiditas, dan Pertumbuhan, sedangkan faktor manajemen terdiri atas variabel Manajemen Umum, Manajemen Risiko, serta Kepatuhan Syariah. Pengukuran indeks ini juga dilakukan terhadap 8 (delapan) LPZ yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai *piloting* untuk mengukur kesehatan LPZ berdasarkan indikator yang disusun berdasarkan kajian oleh BAZNAS. Pengukuran ini bermanfaat untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan LPZ.

Sementara itu, kegiatan ***pilot project*** Implementasi Indeks WCP (IIWCP) dilakukan terhadap 31 (tiga puluh satu) nazhir. Seluruh nazhir tersebut terdiri dari 16 nazhir yang menjadi responden tahun 2021 dan 15 nazhir yang merupakan responden baru dipilih berdasarkan jenis lembaga dan wilayahnya serta merupakan nazhir yang terdaftar di BWI dan merupakan nazhir pengelola wakaf uang dan aset. Indeks implementasi ZCP terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu aktivitas inti, tata kelola, dan manajemen risiko. Secara umum, aspek yang telah memenuhi prinsip-prinsip WCP adalah manajemen pengumpulan, sedangkan aspek yang masih perlu didorong antara lain manajemen risiko operasional. Implementasi ZCP dan WCP dalam kegiatan *piloting* ZCP dan WCP tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur evaluasi dan acuan dalam sistem pengelolaan keuangan sosial syariah di Indonesia (Gambar 3.19).

Pengembangan Instrumen Keuangan Sosial Syariah Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Penguatan peran keuangan syariah dalam perekonomian antara lain dilakukan melalui integrasinya dengan keuangan komersial melalui penerbitan CWLS. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2020, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah memberikan peran yang semakin signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui wakaf produktif. CWLS sebagai salah satu instrumen yang mengintegrasikan keuangan komersial dan keuangan sosial syariah berperan untuk mengoptimalkan wakaf uang melalui instrumen sukuk negara, yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendorong kegiatan produktif untuk membantu ekonomi masyarakat skala mikro, kecil dan menengah dan program sosial lainnya.

Gambar 3.19. Capaian Kegiatan ZCP dan WCP

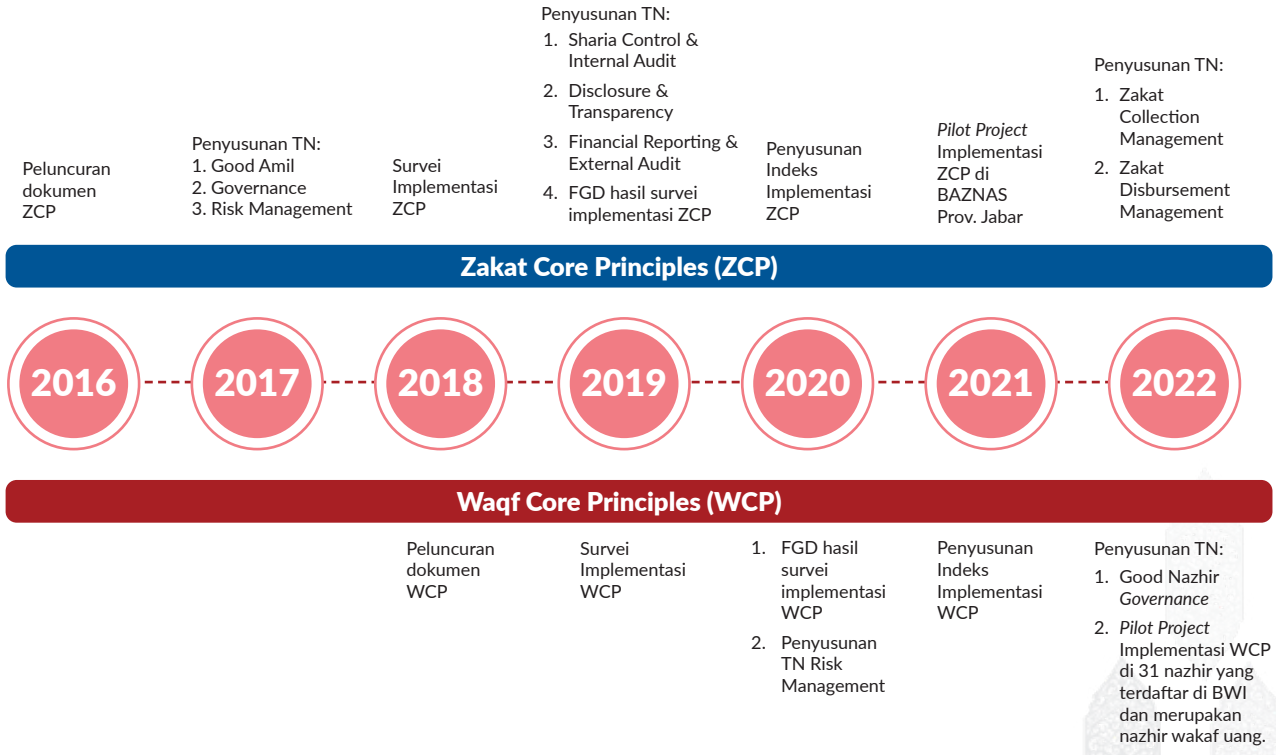

Sumber: Bank Indonesia

Dalam rangka diversifikasi instrumen untuk pendalaman pasar keuangan syariah dan perluasan basis investor SBSN, Pemerintah kemudian mengeluarkan seri CWLS Ritel. CWLS telah diterbitkan oleh Kemenkeu dalam beberapa seri, yakni Sukuk Wakaf SW001 (tahun 2020) dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp50,8 miliar, Sukuk Wakaf Ritel SWR001 (tahun 2020) sebesar Rp14,91 miliar, serta SWR002 (tahun 2021) sebesar Rp24,14 miliar. Sementara itu, pada tahun 2022 Pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) seri CWLS. Pertama, pada bulan Juni 2022 Pemerintah menerbitkan CWLS seri SW002 yang merupakan penerbitan Sukuk Wakaf Private Placement kedua untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi - ITS dengan nominal sebesar Rp 50 miliar. Kedua, pada bulan Juli 2022, Pemerintah menerbitkan CWLS seri SWR003 yang merupakan penerbitan Sukuk Wakaf Ritel bertujuan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nazir menyalurkan imbal hasil SWR-003 ke berbagai program sosial-ekonomi masyarakat antara lain untuk program ketahanan pangan, sanitasi untuk masyarakat, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan dengan nominal penerbitan sebesar Rp 38,25 miliar. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022, Pemerintah menerbitkan CWLS seri SW003 dan SW004 masing-masing sebesar Rp100 miliar yang merupakan Sukuk Wakaf Private Placement dengan sumber dana dari IPB. Imbal hasil sukuk wakaf tersebut disalurkan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi - IPB. Penerbitan CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Pengembangan Model Bisnis Wakaf Produktif

Implementasi integrasi sektor komersial dan sosial syariah antara lain dilakukan dalam bentuk mengembangkan aset wakaf produktif melalui pengembangan konsep *blended finance* di Indonesia. Salah satu upaya yang telah diinisiasikan adalah kerja sama internasional dengan Awqaf Properties Investment Fund (APIF) yang merupakan *subsidiary* dari Islamic Development Bank (IsDB). APIF menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek pengembangan aset wakaf agar menjadi lebih produktif melalui pengembangan proyek properti komersial. Persyaratan utama untuk memperoleh pembiayaan dari APIF diantaranya nilai proyek minimum sebesar 5 juta dolar AS dengan nilai pembiayaan yang diberikan APIF maksimal sebesar 75% dari nilai total nilai proyek serta tenor pembiayaan maksimal selama 15 tahun[41]. Dalam mengembangkan aset wakaf, APIF memprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (*sustainable*). Program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh APIF berfokus pada pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, penurunan kesenjangan, komunitas berkelanjutan, perdamaian dan kemitraan.

BI bersinergi dengan Kementerian Agama, BWI dan BPKH telah melakukan inisiasi kerja sama dengan APIF untuk mewujudkan pembiayaan terhadap aset wakaf produktif di Indonesia. Kerja sama tersebut diinisiasikan pada rangkaian kegiatan *side event* G-20 di Bali bulan Juli 2022 agar wakaf produktif di Indonesia dapat berkembang melalui kerja sama pembiayaan dengan APIF. Terdapat 10 (sepuluh) nazhir potensial yang difasilitasi oleh BI untuk melakukan *one-on-one meeting* dengan perwakilan APIF guna mengelaborasi potensi kerja sama pembiayaan pengembangan *asset* wakaf produktifnya. Kesepuluh nazhir tersebut mendapatkan kesempatan untuk memaparkan proyek wakaf mereka yang bergerak di berbagai bidang mulai dari proyek seperti sekolah, rumah sakit, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, hingga gedung perkantoran. Dari hasil pemaparan tersebut, APIF memberikan asesmen terhadap proyek dimaksud berikut dengan berbagai rekomendasi yang perlu dilakukan oleh para nazhir agar mendapat pembiayaan dari APIF.

41 Rincian persyaratan kerjasama dengan APIF dapat diakses pada laman resmi APIF, yakni: https://www.isdb.org/apif/

Gambar 3.20. Gambaran Umum Skema Model Bisnis Pembiayaan APIF

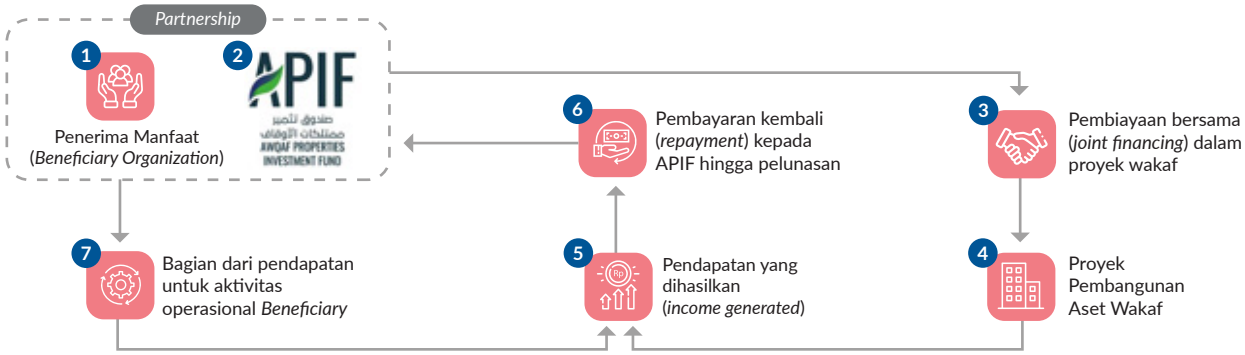

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

1. Penjajakan kerja sama antara nazhir dengan APIF melalui skema pembiayaan seperti *Leasing*, *Istisna*, *Murabaha* atau skema pembiayaan lainnya yang sesuai prinsip syariah.
2. Pemenuhan persyaratan, *legal due diligence* dan pelaksanaan *feasibility study* terhadap proyek yang akan dibangun.
3. *Signing* kerja sama antara nazhir atau pihak lain yang ditunjuk nazhir (*beneficiaries*) dengan APIF, serta masa efektif berlakunya perjanjian kerjasama.
4. Proses pembangunan proyek wakaf yang dilakukan oleh nazhir atau pihak kontraktor yang ditunjuk oleh nazhir. Pembiayaan sesuai dengan skema yang disepakati bersama.
5. Setelah masa konstruksi selesai, properti dikelola oleh pihak operator yang telah disepakati kedua belah pihak. Pendapatan dari aktivitas operasional akan masuk ke dalam *special account*.
6. Sebagian dari pendapatan operasional akan digunakan untuk pembayaran kepada APIF
7. Sebagian lainnya dari pendapatan operasional tersebut akan digunakan oleh nazhir untuk aktivitas operasional dan program pemberdayaan *mauquf alaih*.

Pengembangan aspek digitalisasi Sistem Pembayaran pada Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk mendukung inklusifitas keuangan sosial syariah. Untuk mengetahui tingkat kesiapan digitalisasi di sektor keuangan sosial syariah khususnya zakat, BI bekerja sama dengan BAZNAS telah menyusun Indeks Kesiapan Digital LPZ (IKDZ) pada tahun 2021 untuk mengukur tingkat kesiapan digitalisasi pada masing-masing LPZ. Pada tahun 2022, dilaksanakan survei IKDZ pada 335 LPZ yang terdiri dari BAZNAS serta LAZ Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil pengukuran tingkat kesiapan digitalisasi LPZ secara umum mencapai skor 0,653 (Baik) dengan level kesiapan digital berada pada posisi IT-Developing dan peringkat B2[42]. Dengan

42 Kategori kesiapan digital lembaga amil zakat dibagi menjadi kategori **tidak baik** (skor 0-0,20) dengan level kesiapan tradisional dan peringkat kesiapan C1, artinya seluruh aktivitas utama dalam pengelolaan zakat belum menerapkan proses digitalisasi, kategori **kurang baik** (skor 0,21-0,40) dengan level kesiapan traditional dan peringkat kesiapan C2, artinya sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat masih belum menerapkan proses digitalisasi, kategori **cukup baik** (skor 0,41-0,60) dengan level kesiapan IT-Developing dan peringkat kesiapan B1, artinya proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian aktivitas utama dalam pengelolaan zakat, kategori **baik** (skor 0,61-0,80) dengan level kesiapan IT-Developing dan peringkat kesiapan B2, artinya proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat, serta kategori **sangat baik** (skor 0,81-1,00) dengan level kesiapan Digital Native dan peringkat kesiapan A, artinya proses digitalisasi sudah diterapkan pada seluruh aktivitas utama dalam pengelolaan zakat sehingga LPZ dianggap sudah memiliki kesiapan yang cukup.

kata lain, pada tahapan atau level kesiapan ini, proses digitalisasi sudah diterapkan pada sebagian besar aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Secara rinci, hasil pengukuran tingkat kesiapan digitalisasi aktivitas pengelolaan zakat tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Pengumpulan mendapatkan skor 0.653 dalam kategori Baik dengan level kesiapan pada posisi IT-Developing dan mendapatkan peringkat B2.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan, skor yang didapatkan sebesar 0.586 dalam kategori Cukup Baik dengan level kesiapan IT-Developing dan mendapatkan peringkat B1.

3. Pelaporan mendapatkan skor sebesar 0,748 dalam kategori Baik dengan level kesiapan IT-Developing dan mendapatkan peringkat B2.

Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pengumpulan dan pelaporan pada LPZ relatif memiliki kesiapan digitalisasi yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan. Ke depan, program digitalisasi pada LPZ dapat diprioritaskan pada peningkatan aspek pendistribusian dan pendayagunaan, sedangkan aspek pengumpulan dan pelaporan memiliki tingkat sesiapan digitalisasi yang lebih baik.

QRIS merupakan "*Game Changer*" dalam penghimpunan dan penyaluran ZISWAF. Perkembangan aktivitas penghimpunan ZISWAF yang sangat pesat tidak terlepas dari dukungan digitalisasi dalam sistem pembayaran. Sebelum adanya QRIS, sebagian besar masyarakat Indonesia membayar dana ZISWAF dengan menggunakan uang tunai dan/atau transfer dana melalui perbankan. Dengan adanya QRIS, aktivitas untuk membayar ZISWAF semakin mudah khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening di perbankan. Sejak pandemi Covid-19, pembayaran menggunakan sarana digital sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi secara aman. Selain itu, QRIS juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan baik zakat, infaq dan sedekah dengan berbagai lembaga dan rekening yang berbeda-beda.

Peran sektor keuangan mikro syariah juga sangat penting bagi sektor usaha mikro-kecil Indonesia. Hal ini tergambar dari banyaknya Institusi Keuangan

Gambar 3.21. Pemanfaatan QRIS dalam Keuangan Sosial Syariah

Sumber: Bank Indonesia

Mikro Syariah (IKMS) dan jumlah pelaku usaha mikro-kecil di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan terakhir, penggunaan teknologi digital menjadi instrumen yang dapat menjadi katalisator bagi perkembangan entitas usaha termasuk institusi keuangan mikro syariah. Literasi dan preferensi masyarakat yang semakin tinggi terhadap aplikasi teknologi digital, khususnya melalui aplikasi *smartphone*, menjadi peluang bagi keuangan mikro syariah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan sektor usaha mikro-kecil memanfaatkan teknologi digital ini. Digitalisasi IKMS menjadi semakin penting mengingat saat ini pola hidup masyarakat telah berubah signifikan sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memiliki *digital mindset* merupakan persyaratan keberhasilan digitalisasi IKMS. Wakil Presiden RI selaku ketua harian KNEKS memberikan arahan pada Rapat Pleno tanggal 30 Mei 2022 untuk memperluas pelatihan dan digitalisasi IKMS secara masif serta mendorong integrasi pemanfaatan layanan dalam pengembangannya. Dalam memperluas pelatihan dan digitalisasi, telah dilakukan penguatan layanan keuangan mikro syariah di jaringan Hebitren serta memfasilitasi perluasan penerapan digitalisasi melalui *training* dan implementasi *core system* yang telah ada di jaringan Hebitren. Selain itu, telah dilakukan pula sosialisasi pemanfaatan digitalisasi kepada BMT dan IKMS melalui BMT/IKMS 4.0. Sementara dalam mendorong integrasi pemanfaatan layanan, telah dilakukan integrasi fitur QRIS pada sistem pembayaran di layanan elektronik IKMS.

Pemberdayaan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Bank Indonesia mendukung program penyaluran zakat oleh BAZNAS di wilayah 3T yang dikolaborasikan dengan program kerja "Ekspedisi Rupiah Berdaulat". Program ERB ini berisikan kegiatan: i) Kas Keliling, (ii) Edukasi cinta, bangga, dan paham Rupiah di wilayah 3T, (iii) Penyaluran PSBI, serta (iv) Penyaluran Sembako. Kerja sama penyaluran ZIS dengan BAZNAS yang memanfaatkan jaringan Bank Indonesia akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada mustahik yang tersebar di pelosok tanah air. Pada tahun 2022, telah dilakukan penyaluran ZIS tersebut ke 4 (empat) provinsi yakni Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

BI berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu Lembaga Mitra Wakaf Nasional terbaik bersama dengan beberapa kementerian serta lembaga lainnya pada BWI Award 2022. Adapun BWI Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada mitra-mitra kerja yang memberikan dampak signifikan pada percepatan ekosistem wakaf di Indonesia. Penganugerahan tersebut diberikan dalam rangkaian acara Rakornas BWI yang diselenggarakan pada 7 Desember 2022 di Jakarta.

Gambar 3.22. Penyaluran ZIS ke Wilayah 3T Bersinergi dengan BAZNAS dan TNI-AL dalam Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat

Sumber: Bank Indonesia

Penghargaan Mitra Kerja Sama Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

1. Bertepatan dengan HUT BAZNAS ke-21, BAZNAS menganugerahkan BAZNAS Award tahun 2022 kepada sejumlah Kementerian, Lembaga, pimpinan pemerintahan baik pusat dan daerah, serta OPZ dan para pihak yang telah berjasa atas perkembangan zakat di tanah air. BAZNAS Award tahun 22022 diberikan kepada 184 kategori penerima penghargaan. BI bersama dengan 5 kementerian dan lembaga lainnya menerima penghargaan sebagai Mitra Penguatan Ekosistem Nasional.

2. Bersama dengan 5 kementerian dan lembaga lainnya, BI berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu Lembaga Mitra Wakaf Nasional terbaik pada BWI Award tahun 2022. BWI Award ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh BWI kepada mitra-mitra kerja yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan ekosistem wakaf di Indonesia. Penganugerahan tersebut diberikan dalam rangkaian acara Rakornas BWI yang diselenggarakan pada 7 Desember 2022 di Jakarta.

3.2.4. Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia melaksanakan berbagai program penguatan riset, edukasi dan sosialisasi. Upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ditempuh melalui penguatan riset, penguatan edukasi masyarakat baik melalui jalur pendidikan formal di berbagai tingkatan, maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat luas. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia setiap tahunnya menyelenggarakan rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), yang dimulai dengan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di ketiga wilayah Indonesia.

Penguatan riset ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten menerbitkan jurnal internasional yang memuat *paper* ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka pengembangan riset ekonomi dan keuangan syariah. Pada tahun 2022 telah diterbitkan 4 (empat) isu Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF). Setiap isu JIMF memuat 8 (delapan) *paper* yang separuh penulisnya berasal dari penulis internasional. JIMF kini memasuki tahun ke-8 sejak diterbitkan tahun 2015. JIMF terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas, agar dapat menjadi jurnal ekonomi dan keuangan syariah berkualitas dan terkemuka di dunia internasional.

JIMF merupakan jurnal ekonomi dan keuangan syariah pertama dan satu-satunya yang terakreditasi Scopus di Indonesia. Upaya perbaikan kualitas JIMF membuahkan hasil yang menggembirakan berdasarkan status akreditasi JIMF, baik nasional maupun internasional. Untuk akreditasi internasional, sejak April 2022 JIMF dinyatakan diterima sebagai jurnal terindeks Scopus. Sementara itu, akreditasi JIMF di tingkat nasional yaitu pada Science and Technology Index (Sinta) meningkat dari Sinta-2 menjadi Sinta-1, dimana Sinta-1 merupakan tingkat akreditasi nasional tertinggi dari 6 tingkat akreditasi dalam Sinta (Sinta-1 s.d Sinta-6).

JIMF diharapkan menjadi referensi utama bagi akademisi dalam menyusun dan mempublikasikan riset berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan The 8th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) dan Call for Papers (CFP-JIMF). Penyelenggaraan The 8th IIMEFC dan CFP-JIMF dilakukan secara *hybrid* (*offline* dan *online*). IIMEFC dan CFP-JIMF yang diselenggarakan setiap tahun ini diharapkan dapat menjadi forum eksplorasi ilmu dan media diskusi ilmiah dari para akademisi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari mancanegara. Pada tahun 2022, The 8th IIMEFC dan CFP-JIMF ini mampu menarik 200 *paper* karya peneliti yang berasal dari 21 negara. Diharapkan IIMEFC dan CFP-JIMF ini dapat menjadi agenda tahunan utama bagi akademisi bidang ekonomi dan keuangan syariah di seluruh dunia.

Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas riset, asesmen dan kajian yang dilakukan untuk memperkuat formulasi kebijakan dan implementasi ekonomi dan keuangan syariah. Pada 2022 beberapa riset dan kajian disusun berdasarkan pedoman yang disepakati dalam *Blueprint* Bank Indonesia dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Beberapa kajian tersebut diantaranya adalah: (i) Kajian Indeksasi Return Sektor Riil Sebagai Alternatif Tingkat Pengembalian Instrumen Keuangan Syariah; (ii) Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Hijau: *Towards Green Economy Transformation Through Islamic Green Financing*: *Managing Risk and Fostering Sustainable Growth for the Real and Financial Sectors*; (iii) *Is Islamic Banks better than Conventional Banks in the time of Uncertainty?*; (iv) Kajian Indikator Aktivitas Usaha Syariah sebagai Proksi PDB Syariah; (v) Kajian Model Bisnis Sustainable Food dengan Memanfaatkan *Renewable Energy*; (vi) Kajian Masterplan Industri Halal Indonesia; (vii) Kajian Integrasi Keuangan Komersial & Sosial Syariah: Kajian Dampak Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Studi Kasus SWR 001 dan SWR 002; dan (viii) Kajian Penyempurnaan Mekanisme Transfer Imbalan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Secara detil daftar kajian yang disusun sepanjang tahun 2022 terdapat di lampiran.

Penguatan edukasi dan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Pendidikan Formal

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah melalui edukasi formal, Bank Indonesia menyusun buku-buku referensi di berbagai tingkat pendidikan.[43]

Pada tahun 2022, Bank Indonesia bekerja sama dengan *stakeholders* terkait menyusun empat buku referensi untuk tingkat Perguruan Tinggi, yaitu "Akuntansi Syariah", "Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqqiyah", "Digitalisasi Transaksi Ekonomi Syariah (Perspektif Hukum dan Praktik)", serta "Pengantar Hukum Digital dari Perspektif Ekonomi Syariah" untuk fakultas hukum. Penyusunan 2 (dua) buku ekonomi syariah untuk fakultas ekonomi dilakukan bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi syariah di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (UNAIR), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Tazkia, UIN Ar Raniry, serta UIN Sunan Kalijaga. Sementara 2 (dua) buku ekonomi syariah untuk fakultas hukum bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNPAD dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI).

Bank Indonesia juga mendorong implementasi berbagai buku yang telah diterbitkan untuk diajarkan di lembaga pendidikan. Untuk mendukung implementasi buku tersebut di Perguruan Tinggi, atas buku yang telah disusun akan diajarkan pada perguruan tinggi penyusun sebagai berikut: (i) Buku S1 Prodi Ekonomi Syariah akan digunakan di UI, IPB, UNAIR, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UNPAD, Institut Tazkia, UIN Ar Raniry Aceh, dan/atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; serta (ii) Buku ekonomi syariah untuk Fakultas Hukum akan digunakan di UNPAD dan/atau oleh APPHEISI. Ke depan diharapkan berbagai universitas lainnya di Indonesia akan ikut menggunakan buku-buku tersebut.

43 Lihat Lampiran xx untuk daftar buku yang telah diterbitkan

Pada tingkat pendidikan dasar awal, Bank Indonesia bekerja sama dengan KNEKS menyusun buku literasi ekonomi syariah untuk anak usia dini dan pendidikan dasar awal. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pengenalan literasi dan pengelolaan ekonomi dan keuangan mengacu kepada nilai syariah dari usia dini, serta menjadi bagian dari ekosistem solusi edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Buku literasi ekonomi syariah anak yang disusun terbagi dalam 3 (tiga) seri awal dengan topik pengenalan ekonomi dan keuangan syariah serta pada tahap selanjutnya diusulkan adanya kesinambungan buku untuk topik lanjutan. Buku seri pertama diawali dengan pengenalan fungsi, nominal, dan bentuk uang, serta memahami bahwa uang/harta yang diperoleh/dimiliki adalah bentuk rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya pada buku seri kedua anak dapat belajar mengenali batasan kepemilikan diri sendiri, orang lain, dan fasilitas umum. Selain itu, anak juga diperkenalkan mengenai konsep dasar pinjam meminjam sesuai prinsip syariah. Pada buku seri ketiga, anak belajar mengenai cara membelanjakan harta termasuk dalam produk halal beserta konsep produk halalnya.

Dalam rangka implementasi dan meningkatkan pemahaman terhadap buku-buku tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainers* (ToT). Khususnya untuk buku ekonomi syariah pada fakultas hukum ToT dilakukan secara *offline* kepada representasi dari Fakultas Hukum dari berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki mata kuliah terkait Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam. Kegiatan ToT untuk Buku Ekonomi Syariah bagi mahasiswa fakultas hukum jenjang strata 1/S1 dan strata 2/S2, diselenggarakan dengan menghadirkan Penulis Buku dan/atau Narasumber lain yang relevan dengan target peserta khususnya bagi para pengajar terkait materi ekonomi syariah pada perguruan tinggi hukum strata 1 dan strata 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dikemas dalam tema "Training of Trainers (ToT) Pengajar Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 dan Strata 2". Kegiatan tahap awal dilaksanakan dengan menghadirkan peserta dari perwakilan Perguruan Tinggi Hukum dari berbagai wilayah di Indonesia yang menjadikan materi terkait ekonomi syariah/ekonomi Islam sebagai salah satu mata kuliahnya. Adapun terdapat 18 tenaga pengajar yang hadir pada ToT tersebut yang mewakili 18 perguruan tinggi tersebar dari wilayah Sumatera, KTI, dan Jawa.

Pelaksanaan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022

Rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 merupakan bentuk komitmen seluruh *stakeholder* di Indonesia untuk bersama mengakselerasi upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui ISEF 2022, pemberdayaan ekonomi syariah terus diarahkan untuk membangun ekosistem mata rantai usaha halal, mulai dari pondok pesantren hingga tingkat industri. Selain itu, pengembangan keuangan syariah juga menjadi fokus agenda ISEF 2022 dengan tujuan untuk memperluas produk dan akses keuangan, mulai dari perbankan dan lembaga keuangan lain, hingga mobilisasi zakat, shodaqoh dan wakaf. Edukasi dan literasi masyarakat juga diperkuat melalui penguatan kurikulum ekonomi keuangan syariah, kewirausahaan, hingga kampanye gaya hidup halal. Rangkaian kegiatan ISEF 2022 dimulai dengan berbagai kegiatan, yaitu Road to ISEF, Road to Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), Fesyar

Gambar 3.23. Buku Referensi Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar Awal

Sumber: Bank Indonesia

di 3 (tiga) wilayah, Side Event G – 20, dan ditutup dengan Main Agenda ISEF 2022. Rangkaian tersebut telah dimulai sejak April 2022 yang lalu dan diakhiri dengan pelaksanaan main agenda ISEF selama 5 hari penuh, mulai tanggal 5 s.d 9 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center, secara hybrid yakni *offline* dan *on line*. ISEF 2022 dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 6 Oktober 2022.

Sebagai wujud dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia, ISEF 2022 mengusung tema "*Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery*". Melalui tema tersebut, ISEF 2022 bermaksud menunjukkan peran ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) dalam mendukung pemulihan bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi Covid-19. Tema tersebut kemudian diturunkan dalam 3 (tiga) sub-tema, yaitu (i) *Economic Inclusion*, (ii) *Halal and Green Lifestyle*, dan (iii) *Digitalization of Sharia Economy* (Gambar3.24).

Sebagai salah satu upaya peningkatan literasi ekonomi syariah di daerah dan sebagai bentuk Road to ISEF 2022, BI kembali mengadakan Festival Ekonomi Syariah 2022 sebagai bagian dari Rangkaian Kegiatan ISEF 2022. Penyelenggaraan FESyar 2022 di selenggarakan di ketiga wilayah, yaitu FESyar KTI pada 28-30 Juli di Makassar, FESyar Sumatera pada 4-6 Agustus 2022 di Aceh, dan FESyar Jawa pada 8-10 Agustus 2022 di Jawa Timur dengan mengangkat tema secara umum "Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk memperkuat Ekonomi Daerah yang Inklusif". Penyelenggaraan FESyar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perhelatan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF). FESyar memiliki *alignment* erat dengan salah satu tujuan penyelenggaraan ISEF yaitu dukungan terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Rangkaian kegiatan FESyar dirancang sedemikian rupa agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah, termasuk dari sisi penguatan edukasi dan literasi. Dalam hal ini *Sharia Forum* FESyar menggelar beragam webinar, *talkshow virtual*, *business coaching* hingga *coaching clinic*, yang mengangkat topik-topik terkini terkait ekonomi syariah antara lain pengelolaan ekonomi daerah berbasis ekonomi syariah, pemberdayaan usaha dan ekonomi pesantren, optimalisasi *Islamic Social Finance* (ZISWAF), serta penguatan implementasi *halal value chain* dan literasi *halal lifestyle*. Sementara itu, *Sharia Fair* FESyar menjadi ajang *showcase* produk usaha syariah unggulan, yang disertai dengan kegiatan *business matching* dengan Perbankan Syariah, Lembaga Wakaf, dan juga *Business to Business (B2B)*.

Gambar 3.24. Kerangka Tema ISEF 2022 dalam Mendukung Presidensi Indonesia G20 2022

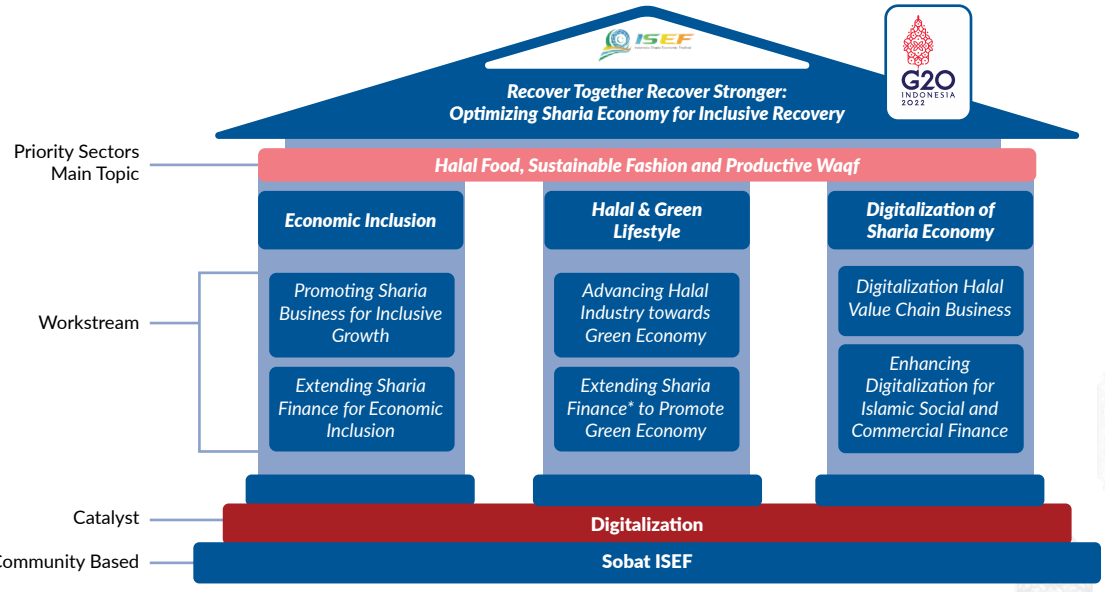

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.25. *Alignment* FESyar-ISEF 2022

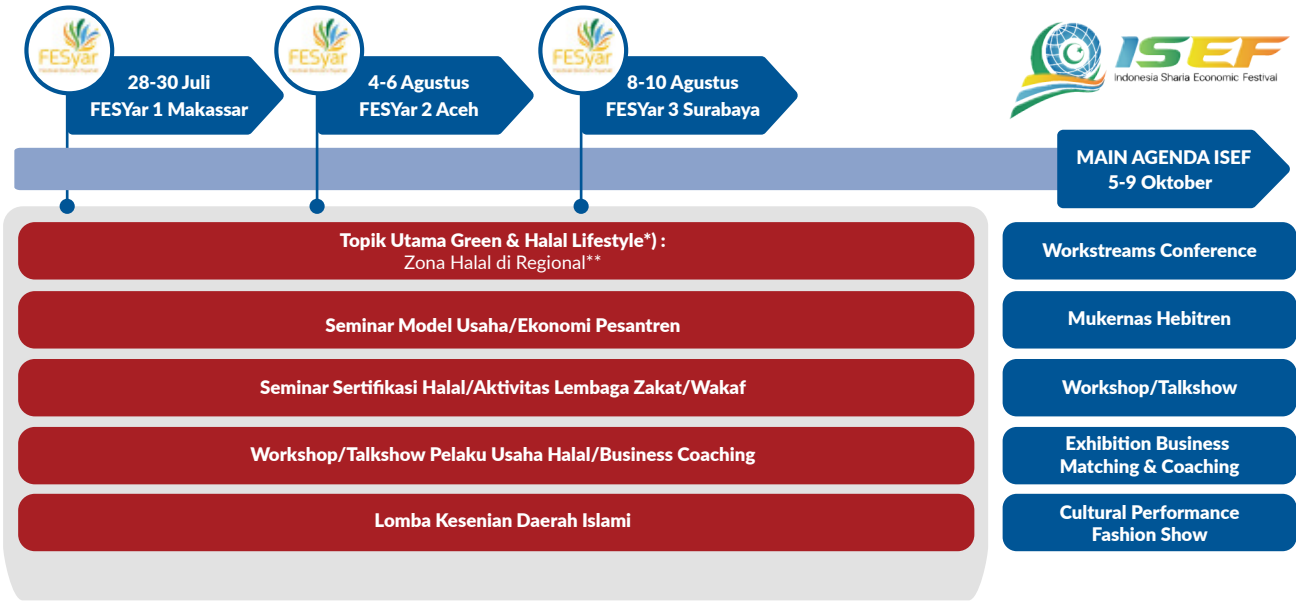

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.26. *Opening Ceremony* FESyar 2022

Sumber: Bank Indonesia

Seluruh pimpinan daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan FESyar 2022 menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah di daerah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Pada FESyar KTI, Bank Indonesia melaksanakan program digitalisasi di 106 Pesantren dan *launching* penggunaan QRIS pada 5.000 masjid di Kawasan Timur Indonesia. Program digitalisasi juga menjadi agenda penting di FESyar Sumatera yang diimplementasikan melalui *launching* platform digital *Aceh Sharia Funding Agregator* (ASIFA) sebagai platform digital keuangan sosial syariah. Platform ini menjembatani pemilik dana yang ingin menyalurkan Infak, Sedekah, dan Wakaf (ISWAF) ataupun investasi kepada pelaku usaha dan kegiatan produktif lainnya. Di Fesyar Jawa, dilakukan antara lain inisiasi Hilirisasi Produk Rempah serta peningkatan peran pesantren guna mendukung ketahanan pangan di antaranya melalui *Social Partnership for Food Security*. Lebih detail, informasi mengenai pelaksanaan FESyar pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.27.

Gambar 3.27. Penyelenggaraan FESyar Tahun 2022

FESyar Sumatera 2022
"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera untuk memperkuat Ekonomi Sumatera yang Inklusif"

Tuan Rumah: Aceh
Tanggal: 4-6 Agustus 2022
Jumlah Pengunjung: ± 120.857
Total Transaksi: ± Rp7,9 Miliar
Total Business Matching: ± 53,4 Miliar
Total Sebanyak 20 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari: (i) 7 Webinar, (ii) 3 talkshow/ business coaching ekonomi-keuangan syariah, (iii) 8 Perlombaan, (iv) festival kuliner; dan (v) tabligh Akbar

FESyar KTI 2022
"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah KTI untuk memperkuat Ekonomi KTI yang Inklusif"

Tuan Rumah: Sulawesi Selatan (Makassar)
Tanggal: 28-30 Juli 2022
Jumlah Pengunjung: ± 94.047
Total Transaksi: ± Rp48,78 Miliar
Total Business Matching: ± 108,93 Miliar
Total Sebanyak 17 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari: (i) 4 Webinar, (ii) 5 talkshow/business coaching ekonomi-keuangan syariah, (iii) 7 Perlombaan, (iv) tabligh Akbar

FESyar Jawa 2022
"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa untuk memperkuat Ekonomi Jawa yang Inklusif"

Tuan Rumah: Jawa Timur (Surabaya)
Tanggal: 8-10 September 2022
Jumlah pengunjung: ± 208.982
Total transaksi: ± Rp4,47 Trilyun
Total business matching: : ± Rp4,77 Trilyun
Total sebanyak 15 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari: (i) 3 webinar, (ii) 6 talkshow/business coaching ekonomi-keuangan syariah; (iv) 5 perlombaan; dan (v) tabligh Akbar.

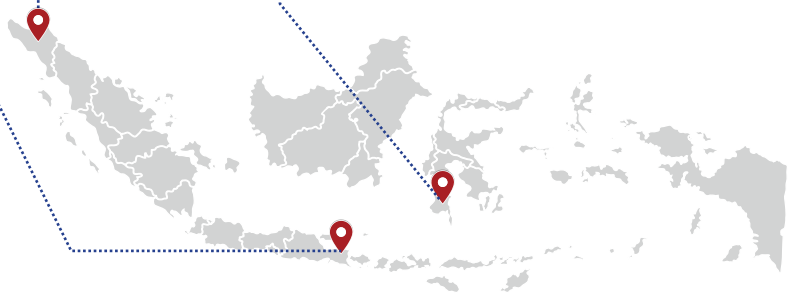

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.28. *Outcome* Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan ISEF 2022

Agenda
163
KEGIATAN
WEBINAR (NATIONAL & INTERNATIONAL WORKSHOP) • TALKSHOW • BUSINESS COACHING BUSINESS MEETING MATCHING FGD • TABLIG AKBAR • FASHION SHOW

Peserta / Pengunjung
FESyar - ISEF
566.181
PESERTA
Jumlah peserta FESyar (513.181)
ISEF *offline* (19.095)
online (34.326)

IN2MOTION FEST
163
DESAINER
Modest Fashion Domestik dan Internasional • 1200 karya dalam 17 parade • 29 Asosiasi • 14 Wastra Nusantara

Transaksi Bisnis
27,6T
FESyar - ISEF
Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, Transaksi B to B. Transaksi B to C serta *Exhibition*

Jumlah *Exhibitor*
950
PELAKU USAHA
Jumlah *exhibitor offline* sebanyak 283 dan *virtual* sebanyak 667

Jumlah *Exhibitor*
4.553 peserta
4 Jenis Kompetisi Hijarahpreneur 2.0 • Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN) *Youth Sharia Sociopreneur Competition* (YSSC) • *Modest Young Designer Competition* (MYDC)

ISEF
Indonesia Sharia Economic Festival

Sertifikasi
1.898
SERTIFIKAT
Melalui Program Sertifikasi Pendampingan Proses Produk Halal (1690), Sertifikasi Halal *Self-Declare* (208).

Platform ISEF
106.355
PENGUNJUNG
Per 1 September-9 Oktober 2022
Pengunjung dari: 92 Negara dari 5 Benua

Outcome Utama 9th ISEF

1. Pencanangan Indonesia International *Modest Fashion Festival (IN2MOTION FEST)* sebagai rujukan *modest* fesyen dunia.
2. Penguatan Ekosistem Global Halal Hub.
3. Akselerasi Sertifikasi Halal.

Domestic Forum Outcome

1. Ijtima Dewan Pakar dan SILAKNAS MES: Rekomendasi untuk melakukan *review Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini.
2. Himpunan Ekonomi Bisnis, Pesantren (Hebitren): 1) Garis Besar Haluan Program yang menjadi acuan, pelaksanaan, program pengembangan usaha, Hebitren, 2023; 2) mempercepat pengembangan usaha Hebitren dan memperluas kerja sama dengan mitra strategis dan antar-Hebitren daerah.

International Forum Outcome

1. *International Halal Dialogue* Ke-4: Penjajakan kerja sama antar otoritas sertifikasi halal dari Indonesia dengan sejumlah negara (Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat, dan Arab Saudi).
2. *International Moslem Friendly Tourism Conference*: "Resolusi Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim Indonesia".
3. *International Conference on Zakat and Waqf*: Peluncuran *Technical Note on Zakat Core Principles, Technical Note on Waqf Core Principle and good nazir governance*, dan produk *Social Impact Sukuk Wogfestasi*.
4. *International Islamic Monetary Economic and Finance Conference* ke-8.: 200 *paper* yang berasal dari 21 negara dan terpilih 48 *selected paper* ilmiah yang dipresentasikan selama konferensi.
5. INHALIFE *Conference Ke-4*: Terdapat 42 UMKM berpeluang dan sedang berproses untuk masuk ke dalam gerai *retail modern*.
6. *High Level Discussion* Islamic Financial Services Board (IFSB) - Islamic Development Banks (IsDB). Secara umum menekankan tentang pentingnya nilai-nilai moral sesuai *magasid syariah* atau *value based intermediation*, yang didalamnya juga menekankan *sustainability and green finance*.

FESyar *Outcome*

1. FESyar KTI, melaksanakan digitalisasi di 106 Pesantren dan mendorong penggunaan QRIS di 5.000 masjid di Kawasan Timur Indonesia.
2. FESyar Sumatera, melaksanakan *launching* platform digital *Aceh Sharia Funding Agregator* (ASIFA) sebagai inisiatif platform digital keuangan sosial syariah hadir menjembatani pemilik dana yang ingin menyalurkan, ISWAF atau investasi produktif lainnya.
3. Pencanangan program perluasan ekspor UMKM melalui "*Indonesia Spice Up the World*" melalui pelaksanaan program-program yang mendorong UMKM untuk masuk pasar produk halal dunia; pembiayaan bank syariah kepada pesantren dan kerja sama pemasaran produk-produk halal untuk masuk *e-commerce* menggunakan kanal antara lain QRIS dan BI-FAST.

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, Main Agenda ISEF ke – 9 2022 tetap menjadi salah satu agenda eksyar internasional yang menjadi daya tarik berbagai *stakeholders*, baik nasional maupun internasional. Pada 2022, selain ISEF 2022, juga diselenggarakan *event* eksyar berskala internasional, seperti Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2022, Halal Expo London 2022, IsDB Annual Meeting 2022, Thailand Halal Assembly 2022, dan berbagai *event* internasional eksyar lainnya. Namun, ISEF 2022 tetap menjadi gelaran eksyar yang unik bagi dunia internasional. Hal tersebut dikarenakan ISEF merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai kegiatan, mulai dari *exhibition* (*expo*), *conference* (*webinar*), sidang fora internasional, musyawarah nasional, *workshop*, *business matching*, dan berbagai jenis kegiatan lain.

Seluruh rangkaian kegiatan Main Agenda ISEF ke-9 tahun 2022 difokuskan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melibatkan berbagai kalangan. Pada gelaran ISEF 2022 telah diselenggarakan 163 kegiatan yang terdiri dari Webinar (National & International), Workshop, Talkshow, Business Coaching, Business Meeting Matching, Tablig Akbar, dan Fashion Show, yang mencatat partisipasi sebanyak 566.181 peserta mulai dari FESyar hingga Puncak ISEF 2022. Selain itu, pada rangkaian Kompetisi di ISEF 2022, telah diikuti oleh 4.553 peserta dari 4 kompetisi yang diselenggarakan selama tahun ini (Hijrahpreneur 3.0, Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), Youth Sharia Sociopreneur Competetition (YSSC), dan Modest Young Designer Competition (MYDC)). Pada kegiatan ini juga terdapat 106.355 pengunjung dari 92 negara yang mengakses website ISEF 2022 yang dihitung mulai 1 September 2022 hingga 9 Oktober 2022. ISEF 2022 juga diikuti oleh 950 pelaku usaha (283 peserta *offline* dan 667 peserta *online*). Selama ISEF 2022 terdapat total transaksi sebesar Rp27,6 triliun, yang berasal dari *business matching*, pengumpulan wakaf, sampai transaksi pada *exhibition* ISEF 2022. Di antara *exhibitor* tersebut, terdapat 163 desainer nasional dan internasional yang turut memeriahkan *exhibiton* ISEF 2022 (Gambar 3.28).

Peluncuran program flagship eksyar. Salah satu hal yang spesial pada penyelenggaraan ISEF 2022 adalah peluncuran (*launching*) program *flagship* oleh Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS pada pembukaan Main Agenda ISEF 2022. Program *flagship* tersebut terdiri dari (i) **Pencanangan Global Halal Hub (GHH)**, (ii) **Akselerasi Sertifikasi Halal**, dan (iii) **Penyelenggaraan the 1st Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST)**. Perluasan dan penguatan kerja sama penyelenggaraan IN2MOTIONFEST selanjutnya akan terus dilakukan sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai rujukan *modest fashion* dunia.

3.2.5. Peran BI Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pada Fora Internasional

Sebagai wujud nyata kontribusi Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah internasional, Bank Indonesia secara aktif berperan dalam forum syariah internasional. Peran aktif Bank Indonesia ditujukan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Sebagai salah satu regulator pasar keuangan syariah, Bank Indonesia secara aktif berkontribusi untuk memberikan masukan terhadap penyusunan standar internasional, khususnya di bidang pendalaman pasar keuangan syariah. Peran tersebut tercermin pada keanggotaan Bank Indonesia pada Working Group (WG) dan Task Force (TF) penyusunan standar di beberapa lembaga standar internasional (*standard setting body*), seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International Islamic Financial Market (IIFM). Selain itu, bentuk kontribusi Bank Indonesia terhadap pengembangan keuangan syariah internasional diwujudkan dalam bentuk dukungan penerbitan instrumen keuangan syariah berupa sukuk jangka pendek yang diterbitkan oleh IILM melalui kepesertaan Bank Indonesia pada lembaga tersebut.

Bank Indonesia berkontribusi dalam penyusunan standar di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan syariah yang dilakukan oleh IFSB. Islamic Financial Services Board (IFSB) suatu lembaga penyusun standar global untuk industri keuangan syariah yang fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pedoman bagi industri perbankan, pasar modal, dan asuransi**.** Kontribusi dilakukan melalui partisipasi dalam berbagai *working group* dan *task force* penyusunan yang dibentuk oleh IFSB. Selama 2022, IFSB telah menerbitkan standar *Technical Note On Recovery And Resolution For Institutions Offering Islamic Financial Services* yang bertujuan untuk mengatasi dampak sistemik dari krisis yang dialami oleh bank yang memenuhi kriteria *systemically*

important financial institutions (SIFIs). Penerbitan standar tersebut selaras dengan upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroprudensial, termasuk pada institusi keuangan syariah.

Dalam penyusunan standar keuangan syariah internasional IFSB, Bank Indonesia secara aktif memberikan masukan konsep dan teknis penyusunan standar, serta *country experience* dalam penerapan standar tersebut. Sebagai contoh, dalam pengembangan standar IFSB yang tengah berlangsung terkait *Shari'ah-Compliant Liquidity Management Tools*, Bank Indonesia memberikan masukan mengenai upaya untuk menghitung dan mendefinisikan berbagai Risiko Likuiditas Syariah dari berbagai instrumen likuiditas syariah yang tersedia di pasar. Selain itu Bank Indonesia juga memberikan masukan mengenai alternatif instrumen jangka pendek, yaitu Sukuk Bank Indonesia, yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen operasi moneter syariah maupun pasar uang syariah di Indonesia.

Pada area pasar uang syariah, Bank Indonesia berpartisipasi dalam penyusunan standar yang diinisiasi oleh IIFM. Internationla Islamic Financial Market (IIFM) adalah suatu lembaga penyusun standar global untuk industri jasa keuangan syariah yang fokus pada instrumen produk dan kontrak keuangan. Pada 2022, Bank Indonesia terlibat dalam penyusunan standar IIFM di antaranya *Syndication Documentation Standardization Initiative* dan *Islamic Liquidity Management Tool's Documentation*. Keterlibatan Bank Indonesia dalam kegiatan perumusan standar di bidang pasar uang tersebut selaras dengan upaya pendalaman pasar uang yang saat ini tengah dilakukan Bank Indonesia baik domestik dan internasional. Sedangkan pada 2022, IIFM telah bekerja sama dengan International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) dalam menerbitkan standar IBOR Fallback Standard Documentation yang berisi panduan mengenai pelaksanaan *hedging* yang *prudent* dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penyediaan Instrumen Likuiditas Syariah Internasional

Dalam rangka penguatan pasar keuangan syariah, Bank Indonesia bersama dengan berbagai bank sentral tergabung sebagai *shareholder*/anggota dan *founder* dari International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM). IILM merupakan *international corporation* yang memiliki lini usaha menerbitkan instrumen keuangan berbasis syariah dalam bentuk Short Term Sukuk, dengan tenor beragam, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai dengan 1 tahun. Langkah yang dilakukan IILM tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan (*gap*) ketersediaan tenor sukuk jangka pendek yang dapat diperdagangkan secara global sehingga memberikan variasi instrumen yang memperkaya pasar keuangan syariah global. Saat ini IILM merupakan satu-

satunya penerbit sukuk jangka pendek yang dapat diperdagangkan secara global di banyak negara dengan nilai penerbitan tahun 2022 mencapai 10,4 miliar dolar AS.

Sejak pendiriannya pada tahun 2010, IILM telah menjadi salah satu sukuk *issuer* terbesar di dunia. Pada tahun 2021, IILM berada pada top 4 penerbit sukuk, bersama dengan negara Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia. Pada beberapa yuriskdiksi, Sukuk IILM telah diperlakukan sebagai *High Quality Liquid Asset* (HQLA) Level 1 dan diklasifikasikan sebagai asset dengan risiko tertimbang sebesar 0%. Hadirnya Sukuk IILM dapat menjadi salah satu opsi bagi lembaga keuangan dalam pengelolaan likuiditas. Saat ini sukuk IILM telah dirating "A-1" oleh S&P dan "F1" oleh Fitch's yang mengindikasikan kapasitas paling kuat dalam pembayaran *coupon* secara tepat waktu, dibandingkan dengan penerbit atau instrumen sejenis lain di Malaysia, lokasi dimana IILM beroperasi. Dalam hal keanggotaan pada komite pada IILM, Bank Indonesia terlibat sebagai Chairperson pada Board of Risk Management Committee (BRMC), serta anggota pada Governing Board (GB), Board Executive Committee (BEC), dan Board Audit Committee (BAC) IILM.

Penguatan Governance pada Fora Eksyar Internasional

Selain berperan aktif dalam penyusunan standar, Bank Indonesia berperan strategis dalam penguatan *governance* pada fora eksyar internasional. Pada tahun 2022, Gubernur Bank Indonesia menjabat sebagai Chairman of IFSB Executive Committee (EC). Penunjukan Gubernur Bank Indonesia sebagai Chairman EC IFSB dilakukan oleh 25 Gubernur Bank Sentral dan Kepala Lembaga yang tergabung dalam Council IFSB. EC IFSB memiliki peran dalam merekomendasikan kepada Council terkait isu strategis, kebijakan dan prosedur internal, aktivitas operasional, penyusunan riset dan standar IFSB. Kedudukan strategis EC dimaksud sangat membantu Council dalam menjalankan keputusan strategis maupun teknis secara efektif dan efisien, dalam rangka mendukung Transformasi IFSB, di area *Policy*, *Oranization*, dan *Human Capital*.

Selain IFSB, Bank Indonesia juga berperan dalam penguatan organisasi IILM dan IIFM. Bank Indonesia saat ini tengah menginisiasi upaya *Scaling-up Business Operation* pada IILM yang merupakan upaya untuk menjajaki opsi pertumbuhan dan penguatan bisnis IILM. Dengan koordinasi yang erat di antara anggota IILM, saat ini tengah disusun *Blueprint* dan *Roadmap* Pengembangan IILM. Adanya *Blueprint* dan *Roadmap* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi IILM untuk memperkuat bisnis yang telah dijalankan selama 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan pada IIFM, Bank Indonesia telah menginisiasi beberapa penguatan, di antaranya pelaksanaan survei kebutuhan standar kepada para *member* IIFM, perluasan partisipasi anggota IIFM pada *working group*, serta upaya penguatan organisasi lainnya.

Penghargaan di Bidang Keuangan Syariah Internasional

Komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat eksyar, baik di ranah domestik dan internasional senantiasa mendapatkan pengakuan oleh dunia internasional. Pada tahun 2022, Bank Indonesia kembali meraih gelar sebagai *Best Central Bank of The Year* pada ajang tahunan Global Islamic Finance Award (GIFA) ke 12 tahun 2022 untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya pernah diraih pada tahun 2018. Penghargaan ini diberikan kepada BI sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) dunia. Bank Indonesia dinilai memiliki keunggulan pada tiga aspek utama, yakni (i) otentisitas program syariah yang dikembangkan; (ii) kebermanfaatan program secara sosial; dan (iii) komitmen terhadap pelaksanaan program tersebut. Pencapaian ini memperkuat optimisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. Kontribusi Bank Indonesia sebagai katalis pengembangan eksyar internasional menjadi penentu keberhasilan BI, sehingga dapat mengungguli 4 nominasi lainnya pada kategori *Best Central Bank of The Year*.

3.3

Sinergi Kebijakan Ekonomi Keuangan Syariah Nasional

Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional antara lain ditempuh melalui pelaksanaan program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sesuai amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah dilakukan Rapat Pleno KNEKS pada Selasa, 30 November 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS dan dihadiri oleh 16 (enam belas) Menteri/ Pimpinan Lembaga Anggota KNEKS. Rapat Pleno tersebut membahas dan menyepakati 13 (tiga belas) program kerja prioritas KNEKS yang terbagi dalam empat klaster, yakni 1) Pengembangan Industri Produk Halal, 2) Pengembangan Industri Keuangan Syariah, 3) Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan 4) Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah.

Program Prioritas KNEKS harus memberikan manfaat konkret terhadap perekonomian nasional. Terhadap program prioritas KNEKS tersebut, Wakil Presiden RI memberikan arahan agar setiap Kementerian/Lembaga, baik anggota maupun non anggota KNEKS, dapat menindaklanjutinya program-program tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kemudian dikoordinasikan dengan Manajemen Eksekutif KNEKS. Selaku Ketua Harian KNEKS, Wakil Presiden RI mengharapkan terdapat beberapa program dari 13 program prioritas yang dapat direalisasikan pada 2022.

Sebagai anggota KNEKS, Bank Indonesia berkomitmen untuk secara aktif mendukung tercapainya Program Prioritas KNEKS tersebut. Dari total 13 Program Prioritas, Bank Indonesia

Gambar 3.29. Area Program Prioritas KNEKS

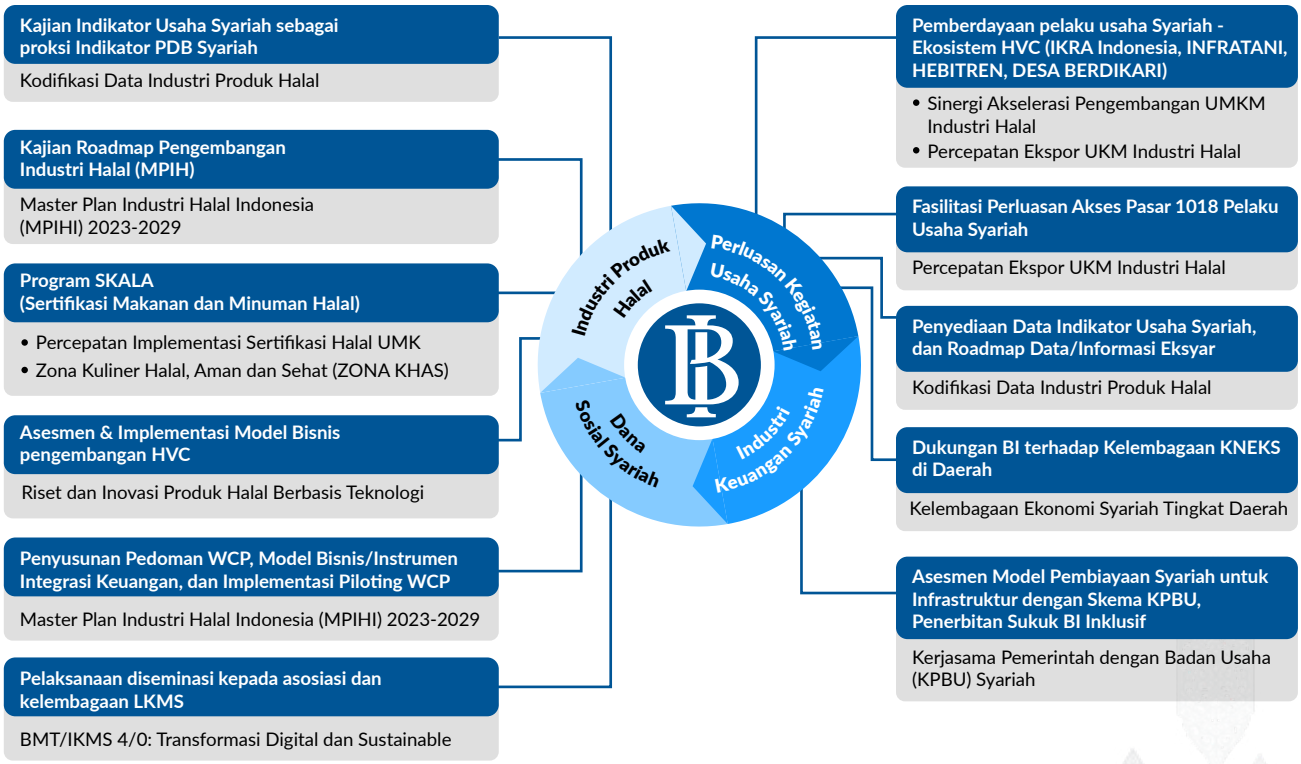

Sumber: KNEKS

aktif mendukung pencapaian 12 Program Prioritas yang tersebar dalam empat klaster tersebut. Bank Indonesia telah melakukan pemetaan dan identifikasi program kerja di bidang eksyar yang mendukung pencapaian Program Prioritas KNEKS (Gambar 3.29). Dalam implementasinya, telah dilakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, diantaranya Manajemen Eksekutif KNEKS, 16 K/L Anggota KNEKS, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta pihak terkait lainnya. Peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, menjadi salah satu akselerator dalam penguatan peran BI untuk mendukung tercapainya program prioritas KNEKS.

Highlight Program Prioritas KNEKS

Dalam rangka mendukung penyusunan arah pengembangan industri produk halal Indonesia jangka panjang, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Kajian Akademik pembentukan Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MPHI) 2022 – 2029. Bank Indonesia telah menyusun kajian terkait *Roadmap* Industri Halal Indonesia bekerja sama dengan Kemenperin, BPJPH, Bappenas, dan ME-KNEKS, sebagai masukan dalam penyusunan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI). MPIHI dapat menjadi *guidance* arah pengembangan industri halal, agar pengembangan yang dilakukan terstruktur dan mengarah pada tujuan yang sama, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia, khususnya pada sektor prioritas, seperti Makanan dan Minuman Halal, *Modest Fashion*, Kosmetik, Farmasi, dan Pariwisata Ramah Muslim.

KNEKS bekerja sama dengan K/L Anggota telah menyusun dashboard Pusat Data Ekonomi Syariah dengan tujuan agar kebijakan eksyar dapat disusun secara komprehensif untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, sebagai wujud kontribusi terhadap PDES, Bank Indonesia telah mengembangkan konsep Indikator Aktivitas Usaha Syariah (AUS), yang telah menjadi pedoman dan referensi utama dalam pengembangan Kodifikasi Data Industri Produk Halal dan penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) '23-'29. Indikator ini dibangun dengan sinergi dan kolaborsi berbagai pihak, dan dapat menjadi inisiasi pertama di dunia dalam pengembangan konsep PDB Syariah. AUS tidak hanya mengukur nilai tambah produk barang dan jasa sesuai prinsip syariah, namun sekaligus mengukur penggunaan sumber pembiayaan syariah dalam memproduksi barang dan jasa tersebut. Inisiatif ini juga dapat mencerminkan posisi Indonesia sebagai *center of excellence* ekonomi syariah global.

Pembentukan area yang khusus menaungi produsen produk halal juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk halal dan sekaligus memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen. Area tersebut dapat memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh produk Halal serta meningkatkan ketertarikan masyarakat pada destinasi halal terintegrasi. Untuk mendorong upaya tersebut KNEKS mencanangkan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) sebagai bentuk *piloting showcase* implementasi kebijakan Halalan Toyyiban. Dari 8 lokasi *pilot project* Zona KHAS pada 2022, 1 lokasi (Taman Valkenet Malabar – Bandung) telah secara utuh menjadi Zona KHAS, sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses sertifikasi (audit, fatwa halal, serta aman dan sehat). Ke depan direncanakan akan dilakukan penambahan 3 lokasi lainnya dan saat ini sudah dilakukan audiensi dengan *stakeholder*. Untuk mendukung upaya tersebut, Bank Indonesia juga mengimplementasikan program SKALA (Sertifikasi Halal) berbasis Perguruan Tinggi (PT) di 6 PT yaitu Unsyiah (Aceh), UGM (Yogyakarta), UIN Syarif Hidayatullah (DKI Jakarta), UMI (Sulawesi Selatan), Tazkia Institut (Jawa Barat) dan UIN Fatahul Muluk (Papua). *Piloting* tersebut ditandai dengan Peluncuran Kantin Halal pada Perguruan Tinggi tersebut.

Selain itu, untuk menyelaraskan kebijakan eksyar antar otoritas di tingkat daerah, dibutuhkan lembaga khusus yang bertugas mengimplementasikan kebijakan eksyar di tingkat daerah. Untuk itu, KNEKS bersama Kementerian/Lembaga baik anggota dan non-anggota KNEKS, termasuk Bank Indonesia, mendorong pembentukan kelembagaan ekonomi syariah di rangka daerah yang disebut dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Pembentukan KDEKS berfungsi untuk i) memberikan rekomendasi arah kebijakan strategis di sektor eksyar; ii) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis eksyar di daerah; iii) serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan eksyar di tingkat daerah. Sebagai anggota KNEKS, BI mendukung perluasan

KDEKS melalui keterlibatan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia sebagai pelaksana peran BI dalam KNEKS di tingkat daerah. KDEKS merupakan bagian penting dalam strategi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat inklusivitas perekonomian daerah. Pada tahun 2022, telah terbentuk 6 (enam) KDEKS di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, KDEKS akan dibentuk di Provinsi Jabar dan Provinsi Sumut yang diawali dengan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Jabar tentang pembentukan KDEKS. Melalui KDEKS yang terbentuk, Bank Indonesia akan terus mendorong akselerasi beberapa program eksyar unggulan, antara lain sertifikasi halal.

Capaian Program Kerja KNEKS 2022

Selama tahun 2022, program kerja KNEKS, baik yang dilaksanakan oleh Anggota maupun non anggota KNEKS, telah mencatatkan pencapaian yang baik. Beberapa pencapaian tersebut dapat terlihat dari beberapa kategori, yaitu:

1. **Sertifikasi Halal UMK Melalui Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*)**. Menjelang akhir 2022, baru 35.930 sertifikasi halal *self-declare* yang telah diterbitkan atau 10,27% dari total kuota yang disediakan oleh Pemerintah sebanyak 349.834. Tantangan utama adalah sumber bahan baku bagi UMKM seperti RPH/TPH belum bersertifikasi halal dan proses bisnis sertifikasi halal belum berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi JPH, mendorong piloting RPH yang sudah ber-Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan fasilitasi pembiayaan untuk mengakselerasi sertifikasi halal.
2. **Kawasan Industri Halal (KIH)**. Tingkat *occupancy* dari 3 KIH masih berada pada kisaran 4,7% - 33,1%. Diperlukan dukungan untuk mengoordinir integrasi industri dari hulu ke hilir, menyegerakan revisi Permenperin No.17/2020, memperkuat promosi investasi, dan mendorong berkembangnya Sentra IKM di wilayah Provinsi NTB, Riau, Sumbar, Sulsel dan Aceh.
3. **Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah**. Sampai dengan Q2 2022, pembiayaan syariah untuk proyek KPBU meliputi 13 proyek KPBU dari KemenPUPR dan Kemenhub dengan total pembiayaan yang mencapai Rp12,38 T. Ke depan, dukungan untuk keberlanjutan KPBU RSUDZA diharapkan tetap diperoleh baik melalui penyusunan pedoman dan perencanaan tahunan KPBU Syariah, bimbingan teknis skema KPBU Syariah kepada PJPK pusat dan daerah, serta dukungan berkelanjutan dari

Kementerian, OJK dan BI untuk *business matching* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek KPBU.

4. **Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Perbankan Syariah**. Market Share Perbankan Syariah mengalami peningkatan mencapai 7,03% (Agustus 2022) dari sebelumnya 6,54% (Agustus 2021), yang disebabkan oleh konversi beberapa BPD. Selanjutnya, penyaluran gaji ASN melalui Bank Syariah mencapai Rp923,27 Miliar (Desember 2022) dari sebelumnya Rp835,08 Miliar (Desember 2021), seiring dengan telah ditetapkannya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu Bank Operasional penyalur dana APBN.

5. **Transformasi Pengelolaan Wakaf Uang Nasional**. Hal tersebut tercermin pada: 1) nilai akumulasi wakaf uang nasional (termasuk akumulasi Cash Waqf Linked Sukuk) yang meningkat menjadi Rp1,77 Triliun (per Q4 2022) dari Rp1,48 Triliun (per Q4 2021), 2) Jumlah Nazhir yang tersertifikasi kompetensi berbasis SKKNI (LSP BWI) mencapai sebesar 1.478 (Desember 2022) dari 438 (Juni 2021), serta 3) Penguatan regulasi (revisi UU Wakaf) dan tata kelola wakaf (penyusunan Technical Notes Waqaf Core Principle on Good Nazhir Governance) oleh BWI, DEKS BI dan World Zakat and Wakaf Forum.

6. **Pengembangan BMT/IKMS 4.0 (Transformasi Digital dan Sustainabilitas)**, yang tercermin pada: 1) Digitalisasi telah diimplementasikan pada 310 Institusi Keuangan Mikro Syariah (BMT, BWM, KSPPS, LKMS) berbasis masjid, pesantren dan lainnya di lebih dari 7 provinsi, 2) Penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Koperasi Syariah melalui LPDB-KUMKM mencapai Rp729 Miliar atau 45,9% (per 12 Desember 2022) dari total pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM. 3) Peningkatan akses pembiayaan melalui penandatanganan MoU 30 BPRS dengan PT Sarana Multigriya Finansial Persero (telah disalurkan pembiayaan perumahan sebanyak Rp65 Miliar), 4) Peningkatan kompetensi SDM BMT melalui kerja sama dengan Kemenkeu melalui pembuatan *e-Learning* pengenalan Baitul Maal wat Tamwil.

7. **Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal**. Pengembangan UMKM industri halal terakselerasi melalui penguatan kapasitas, kurasi dan fasilitas, serta pembiayaan syariah terintegrasi, sbb.:

   a. Penguatan Kapasitas Usaha UMKM: a) Pendampingan UMKM berbasis syariah sudah diimplementasikan bersama BSI UKM Centre, Pos Logistic, Shipper, dan ALAMI, b) Kajian Inkubasi Bisnis Syariah dalam tahap finalisasi, dan c) 8 Modul Pelatihan Kewirausahaan Syariah telah digunakan.

   b. 100 UMKM telah dikurasi dan difasilitasi investor meeting dengan realisasi penyaluran sebesar Rp5,32 Miliar, sedangkan Rp8,20 Miliar masih dalam proses.

   c. Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah bagi UMKM pada Juli 2022 mencapai sebesar 18,91% atau Rp88,38 Triliun (86% dari target 2024 rasio RPJMN, atau 63% dari target 2024 rasio MEKSI).

   Oleh karena itu, diperlukan dukungan untuk kewirausahaan Syariah dalam program yang dilaksanakan Komite Kewirausahaan Nasional, peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Business Matching UMKM dengan Lembaga Keuangan Syariah, akselerasi asistensi teknis digitalisasi, serta penguatan kajian dan implementasi Inkubasi Bisnis Syariah.

8. **Percepatan Ekspor UKM Industri Halal**. Ekspor produk halal ke negara-negara OKI meningkat sebesar 18,49% (yoy) dari 738,7 Juta dolar AS (September 2021) menjadi 875,4 Juta dolar AS (September 2022). Peningkatan ekspor produk halal didukung oleh:

   a. Komitmen transaksi yang terbentuk pada event Trade Expo Indonesia (TEI) dan ISEF, serta binaan dan mitra Kemendag, IKRA Indonesia, dan Arqam Alami dengan *aggregator* asal Malaysia.

b. Promosi perdagangan produk halal binaan BI-IKRA Indonesia (Mamin Halal dan Fesyen Muslim) pada World Expo Dubai (80 UKM), dan MIHAS (6 UKM).

c. Program Juara Ekspor BI-DEKS & Nudira, berupa *piloting* ekspor produk halal pesantren sebesar 100kg cabai organik ke Jepang.

d. Kemudahan ekspor bagi UKM eksportir ke negara tujuan ekspor (NTE) prioritas, yang terdiri dari 1 Rumah Produksi (BRIN Cibinong) dan 1 Rumah Kemas (BI – LWMUI - Goorita Sidoarjo) yang telah bersertifikasi halal.

9. **Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona Khas)**. Dari 8 lokasi pilot project Zona KHAS pada 2022, 1 lokasi (Taman Valkenet Malabar – Bandung) telah secara utuh menjadi Zona KHAS, sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses sertifikasi (audit, fatwa halal, serta aman dan sehat). Ke depan direncanakan akan dilakukan penambahan 3 lokasi lainnya dan saat ini sudah dilakukan audiensi dengan *stakeholder*.

10. **Kelembagaan Ekonomi Syariah Tingkat Daerah melalui Pembentukan KDEKS**. Telah terbentuk 6 (enam) KDEKS di 6 Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari 6 KDEKS dimaksud, telah dilaksanakan rapat pleno di 2 KDEKS (Sumbar dan Riau) berikut pendampingan dalam penyusunan program strategis Eksyar di masing-masing daerah tersebut. Saat ini telah tersedia regulasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi RAPBD, yang mengatur alokasi anggaran 31 Provinsi untuk memfasilitasi pembentukan KDEKS.

Usaha Syariah Berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi. Telah dilakukan penguatan pusat riset halal melalui pembentukan pusat riset bioindustri laut dan perairan darat BRIN sebagai fasilitas pengembangan teknologi produk halal berbasis maritim nasional; serta penguatan iptek, kreativitas dan inovasi melalui pembinaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas daya serap penggunaan teknologi oleh UMKM.

Boks 3.1 Peran EKSyar dalam Mendukung Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Presidensi G-20 tahun 2022 yang diamanahkan pada Indonesia di tengah pemulihan pasca pandemi merupakan bentuk pengakuan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar yang merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Dengan mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Konsepsi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif menjadi perhatian global dan isu utama dalam inisiatif G20. Konsep pembangunan ekonomi yang inklusif ini sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi syariah. Dalam rangka mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan, melalui pendekatan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia menginisiasi beberapa kegiatan sebagai *side event* dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia 2022. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Seminar on Financial Inclusion and Sustainable Economy yang diselenggarakan pada 20 April 2022 di Bali, *High-Level Discussion on Financial Inclusion: Optimizing Endowment Fund for Sustainable Financial Inclusion* yang diselenggarakan pada 14 Juli 2022 di Bali, The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment yang diselenggarakan pada 11-12 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center dan *Seminar on Leveraging on Sukuk for Sustainable Finance dan Islamic Finance and Digitalization* pada 14 November 2022 di Bali.

Inisiatif Bank Indonesia dalam Inklusi Keuangan melalui Keuangan Syariah

Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 membutuhkan solusi dengan menghadirkan instrumen keuangan yang mampu memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Seminar *on Financial Inclusion and Sustainable Economy* merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Seminar yang dibuka secara virtual oleh Gubernur Bank Indonesia ini dihadiri lebih dari 500 partisipan yang tersebar dari berbagai negara, dari kalangan *policy maker*, akademisi, *banker* dan *fintech*. Seminar ini berupaya untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di tengah masyarakat. Diskusi terkait inovasi dalam keuangan syariah serta *showcase* peran instrumen keuangan syariah baik komersial maupun sosial diharapkan dapat semakin mendorong inklusi keuangan syariah. Pendekatan inklusi keuangan kepada u*nbanked community* dapat dilakukan dengan memberdayakan komunitas tersebut melalui projek bisnis dengan skala kecil. Pemberdayaan tersebut dapat diinisiasi melalui kerja sama fintek dengan masyarakat.

Di sisi keuangan sosial, instrumen keuangan sosial berupa wakaf dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan guna mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi. Wakaf adalah penyerahan uang atau aset kepada lembaga wakaf yang akan mengelola uang/aset tersebut. Pengelolaan uang/aset wakaf dapat berupa proyek investasi, yang pendapatan investasinya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat duafa. Manfaat wakaf tidak hanya untuk pihak tertentu saja, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan, bantuan bencana, layanan kesehatan gratis, pemberian pendidikan agama dan pengetahuan umum, serta pelestarian lingkungan.

Bekerja sama dengan Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Indonesia menginisiasi kegiatan *side event* dari rangkaian kegiatan G20, yang bertujuan untuk mengoptimalkan *cross-border sustainable endowment fund*, yang juga dikenal sebagai wakaf dalam ekonomi syariah, sebagai upaya penguatan inklusi keuangan. Kegiatan ini, menjadi agenda kolaborasi kedua antara Bank Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) dengan pemateri utama Gubernur Bank Indonesia dan Presiden IsDB,

serta narasumber Minister of Economy, Planning and Cooperation Republic of Senegal, President Food and Agriculture Organization (FAO) United Nation, dan Special Adviser to the United Nation Secretary General. *High level discussion* dihadiri oleh 337 partisipan, baik secara luring maupun daring.

Kegiatan yang dilakukan berupa Diskusi Tingkat Tinggi tentang Inklusi Keuangan: Mengoptimalkan Dana Abadi untuk Inklusi Keuangan yang Berkelanjutan (*High-Level Discussion on Financial Inclusion: Optimizing Endowment Fund for Sustainable Financial Inclusion*). Diskusi tersebut menampilkan pengalaman beberapa negara dan lembaga swasta dalam pengelolaan wakaf. Dalam kesempatan itu Bank Indonesia memfasilitasi lembaga wakaf (nazir) di Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan Awqaf Properties Investment Fund (APIF)-IsDB. Sebanyak 10 Nazir melakukan *one-on-one consultation* dengan nilai proyek sebesar Rp2,32 triliun.

APIF-IsDB mendorong pengembangan wakaf di Indonesia dalam bentuk kerja sama investasi untuk membangun proyek komersial dengan memanfaatkan aset wakaf yang dimiliki oleh nazir. Sebagian keuntungan dari proyek komersial akan digunakan untuk membantu kelompok masyarakat duafa (terlampir model kerja sama dengan APIF). Kerja sama nazir dengan APIF-IsDB diharapkan dapat mengoptimalkan aset wakaf yang belum termanfaatkan, sekaligus membantu lebih banyak kelompok masyarakat duafa.

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Syariah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa total usaha UMKM di Indonesia berjumlah 64 juta unit, yang didominasi oleh usaha mikro-kecil (99,99%). Di sisi lain, pelaku usaha perempuan mencapai 43,45% dari total UMKM (Badan Pusat Statistik, 2016).

Presidensi G20 Indonesia 2022 mengambil tema pemberdayaan perempuan sebagai salah satu topik pembahasan. Pentingnya isu ini terlihat dari dibentuknya dua kelompok khusus yang membahas peningkatan posisi dan kesetaraan perempuan, yaitu G20 EMPOWER yang terdiri dari aliansi pemerintah dan swasta serta Women 20 yang merupakan *engagement group*.

G20 EMPOWER berfokus pada tiga tema utama, yakni (1) akuntabilitas perusahaan untuk indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) guna mendorong kepemimpinan dan memperkuat posisi perusahaan di tempat kerja; (2) upaya swasta dan pemerintah untuk terus mendorong dan mendukung peran perempuan dalam usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai penggerak ekonomi; serta (3) mengembangkan kesiapan masa depan perempuan dalam ekonomi digital.

Sementara itu, empat topik bahasan dalam Women 20 Indonesia ialah (1) pemajuan kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghilangkan

diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian; (2) promosi inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola perempuan; (3) peningkatan ketahanan dengan mengatasi kerentanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan perdesaan; serta (4) respons kesehatan tanpa membedakan gender.

Sejalan dengan hal itu, untuk memperkuat peran pelaku usaha perempuan, Bank Indonesia bersama dengan komunitas usaha syariah perempuan menginisiasi program pengembangan pelaku UMKM syariah perempuan, antara lain melalui peningkatan kapasitas, penguatan silaturahmi dan kerja sama di antara para komunitas tersebut.

Komunitas yang terlibat adalah Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Persaudaraan Muslimah (Salimah), Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (Persami), Bunda Wakaf dan Shaliza, yang bersama Bank Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan Konferensi Internasional Pertama tentang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Syariah (The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment). Konferensi ini diharapkan menjadi salah satu tonggak pergerakan pemberdayaan wanita.

Konferensi menghasilkan komitmen terhadap: (i) resolusi komunitas pelaku usaha syariah perempuan dalam mendukung ekosistem sektor makanan minuman halal dan fesyen muslim; (ii) dukungan digitalisasi dan skema pembiayaan baik pembiayaan komersial maupun sosial bagi pelaku usaha syariah perempuan; serta (iii) peta dan strategi dalam menembus pasar domestik dan internasional.

Inisiatif Bank Indonesia mendorong instrumen ekonomi syariah berkelanjutan dan digitalisasi

Keuangan berkelanjutan dan digitalisasi sistem pembayaran menjadi bagian dari agenda pembahasan jalur keuangan presidensi G20 Indonesia 2022. Dengan mengambil tema instrument ekonomi syariah yang berkelanjutan dan digitalisasi dilakukan *Seminar on Leveraging on Sukuk for Sustainable Finance dan Islamic Finance and Digitalization*. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BI dan IsDB dengan Kementerian Keuangan RI dan Saudi Central Bank, dihadiri oleh 1.265 peserta dari berbagai kalangan. Seminar tersebut menekankan pentingnya untuk bersama memajukan sukuk sebagai instrumen ekonomi syariah yang berkelanjutan dan pentingnya mendorong digitalisasi pembayaran yang inklusif sehingga mendorong penetrasi ekonomi dan keuangan syariah. Pasar ekonomi keuangan syariah yang besar memiliki peluang yang perlu dimanfaatkan yaitu melalui penggunaan teknologi.

Gambar 3.30. ***The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment***

Sumber: KNEKS

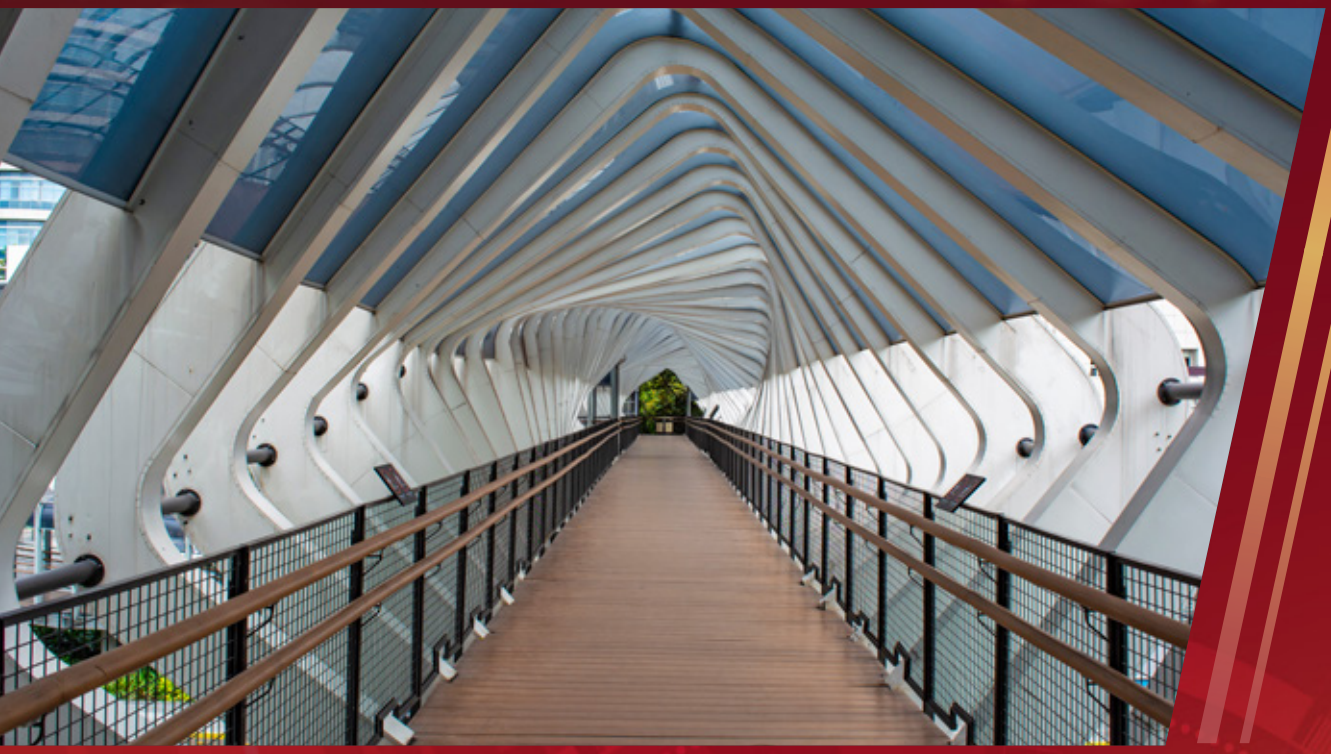

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan mitra strategis, baik kementerian dan lembaga dalam wadah KNEKS maupun lainnya, komunitas dan pelaku usaha di industri, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, diharapkan mampu menjaga peran ekonomi dan keuangan syariah dalam momentum pemulihan. Secara nasional kebijakan pengembangan ekonomi syariah akan berfokus pada antara lain percepatan sertifikasi halal dan ekspor produk Halal. Sementara kebijakan pengembangan keuangan syariah nasional akan memprioritaskan antara lain pada pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah serta transformasi pengelolaan wakaf uang. Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia mengacu pada tiga strategi utama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendorong pembiayaan, serta penguatan riset, asesmen dan edukasi. Dalam rangka mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, Bank Indonesia bersinergi mengusung tiga program *flagship* di tahun 2023, yaitu penguatan Global Halal Hub (GHH), akselerasi sertifikasi halal dan penguatan Indonesia International Modest Fashion Festival (In2MotionFest). Sejalan dengan *flagship* tersebut, program pengembangan lainnya akan berfokus pada penguatan ekosistem rantai nilai makanan halal dan *modest fashion*, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah termasuk inovasi wakaf produktif, serta penguatan edukasi dan sosialiasi untuk percepatan peningkatan literasi ekonomi syariah.

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DENGAN SINERGI KNEKS

PENGEMBANGAN *HALAL VALUE CHAIN*
- MODEST FASHION
- HALAL FOOD

PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH
- SUKUK BI INKLUSIF
- SWAP LINDUNG NILAI SYARIAH
- WAKAF PRODUKTIF

EDUKASI DAN SOSIALISASI
- FESYAR
- ISEF

Sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Akselerasi Sertifikasi Halal	Penguatan Ekosistem Ekspor Halal	Penguatan IN2MOTIONFEST
HALAL INDONESIA		

4.1

Asesmen Menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah sepatutnya menjadi kenyataan, sehingga eksyar mampu berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan Indonesia menjadi pelaku utama dalam eksyar global. Visi menjadi pusat industri halal dunia membutuhkan kebijakan dan akselerasi program pengembangan eksyar yang tepat. Kebijakan dan akselerasi program pengembangan eksyar ini harus mampu mengatasi tantangan yang dimiliki oleh ekosistem eksyar nasional. Oleh sebab itu, diperlukan asesmen terhadap kondisi eksyar nasional untuk mengidentifikasi kebijakan dan akselerasi program pengembangan berdasarkan *gap* yang ada.

4.1.1. *Gap analysis* menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

Untuk menjadi negara yang terdepan dalam industri halal global, Indonesia harus mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Upaya optimalisasi tentu membutuhkan pengetahuan kemana destinasi dari pengembangan eksyar nasional dan posisinya saat ini. Sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekosistem eksyar. Dengan mengetahui destinasi dan posisi dari eksyar nasional saat ini, diharapkan dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi *gap* dan perlu dikembangkan dalam bentuk kebijakan dan akselerasi program.

Secara umum kondisi eksyar nasional saat ini masih perlu dioptimalkan, baik ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan usaha syariah, masih kecilnya pangsa pembiayaan syariah dan masih belum signifikannya tingkat literasi eksar masyarakat (Gambar 4.1). *Necessary condition* menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, yaitu sertifikasi halal bagi produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi pendukung lainnya (*sufficient condition*) yaitu kualitas produk dan pelaku usaha masih harus ditingkatkan lagi agar lebih kompetitif, perluasan *outlet* pasar produk halal terutama penetrasi produk halal Indonesia secara global, dan dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Sementara itu, masih belum signifikannya pangsa pembiayaan syariah menjadi tantangan utama di sektor keuangan syariah. Secara spesifik, pangsa pembiayaan syariah yang masih rendah disebabkan karena basis penabung yang masih terbatas, inovasi produk terbatas, jumlah debitur besar masih rendah, inovasi kebijakan belum memadai, basis investor keuangan sosial syariah belum kuat, model bisnis integrasi keuangan komersial & sosial masih terbatas.

Sedangkan masih belum signifikannya tingkat literasi eksyar masyarakat diprakirakan karena upaya edukasi yang belum menjangkau semua segmen masyarakat, sinkronisasi strategi literasi antar lembaga masih minim dan strategi komunikasi yang belum memadai. Tingkat literasi masyarakat terhadap eksyar berdasarkan indeks literasi baru mencapai 20% tahun 2022. Untuk menjadi pelaku utama dalam industri halal global, Indonesia perlu mendorong program edukasi yang berdampak masif.

Pertumbuhan eksyar nasional yang masih belum memuaskan dan tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, ditengarai karena penggunaan teknologi dan digitalisasi pada upaya di atas masih terbatas. Penggunaan teknologi digital saat ini menjadi faktor kunci bagi industri, terlebih bagi industri eksyar yang relatif masih baru jika dibandingkan dengan konvensional. Selain itu, sampai saat ini belum tersedia indikator pengukuran capaian usaha syariah, sehingga belum dimiliki data atau informasi yang memadai untuk membantu formulasi kebijakan. Pengembangan eksyar saat ini sudah menjadi *concern* banyak pihak khususnya K/L pemerintah. Namun agar upaya pengembangannya memberikan hasil yang signifikan, pendekatan sinergi dan kolaborasi menjadi begitu krusial.

Gambar 4.1. *Gap Analysis* Menuju Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia

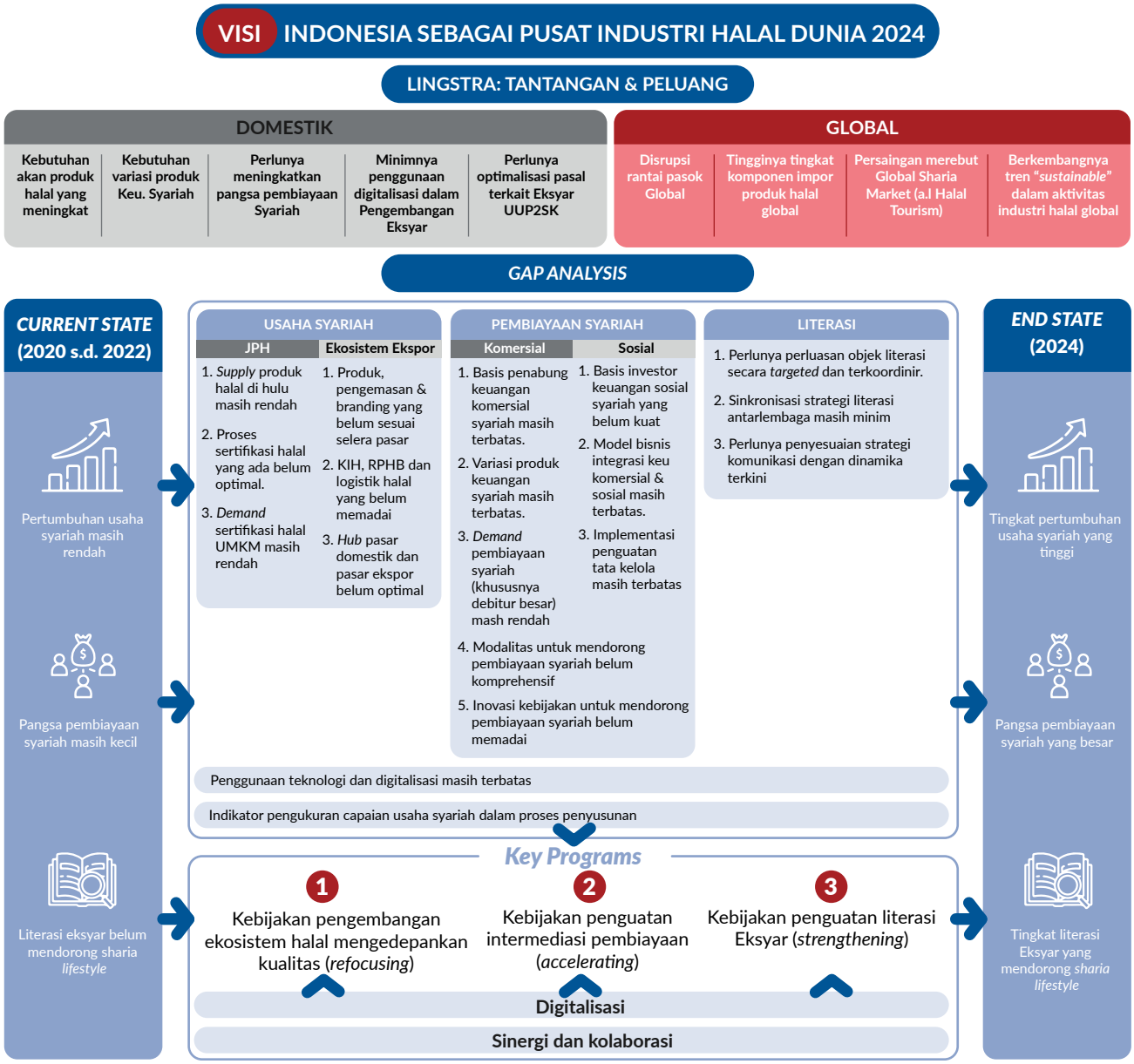

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

4.1.2. Penguatan Sinergi dan Akselerasi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perlunya pengembangan eksyar yang mampu menjawab tantangan yang diidentifikasi dalam *gap analysis*. Arah kebijakan nasional mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan dengan pendekatan sinergi dan kolaborasi, baik yang dilakukan bersama lembaga pemerintah dalam wadah KNEKS maupun dengan *stakeholders* non-pemerintah. Sinergi dan kolaborasi dari semua *stakeholders* menjadi sangat penting, khususnya dalam mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS dalam Rapat Pleno KNEKS tanggal 20 Desember 2022 yang dihadiri oleh pimpinan dari 26 kementerian/lembaga (K/L) Anggota dan non-Anggota KNEKS, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia bersifat multidimensi sehingga diharapkan semua *stakeholders* dapat bersinergi dan berkolaborasi.

Selain itu, pada Rapat Pleno KNEKS tersebut Wakil Presiden menekankan akselerasi program pengembangan eksyar yang mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Akselerasi program diantaranya berupa program penguatan industri halal melalui program sertifikasi halal dan pengembangan model bisnis serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan syariah, baik keuangan komersial, sosial maupun mikro syariah. Akselerasi pengembangan eksyar semakin dikuatkan dengan sinergi dan kolaborasi antara K/L dalam wadah KNEKS. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting agar pengembangan di sektor industri halal dan keuangan syariah semakin terakselerasi. Sementara itu, Bank Indonesia akan terus berkomitmen menjadi motor pengembangan eksyar nasional melalui perannya sebagai regulator, akselerator dan inisiator. Pada tahun 2023 dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan eksyar nasional akan dilakukan melalui program *flagship* dan program pengembangan lainnya.

4.2

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

4.2.1. *Milestone* Program Kerja KNEKS

KNEKS memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengembangan eksyar nasional. KNEKS menjadi koordinator dalam implementasi program-program pengembangan eksyar dari K/L pemerintah yang menjadi anggota KNEKS. Semakin banyak K/L yang terlibat dalam pengembangan eksyar nasional, maka akan semakin banyak aspek yang terbenahi dan teroptimalkan dalam ekosistem eksyar nasional. Banyaknya K/L yang sudah terlibat dalam pengembangan eksyar perlu diorkestrasi dengan baik agar memberikan hasil yang optimal dengan dampak yang masif. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, upaya pengembangan eksyar nasional memang membutuhkan keterlibatan semua komponen di tingkat pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. KNEKS diharapkan mampu mengajak sebanyak mungkin komponen tersebut dan menyatukan langkah dalam program pengembangan yang integratif, sistematis dan terukur.

KNEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional, dengan fungsi sebagai berikut: (i) memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; (ii) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan melaksanakan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah; (iii) merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan (iv) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, KNEKS memiliki 13 program prioritas yang dikelompokkan dalam 4 jenis program berdasarkan sektor. Keempat kelompok program tersebut adalah pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah (Gambar 4.2), pengembangan dana sosial

Gambar 4.2. Program Prioritas KNEKS

Sumber: KNEKS

syariah serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. KNEKS pada tahun 2023 berupaya mendorong agar keempat sektor tersebut mampu mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Untuk mengembangkan industri produk halal, KNEKS akan fokus pada upaya akselerasi sertifikasi halal melalui penyempurnaan regulasi JPH, mendorong *piloting* Rumah Potong Hewan (RPH) dan memfasilitasi pembiayaan untuk mengakselerasi sertifikasi halal. Di samping itu, pengembangan industri produk halal juga akan dilakukan melalui penguatan Kawasan Industri Halal (KIH) dengan mendorong kawasan yang mengintegrasikan industri halal dari hulu ke hilir, memperkuat promosi investasi dan mendorong berkembangnya Sentra IKM di beberapa provinsi, seperti NTB, Riau, Sumbar, Sulsel dan Aceh.

Untuk pengembangan industri keuangan syariah, KNEKS akan mendorong penyusunan pedoman dan perencanaan tahunan KPBU Syariah dan pelaksanaan bimbingan teknis skema KPBU Syariah kepada PJPK pusat dan daerah. Selain itu, KNEKS juga akan melakukan pengembangan dan penguatan ekosistem perbankan syariah melalui optimalisasi penyaluran gaji dan tunjangan ASN melalui bank syariah, penguatan BPD syariah, serta pengembangan pembiayaan untuk usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Untuk program ini dibutuhkan dukungan semua lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sementara itu untuk pengembangan dana sosial syariah, KNEKS akan fokus mendorong transformasi pengelolaan wakaf uang nasional dan pengembangan BMT/IKMS 4.0. Transformasi pengelolaan wakaf akan dilakukan dengan melakukan perbaikan regulasi wakaf untuk penguatan tata kelola wakaf nasional serta mengevaluasi dan mengeskalasi program Inkubasi wakaf produktif. Agar transformasi pengelolaan wakaf dapat berlangsung komprehensif dan efektif, KNEKS akan mendorong penyusunan *roadmap* wakaf nasional. Sedangkan untuk pengembangan BMT/IKMS 4.0 akan dilakukan digitalisasi dan penguatan pada program pembinaan dan pengawasan BMT/IKMS.

Selanjutnya KNEKS akan mendorong pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, yang menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Untuk upaya ini KNEKS akan fokus mensinergikan akselerasi pengembangan UMKM industri halal, mempercepat ekspor UKM industri halal, memperkuat zona kuliner halal, aman dan sehat (Zona Khas), mendorong kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan mendorong usaha syariah berbasis teknologi, kreativitas dan inovasi. Mendorong sinergi akselerasi pengembangan UMKM industri halal meliputi program yang berorientasi pada peningkatan dukungan untuk kewirausahaan Syariah melalui Komite Kewirausahaan Nasional, peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan *Business Matching* UMKM dengan Lembaga Keuangan Syariah, akselerasi asistensi teknis digitalisasi, serta penguatan kajian dan implementasi Inkubasi Bisnis Syariah. Untuk mempercepat ekspor UKM industri halal dilakukan dengan mendorong Pembangunan Rumah Produksi Halal Bersama untuk peningkatan Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas produk UMKM serta mengintegrasikan dalam perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain yang tengah dalam tahap perundingan. Sementara itu untuk memperkuat zona kuliner halal, aman dan sehat (Zona Khas), KNEKS akan mendorong penambahan lokasi Zona KHAS lainnya yang sudah diawali melalui audiensi awal pada tahun 2022 dengan *stakeholder* terkait di lokasi potensial. Sedangkan untuk mendorong kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah dilakukan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga yang memiliki kantor perwakilan di daerah dengan KDEKS di daerah tersebut. Untuk mendorong usaha syariah berbasis teknologi, kreativitas dan inovasi akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Usaha Syariah Berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi serta penyusunan dokumen strategis yang memasukkan indikator produktivitas Aktivitas Usaha Syariah (AUS) sebagai dasar pengukuran.

4.2.2. Arahan Wakil Presiden RI terhadap Upaya Pengembangan Eksyar 2023

Sesuai dengan amanah Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS, pada tahun 2023, K/L Anggota KNEKS diharapkan dapat memperkuat program eksyar yang telah dilakukan. Beberapa upaya penguatan yang masih akan dilakukan dapat dikelompokkan pada beberapa area (Tabel 4.1), diantaranya adalah:

1. **Penguatan industri halal dan penyediaan produk halal**, melalui beberapa upaya, seperti perbaikan proses bisnis sertifikasi halal - *self declare*, percepatan Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan dan peningkatan jumlah Juru Sembelih Halal (Juleha), serta Penguatan Kawasan Industri Halal (KIH) dari hulul ke hilir.
2. **Percepatan Ekspor UKM halal** melalui beberapa upaya, yang terdiri dari penguatan *Shipping Services* dari BUMN serta fasilitasi melalui perjanjian dagang bersama antar negara.
3. **Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal** melalui beberapa upaya, melalui penguatan program kewirausahaan syariah, peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan bisnis *matching* UMKM, pemberian asistensi teknis digitalisasi UMKM Industri Halal, serta pengembangan kajian dan implementasi inkubasi untuk UMKM Syariah.
4. **Akselerasi ZONA KHAS** melalui beberapa upaya, antara lain melalui perrcepatan proses sertifikasi halal dan pelatihan penyelia halal di Zona KHAS, pemberian dukungan berkelanjutan dalam proses inspeksi kesehatan lingkungan dan aman sehat di Zona KHAS, promosi Zona KHAS, sinergi dengan Gernas BBI, serta peningkatan dukungan lembaga keuangan Syariah dalam penguatan kapasitas UMKM pada Zona KHAS.
5. **Akselerasi Pengembangan KPBU Syariah** melalui beberapa upaya, melalui percepatan proses KPBU syariah RSUD Zainal Abidin di Aceh, penyusunan pedoman dan perencanaan tahunan KPBU

Tabel 4.1. Arahan Wakil Presiden dalam Rapat Pleno KNEKS

Arahan Wapres Rapat Pleno KNEKS (Mei & Des 2022)			
No.	PILAR 1: Pemberdayaan Ekonomi Syariah	PILAR 2: Pendalaman Pasar Keuangan Syariah	PILAR 3: Edukasi dan Sosialisasi
1	Penguatan Kapasitas UMKM dan Industri Halal	Penguatan Ekosistem Perbankan Syariah	Percepatan Pembentukan KDEKS
2	Perbaikan Proses Bisnis Sertifikasi Halal yang Terintegrasi	Percepatan dan Perbaikan KPBU Syariah	Penyusunan Data Ekonomi Syariah **
3	Penguatan Kawasan Industri Halal (KIH)	Penguatan Tata Kelola Wakaf Nasional & Eskalasi Inkubasi Zakat/Wakaf Produktif	Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
4	Percepatan Ekspor UKM	Penyempurnaan *Roadmap* Wakaf/Zakat Nasional	
5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas *Business Meeting*		
6	Pengembangan kajian dan implementasi inkubasi UMKM Syariah		
7	Akselerasi Zona KHAS		

**Kelanjutan Arahan Wapres Rapat Pleno KNEKS 20 Mei 2022
Sumber: Rapat Pleno KNEKS Mei dan Desember 2022

dengan skema Syariah, serta peningkatan jumlah dan kualitas *business matching* proyek KPBU Syariah.

6. **Pengembangan dan Penguatan Industri Perbankan Syariah** melalui beberapa upaya, antara lain mendorong opsi pembayaran gaji dan tunjangan ASN melalui bank syariah, mendorong Pemda dalam upaya konversi dan penguatan BPD Syariah, serta mendorong pembiayaan untuk usaha kreatif dan inovatif.
7. **Transformasi Pengelolaan Wakaf Uang Nasional** melalui beberapa upaya, melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan tata kelola Wakaf Uang Nasional, evaluasi serta eskalasi program inkubasi wakaf produktif, penyusunan *roadmap* wakaf uang nasional, penyusunan kajian peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional, serta perluasan fasilitas sosialisasi dan penumbuhan wakaf uang.
8. **Pengembangan BMT/IKMS 4.0** melalui beberapa upaya, antara lain penguatan pembinaan dan pengawasan bagi BMT/IKMS, fasilitasi pembiayaan IKMS kepada UMKM, pengembangan infrastruktur digitalisasi BMT/IKMS, serta perluasan akses pembiayaan bagi BMT/IKMS yang memenuhi syarat.
9. **Penguatan Kelembagaan Ekonomi Syariah di Daerah**, melalui beberapa upaya yaitu percepatan proses revisi Peraturan Presiden tentang KDEKS, perencanaan program strategis eksyar di daerah; serta perbaikan mekanisme kolaborasi dan sinergi antara K/L dengan KDEKS.
10. **Penguatan Usaha Syariah Berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi**, melalui beberapa upaya, antara lain pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi serta percepatan pembentukan Kelompok Kerja Usaha Syariah Berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dari usaha syariah.
11. **Peningkatan literasi eksyar** dengan target 50% serta **integrasi perencanaan program pengembangan eksyar** dalam rencana pembangunan nasional dan daerah dalam penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024-2029.

4.3

Kebijakan Bank Indonesia Mendukung Pencapaian Visi

4.3.1. Program *Flagship*

Bank Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka dunia sesuai dengan arahan dan harapan Bapak Wakil Presiden. Dengan kekayaan sumber daya alam dan besarnya potensi pasar produk halal, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar menjadi *player* dominan dalam industri halal global. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah menetapkan 3 program *flagship* pada tahun 2023 yaitu Akselerasi Sertifikasi Halal, Penguatan Global Halal Hub (GHH) dan Perluasan In2MotionFest. Komitmen Bank Indonesia ditunjukkan pula dengan menyusun *taskforce* untuk mengawal pelaksanaan masing-masing program *flagship* tersebut. Pelaksanaan 3 program *flagship* ini akan maksimal jika dilakukan secara bersama-sama dengan *stakeholders* terkait. Oleh sebab itu, tantangan awal dari pelaksanaan 3 program *flagship* ini adalah sinergi dan kolaborasi.

A. Akselerasi Sertifikasi Halal

Latar Belakang Akselerasi Sertifikasi Halal

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Implementasi kewajiban sertifikasi halal tersebut dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap guna memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal sesuai regulasi. Sebagaimana diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021, tahapan pertama diberlakukan kepada produk makanan, minuman dan hasil dan jasa sembelihan yang harus bersertifikat halal setelah tanggal 17 Oktober 2024. Untuk tahapan kedua, semua produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan diwajibkan bersertifikat halal selambatnya tanggal 17 Oktober 2026. Melalui UU No 11 Tahun 2020 Pemerintah juga telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengurus sertifikasi halal melalui skema pernyataan halal (*self-declare*) dengan kriteria produk tertentu.

Kewajiban sertifikasi halal ini merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum hak warga negaranya. Sebelum terbitnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penerapan sertifikasi halal bersifat himbauan kepada para pelaku usaha tanpa adanya konsekuensi hukum. Melalui undang-undang ini, negara memberikan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Lebih lanjut, sertifikasi halal juga memberikan jaminan keamanan pangan karena adanya persyaratan penggunaan bahan baku dan tahapan proses produksi yang halal dan baik bagi kesehatan.

Tantangan Percepatan Sertifikasi Halal

Di tengah perkembangan yang progresif, proses sertifikasi halal di Indonesia dihadapkan pada tantangan dari kesiapan ekosistem jaminan produk halal. Penerbitan sertifikasi halal per tanggal 2 Desember 2022 tercatat sejumlah 40.671 sertifikat, atau sekitar 482.832 produk, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 17.287 sertifikat atau naik 135,27% dan sebesar 305.754 produk atau naik sebesar 57.92%. Namun, pencapaian tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan target sertifikasi halal sebanyak 10 juta produk per tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Belum optimalnya pencapaian target sertifikat halal tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi dalam ekosistem jaminan produk halal, antara lain meliputi kesiapan SDM, proses dan infrastruktur pendukung. Pada aspek sumber daya manusia, kapasitas pelaku usaha dan perangkat pendukung halal masih terbatas. Pelaku usaha khususnya di tingkat mikro dan kecil memiliki keterbatasan memahami prosedur sistem jaminan produk halal yang dianggap sulit dan rumit. Selain itu, literasi digital pelaku usaha juga terbatas sehingga menyulitkan untuk mendaftar sertifikasi halal secara *online* menggunakan sistem SIHALAL. Di sisi perangkat halal yang meliputi penyelia halal, pendamping halal, auditor halal dan juru sembelih halal, masih terdapat kesenjangan kompetensi, jumlah

dan sebaran yang terpusat di Pulau Jawa. Sebagai contoh untuk tenaga pendamping halal, jumlah yang teregistrasi saat ini adalah sekitar 19 ribu orang dari target 35.500 orang, dengan 71.8% berada di Pulau Jawa (BPJPH, 2022).

Infrastruktur pendukung sistem jaminan produk halal yang handal, lengkap dan merata belum tersedia. Di sisi hulu, jumlah fasilitas penyedia bahan baku halal masih terbatas, seperti rumah potong hewan teregistrasi halal dan toko bahan baku halal. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya pilihan pelaku usaha dan industri halal untuk mendapatkan bahan baku bersertifikat halal. Sejalan dengan hal itu, ketersediaan lembaga halal seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pelatihan Halal dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) juga masih terbatas jumlahnya (Tabel 4.2). Dari aspek digitalisasi, sistem informasi SIHALAL yang ada saat ini juga masih belum didukung dengan otomasi proses validasi dan verifikasi serta kapasitas infrastruktur IT yang memadai, sehingga berdampak pada relatif lambatnya proses sertifikasi.

Strategi Percepatan Sertifikasi Halal

Percepatan pencapaian target sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia memerlukan strategi yang fokus pada penguatan ekosistem jaminan produk halal. Bank Indonesia telah menyusun kerangka kerja untuk mengakselerasi sertifikasi halal, lihat gambar 4.3. Di sisi hulu, strategi yang ditempuh bertujuan untuk memperbanyak keberadaan penyedia bahan baku halal yang berkualitas, seperti rumah potong hewan bersertifikasi halal, toko bahan baku halal serta pabrik gelatin halal yang menjadi komponen penting dalam produksi beragam produk. Fasilitas infrastruktur pendukung bersertifikat halal di sisi hulu ini memberikan kepastian kehalalan bahan baku utama, tambahan dan penolong yang dibutuhkan untuk produksi, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal oleh pelaku usaha.

Strategi penguatan proses sertifikasi halal ditempuh dengan memperbanyak jumlah SDM halal, lembaga halal serta kehandalan digitalisasi. Kesenjangan jumlah dan kualitas SDM halal yang tersedia saat ini perlu ditingkatkan dengan memperluas kerja sama dengan sejumlah lembaga yang memiliki potensi SDM, seperti perguruan tinggi, balai kerja dan entitas pendamping UMKM. SDM potensial yang dimiliki oleh tiap lembaga tersebut dibekali dengan modul pelatihan yang komprehensif dan praktek yang intensif agar dapat menjadi tenaga pendamping yang handal bagi para pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas lembaga halal seperti Lembaga Pelatihan Halal (LPH), Lembaga Pelatihan dan Lembaga Pendampingan PPH perlu terus ditingkatkan dan diperbanyak, melalui keterlibatan perguruan tinggi dan ormas Islam. Khusus untuk LPH, penambahan jumlah dan penyebaran tidak hanya terkait dengan kelembagaan dan SDM halalnya, tetapi juga didukung dengan fasilitas laboratorium uji kehalalan yang lengkap.

Di sisi digitalisasi, peningkatan kemampuan sistem informasi SIHALAL dan sistem informasi lain yang terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Sistem SIHALAL perlu diperkuat pada sejumlah aspek guna mendukung kelancaran dan kecepatan penyelesaian proses sertifikasi halal. Pertama,

Tabel 4.2. Lembaga Halal

JUMLAH LEMBAGA HALAL	KONDISI SAAT INI	VS	KONDISI IDEAL
1. Lembaga Pemeriksa Halal	29 lembaga (14 provinsi)		Di tiap provinsi, dilengkapi dengan fasilitas laboratorium (37)
2. Lembaga Pendampingan Produk Halal	156 lembaga (96 kab/kota)		Di tiap kabupaten/kota (514)
3. Lembaga Pelatihan Halal	3 lembaga (1 provinsi DKI Jakarta)		Di tiap provinsi (37)

Sumber: BPJPH, 2022

Gambar 4.3. Kerangka Akselerasi Sertifikasi Halal

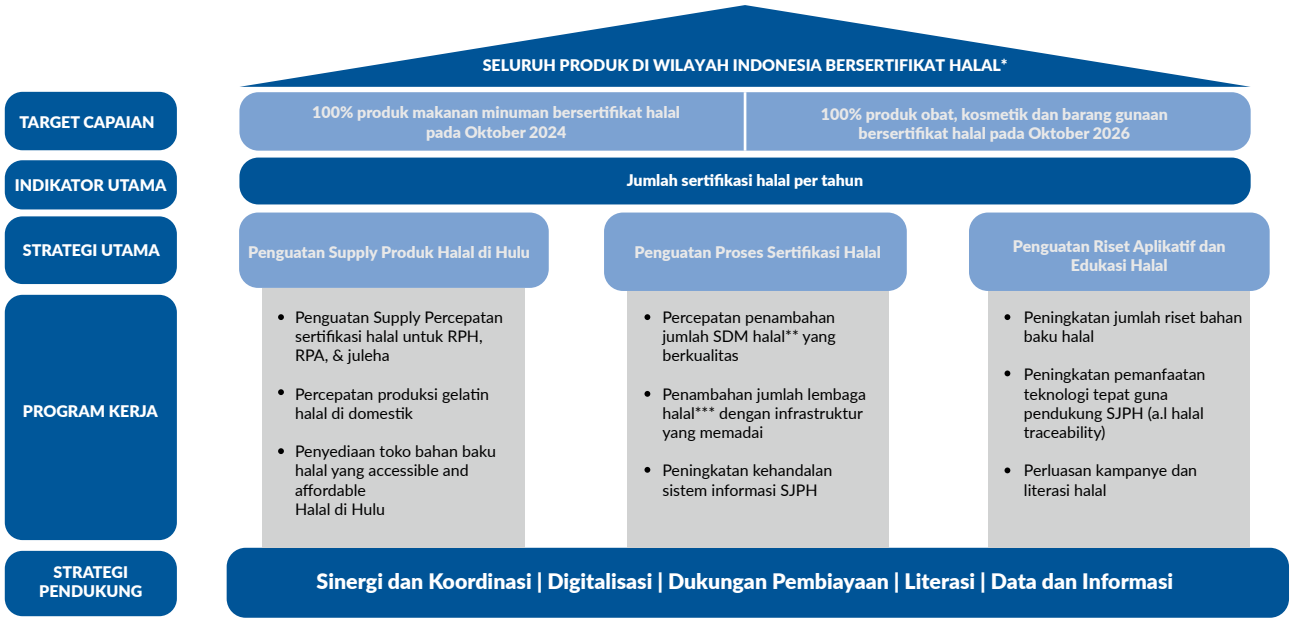

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

perlunya mengembangkan otomasi proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara langsung oleh sistem. Hal ini didukung dengan keberadaan *database* atau *masterdata* yang lengkap serta kodifikasi bahan, produk dan proses produksi. Kedua, pentingnya meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik, seperti server, *memory* dan lainnya, untuk mendukung pemrosesan pengajuan sertifikasi halal yang ditargetkan 10 juta produk per tahun serta integrasi dengan sistem informasi dari pihak terkait lainnya seperti BKPM, BSN dan LPH.

Strategi meningkatkan riset aplikatif dan edukasi halal juga perlu terus didorong guna menciptakan inovasi dan meningkatkan *halal awareness*. Sejumlah temuan riset dan teknologi yang tersedia saat ini perlu didorong untuk diaplikasikan dalam tataran operasional. Salah satunya adalah implementasi *halal traceability*. Teknologi digital yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir menawarkan peluang besar untuk penerapan *halal traceability* dalam rantai nilai produk halal secara mudah, cepat dan efisien. Senada dengan hal tersebut, edukasi dan kampanye halal perlu terus digalakan guna mendukung perluasan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) serta membentuk masyarakat yang kritis terhadap penyediaan produk bersertifikat halal. Metode edukasi halal dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, diantaranya melalui modul pembelajaran di sekolah sejak dini, memperbanyak kawasan dan zona khusus produk halal, dan edukasi dengan pendekatan komunitas.

Untuk mengoptimalkan langkah akselerasi sertifikasi halal dalam rangka mencapai target 2024, akan dilakukan program akselerasi sertifikasi halal bersinergi dengan *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, seperti BPJPH, Kemenko Perekonomian, KNEKS, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kementan, Kemendag, Komisi Fatwa, Pemda, satgas halal, KDEKS, dinas teknis, perguruan tinggi, asosiasi (Gambar 4.4).

Dukungan Bank Indonesia untuk Mempercepat Sertifikasi Halal

Bank Indonesia terus mendukung akselerasi perluasan sertifikasi halal sebagai prasyarat utama menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Pengembangan dan penguatan ekosistem jaminan produk halal terus ditempuh Bank Indonesia khususnya pada komoditas pangan dalam rangka pengendalian inflasi, melalui kerja sama dengan halal *center* perguruan tinggi. Pada strategi penguatan *supply* produk di sisi hulu, pada tahun 2022 Bank Indonesia memfasilitasi sertifikasi halal kepada 50 rumah potong hewan/ayam di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya kepada 100 RPH/A di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan mitra strategis akan berkolaborasi mengembangkan toko bahan baku halal di 4 lokasi guna menyediakan model bisnis yang dapat direplikasi lebih luas.

Gambar 4.4. Strategi Akselerasi Sertifikasi Halal

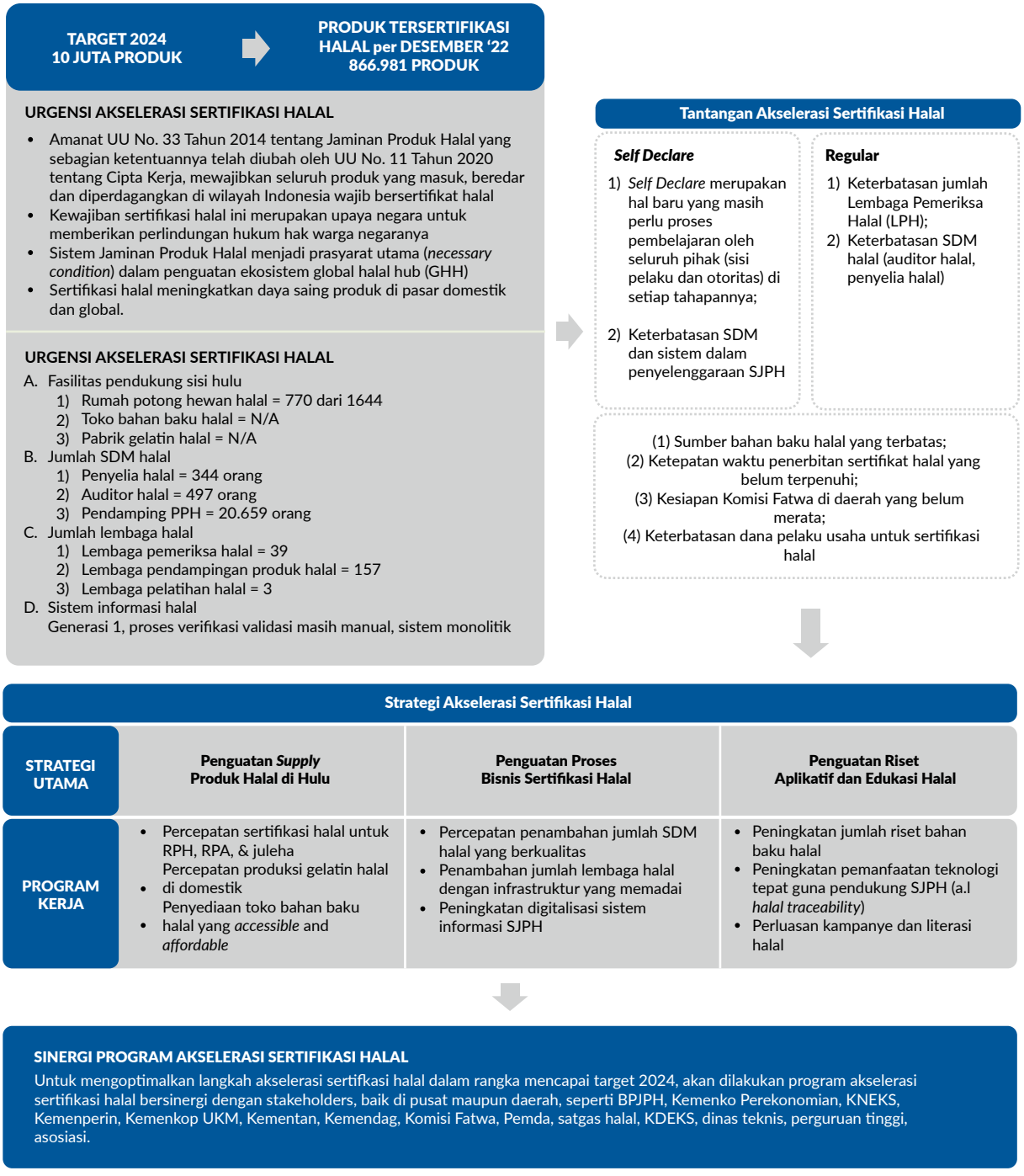

Sumber: BPJPPH, KNEKS (diolah)

Pada strategi penguatan proses sertifikasi halal, Bank Indonesia terus menambah jumlah SDM halal yang berkualitas dan lembaga pendukung halal serta mendukung peningkatan kapasitas sistem informasi. Melalui kerja sama dengan 8 halal *center* perguruan tinggi pada tahun 2022, Bank Indonesia memfasilitasi sejumlah pelatihan dan *workshop* kepada pendamping proses produk halal, penyelia halal, auditor halal dan juru sembelih halal. Dukungan terhadap penyediaan fasilitas laboratorium juga diberikan kepada 2 halal *center* perguruan tinggi yang memperluas perannya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal serta kepada LPPOM MUI untuk meningkatkan kapasitas pengujian halal. Bank Indonesia juga memfasilitasi sertifikasi penyelia halal dan juru sembelih halal bagi personil P3JPH UIN Syarif Hidayatullah sebagai prasyarat untuk menjadi Lembaga Pelatihan Halal. Terkait digitalisasi, Bank Indonesia mendukung

pengembangan sistem informasi manajemen data sertifikasi halal untuk Komisi Fatwa. Kedepannya, Bank Indonesia akan mengembangkan sistem otomasi sistem SIHALAL guna mempercepat proses verifikasi dan validasi pengajuan sertifikasi halal. Tampilan dan *user interface* sistem tersebut juga akan ditingkatkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan input pendaftaran sertifikat halal.

Pada strategi penguatan riset aplikatif, Bank Indonesia mendorong implementasi beragam temuan riset dan teknologi dalam bentuk *piloting halal traceability* pada sektor halal *food*. Munculnya sejumlah riset pemanfaatan teknologi untuk mendukung halal *traceability* akan diaplikasikan pada model bisnis sektor halal *food* yang telah dibangun oleh Bank Indonesia bersama mitra strategis. Uji coba ini diharapkan dapat melengkapi ekosistem rantai nilai halal yang ada serta mendukung penguatan ekosistem global halal hub melalui kemudahan ketelusuran asal usul produk halal ekspor. Terkait strategi penguatan edukasi halal, Bank Indonesia terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi gaya hidup halal melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan kampanye di agenda Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Selain itu, sejumlah publikasi dan materi ajar juga disusun bersama dengan mitra strategis untuk menjadi rujukan pembelajaran tentang ekonomi syariah bagi pelajar dan mahasiswa.

B. Penguatan Ekosistem Halal Orientasi Ekspor

Latar Belakang Ekosistem Halal Orientasi Ekspor

Industri halal berkembang pesat, seiring tingginya permintaan produk halal masyarakat global. Dalam *State of the Global Islamic Economy Report* Tahun 2022 diperkirakan bahwa total pengeluaran umat muslim global pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 9,1%, yang berasal dari enam sektor riil ekonomi syariah yaitu sektor makanan dan minuman halal, *modest fashion*, kosmetika, farmasi, media dan rekreasi, serta *travel* (pariwisata ramah muslim). Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 2,76 triliun dolar AS pada tahun 2025 atau meningkat 7,81% (*Compound Annual Growth Rate*).

Potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh negara non-muslim dalam rangka mengkapitalisasi potensi pasar negara muslim. Mayoritas produk halal yang diekspor ke negara anggota OKI mayoritas diproduksi oleh negara seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia. Indonesia dengan seluruh potensi industri halal yang ada, masih memiliki ruang optimalisasi yang tinggi apabila ingin berperan lebih besar dalam peta ekspor barang halal di dunia. Sementara itu, Covid-19 menyebabkan biaya logistik meningkat tajam sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Dibutuhkan adanya inisiatif berupa program yang mampu mendorong ekspor dari pelaku usaha nasional dikarenakan adanya kebutuhan (*demand*) dari luar negeri yang tidak dapat direspon dengan cepat akibat belum terintegrasinya ekosistem produk halal yang berpotensi ekspor.

Ruang optimalisasi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia menciptakan visi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen produk halal terkemuka di dunia tahun 2024. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ekosistem produk halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Untuk merumuskan masalah serta mendapatkan gambaran terkini terkait dengan kondisi dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian terkait, maka dilaksanakan Rangkaian FGD bertempat di Ruang Sinergi Setwapres, dengan melibatkan *stakeholder* utama terkait (diantaranya: Bank Indonesia, Kemenkop KUMKM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenlu, Kemenhub, dll). Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menginisiasi gerakan *hamzah washol* untuk menjadi katalis bagi setiap pihak agar dapat berkontribusi dalam mendorong potensi ekspor halal Indonesia guna mendorong ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, dimana salah satu lembaga yang terlibat aktif dalam merealisasikan hal tersebut adalah Bank Indonesia. *Kick off* dari inisiatif penguatan ekosistem halal yang berorientasi ekspor dilakukan pada 28 Januari 2022, bertempat di Great Westren Resort Tangerang, dihadiri oleh Wapres RI, Menteri Perindustrian, Wamen Perdagangan, Perwakilan BI dan Perwakilan KNEKS. Pada pertemuan tersebut dicanangkan pula Gerakan Nasional Sinergitas Indonesia Menuju Produsen Produk Halal Dunia 2024.

Strategi Penguatan Industri Halal melalui Ekosistem Halal Orientasi Ekspor

Dengan besarnya potensi termasuk pasar produk halal yang dimiliki Indonesia, sepatutnya Indonesia mampu pula memanfaatkan besarnya permintaan produk halal global yang terus meningkat. Keragaman produk halal yang semakin banyak, tidak hanya produk (makanan minuman, kosmetik termasuk *fashion*, obat-obatan) tetapi juga jasa (pariwisata ramah muslim), harus mendorong Indonesia menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha. Namun begitu, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM untuk menjadi produsen halal dunia meliputi kelemahan pelaku usaha (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kapasitas), kelemahan pengelolaan yang membuat produk tidak kompetitif (*high cost & less efficient*) serta belum terdapatnya ekosistem produk halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mendukung pemenuhan pasar domestik dan ekspor.

Inisiatif gerakan *hamzah washol* yang digagas Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, diimplementasikan oleh Bank Indonesia melalui program penguatan ekosistem halal orientasi ekspor. Penguatan ekosistem halal orientasi ekspor dilakukan melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan produknya, terutama agar bisa menembus pasar ekspor melalui satu ekosistem yang terintegrasi mulai dari kurasi pelaku usaha dari daerah-daerah, pembinaan, pemberian pelatihan seperti *branding* dan pengemasan yang sesuai standar pasar, hingga membantu legalisasi dan sertifikasi. Berdasarkan diskusi dengan mitra dari pemerintah dalam wadah KNEKS, penguatan ekosistem halal orientasi ekspor memiliki target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekspor produk halal dunia (Gambar 4.5). Penguatan ekosistem halal orientasi ekspor dilakukan berdasarkan 4 pilar, yaitu (i) inkubasi dan produksi eskpor produk halal; (ii) pembiayaan dan pembayaran ekspor syariah; (iii) MRA dan perjanjian dagang; dan (iv) akses pasar ekspor produk halal. Strategi melalui 4 pilar tersebut diharapkan mampu mewujudkan produk ekspor unggulan dan munculnya eksportir global produk halal. Strategi 4 pilar ini didukung oleh 8 program utama yaitu kurasi produk, pelatihan & pendampingan, *branding* & pengemasan, investasi & permodalan, legalitas & sertifikasi, pengkinian database, pemasaran lokal & global, logistik.

Gambar 4.5. Kerangka Penguatan Penguatan Ekosistem Halal Orientasi Ekspor

Sumber: Pertemuan koordinasi Koordinator Kelompok Kerja Percepatan Ekspor antara Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan ME-KNEKS tanggal 5 Oktober 2022.

Para pihak yang terlibat dalam upaya penguatan ekosistem halal orientasi ekspor kemudian melakukan kesepakatan untuk tindak lanjut, seperti menyepakati *framework* pengembangan ekspor halal hub dan pembagian peran masing-masing kementerian dan Lembaga serta industri, seperti: (i) perumusan rencana tindak lanjut hasil arahan wakil presiden RI yang disampaikan pada saat pelaksanaan pleno KNEKS 2022, (ii) penentuan proses dan langkah pencapaian dan (iii) penentuan indikasi target *output/ outcome*. Pelaku Industri juga diharapkan dapat memperkuat fungsi aggregator ekosistem ekspor (termasuk membantu pemetaan tujuan pasar ekspor potensial). Sebagai bentuk akselerasi pencapaian, *quickwins* juga dirumuskan untuk dapat mendorong pencapaian program, seperti (i) fungsi optimasi *aggregator* Ekspor, (ii) penguatan *branding* produk-produk Indonesia dan (iii) penguatan proses inkubasi pelaku usaha potensial.

C. Penguatan Sektor Modest Fashion: Perluasan Event IN2MOTIONFEST

Latar Belakang IN2MOTIONFEST

Salah satu sektor yang dinilai berpotensi untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah nasional adalah *modest fashion*, dimana Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa jumlah penduduk Indonesia yang didukung keragaman budaya. The State Global Islamic Economy Report 2022 yang dikeluarkan oleh Dinar Standard, melaporkan bahwa total pengeluaran untuk muslim modest fashion pada tahun 2021 mencapai 295 miliar dolar AS dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 375 miliar dolar AS (Gambar 4.6). Kebutuhan *modest fashion* yang cukup besar tersebut merupakan potensi pasar yang dapat digarap oleh pelaku industri *modest fashion* di Indonesia.

Pasar *modest fashion* global memperlihatkan peluang yang menjanjikan. Indonesia yang menduduki peringkat ke-3 dalam *modest fashion indicator ranking* oleh Global Islamic Economic Report (2022) serta salah satu negara eksportir fashion terbesar ke negara anggota OKI, berpotensi menjadi kiblat fashion dunia. Tren *modest fashion* di Indonesia semakin menguat, seiring dengan maraknya pemberitaan *modest fashion* di sosial media serta penyelenggaraan *modest fashion show*. Namun begitu, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti: (i) belum terdapat produk Indonesia yang menjadi global *brand*; (ii) keterbatasan kapasitas pelaku *fashion* untuk memenuhi kebutuhan dan selera pasar global; dan (iii) keterbatasan jumlah outlet di tengah persaingan dengan produk asing yang semakin membanjiri pasar domestik melalui platform *e-commerce* baik produk jadi maupun bahan baku.

Untuk menjawab potensi pengembangan *modest fashion* yang cukup tinggi di pasar global, Bank Indonesia menyelenggarakan Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) yang merupakan penguatan dari *event fashion show* "*Sustainable Fashion, Sustainable Lifestyle*" yang telah dilakukan sejak tahun 2019. Acara tersebut dilakukan bekerja sama dengan Indonesia Fashion Chamber (IFC) sebagai salah satu rangkaian kegiatan *event* akbar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Semenjak 2022, *event fashion show* diperkuat melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM guna menaikkan level kegiatan menuju *event modest fashion global*. Mengusung tema "*Local Product, Global Look*", penyelenggaraan IN2MOTIONFEST menjadi *outlet showcase* produk *modest fashion* Indonesia yang mengangkat kearifan budaya Indonesia melalui penggunaan kain wastra dan kain lokal (Gambar 4.7).

Kedepan pelaksanaan event IN2MOTIONFEST akan diperkuat dengan menjadikan sebagai *event modest fashion* rujukan dunia, melalui 3 strategi penguatan yaitu i) penguatan produk, ii) penguatan pelaku, iii) penguatan promosi (Gambar 4.8). Pelaksanaan IN2MOTIONFEST juga diharapkan dapat menjawab tantangan pengembangan *modest fashion* serta menjadi *event* unggulan Indonesia yang menawarkan produk-produk terbaik karya anak bangsa. Untuk itu, 3 strategi penguatan perlu didukung pula dengan peningkatan sinergi dengan pihak terkait, penggunaan digitalisasi baik dalam rangka promosi kegiatan maupun peningkatan *outlet*, serta peningkatan literasi penggunaan produk-produk *modest fashion* dengan berbahan baku produk dalam negeri.

Pilar penguatan produk berfokus pada strategi untuk memperkuat produk *ready to wear* (RTW) dan aksesoris pendukung baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas produk *modest fashion*

Gambar 4.6. Perkembangan *Modest Fashion* Indonesia dan Global

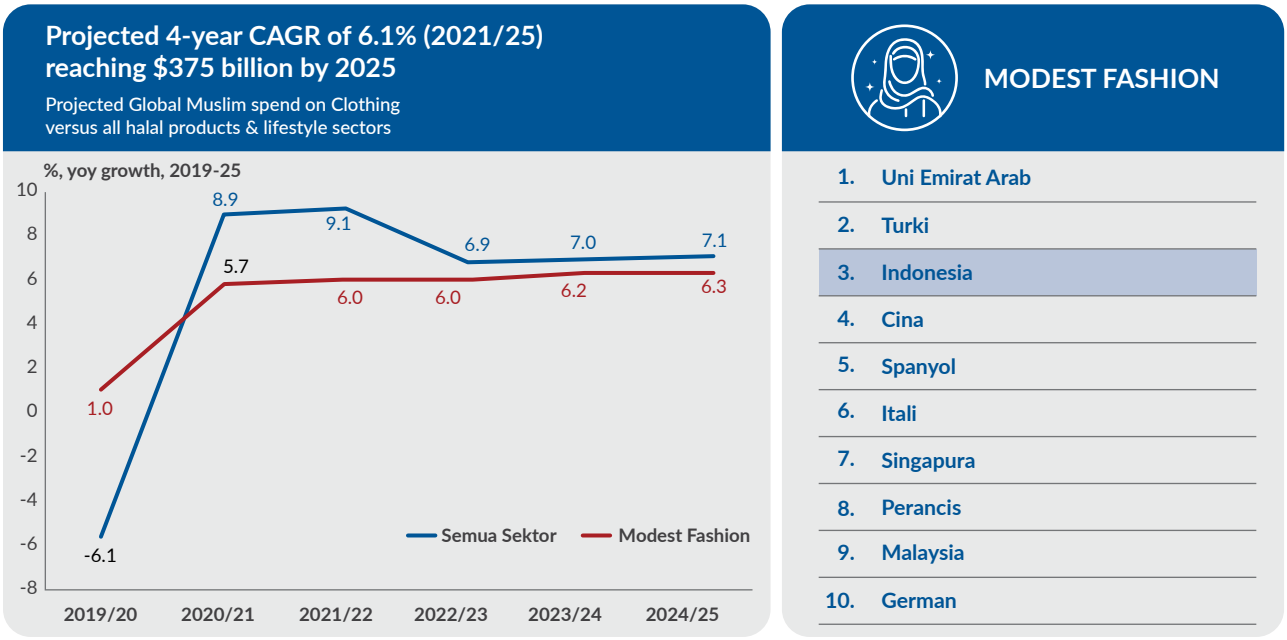

Eksportir Teratas ke OKI

Miliar Dolas AS (2020 EST.)

Cina	$25.4
India	$22.2
Amerika Serikat	$17.0
Brazil	$16.7
Russia	$13.8
Perancis	$12.6
Turki	$10.5
German	$10.0
Argentina	$8.6
Indonesia	$8.5

Impor OKI Teratas

Miliar Dolas AS (2020 EST.)

Arab Saudi	$31.2
Uni Emirat Arab	$23.2
Turki	$22.1
Indonesia	$21.1
Malaysia	$20.5
Mesir	$16.5
Nigeria	$11.2
Algeria	$10.4
Iraq	$10.4
Bangladesh	$9.0

Negara OKI

Negara dengan kasus COVID-19 terbanyak (Agustus 2021, Worldometer)

Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2022

Gambar 4.7. Perkembangan *Event Fashion Show* Oleh Bank Indonesia

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Indonesia secara konsisten akan terus diperkuat sehingga dapat memenuhi selera pasar global. Penguatan dari sisi kuantitas juga terus dilakukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan *modest fashion* di pasar domestik dan pasar global.

Pilar penguatan pelaku fokus pada pengembangan kapasitas pelaku *fashion* yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan *business coaching, talkshow* serta penyelenggaraan kompetisi. Penguatan pelaku dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas produksi namun juga menciptakan generasi unggul untuk meneruskan pengembangan *modest fashion* di Indonesia. Pelaksanaan *Indonesia International Modest Young Designer Competition* (IN2MYDC) akan menjadi *event* kompetisi *modest fashion* tahunan yang ditujukan untuk melahirkan desainer *modest*

Gambar 4.8. Kerangka Penguatan IN2MOTIONFEST

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

fashion muda yang diharapkan dapat memunculkan ide, inovasi maupun tren *modest fashion* yang baru. Ke depan, penyelenggaraan IN2MYDC juga akan dibuka untuk peserta Internasional sehingga dapat meningkatkan eksposur IN2MOTIONFEST di level internasional.

Sementara pilar penguatan promosi berfokus pada penyusunan standard kegiatan modest fashion di Indonesia yang berkualitas dengan jadwal kegiatan yang tertata dengan baik sehingga dapat mendorong keikutsertaan pelaku usaha baik nasional maupun global. Beragamnya kegiatan *modest fashion* di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan dinilai dapat menyebabkan kejenuhan pengunjung. Untuk menjawab tantangan tersebut serta mewujudkan visi IN2MOTIONFEST, diperlukan strategi penyusunan kalender kegiatan *modest fashion* di Indonesia. Hal lain yang diperlukan adalah penguatan sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan acara yang didukung ketersediaan standar penyelenggaraan kegiatan yang bersifat internasional bagi kegiatan *modest fashion* lain yang akan berkolaborasi dengan IN2MOTIONFEST. Fokus lainnya dalam pilar ini adalah perlunya dukungan penguatan *brand awareness* IN2MOTIONFEST antara lain melalui penunjukkan *brand ambassador* sebagai wajah IN2MOTIONFEST serta penguatan promosi melalui sosial media dan kanal media lainnya. Secara umum, cakupan kegiatan IN2MOTIONFEST berdasarkan masing-masing pilar dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Pelaksanaan IN2MOTIONFEST akan dilakukan secara simultan, masif dan kolaboratif. Dukungan Bank Indonesia dalam kegiatan tersebut tidak hanya dalam pelaksanaannya namun juga melalui program penguatan produk dan pelaku. Sebagaimana telah tertuang pada Bab 3, Bank Indonesia telah mempersiapkan program seleksi dan pendampingan melalui IKRA Indonesia, sehingga diperoleh pelaku-pelaku usaha yang tangguh dan mampu berkompetisi secara global, dengan tetap mengedepankan produk-produk yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah serta mengusung nilai budaya wastra Indonesia.

Dukungan dari mitra strategis juga akan terus diperkuat melalui sinergi penyelenggaraan IN2MOTIONFEST dengan mitra kolaborasi yang lebih luas, antara lain dengan kementerian/Lembaga lainnya yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, serta mitra strategis terkait lainnya. Beberapa kegiatan telah direncanakan untuk dilakukan termasuk kolaborasi penyelenggaraan rangkaian acara IN2MOTIONFEST dari yang bersifat regional hingga internasional sehingga menghasilkan dampak yang lebih kuat bagi sektor *modest fashion* Indonesia. Kerja sama penyelenggaraan kegiatan juga tidak hanya terpusat pada sektor *modest fashion*, namun juga dilakukan agar kegiatan tersebut dapat juga berkontribusi pada sektor lainnya termasuk pariwisata ramah muslim.

Tabel 4.3. Cakupan Kegiatan IN2MOTIONFEST

NO	KEGIATAN	PILAR I (PRODUK)	PILAR II (PELAKU)	PILAR III (PROMOSI)
1	*Exhibition/Fashion Show (Mandatory)*			
	1. ***Fashion show* produk *modest fashion* yang layak *Go-Global*** 2. **Pameran (*exhibition*)** dalam rangka *business matching/linkage* dengan *buyer*	✓		✓
2	**Kompetisi (Hanya di *main event*)**			
	Indonesia International Modest Young Designer Competition (IN2MYDC) adalah kompetisi yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan promosi IN2MOTIONFEST agar lebih dikenal di kalangan internasional. Salah satu hadiah adalah diikutkan dalam program *reality show* yang dapat mendongkrak calon pemenang		✓	✓
3	*Business Matching (optional)*			
	Kegiatan yang memfasilitasi/mempertemukan *fashion* desainer/pelaku usaha sektor *modest fashion* dengan calon pembeli dan/atau investor/lembaga keuangan	✓	✓	
4	*Business Coaching (optional)*			
	Kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha sektor *modest fashion* agar menghasilkan produk *modest fashion* sesuai selera pasar internasional.	✓	✓	
5	*Talkshow (optional)*			
	Kegiatan yang dilakukan untuk membahas isu terkini terkait sektor *modest fashion*.	✓	✓	✓

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

4.3.2. Program Pengembangan Lainnya

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia mengacu pada 3 (tiga) pilar utama *blueprint* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu (i) pilar pemberdayaan ekonomi syariah; (ii) pilar pendalaman pasar keuangan syariah; dan (iii) pilar penguatan riset, asesmen dan edukasi. Program pengembangan untuk memberdayakan ekonomi syariah akan memprioritaskan pada penguatan ekosistem sektor unggulan rantai nilai halal, khususnya makanan halal dan *modest fashion*. Sementara itu, kebijakan di sektor keuangan syariah akan fokus pada pengembangan inovasi kebijakan dan instrumen pasar keuangan, termasuk pengembangan *blended finance*, sebagai alternatif skema pembiayaan serta pendanaan syariah. Untuk meningkatkan literasi, Bank Indonesia akan menyelenggarakan Fesyar di tiga wilayah serta ISEF berskala nasional dan internasional, termasuk mengoptimalkan sinergi program literasi dengan berbagai mitra strategis.

A. Kebijakan Pengembangan Usaha Syariah

Kebijakan pengembangan usaha syariah pada 2023 diarahkan pada proses replikasi terhadap inisiasi *pilot project* model-model bisnis dan ekosistem *halal value chain* di lima sektor utama, dalam mengakselerasi pertumbuhan usaha syariah. Keadaan perekonomian Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan akselerasi pertumbuhan usaha syariah masih terbatas, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, serta program literasi eksyar belum cukup untuk mendongkrak *sharia lifestyle* secara signifikan. Tiga pendekatan utama dalam program pengembangan usaha syariah yaitu i) penguatan kapasitas pelaku usaha yang berbasis komunitas secara *end to end*, ii) penguatan kelembagaan pelaku usaha syariah secara jamaah dalam satu perhimpunan/asosiasi/koperasi/bentuk perhimpunan berbadan hukum lainnya, serta memperkuat organisasi masyarakat dan asosiasi melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi, iii) penguatan infrastruktur pendukung yang mencakup akses pasar, akses pembiayaan, akses fasilitasi sertifikasi dan standardisasi. Pendekatan secara mendalam kepada kelompok pelaku usaha dilakukan pada setiap rantai nilai di masing-masing sektor dengan tetap memerhatikan rantai pasok dan rantai nilai antar sektor prioritas.

Tantangan utama dalam proses pengembangan usaha syariah antara lain rantai pasok antar sektor dan antar pelaku usaha yang belum terbangun dengan solid, kapasitas pengelolaan usaha termasuk tingkat partisipasi jaminan produk halal masih terbatas, akses pembiayaan, dan akses pasar baik domestik maupun global yang belum optimal. Dalam merespon tantangan tersebut, kerangka pengembangan usaha syariah dilakukan dengan memperkuat ekosistem *halal value chain* melalui i) penguatan ekosistem pertanian terintegrasi, mamin halal dan fesyen muslim yang kaffah melalui Gerakan Nasional Penguatan Global Halal Hub dan IN2MOTIONFEST, (ii) Penguatan Ekosistem Jaminan Produk Halal melalui Implementasi Akselerasi Sertifikasi Halal, (iii) Mengembangkan Kerangka Model Ekosistem 2 sektor HVC lainnya yaitu Sektor Pariwisata Ramah Muslim melalui penguatan forum koordinasi PRM dan aktivasi pada sekber pariwisata nasional; dan Sektor Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan kerangka penguatan EBT bekerja sama dengan K/L terkait.

Penguatan ekosistem di tiga sektor prioritas yaitu pertanian terintegrasi, fesyen muslim, dan makanan-minuman halal ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan pelaku usaha dan daya saing produk halal, guna mendukung penciptaan rantai nilai yang

Gambar 4.9. IN2MOTIONFEST 2022

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

solid antar sektor dan penciptaan *demand* yang tinggi di sisi hilir. Pada 2023, program pengembangan usaha syariah mencakup (i) penguatan program inkubasi bagi anggota IKRA Indonesia, terutama pada aspek kapasitas pelaku usaha syariah, akses pasar dan akses pembiayaan;(ii) perluasan fasilitasi *linkage* antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah besar (UMB); (iii) perluasan replikasi model ekosistem pertanian terintegrasi berbasis komunitas dan *smart farming* (*Integrated Farming with Technology and Society*- INFRATANI dan pertanian berkualitas ekspor (Jaringan Usaha Berorientasi Ekspor- JUARA EKSPOR) ke wilayah guna mendukung ekosistem *Global Halal Hub*; (iv) Penguatan *outlet* pasar *modest fashion* melalui *IN2MOTIONFEST*; (v) penguatan kelembagaan melalui HEBITREN, IKRA Indonesia dan JUARA EKSPOR agar dapat mengakselerasi peningkatan usaha syariah.

Perluasan replikasi model ekosistem pertanian berbasis komunitas pesantren dengan teknologi budidaya *smart farming* (INFRATANI), dan berorientasi ekspor (JUARA EKSPOR) diharapkan akan meningkatkan skala ekonomi dan mendorong akselerasi pertumbuhan usaha syariah. Program *Integrated Farming based on Technology and Society* (INFRATANI) yang telah diuji cobakan pada 55 ponpes di wilayah Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Solo Raya, Lampung, dan Riau akan diperluas ke wilayah lainnya dengan mengoptimalkan peran kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi dengan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Agama dan Kemenkop UKM. Selain itu program berbasis pertanian yang berorientasi ekspor (JUARA EKSPOR) yang telah diuji cobakan pada 10 Ponpes di wilayah Jawa Barat berbasis komoditas cabai, telah lolos uji coba untuk masuk ke pasar Jepang, akan direplikasi di wilayah lainnya. Proses replikasi bertujuan untuk membentuk skala ekonomi yang cukup besar sehingga mampu memberi kepastian rantai pasok kepada sektor mamin halal, termasuk untuk mendukung penetrasi pasar ekspor yang kontinu dan mampu memenuhi standar pasar global. Peningkatan skala ekonomi dan perluasan pasar, diharapkan akan menarik institusi keuangan baik komersial maupun sosial untuk meningkatkan akses pembiayaannya kepada pelaku usaha di sektor pertanian dan mamin halal.

Penguatan kapasitas kepada pelaku usaha sektor makanan dan minuman halal, serta sektor fesyen muslim akan semakin diperluas melalui perluasan mitra kerja sama dengan mempertajam pada aspek standardisasi termasuk sertifikasi halal, pengelolaan usaha yang lebih profesional, dan penguatan produk. Kerja sama dengan kementerian terkait lainnya, organisasi perempuan, asosiasi, dan perguruan tinggi akan semakin ditingkatkan, guna melengkapi pendampingan yang telah dilakukan melalui program IKRA Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaku usaha dan produk halal yang dapat berkompetisi secara global baik di dalam maupun di luar negeri. Penguatan program pendampingan diikuti dengan penyediaan akses pasar melalui fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan ekosistem Global Halal Hub dan *outlet* IN2MOTIONFEST, pasar digital, dan fasilitasi *business linkage* dengan pelaku usaha yang lebih besar.

Inkubasi pelaku usaha melalui program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia akan diperkuat dengan melakukan penajaman program terutama melakukan segmentasi pelatihan dan pendampingan sesuai dengan *level of maturity* dari produk maupun pelaku usahanya. Hingga akhir 2022 jumlah anggota IKRA Indonesia telah mencapai 669 orang dan tersebar di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Fokus pengembangan anggota IKRA Indonesia pada sektor makanan dan minuman halal, serta sektor fesyen muslim. Pada 2023 program penguatan inkubasi ditargetkan dapat menghasilkan kelompok pelaku usaha yang tangguh dan menjadi kontributor utama dalam ekosistem Global Halal Hub dan IN2MOTIONFEST. Perluasan akses pasar baik domestik dan global dilakukan dengan memperkuat partisipasi anggota IKRA Indonesia pada *event-event* pameran di dalam maupun luar negeri.

Penguatan ekosistem jaminan produk halal bertujuan untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal, keberadaan sertifikasi halal merupakan *necessary condition* guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal Indonesia. Pada 2023, penguatan ekosistem jaminan produk halal akan dilakukan melalui Implementasi Akselerasi Sertifikasi Halal dalam bentuk (i) Perluasan kerja sama dengan halal

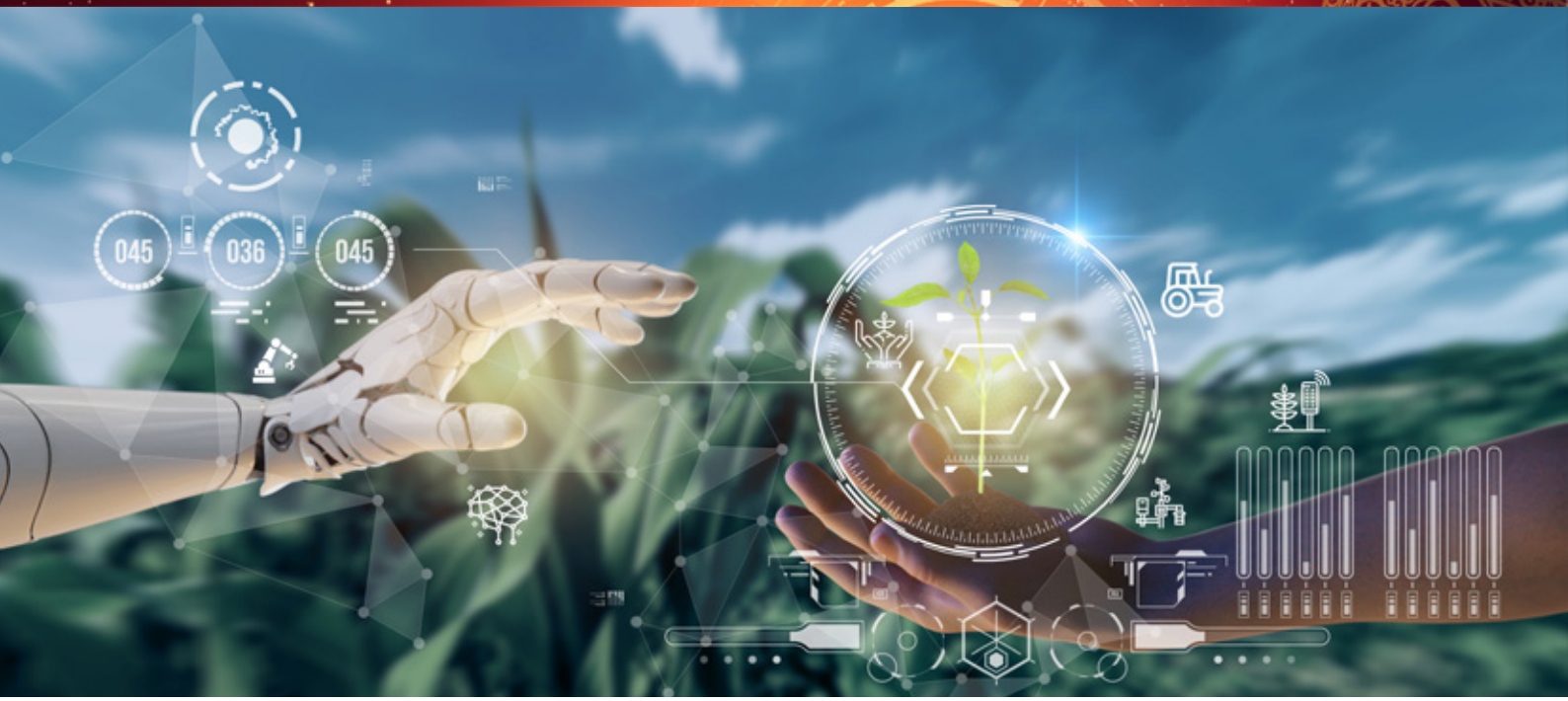

center berbasis perguruan tinggi (SKALA) dan non perguruan tinggi (Zona KHAS); (ii) Fasilitasi penguatan SDM, institusi, riset, infrastruktur jaminan produk halal (JPH-sisi hulu-hilir), pengembangan digitalisasi/ otomasi sistem informasi; iii) perluasan kerja sama dengan K/L lainnya, dalam hal ini BPJPH, Kemenperin – PPIH, MUI, MES dan mitra strategis lainnya.

Penguatan kelembagaan pelaku usaha syariah secara berjamaah menjadi salah satu faktor pengungkit utama untuk membangun ekosistem rantai nilai yang solid. Hingga saat ini, jumlah HEBITREN wilayah telah mencapai 18 provinsi. Pada 2023, ditargetkan akan terbentuk HEBITREN di wilayah lainnya dan telah terbangun kolaborasi usaha antar anggota HEBITREN wilayah dan pusat. Selain penguatan kelembagaan HEBITREN, ke depan juga akan diperkuat (i) kelembagaan antar anggota IKRA Indonesia dan JUARA EKSPOR dalam wadah organisasi berbadan hukum yang lebih solid, agar terjadi peningkatan pada daya tawar para pelaku usaha syariah yang tergabung dalam program IKRA Indonesia dan JUARA EKSPOR; (ii) kelembagaan lainnya yang sudah terbentuk seperti PP Muhammadiyah, PBNU, MES, PPUMI, PP Salimah, Bunda Wakaf, Persami, IHLC, IFC, DMI, dll melalui penguatan kolaborasi dan kerja sama.

Pengembangan ekosistem sektor Pariwisata Ramah Muslim ditujukan dengan menginisiasi uji coba model SMART MFT HUB berbasis pembiayaan keuangan sosial, dan mengembangkan model ekosistem Energi Bari Terbarukan terutama dalam mendukung sumber energi bagi keempat sektor prioritas lainnya. Pada 2023, pengembangan ekosistem PRM akan difokuskan pada (i) uji coba pengembangan SMART MFT HUB di wilayah Sumbar, (ii) tindak lanjut deklarasi 7 butir yang telah ditandatangani pada ISEF 2022, dan (iii) penyelarasan dan sinergi dengan Sekber Pariwisata nasional. Sementara itu, program pengembangan ekosistem EBT akan difokuskan pada pemetaan yang lebih komprehensif terutama rantai nilai dalam mendukung empat sektor prioritas lainnya.

Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihal lainnya termasuk dengan Kementerian terkait dalam wadah KNEKS, asosiasi, organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya menjadi faktor pengungkit guna mendukung proses akselerasi pembentukan ekosistem yang solid. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, Bank Indonesia juga akan melakukan (i) Kerja sama dengan K/L dan Otoritas terkait dalam wadah KNEKS, diantaranya melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Parekraf, Kementerian Koperasi dan UMKM; (ii) Kerja sama dengan Mitra Global, antara lain IsDB; (iii) Kerja sama dengan Diaspora Indonesia dan KBRI/KJRI; (iv) organisasi profesi seperti MES juga akan diperkuat untuk mendorong penetrasi produk-produk halal Indonesia ke Global.

B. Kebijakan Penguatan Intermediasi Pembiayaan

Pengembangan Keuangan Komersial Syariah

Pendalaman pasar uang syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengendalian moneter ditujukan untuk mendukung penyaluran pembiayaan syariah. Pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien bertujuan untuk membantu pelaku pasar dalam rangka pengelolaan likuiditasnya sehingga dapat tercipta peningkatan dari sisi *supply* yang efektif dan efisien. Bank Indonesia terus mendorong pendalaman pasar uang syariah yang terintegrasi dengan kerangka pengelolaan moneter syariah, bersama dengan implementasi kebijakan makroprudensial syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2023, sejalan dengan *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, program pengembangan dan pengaturan pasar uang syariah juga akan dilakukan melalui implementasi strategi penguatan dari seluruh aspek dalam prinsip 3P+1I.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan variasi produk keuangan syariah, Bank Indonesia terus mendorong perluasan instrumen pasar uang syariah baik rupiah maupun valas. Pada pasar uang syariah rupiah, akselerasi pendalaman pasar terus dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, antara lain melalui perluasan penggunaan instrumen SiPA, sertifikat deposito syariah, dan SukBI inklusif. Perluasan penggunaan instrumen SiPA dan sertifikat deposito syariah akan dilakukan dengan berbagai upaya antara lain *workshop*, pelatihan, *coaching*, *refreshment* dengan pelaku pasar, dan sosialisasi termasuk pada rangkaian kegiatan ISEF 2023. Adapun penerbitan SukBI inklusif akan terus dilanjutkan secara reguler untuk mendukung pengelolaan moneter dan mendukung kebijakan makroprudensial terkait RPIM. Untuk itu, penguatan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah akan terus dilakukan untuk mendorong penerbitan SBSN inklusif sebagai *underlying*. Lebih lanjut, pada pasar uang syariah valas, pengembangan transaksi lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia dan instrumen SukBI valas akan dilakukan agar tercipta likuiditas valas yang optimal dan terdistribusi secara seimbang. Untuk mendukung pengembangan transaksi lindung nilai syariah, pada bulan Desember 2022 Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup mekanisme bagi perbankan syariah yang ingin melakukan pengelolaan likuiditas valas melalui transaksi lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Sementara itu, upaya pengembangan instrumen SukBI valas juga akan dilakukan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait seiring dengan likuiditas valas yang mulai mengetat dan untuk mendukung stabilitas nilai tukar.

Untuk mendukung penguatan *pricing* pasar uang syariah, Bank Indonesia akan terus melanjutkan pengembangan IndONIA syariah sebagai *benchmark rate* pasar uang syariah. *Benchmark rate* pasar uang berperan penting dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi di pasar uang. Adanya *benchmark rate* pasar uang syariah (IndONIA syariah) yang merupakan cerminan tingkat imbal hasil transaksi yang riil terjadi di pasar uang syariah diharapkan dapat menjadi referensi/acuan dalam transaksi di pasar uang syariah sehingga mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil evaluasi dari *piloting* IndONIA syariah yang telah dilakukan di 2022 akan menjadi fokus pengembangan ke depan agar dapat mengeluarkan *benchmark rate* pasar uang syariah yang *robust* dan kredibel. Penguatan tersebut utamanya dilakukan dalam bentuk pelatihan/*coaching clinic* kepada perbankan terkait pelaporan transaksi PUAS dalam rangka memperkuat validitas data pembentuk IndONIA syariah serta penyesuaian atau pengembangan infrastruktur dan ketentuan pendukung.

Dalam rangka memperkuat aspek *participant* dan untuk meningkatkan kredibilitas pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan terus mendorong penerapan kode etik pasar. Kode etik pasar sebagai norma moral profesional tentang pedoman berperilaku di pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh pelaku pasar. Sebagai acuan dalam menerapkan etika tersebut, IIGMA telah menerbitkan *Islamic Financial Market Code of Conduct* yang akan disempurnakan pada awal triwulan I-2023, sejalan dengan adanya penyempurnaan pada beberapa ketentuan terkait penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri. Dalam penyempurnaan kode etik syariah dimaksud, Bank Indonesia akan mendukung IIGMA dan akan berkolaborasi intensif dengan seluruh pihak terkait agar kode etik yang disusun dapat sesuai dengan ketentuan dan kondisi pasar terkini.

Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

Terdapat 3 (tiga) tantangan yang telah diidentifikasi dalam *gap analysis* terkait pengembangan keuangan sosial yakni: (i) Basis investor yang belum kuat; (ii) Model bisnis integrasi keuangan komersial & sosial yang masih terbatas; serta (iii) Implementasi penguatan tata kelola yang juga masih terbatas. Ketiga tantangan inilah yang menjadi dasar arah kebijakan pengembangan keuangan sosial syariah ke depan. Pendekatan ekosistem diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keuangan sosial syariah agar dapat berperan secara optimal dalam pembiayaan ekonomi nasional. Ekosistem keuangan sosial syariah mencakup penyedia keuangan sosial syariah/aset sosial syariah, dan seluruh *stakeholder* yang berpartisipasi, memengaruhi atau yang memperoleh dampak atas keuangan/aset sosial syariah.

Keuangan sosial syariah sangat terkait erat dengan kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam pengelolaannya mengingat ZISWAF tersebut merupakan amanah dari masyarakat kepada lembaga filantropi untuk disalurkan kepada yang berhak secara optimal. Oleh karenanya, *good governance* pengelolaannya menjadi kunci untuk meraih kepercayaan dari masyarakat. Terdapat banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di sektor keuangan sosial syariah sehingga sinergi dan koordinasi menjadi sebuah keharusan dalam upaya pengembangannya. Selain itu, integrasi data dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengukur dan mengevaluasi program pemberdayaan di sektor ini.

Penguatan tata kelola (*governance*) akan tetap menjadi prioritas utama untuk pengembangan sektor keuangan sosial syariah di tahun depan. Pada tahun 2023, *pilot project* implementasi ZCP dan WCP akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan keberhasilan program. Implementasi ZCP dan WCP diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola dan profesionalitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia sehingga kepercayaan publik (*public trust*) akan meningkat. Hal tersebut akan memengaruhi tingkat penghimpunan dana sosial syariah yang diharapkan dapat mencapai potensi optimalnya.

Pada integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, pengembangan instrumen juga menjadi fokus di tahun 2023. Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan melanjutkan perannya sebagai akselerator

dalam pengembangan model bisnis baru yang bisa diterapkan sehingga terdapat variasi instrumen dan investor keuangan sosial syariah yang lebih luas. Perluasan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan dana sosial syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2023, Bank Indonesia akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait yaitu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru pengembangan keuangan sosial syariah, termasuk model bisnis pembiayaan wakaf produktif bekerja sama dengan Awqaf Property Investment Fund (APIF) - IsDB.

Program penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga akan dilanjutkan bersinergi dengan BAZNAS dan TNI-AL. Program ini akan dikolaborasikan dengan program kerja "Ekspedisi Rupiah Berdaulat" atau ERB dengan memanfaatkan jaringan Bank Indonesia di berbagai Kantor Perwakilan. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada mustahik yang tersebar di pelosok tanah air.

Digitalisasi sektor keuangan sosial syariah turut menjadi strategi penting dalam pengembangan keuangan sosial syariah ke depan. Pada tahun 2021, Bank Indonesia dan BAZNAS telah menyelesaikan kajian indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Indeks Implementasi *Zakat Core Principle* (IIZCP), Indeks Kesehatan Lembaga Pengelola Zakat, serta survei Indeks Kesiapan Digital Zakat (IKDZ) di tahun 2022. Berdasarkan hasil survei IKDZ dimaksud, aspek Pendistribusian dan Pendayagunaan masih memerlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) terlebih dahulu sebelum dilakukan pengembangan digitalisasinya. Ke depan, kajian juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian mengenai kebijakan digitalisasi untuk pengembangan keuangan sosial syariah di Indonesia yang bertujuan untuk menentukan model keuangan sosial syariah digital terbaik, dengan mempertimbangkan keuntungan dan konsekuensinya dalam penerapan di Indonesia.

Untuk meningkatkan signifikansi sektor keuangan sosial syariah dalam mendukung pembiayaan sektor usaha dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, penguatan pada aspek kelembagaan, kapasitas dan infrastruktur serta regulasi akan semakin ditingkatkan. Pengembangan model bisnis pengelolaan dan inovasi instrumen keuangan sosial syariah termasuk inovasi instrumen *blended finance*, seperti mengintegrasikan keuangan sosial syariah dan keuangan komersial syariah sebagai alternatif pembiayaan. Bank Indonesia akan terus berkontribusi dalam pengembangan model bisnis dan memfasilitasi implementasi instrumen *blended finance* tahun 2023. Implementasi skema pembiayaan proyek wakaf produktif bekerja sama dengan Awqaf Properties Investment Fund (APIF) - IsDB menjadi salah satu program yang akan didorong dalam memberdayakan aset wakaf nasional.

Pengembangan sektor keuangan sosial syariah juga dilakukan dengan penguatan pada aspek hukum dan kelembagaan. Bank Indonesia akan aktif berkontribusi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Wakaf. Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Indonesia akan menguatkan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah melalui implementasi *Waqf Core Principles* (WCP) dan *Zakah Core Principles* (ZCP). Dalam rangka penerapan WCP dan ZCP yang optimal Bank Indonesia juga akan berkontribusi dalam penyusunan *Technical Notes* dari WCP dan ZCP bersama BWI dan BAZNAS.

C. Kebijakan penguatan literasi Eksyar

Peningkatan literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah merupakan salah satu persyaratan dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terlebih lagi target menjadi pusat industri halal dunia tahun 2024 sesuai arahan Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS, membutuhkan fondasi literasi eksyar yang tinggi dari masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia guna pengembangan literasi ekonomi syariah. Selanjutnya, untuk mendukung arahan Wakil Presiden tersebut, dibutuhkan strategi peningkatan

literasi yang akseleratif. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menyusun 4 strategi penguatan literasi ekonomi syariah, terdiri dari penguatan saluran komunikasi, penguatan pelaku, penguatan materi dan penguatan *branding* ekonomi syariah.

Bank Indonesia akan mengimplementasikan strategi penguatan saluran komunikasi melalui penajaman penggunaan media digital termasuk penggunaan *omni channel* serta kerja sama dengan jaringan media baik bersifat lokal, nasional maupun internasional. Dalam rangka mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses materi literasi ekonomi syariah, Bank Indonesia memanfaatkan peluang pesatnya pengembangan teknologi komunikasi dengan didukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut juga membuat masyarakat lebih mudah untuk menyebar informasi. Hal tersebut menimbulkan tantangan lebih lanjut, yaitu bagaimana masyarakat mau mengakses dan menerima materi literasi ekonomi syariah dengan baik. Untuk itu, Bank Indonesia memperhatikan juga bentuk materi literasi ekonomi syariah sesuai target segmen yang dituju.

Implementasi strategi penguatan pelaku oleh Bank Indonesia, dilakukan melalui sinergi dan sinkronisasi kegiatan literasi ekonomi syariah dengan mitra strategis, antara lain dengan kementerian dan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat serta pondok pesantren. Beragamnya demografi penduduk Indonesia sebagai tujuan peningkatan literasi ekonomi syariah perlu didukung dengan strategi komunikasi yang optimal. Salah satu strategi yang dilakukan antara lain kolaborasi dengan kelompok masyarakat yang memiliki satu visi sejenis melalui kegiatan *Training of Trainers* (ToT) kepada perwakilan kelompok tersebut. Selanjutnya, perwakilan tersebut diharapkan dapat mensosialisasikan materi yang telah disampaikan dalam ToT kepada anggota kelompok lainnya.

Strategi penguatan materi ekonomi syariah yang sesuai segmen diperlukan dengan memperhatikan luasnya ruang lingkup pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil survei nasional literasi ekonomi syariah salah satunya adalah indeks literasi pada masyarakat yang memiliki pekerjaan profesional, pensiunan, pegawai pemerintahan dan pengusaha yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya. Dengan memperhatikan pula mayoritas responden adalah perempuan, Bank Indonesia berencana untuk memperkuat literasi ekonomi syariah terutama kepada ibu rumah tangga. Penguatan materi literasi ekonomi syariah kepada pelajar dan mahasiswa akan terus dilakukan bekerja sama dengan kementerian, lembaga pendidikan, asosiasi pendidikan terkait melalui penyusunan buku-buku referensi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar serta untuk pengayaan materi ekonomi syariah (Gambar 4.10).

Gambar 4.10. Demografi Responden Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Tahun 2022 Berdasarkan Gender, Pendidikan Terakhir dan Kelompok Usia

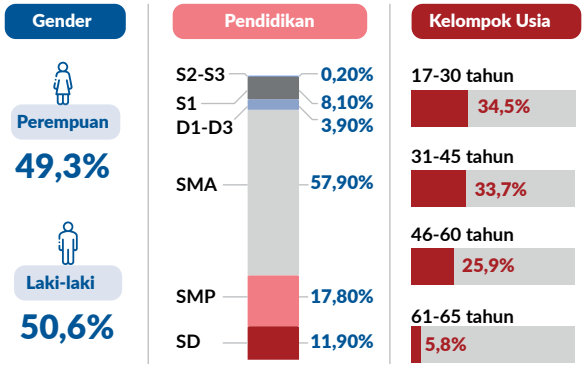

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Penguatan *branding* ekonomi syariah dilakukan melalui penggunaan logo *Brand* Ekonomi Syariah Nasional sebagai pemersatu langkah ekonomi syariah. Beragamnya industri dalam ekosistem ekonomi syariah perlu didukung dengan adanya satu logo khusus sebagai pemersatu. Untuk itu, Bank Indonesia menggunakan logo *Brand* Ekonomi syariah yang melambangkan nilai "Kebaikan untuk Semua", pada setiap kegiatan terkait ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk melakukan sosialisasi serta mendorong penggunaan *Brand* Ekonomi Syariah oleh seluruh *stakeholders*. Dengan penggunaan *brand* tersebut, diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh oleh industri dalam ekosistem ekonomi syariah, terutama bagi industri yang tidak menggunakan logo khusus antara lain logo halal dan logo Perbankan Syariah.

Selain implementasi keempat strategi tersebut, Bank Indonesia juga secara konsisten menyelenggarakan program unggulan guna meningkatkan literasi ekonomi syairah. Kegiatan unggulan yang dilakukan adalah Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) sebagai acara puncak tahunan dalam upaya pengembangan eksyar di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen menjadi motor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Indonesia terus berinisiatif mewujudkan Fesyar dan ISEF sebagai agenda besar baik di tingkat nasional maupun global. Fesyar dan ISEF diharapkan juga menjadi wadah bersama dengan mitra strategis dari lembaga pemerintah, komunitas masyarakat dan pelaku industri.

Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mewujudkan pusat-pusat riset, edukasi dan sosialisasi dilakukan dalam bentuk melanjutkan program penciptaan ekosistem riset ekonomi dan keuangan syariah di lembaga perguruan tinggi. Pusat riset, edukasi dan sosialisasi perannya akan signifikan dalam memaksimalkan eksplorasi pengetahuan eksyar, mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan basis pengguna aplikasi eksyar. Dalam mewujudkan hal tersebut, kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi menjadi penting khususnya dalam peningkatan literasi dan penciptaan ekosistem riset eksyar yang berkualitas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan terus menjaga dan menguatkan kemitraan yang produktif dengan lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan eksyar di tanah air. Untuk menghidupkan ekosistem riset ekonomi dan keuangan syariah khususnya di perguruan tinggi, Bank Indonesia berkomitmen akan terus menyelenggarakan *International Islamic Monetary Economics and Finance Conference* (IIMEFC) dan *Call for Papers Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (CFP-JIMF). Selain itu, Bank Indonesia akan terus berkontribusi dalam publikasi paper berkualitas melalui penerbitan JIMF 4 kali dalam satu tahun.

Bank Indonesia turut berkontribusi dalam peningkatan literasi ekonomi syariah di regional antara lain melalui dukungan terhadap perluasan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai koordinator dan *vocal point* dengan KNEKS. Komunikasi dengan KDEKS melalui kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia terus ditingkatkan sebagai bagian penting dalam strategi pengembangan dan peningkatan literasi masyarakat. Pada tahun 2022, telah terbentuk 6 (enam) KDEKS di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, NTB, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan terus mendukung pembentukan KDEKS di provinsi lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi setempat. Bersama dengan KNEKS, Bank Indonesia akan terus mendorong akselerasi beberapa program agar menjadi program prioritas di KDEKS, seperti sertifikasi halal.

Boks 4.1 Pengembangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia mengembangkan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah berupa transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi lindung nilai kompleks beli BUS/UUS kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian transaksi *spot* jual BUS/UUS kepada Bank Indonesia dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* beli BUS/UUS kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *forward agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal)* adalah saling berjanji (muwa'adah) untuk transaksi *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji. Transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia menggunakan akad *al-tahawwuth al-murakkab* sesuai Fatwa DSN MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

Karakteristik transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Karakteristik dimaksud mencakup: (i) dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah; (ii) dilakukan dengan menggunakan *underlying* transaksi;(iii) dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai syariah, yaitu informasi dari bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *underlying* transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada bank indonesia, melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan jangka waktu kontrak lindung nilai syariah paling lama 3 (tiga) tahun; (iv) jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; (v) dapat diperpanjang; dan (vi) tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).

***Underlying* transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia**. Dalam melakukan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia, bank syariah wajib memenuhi persyaratan *underlying* transaksi yang dapat berupa *underlying* transaksi yang dimiliki bank atau nasabah. Dalam hal bank syariah

Gambar 4.11. Contoh Skema Transaksi Lindung Nilai Kompleks Beli

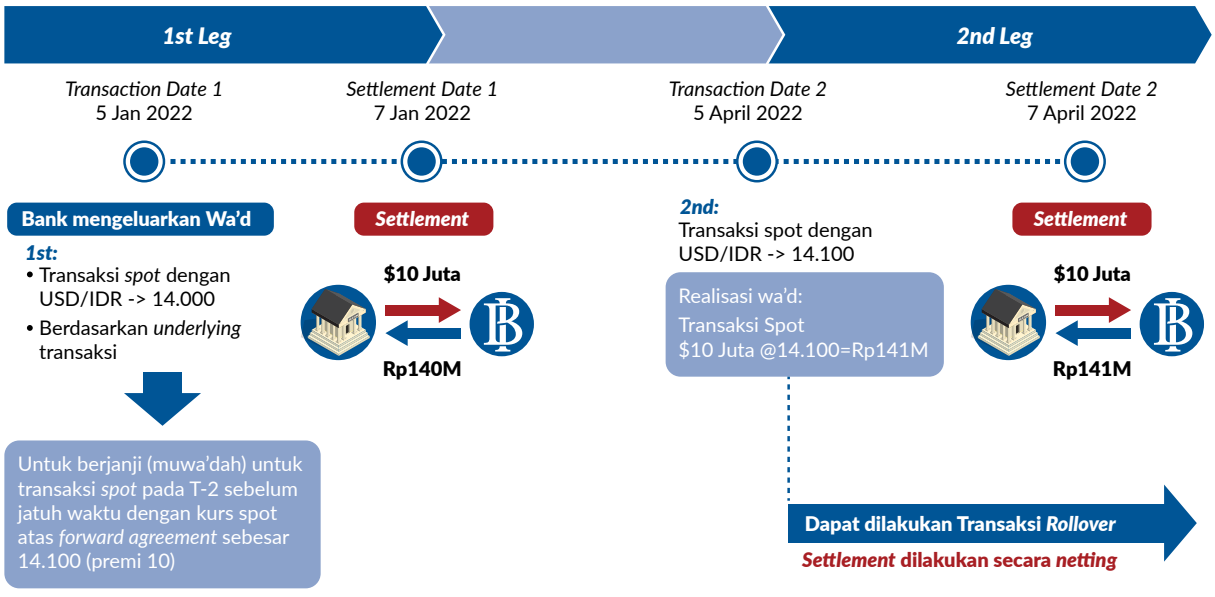

Sumber: Bank Indonesia

menggunakan *underlying* transaksi yang dimiliki nasabah maka bank syariah melakukan *squaring* untuk memitigasi risiko atas transaksi lindung nilai syariah yang diterima dari nasabah. *Underlying* transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia mencakup: (i) kegiatan transaksi berjalan (*current account*), (ii) kegiatan transaksi finansial (*financial account*), (iii) kegiatan transaksi modal (*capital account*), (iv) pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, (v) perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan/atau (vi) *underlying* transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Underlying* transaksi dimaksud tidak termasuk: (i) surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; (ii) penempatan dana; (iii) fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau (iv) aset kripto.

Persyaratan bank syariah yang dapat mengajukan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia dilaksanakan secara bilateral, pada hari kerja Bank Indonesia. Bank syariah yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang mencakup: (i) memiliki izin sebagai peserta operasi moneter syariah dalam valuta asing; (ii) memiliki tingkat kesehatan Bank tertentu; (iii) tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia; dan (iv) tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

Perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Bank dapat mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia dengan tetap memenuhi persyaratan sebagai bank syariah yang dapat mengajukan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia tersebut di atas. Selain itu, bank syariah juga perlu memastikan bahwa perpanjangan menggunakan kontrak lindung nilai syariah yang masih berlaku, jangka waktu perpanjangan sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai syariah dan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan nilai nominal perpanjangan paling banyak sebesar nilai *underlying* transaksi.

Penyelesaian transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Bank syariah diwajibkan melakukan penyelesaian transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara melakukan transfer dana dalam valuta asing sesuai dengan nilai transaksi ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia (dana harus diterima Bank Indonesia pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) dan menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia (dana harus disediakan pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia). Sementara itu, penyelesaian transaksi atas perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*.

Tersedianya transaksi *swap* lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi valas di pasar uang syariah. Bank syariah yang dapat melakukan transaksi valas masih terbatas sehingga tersedianya instrumen lindung nilai baik yang telah ada di *market* maupun bank syariah kepada Bank Indonesia diharapkan dapat mendukung upaya mencapai kondisi pasar keuangan yang ideal yaitu pasar keuangan yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas sehingga dapat mendorong peningkatan transaksi valuta asing oleh perbankan syariah yang mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

Gambar 4.12. Alur Transaksi Lindung Nilai Syariah

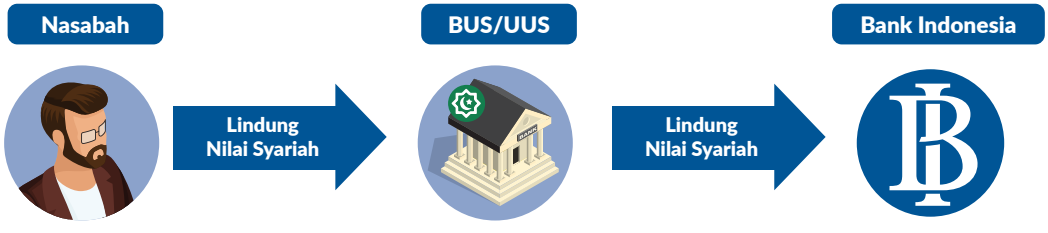

Sumber: Bank Indonesia

BAB V

SEKTOR UNGGULAN EKONOMI SYARIAH NASIONAL: PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Perkembangan pariwisata ramah muslim (PRM) global yang sempat mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 akhirnya dapat mulai kembali pulih di tahun 2022 seiring dengan efektifnya vaksinasi serta pelonggaran kebijakan perjalanan dan aktivitas masyarakat. Negara anggota OKI memiliki beragam strategi dalam menghadapi pasang surut pariwisata global, termasuk dalam menyambut fase pemulihan sektor wisata yang beranjak bangkit pada tahun ini. Beberapa strategi dari negara OKI dimaksud mulai dari memasukkan sektor wisata sebagai bagian dari program penanganan pemulihan ekonomi, melakukan pembentukan komite khusus pengembangan wisata ramah muslim, pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur wisata, membangun *branding* wisata yang terintegrasi dengan pengembangan industri halal, hingga melakukan kerja sama wisata internasional. Sektor PRM Indonesia yang pernah menduduki peringkat pertama pada tahun 2019 berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), membutuhkan kerangka strategi pengembangan yang tepat untuk kembali mengakselerasi pertumbuhannya. Dengan potensinya yang besar, sektor PRM Indonesia dapat menjadi kontributor yang signifikan bagi pemulihan baik bagi ekonomi syariah secara khusus, maupun ekonomi nasional secara umum. Strategi pengembangan PRM paska pandemi, memiliki pilar sebagaimana strategi kunci pengembangan wisata secara umum, yaitu terdiri dari pilar adaptasi, inovasi, serta kolaborasi. Strategi pemasaran PRM Indonesia sebagai *extended services* perlu diarahkan pada 20 negara OKI teratas dari *outbound market*, sebagai upaya diversifikasi pasar. Bank Indonesia turut berkontribusi mendorong pengembangan PRM nasional dengan fokus pada pengembangan daerah wisata berbasis desa, pengembangan model bisnis PRM yang mengombinasikan kegiatan dalam ekosistem pariwisata dengan teknologi informasi, serta program sinergi lainnya dengan mitra strategis terkait.

Sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) yang menjadi salah satu sektor unggulan HVC mengalami guncangan yang paling buruk akibat pandemi Covid-19. Sektor PRM sempat mengalami kontraksi sebesar -25,8% (yoy) pada awal pandemi di triwulan-2 2020 (Grafik 5.1). Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat, sektor PRM kini terus meningkat dengan capaian terakhir pada triwulan-3 2022 tumbuh sebesar 19,0% (yoy). Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan HVC nasional. Sehubungan dengan itu, Indonesia perlu mengoptimalkan pengembangan sektor PRM memanfaatkan keunggulan destinasi wisata, pelayanan, dan infrastruktur bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Selain penguatan pada kontribusi Bank Indonesia di sektor ini, kolaborasi dengan pihak terkait, baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah maupun dengan pelaku industri dan komunitas masyarakat, diperlukan dalam mengakselerasi pengembangan sektor PRM ini.

Grafik 5.1. Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim (yoy)

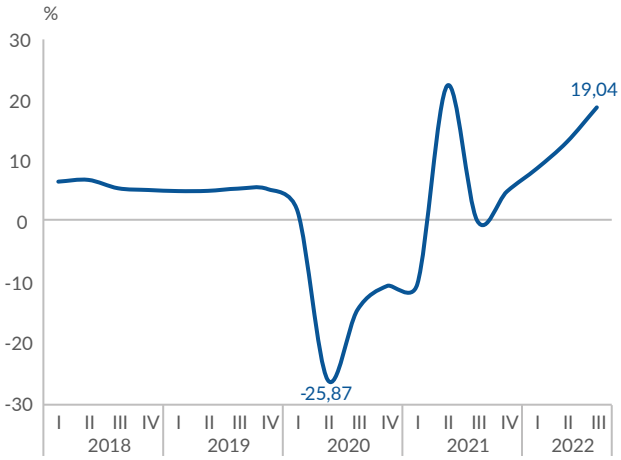

Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.1

Perkembangan dan Potensi Pariwisata Ramah Muslim Global

Sektor wisata sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di beberapa negara telah mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Pada periode 2014 s.d. 2019, sektor wisata di negara anggota OKI mencatat ekspansi sebesar 37%[44]. Namun pandemi Covid-19 telah memukul pariwisata global, termasuk negara-negara anggota OKI yang mengalami kontraksi pada 2020 hingga -78% (yoy).[45] Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada beberapa negara yang memiliki komitmen dalam pengembangan PRM. Thailand, Korea Selatan dan Jepang sebagai negara di luar OKI yang ingin memperkuat PRM juga mengalami *shocks* serupa. Rata-rata penurunan kunjungan wisatawan asing di ketiga negara tersebut pada 2020 menurun sebesar -85,3%.[46]

Pertumbuhan negatif sektor wisata global tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap sektor ekonomi lainnya. Sektor wisata memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sekitar 185 aktivitas ekonomi di sisi penawaran (OECD, 2020). Sektor wisata mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi karena perannya yang signifikan untuk menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh dunia, termasuk didalamnya kalangan rentan seperti difabel, perempuan dan anak-anak. Pada beberapa negara, sektor wisata juga terkait dengan isu lingkungan hidup, karena secara tidak langsung dapat berkontribusi pada upaya konservasi dan mempertahankan keberlangsungan alam.

Negara OKI telah melakukan serangkaian upaya, untuk memulihkan kembali sektor wisata di negaranya. Diantaranya melalui vaksinasi masif yang dilakukan pada 2021 yang diikuti oleh kebijakan pelonggaran aturan perjalanan pada 2022, pemberian stimulus fiskal dan moneter, melakukan pengembangan produk wisata, dan juga memperdalam kerja sama dengan sesama negara anggota OKI. Peningkatan aktivitas wisata di antara negara anggota OKI telah memungkinkan wisatawan untuk melakukan kunjungan ke berbagai objek wisata, yang dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pariwisata ramah muslim. Pada 27 s.d. 29 Juni 2022, *The 11th Session of Islamic Conference of Tourism Minister* (ICTM) yang digelar di Azerbaijan mengeluarkan resolusi terkait pengembangan wisata diantara negara-negara anggota OKI, yang semakin menegaskan komitmen diantara negara anggota untuk mendorong kembali relevansi peran sektor wisata dengan aktualisasi strategi dan kebijakan pemberantasan kemiskinan serta pembangunan berkelanjutan.

Beberapa negara anggota OKI memasukkan sektor wisata sebagai bagian dari program penanganan pemulihan akibat pandemi Covid-19. Sebagai contoh, Arab Saudi dan Bangladesh menempatkan kebijakan sektor wisatanya di bawah kementerian yang menangani mekanisme krisis internal. Otoritas wisata di Bahrain telah memiliki rencana aksi manajemen krisis yang di dalamnya meliputi strategi komunikasi dan solusi kepada para pemangku kepentingan di sektor wisata. Selain itu, Pakistan telah memiliki *Tourism Recovery Action Committee* (TRAC) yang bekerja di bawah otoritas wisata nasionalnya dalam rangka memberikan rekomendasi pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi. Upaya ini diharapkan juga sejalan dengan pencegahan perluasan pandemi Covid-19, mulai dari melembagakan protokol kesehatan pada berbagai ruang dan aktivitas publik, memastikan kepatuhan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap protokol dimaksud, sehingga dapat memberikan citra positif dan kepercayaan bagi para wisatawan. *World Travel and Tourism Council's* (WTTC) *Safe Travels Stamp*, sebagai salah satu protokol umum yang mengatur SOP pelaku perjalanan dan tenaga kerja di industri wisata, telah diterapkan di beberapa negara anggota OKI, diantaranya Arab Saudi, Turki, UEA, Mesir, termasuk Indonesia. Implementasi

44 International Tourism in OIC Countries, SESRIC, 2022
45 Ibid
46 World Bank, 2022

Gambar 5.1. "Putrajaya Internasional Hot Air Balloon Fiesta", Salah Satu Event Wisata Ramah Muslim di Malaysia

protokol ini diikuti oleh sertifikasi yang menjamin diaplikasikannya panduan untuk memastikan kesehatan dan keamanan penumpang dan pegawai di sektor wisata, seperti "Go Safe" di Abu Dhabi, atau sertifikasi "*Clean and Safe Malaysia*" di Malaysia.

Khusus terkait dengan pengembangan sektor pariwisata ramah muslim[47], beberapa negara OKI telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan untuk dapat meningkatkan daya saing sektor PRM di tingkat global. Sebagai contoh, Malaysia telah melakukan beberapa langkah pengembangan dan promosi wisata ramah muslim di berbagai daerah/ provinsi di negaranya sebagai berikut[48]:

1. Mendirikan *Islamic Tourism Center* (ITC) sebagai mitra dari kementerian pariwisata;
2. Menyusun "Rencana Strategis Pengembangan Wisata Islam" (*Strategic Plan for Islamic Tourism Development*);
3. Mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur wisata (*Tourism Development Infrastructure Fund*) yang dikelola oleh kementerian pariwisata;
4. Mendirikan *Halal Industry Development Corporation* sebagai koordinator pengembangan industri halal secara keseluruhan[49].

Islamic Tourism Center Malaysia memiliki visi sebagai penggerak utama dalam mendukung Malaysia sebagai pusat wisata Islam dan wisata ramah muslim dunia[50]. Beberapa fokus area yang dibangun oleh ITC Malaysia diantaranya terkait pengembangan riset, *capacity building-training*, konsultasi dan kolaborasi, standar dan sertifikasi, pedoman industri, serta program terkait *public relation* dan promosi. ITC sempat diundang sebagai pembicara dalam acara Halal Expo London 2022 untuk menceritakan pengalaman Malaysia sebagai negara unggulan destinasi wisata ramah muslim dunia.

47 Pariwisata ramah muslim merupakan *extended services* dari sektor pariwisata. Istilah "ramah muslim" merupakan upaya untuk menawarkan pengalaman pariwisata yang memudahkan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadahnya dan menawarkan layanan yang halal (CrescentRating, 2016).

48 SESRIC, 2022.

49 COMCEC, 2016

50 https://itc.gov.my/

Gambar 5.2. Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Jepang

Kebijakan sejenis juga telah ditempuh oleh beberapa negara OKI lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Indonesia. Pemerintah di negara tersebut mendirikan lembaga/komite yang secara khusus memikirkan penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan wisata ramah muslim, melakukan koordinasi dengan para pelaku wisata untuk menyediakan produk dan jasa yang mendukung wisata ramah muslim, memikirkan dinamika perkembangan kebutuhan dari wisatawan muslim, dan meningkatkan kualitas promosi dari destinasi wisata halal. Oleh karena itu, secara tidak langsung, strategi ini mendorong pengembangan sertifikasi halal terhadap barang dan jasa. Banyak hotel yang telah melengkapi ruangannya dengan tanda kiblat, sajadah, dan Quran di dalam kamarnya. Dalam area restoran, penawaran makanan halal semakin meningkat, bahkan beberapa telah memperoleh sertifikasi *halal kitchen*[51].

Beberapa negara OKI lainnya menempuh strategi kolektif yang didukung oleh asosiasi atau lembaga wisata internasional. Beberapa negara seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan mempromosikan *active tourism* dan wisata petualangan domestiknya dengan dukungan dari *Adventure Travel Trade Association* (ATTA) dan USAID. Mereka terlibat dalam pembekalan terkait strategi pemulihan Covid-19, implementasi pedoman pariwisata yang aman untuk wisata *adventure*, dan menawarkannya dalam paket wisata untuk keluarga/grup wisatawan[52]. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia bersama ILO dan Yayasan Ekowisata Indonesia (Indonesian Ecotourism Foundation) dalam hal pengembangan *eco-tourism* di NTB dan NTT.

Pada negara non-OKI, strategi pengembangan pariwisata ramah muslim dilakukan dengan upaya edukasi dan promosi yang cukup masif. Berbeda dengan negara anggota OKI yang berpenduduk mayoritas Muslim, beberapa negara non-OKI yang tertarik untuk mengembangkan *halal travel* seperti Jepang dan Thailand tentu memerlukan upaya ekstra untuk membangun *branding*-nya sebagai destinasi wisata ramah muslim (*branding-based halal tourism*). Kedua negara tersebut telah memahami besarnya potensi wisatawan muslim di Asia yang perlu digarap secara serius, dan oleh karena itu diperlukan langkah strategis untuk membangun citra positif terhadap *Muslim travelers*.

Pemerintah Jepang telah mendukung upaya untuk membangun ekosistem wisata halal sejak 2014, setelah adanya fokus pengembangan wisata Jepang pada 2012. Untuk mendukung pembangunan

51 Ibid.

52 Kelly, H. and Nikolova, G. (2020), Central Asia's Covid-19 Recovery Strategy. Adventure Travel News.

ekosistem dimaksud, seiring dengan penguatan *branding* "Japan Halal Tourism" melalui berbagai media *online* dan *offline*[53], Pemerintah Jepang berupaya memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan oleh wisatawan Muslim, mulai dari penyediaan produk dan restoran halal, pendirian musala yang dilengkapi dengan arah kiblat dan tempat wudhu di pusat perbelanjaan (seperti di Takashimaya, salah satu pusat perbelanjaan di Tokyo), hingga memberikan *visa-free* kepada beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim. Informasi terkait dengan wisata ramah muslim juga dengan mudah diperoleh melalui internet, misalnya www.muslimguide.jnto.go.jp. Website yang didirikan oleh Japan National Tourism Organisation (JNTO) dimaksud memberikan beragam informasi yang diperlukan oleh wisatawan, mulai dari perencanaan dan tips perjalanan wisata di Jepang hingga penyediaan *communication sheet* untuk membantu komunikasi para wisman Muslim terkait preferensi makanan atau hal lainnya. Berkat upaya yang serius, pada 2016 Jepang meraih predikat sebagai "World Best Non-OIC Emerging Halal Destination" dalam ajang World Halal Tourism Award kedua yang diselenggarakan di Abu Dhabi, dan telah memiliki Japan Muslim Travel Index (JMTI) sejak 2017 sebagai hasil kerja sama dengan CrescentRating. Berdasarkan GMTI 2022, kini Jepang telah menduduki peringkat ke-6 untuk negara non-OKI.

Fokus pengembangan wisata Thailand telah dimulai sejak 1999 melalui perbaikan infrastruktur wisata yang masif, sedangkan potensi terkait potensi industri halal telah dibahas sejak 2014 melalui sebuah simposium bertajuk "*Thailand Halal Assembly*". Pemerintah Thailand memulai ambisinya dalam industri halal sebagai dapur halal dunia, sejalan dengan visinya sebagai "*The Kitchen of the World*", dan saat ini Thailand merupakan negara peringkat ke-13 sebagai negara eksportir makanan halal terbesar dunia. Prospek besar dari *Muslim travel market* kemudian mendorong Pemerintah Thailand untuk juga menggarap sektor wisata ramah muslim, mengingat adanya sekitar 3,7 juta[54] Muslim mengunjungi Thailand sebelum pandemi. Terlebih, wisatawan Muslim dari negara Teluk merupakan wisatawan yang potensial, dikenal dengan lama tinggal dan pengeluaran harian yang tinggi. Pemerintah Thailand meluncurkan *branding* "Thailand Diamond Halal" pada 2014; sebuah konsep merek yang diharapkan dapat menjadi *icon* pemasaran/penjualan produk halal Thailand, termasuk pariwisata. Peluncuran *branding* tersebut diikuti oleh berbagai upaya nyata untuk memperkuat aspek *Muslim-friendly services*, mulai dari penguatan pada titik awal perjalanan wisatawan melalui *Muslim-friendly airport facilities* di beberapa bandara besar[55], hotel yang menawarkan makanan halal, penyediaan fasilitas

Gambar 5.3. Aspek Penting yang Perlu Menjadi Perhatian dalam Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

Sumber: GMTI, 2022

53 Dalam membangun *branding*-nya, Pemerintah Jepang bekerja sama dengan beberapa blogger, influencer dan juga media di negara Muslim untuk mempromosikan potensi pariwisata ramah muslimnya (JNTO, 2020).

54 https://www.bangkokpost.com/business/1696452/thailand-ready-to-tap-busy-muslim-travel-market

55 Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, Thailand pernah meraih peringkat pertama dari kategori Top 10 Halal Friendly Airports (Non-OIC Countries) di tahun 2012.

ibadah di pusat perbelanjaan (termasuk keberadaan sekitar 2.000 masjid[56]), hingga pembuatan aplikasi ramah muslim (*Muslim-friendly app*) yang dapat dijadikan sebagai panduan selama wisatawan muslim berwisata di negeri gajah putih. Aplikasi tersebut dibuat oleh *Tourism Authority of Thailand*, lembaga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan negeri tersebut sebagai destinasi wisata, termasuk didalamnya wisata ramah muslim. Berdasarkan GMTI 2022, Thailand menduduki peringkat ke-2 untuk negara non-OKI.

Dalam konteks pariwisata ramah muslim, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pegiat wisata adalah ketersediaan layanan muslim (*muslim-friendly services*). Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh CrescentRating pada November 2021 yang menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas layanan ramah muslim telah menjadi bagian perencanaan wisata *Muslim travelers*. Secara tidak langsung, hasil survei tersebut dapat menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha wisata ramah muslim, mulai dari pemilik rumah makan hingga Pemerintah ikut untuk menyediakan mushola atau masjid beserta kemudahan memperoleh akses air untuk bersuci, *halal food*, *halal destination*, dan sertifikasi halal lain yang diperlukan untuk mendukung ekosistem pariwisata ramah muslim secara menyeluruh.

Di sisi lain, pengembangan wisata ramah muslim ke depan perlu memperhatikan beberapa hal terkait aktivitas sosial (*social impact activities*), sustainabilitas (*sustainability*) dan perjalanan bermakna (*meaningful travel*). Ketiga hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang perlu dibangun oleh para pemangku kepentingan di sektor PRM. Selain itu, ketiga aspek tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator perkembangan PRM di suatu negara, sebagaimana yang telah digunakan oleh CrescentRating. Saat ini generasi muda telah semakin terinformasi tentang isu terkait lingkungan dan *sustainability*, yang akhirnya membangun kesadaran mereka dalam memilih tempat wisata yang mendukung inisiatif hijau.

Model bisnis pelaku usaha wisata juga perlu memperhatikan perubahan perilaku wisatawan paska pandemi Covid-19. Salah satu tuntutan yang secara tidak langsung diharapkan oleh para wisatawan adalah fleksibilitas dalam melakukan perencanaan perjalanan, terlebih ketika teknologi telah menjadi bagian dari perencanaan wisata itu sendiri. Misalnya, pemilik hotel perlu merumuskan kebijakan yang dapat memberikan keleluasaan bagi pelanggannya untuk melakukan pembatalan, mengingat faktor penyebab pembatalan cukup beragam. Para pelaku usaha perlu memperhatikan tren yang sedang diminati oleh masyarakat, baik di antara negara OKI maupun non-OKI, melalui optimalisasi *digital channel*. Berdasarkan data GMTI 2019, potensi *muslim traveler* akan terus berkembang hingga 2026 hingga menyentuh angka 230 juta orang dengan perkiraan pembelian berbasis online sebesar 180 miliar dolar AS. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2022, pengeluaran umat muslim untuk wisata halal mencapai 102 miliar dolar AS.

Gambar 5.4. Proyeksi Pertumbuhan Muslim *Travel Market*

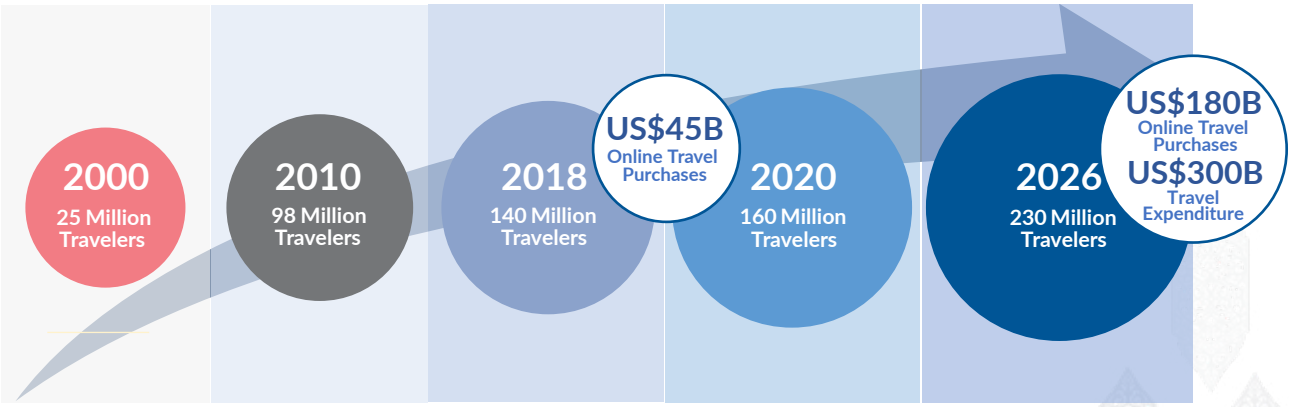

Sumber: GMTI, 2019

56 https://riyadh.thaiembassy.org/th/page/29025-muslim-in-thailand-2?menu=5d80b46615e39c0a50006465

Di sisi lain, implementasi teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menggarap wisatawan domestik mengingat posisi wisatawan mancanegara yang rentan mengalami fluktuasi. Beberapa negara seperti Uganda dan Jordan menjadikan wisatawan lokal sebagai faktor yang mampu mendorong keberlangsungan industri wisata di negaranya. Langkah ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat Covid-19 belum benar-benar usai. Berdasarkan data WTTC (Grafik 5.2), di masa pandemi terjadi lonjakan porsi pengeluaran turis domestik dari 46% di tahun 2019 menjadi 63% di tahun berikutnya, dan sebaliknya, pengeluaran turis asing mengalami penurunan dari 54% menjadi 37% pada periode yang sama.

Potensi pengembangan pariwisata ramah muslim ke depan akan semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk muslim dunia. Berdasarkan data GMTI 2022, jumlah populasi muslim dunia akan mencapai 2,3 miliar penduduk pada tahun 2030, yang tersebar di 200 negara. Sekitar 1,46 miliar diantaranya terdiri dari Generasi Alfa (21,5%), Generasi Z (27.2%) dan Generasi Millenials (22,9%), atau dapat dikatakan sekitar 70% penduduk muslim dunia berada dalam usia di bawah 40 tahun. Jumlah penduduk di bawah 40 tahun diproyeksikan mencapai 1,6 miliar jiwa pada 2030; dan grup rentang usia antara 20 hingga 25 tahun sebagai generasi yang akan masuk dalam angkatan kerja akan bertambah dari 165 juta di tahun 2022 menjadi 181 juta pada

Grafik 5.2. Perbandingan Pengeluaran Turis Domestik dan Internasional pada 2019 dan 2020

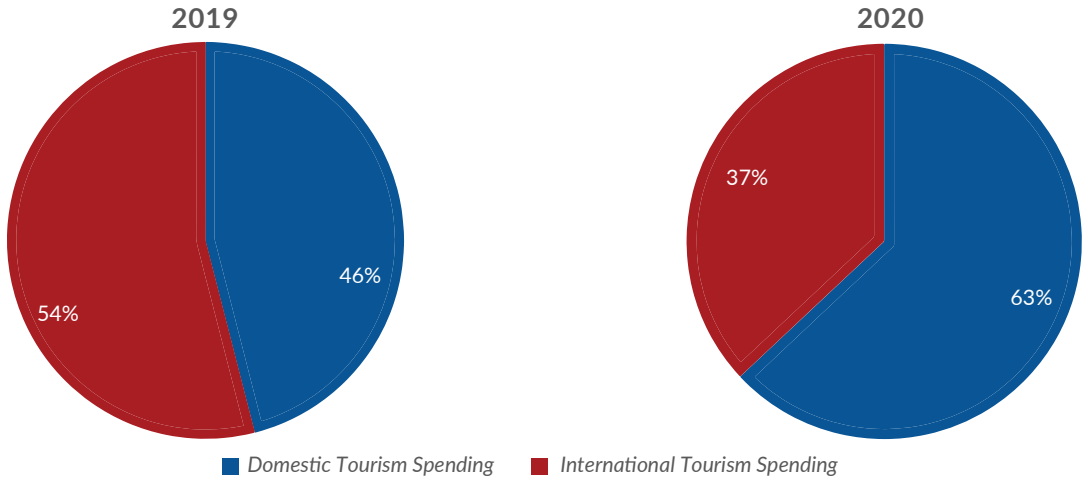

Sumber: Wold Travel and Toursim Council, 2021

Grafik 5.3. Pengeluaran Konsumsi Umat Muslim Dunia

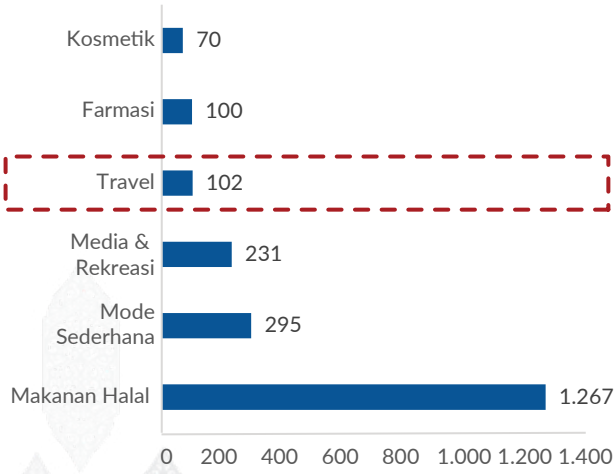

Sumber: SGIER 2022, diolah

Grafik 5.4. Sebaran Populasi Muslim Dunia

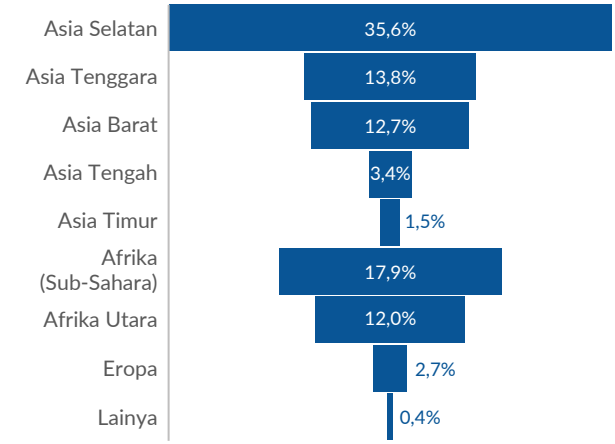

Sumber: GMTI 2022, diolah

2030. Menariknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 5.4, sekitar 67% dari populasi muslim tinggal di wilayah Asia, dan sisanya berada di Afrika (29,9%), Eropa (2,7%) dan benua lainnya (0,4%). Oleh karena itu, strategi untuk menggarap pasar *muslim travel* perlu terus dikembangkan, agar potensi pasar wisata senilai 102 miliar dolar AS, sebagaimana *report* SGIER 2022 (Grafik 5.3 dan 5.4), dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, terutama di negara-negara yang memiliki basis pariwisata ramah muslim yang kuat.

Fase selanjutnya dari perkembangan wisata halal dunia adalah *Halal Travel 2.0* yang akan banyak digerakkan oleh generasi milenial, generasi Z, dan *Muslim Women Travelers*. Pada fase ini wisata didorong oleh teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *Augmented Reality*, dan *Virtual Reality* (GMTI, 2022). Perkembangan teknologi akan terus mengubah cara wisatawan dalam melakukan perencanaan dan menikmati perjalanan wisata (*tech-enabled travel*). Situasi ini sejalan dengan keberadaan generasi milenial (*Muslim Millenial Travelers*) yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, melek teknologi, dan seringkali meluangkan waktunya untuk melakukan riset sederhana sebelum merencanakan perjalanan wisata. Perkembangan ini juga sejalan dengan Generasi Z yang tumbuh dengan teknologi. Selain generasi milenial dan Z, turis perempuan muslimah (*Muslim Women in Travel* atau disingkat MWIT) juga menjadi elemen penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha di sektor wisata. Segmen ini memiliki pertumbuhan tertinggi dalam *travel market* dan menguasai sekitar 45% dari wisatawan muslim. Dan dalam kebanyakan keluarga, perempuan memiliki peran besar dalam menyusun persiapan hingga mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan perjalanan wisata.

Gambar 5.5. Segmen *Muslim Women Travelers* Semakin Penting dalam Industri Pariwisata Ramah Muslim

5.2

Kerangka Strategi Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia

Indonesia telah menunjukkan tren positif yang konsisten dalam pengembangan sektor pariwisata ramah muslim dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan MasterCard-CrescentRating, jumlah wisatawan muslim dunia mengalami pertumbuhan sebesar 30% di tahun 2016. Pada saat itu, posisi Indonesia masih menduduki peringkat ke-4 (versi GMTI), namun dapat tampil sebagai juara umum di ajang *World Halal Tourism Award* (WHTA) 2016 dengan memenangkan tiga kategori sekaligus dari lima belas kategori yang dilombakan. Pemerintah melalui kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, telah berhasil meramu strategi pengembangan wisata halal Indonesia dengan jitu sehingga peringkat Indonesia terus mengalami peningkatan, hingga menduduki peringkat ke-1 pada tahun 2019. Strategi yang diterapkan mencakup penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi wisatawan muslim; peningkatan atraksi wisata muslim; pengembangan konektivitas; peningkatan pemasaran (promosi dan *marketing communication*) yang berfokus pada tujuan, waktu, asal, dan preferensi wisata halal; pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; penguatan kebijakan, kelembagaan dan sinergi antar *stakeholders*; hingga peningkatan kompetensi industri melalui pengembangan destinasi wisata ramah muslim.

Kemunculan pandemi Covid-19 telah menjadikan tahun 2020 sebagai periode yang paling menantang bagi industri wisata di dunia, termasuk di Indonesia. Pada fase ini, Indonesia mengalami penurunan kunjungan wisatawan asing hingga mencapai 75% dan wisatawan domestik sebesar 30%. Penurunan kunjungan wisatawan ini berdampak negatif pada 1,58 juta pekerjaan di sektor ekonomi kreatif. Gelapnya industri wisata di tahun 2020 ditengarai menjadi penyebab utama menurunnya peringkat GMTI Indonesia ke posisi 4 pada tahun 2021[57].

57 Pada tahun 2020 GMTI tidak mengeluarkan laporan oleh karena adanya pandemi Covid-19.

Tabel 5.1. Peringkat Wisata Halal Dunia Versi GMTI

Tahun	Peringkat Indonesia
2015	6
2016	4
2017	3
2018	2
2019	1
2021	4
2022	2

Sumber: GMTI, diolah

Grafik 5.5. Tren Peningkatan Peringkat Wisata Halal Indonesia

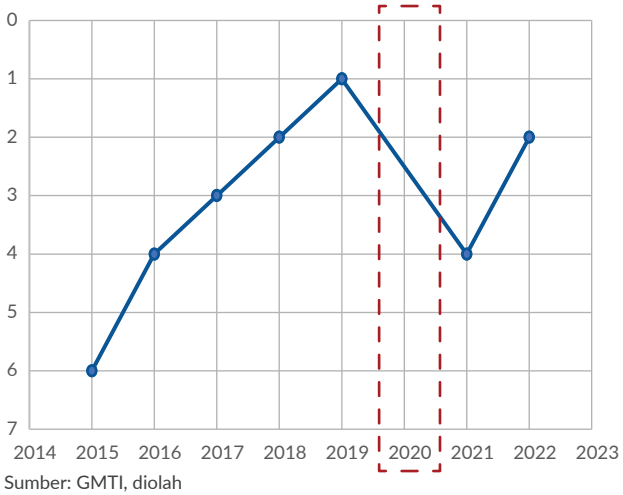

Sumber: GMTI, diolah

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar peringkat Indonesia dapat kembali menempati posisi pertama, sebagaimana capaian yang pernah diraih pada 2019.

Grafik 5.6. Tren Positif Peningkatan Jumlah Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Periode Agustus 2021-Agustus 2022

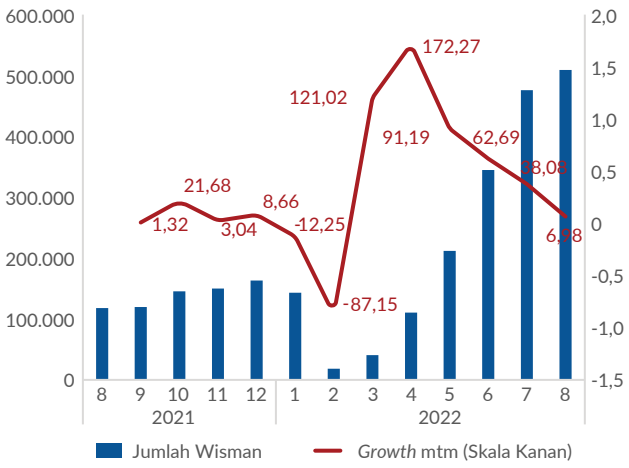

Sumber: BPS, diolah

Pelonggaran kebijakan perjalanan internasional di beberapa negara pasca penanganan Covid-19 yang semakin baik telah membawa angin segar bagi industri wisata dunia, termasuk di Indonesia. Hingga tahun 2022, Indonesia masih termasuk dalam negara yang mewajibkan karantina bagi wisatawan yang menunjukkan hasil tes positif Covid-19 pada saat kedatangan, dan menutup peluang kunjungan bagi wisatawan yang masih belum melakukan vaksinasi Covid-19. Namun demikian, peningkatan kunjungan wisatawan asing telah mulai meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2022, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia telah mencapai 1.730.426 orang secara akumulatif; mengalami kenaikan sebesar 2.028,65% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Berdasarkan pertumbuhan *month to month*, peningkatan signifikan terjadi pada bulan Maret dan April 2022 sebesar 121,02% dan 172,27% karena dibukanya penerbangan internasional oleh beberapa bandara dan maskapai.

Berdasarkan negaranya, kunjungan turis asing ke Indonesia pada tahun 2022 didominasi oleh Australia, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Juli 2022, kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 476.970 orang, dan Bali memiliki porsi 51,68% atau sebanyak 246.504 orang. Peningkatan kunjungan turis asing salah satunya didorong oleh adanya kebijakan "Visa on Arrival" bagi para wisatawan asing. Visa on Arrival (VoA) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan pasca membaiknya Covid-19. WNA yang menjadi subjek VoA dapat menjadikannya sebagai visa selama 30 hari untuk enam tujuan, yaitu kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintahan, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat serta transit. Berdasarkan kewilayahannya, data Badan Pusat Statistik pada periode 2016 s.d. 2021 (Grafik 5.7 dan Grafik 5.8) menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia paling banyak berasal dari wilayah Asia (diantaranya Tionghoa, Timur Leste, India, Jepang dan Korea Selatan), kemudian diikuti oleh negara-negara ASEAN (diantaranya Malaysia dan Singapura). Kunjungan wisatawan dari negara-negara Timur

Grafik 5.7. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2016 - 2021

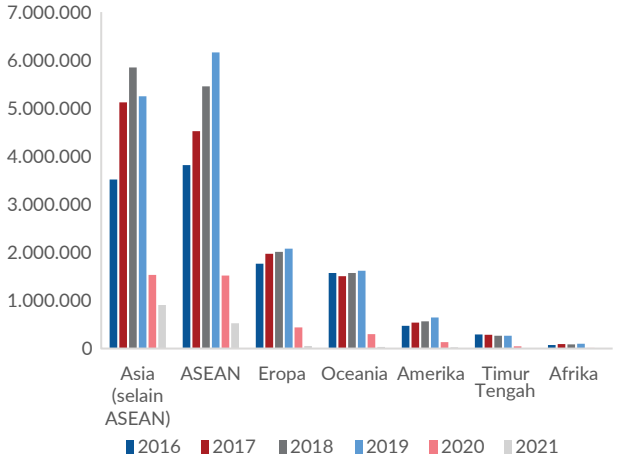

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.8. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2021

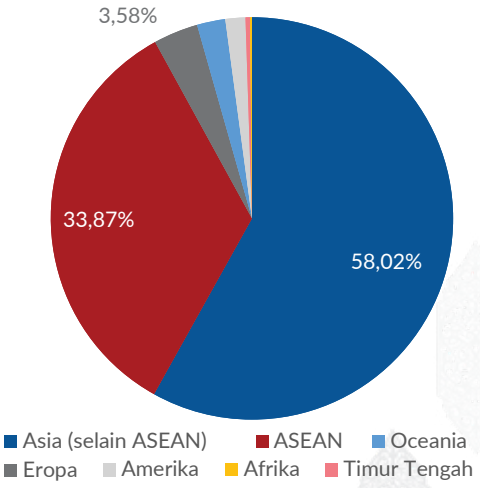

Sumber: BPS, diolah

Tengah cukup rendah. Data statistik kunjungan wisatawan asing tersebut dapat menjadi sinyal bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia perlu untuk selalu dikemas dengan baik, terutama dari sisi komunikasi, sehingga penerapan nilai-nilai Islami dalam industri wisata dapat diterima dengan baik oleh calon wisatawan asing.

Potensi pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia didukung oleh kultur masyarakat yang agamis dan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pew Research Center yang diterbitkan pada 2021, Indonesia merupakan negara paling religius di dunia, mengalahkan negara-negara timur tengah. Sekitar 98% responden Indonesia menganggap agama merupakan hal penting dalam hidup, dan 96% meyakini bahwa iman kepada Tuhan YME merupakan syarat untuk membangun moral. Hasil riset ini dapat menjadi salah satu indikator potensi besar pariwisata ramah muslim di Indonesia. Selain itu, hasil riset ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa cukup banyak daerah potensial untuk didorong menjadi destinasi wisata ramah muslim kelas dunia. Sebagai contoh, Aceh pernah terpilih sebagai World's Best Halal Cultural Destination, dan Sumatera Barat terpilih pada dua kategori, diantaranya sebagai World's Best Halal Destination dan World's Best Halal Culinary Destination pada ajang World Halal Tourism Award tahun 2016 yang digelar di Abu Dhabi, UEA. Dari sisi alam, Indonesia merupakan negara dengan 17.508 pulau yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia juga memiliki 53 taman nasional, dan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar. Potensi ini memberi tanda bahwa peluang pengembangan *green tourism*, *eco-tourism*, dll masih terbuka lebar di Indonesia. Ke depan, cakupan pengembangan wisata ramah muslim akan dikembangkan sebagai *extended services* dari berbagai daerah destinasi wisata di Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia telah dikembangkan dengan strategi yang komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi pariwisata ramah muslim dan komitmen Pemerintah Indonesia yang kuat dan visioner dalam mengembangkan sektor wisata. Pada 2015, Presiden Joko Widodo bahkan telah menetapkan sektor pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun

Gambar 5.6. Sepuluh Destinasi Unggulan Pariwisata Halal Indonesia

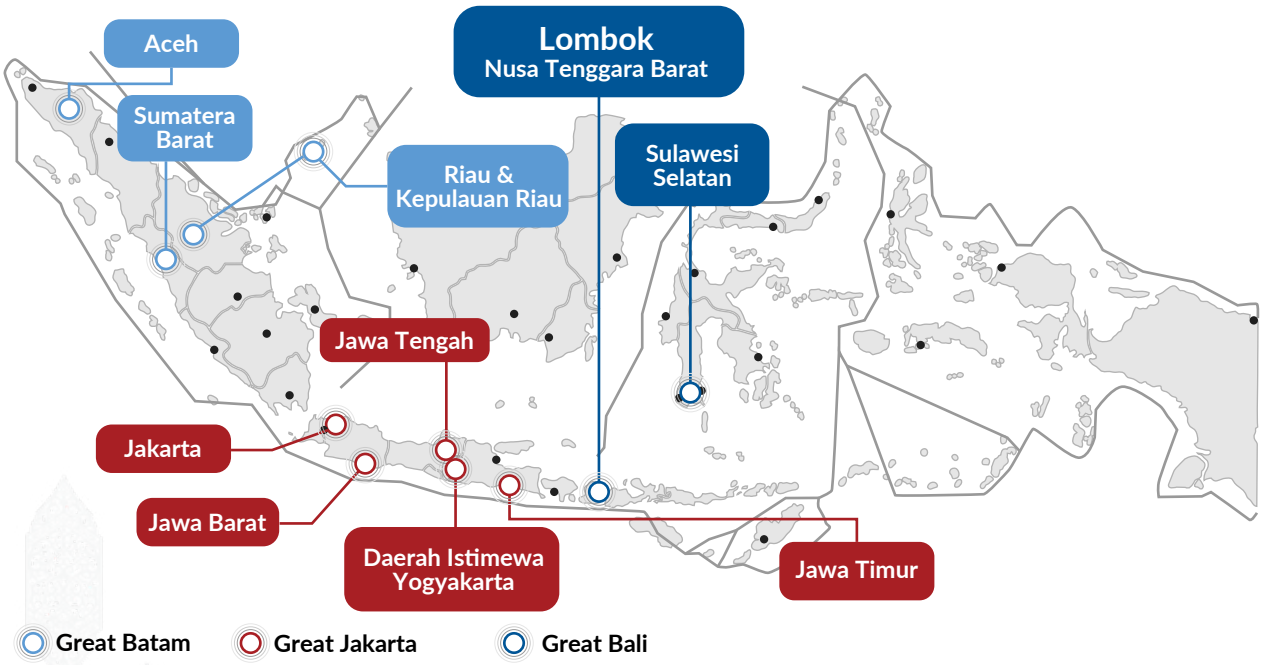

Sumber: Renstra Pariwisata Halal 2019-2024, Kemenparekraf RI

2016, sektor wisata memperoleh dua dari delapan arahan Presiden. Selama kurun waktu 2015-2019, sektor wisata mampu menjadi kontributor devisa terbesar. Tidak mengherankan bila akhirnya sektor wisata memperoleh posisi strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS).

Indonesia memiliki visi sebagai negara tujuan pariwisata ramah muslim kelas dunia. Ada tiga area yang menjadi fokus untuk mencapai visi tersebut, yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi pengembangan wisata nasional yang dirumuskan oleh Kemenparekraf RI, yaitu *sustainable competitive growth*, *integrated-tourism ecosystem*, dan *government support-industry*. Pertama, penguatan destinasi wisata pada sisi 3A (amenitas, atraksi, serta aksesibilitas dan konektivitas). Kedua, penguatan sisi pemasaran melalui pengembangan pemasaran berbasis DOT (*destination*, *origin* dan *time*), BAS (*branding*, *advertising* dan *selling*) dan POSE (*Paid Media*, *Owned Media*, Social Media dan *Endorser*). Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui 3C (Curriculum, Certification dan Center of Excellence), komunitas masyarakat dan industri. Penguatan pada tiga area tersebut (destinasi, pemasaran serta industri dan kelembagaan) diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan wisata halal, mendukung peningkatan kunjungan jumlah wisatawan mancanegara muslim, dan menjaga daya saing Indonesia dalam rating wisata halal internasional (seperti GMTI). Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuh sasaran strategis pengembangan pariwisata ramah muslim yang disusun dalam model *balance score card* sebagai berikut.

Pemerintah mengupayakan terciptanya "Bali baru" dalam kerangka pengembangan pariwisata ramah muslim untuk menambah daya tarik wisata nasional. Paralel dengan pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata ramah muslim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah juga mengupayakan lahirnya destinasi wisata favorit di Indonesia yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan internasional sebagaimana Bali. Beberapa wilayah yang diharapkan mampu menjadi destinasi "Bali baru" wisata ramah muslim diantaranya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Kelima daerah ini memiliki keunikannya masing-masing yang dinilai mampu menarik minat wisatawan asing dan domestik. Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dengan luas mencapai 1.145 kilometer persegi. Borobudur telah dikenal sebagai *global cultural heritage* yang menunjukkan kemegahan arsitektur Indonesia pada abad ke-8 Masehi. Mandalika menawarkan panorama alam berupa perbukitan hijau, pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mempesona, serta ditunjang oleh kearifan budaya lokal yang unik. Labuan Bajo identik dengan komodo

Gambar 5.7. Tujuh Sasaran Strategis Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

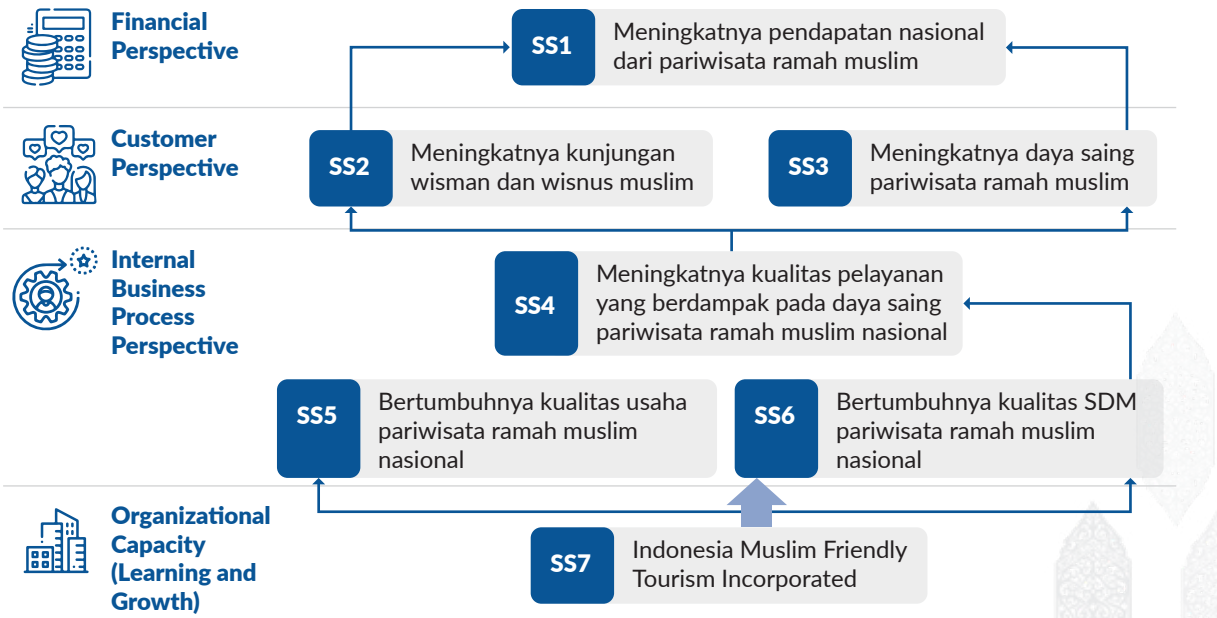

Sumber: Kemenparekraf RI 2019, diolah

Gambar 5.8. Pemetaan Negara OKI sebagai Target Wisatawan Mancanegara

The Top 20 OIC Outbound Markets Represent 84% of the Total Muslim Outbound Market

	Nigeria Bangladesh Uzbekistan Pakistan	Egypt Algeria Morocco Iran	Jordan Azerbaijan Indonesia Tunisia	Oman Malaysia Kazakhstan Turkey	Qatar UAE Kuwait Saudi Arabia
GDP per Capita (USD)	**2,000**	**3,500**	**4,500**	**12,500**	
% of the Global Muslim Population	26%	13%	14%	6%	2%
% of the Global Muslim outbound market	11%	14%	10%	17%	32%

The Top 10 Non-OIC Outbound Markets Represent 15% of the Total Muslim Outbound Market

	India	Russia China	Italy	Germany UK France	USA Singapore Netherlands
GDP per Capita (USD)	**2,000**	**15,000**	**35,000**	**50,000**	
% of the Global Muslim Population	11%	2%	<1%	1%	1%
% of the Global Muslim outbound market	2%	3%	1%	7%	2%

Sumber: GMTI, 2022

sebagai kadal purba raksasa yang langka. Likupang memiliki hamparan savana dan perbukitan, ditunjang oleh keindahan pantai, butiran pasir yang lembut, air laut yang bersih serta pemandangan bawah laut yang indah.

Strategi pemasaran pariwisata ramah muslim di Indonesia perlu diarahkan pada 20 negara OKI teratas dari *outbound market*. Berdasarkan GMTI 2022, terdapat 20 negara yang merepresentasikan 84% dari total wisatawan muslim negara OKI sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas. Apabila kita kembali melihat grafik 5.7, kita akan mendapati kunjungan wisatawan dari Timur Tengah masih rendah, bahkan hanya lebih tinggi dari negara-negara asal Afrika. Bahkan total kunjungan wisman dari negara-negara di Eropa di tahun 2019 (di saat Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI) lebih banyak 7,86 kali dari negara-negara asal Timur Tengah. Hal ini menandakan perlunya prioritisasi strategi wisata untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan dari Timur Tengah. Prioritisasi promosi wisata Indonesia pada negara-negara dimaksud diharapkan dapat memperkuat *awareness* wisatawan mancanegara, terutama dari negara anggota OKI, terhadap posisi Indonesia sebagai *world halal destination*, sekaligus pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Strategi ini diperlukan sebagai upaya mitigatif apabila *travelers* dari Eropa dan Amerika mengalami penurunan akibat adanya krisis ekonomi.

Upaya dari sisi *marketing* tentu belum cukup. Masih diperlukan perbaikan pada beberapa aspek wisata lainnya untuk mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia. Diantaranya memastikan 4 hal utama, yaitu kemudahan akses (mulai dari pengurusan Visa sampai dengan dukungan akses transportasi hingga menuju destinasi wisata), kejelasan komunikasi (mulai dari memperkenalkan destinasi wisata ramah muslim melalui berbagai kanal komunikasi hingga kejelasan informasi akomodasi, peta lokasi, dan aspek teknis komunikasi lainnya), ketersediaan lingkungan yang nyaman (mulai dari sisi keamanan wisata, hingga kepedulian terhadap sustainabilitas), dan ketersediaan layanan yang mampu menjamin pengalaman terbaik bagi *muslim travelers* (mulai dari ketersediaan makanan-minuman halal hingga fasilitas beribadah).

Pasca pandemi, strategi pengembangan pariwisata ramah muslim memiliki pilar sebagaimana strategi kunci pengembangan wisata secara umum, yaitu terdiri dari pilar adaptasi (pemulihan pariwisata pasca pandemi), inovasi (diversifikasi dan digitalisasi) serta kolaborasi. Adaptasi dapat dimaknai bahwa wisata

ramah muslim menerapkan protokol kesehatan dan senantiasa memperhatikan faktor CHSE (*Cleanliness, Health, Safety* dan *Environment sustainable*). Aspek inovasi terkait dengan pemanfaatan *platform* digital dalam memasarkan produk wisata dan melayani wisatawan; sedangkan aspek kolaborasi adalah bekerja sama dalam kerangka *penta helix*. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa konsep pengembangan wisata berbasis 3A (*attraction, amenity* dan *access*) sudah tidak lagi cukup untuk merespon perubahan tren industri wisata.

Secara khusus, Kemenparekraf memiliki langkah-langkah khusus dalam rangka mendorong pemulihan sektor wisata. Diantaranya mulai dari pemulihan dan perluasan pasar (misalnya melalui Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja dan Gernas Bangga Buatan Indonesia dan pemasaran produk ekraf), peningkatan kapasitas SDM (*reskilling, upskilling*, sertifikasi kompetensi, pendampingan dan wirausaha SDM Parekraf), revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekonomi kreatif (diantaranya pengembangan desa wisata dan revitalisasi destinasi), peningkatan resiliensi dan daya saing usaha (diantaranya standarisasi usaha dan sertifikasi CHSE), serta inovasi produk dan jasa (diantaranya pengembangan produk berkualitas, perlindungan HKI dan transformasi digital).

Kebijakan pengembangan wisata Indonesia ke depan akan menuju wisata berbasis alam dan budaya yang berkelanjutan (*sustainability based on nature and culture*). Paska pandemi, sebagaimana arahan Menparekraf[58], tren pengembangan wisata Indonesia juga mengikuti tren karakteristik wisata yang *personalize, customize, localize*, dan *smaller in size* . Atraksi yang menarik sebisa mungkin dikemas dalam konsep *eco, wellness*, dan petualangan. Menindaklanjuti tren tersebut, program pengembangan wisata berbasis desa atau *domestic micro tourism* perlu diperhatikan dan dikembangkan bersama agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pada subbab berikutnya, akan dijelaskan program pengembangan pariwisata ramah muslim berbasis komunitas desa.

***Services* dan *environment* merupakan dua hal yang perlu menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata ramah muslim Indonesia, meski dalam konteks Indonesia unsur *access* tetap harus dikembangkan secara simultan**. Pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata ramah muslim perlu berfokus pada aspek layanan wisatawan. Pelayanan terhadap wisatawan dimulai sejak mereka meninggalkan rumah. Artinya, mulai dari moda transportasi publik beserta fasilitasnya (bandara, pelabuhan, terminal, dsb) akan menjadi titik awal para wisatawan menilai atau menduga kenyamanan wisata di suatu wilayah. Titik berikutnya yang akan dilalui oleh *muslim travelers* adalah akomodasi (hotel, vila, resort, dsb). Para penyelenggara jasa akomodasi perlu memperhatikan apakah nuansa dan fasilitas yang disediakan cukup untuk mendukung kenyamanan menginap dan beribadah di lingkungan penginapan. Sertifikasi halal terutama pada sisi layanan dapur dan restoran, sehingga dapat memberi rasa nyaman dan aman dari kontaminasi zat yang diharamkan. Pada titik akhir, pelaku perjalanan wisata ramah muslim akan tiba di tempat tujuan wisata. Layanan ramah muslim juga diperlukan untuk mendukung terbentuknya *muslim-friendly experience* yang utuh[59].

Gambar 5.9. Empat Aspek Penting Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

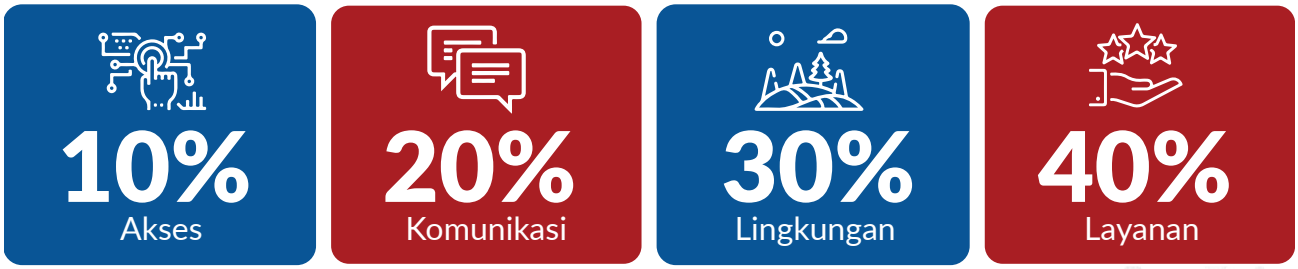

Sumber: GMTI, 2022

58 Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210322165235-4-231982/gaspol-ini-jurus-sandiaga-uno-ramaikan-lagi-pariwisata-ri

59 Dalam paparan "Kebangkitan Industri Pariwisata Indonesia", 2022.

Strategi pemulihan pariwisata ramah muslim Indonesia perlu dikaitkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebagai salah satu indikator keberhasilan. Keberhasilan pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia tentu tidak cukup ditunjukkan melalui peringkat wisata halal dunia, tetapi perlu didukung oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sebagai contoh, meski Indonesia berada di peringkat pertama wisata halal dunia pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan asing pada saat itu diperkirakan sebanyak 16,1 juta orang. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Malaysia sebanyak 26,1 juta orang, meski pada saat itu negeri jiran tidak dalam peringkat pertama. Pada Juli 2022, Malaysia telah mencatat kunjungan wisatawan asing sebesar 3,2 juta orang, sedangkan pada periode Agustus 2022, kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 1,7 juta orang.

5.3

Piloting Program Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim

***Pilot project* pengembangan pariwisata ramah muslim akan menggunakan model SMART Ekosistem Pariwisata Halal.** SMART merupakan singkatan dari *Sustainable Muslim-Friendly and Attractive Tourism*. Model ini mengombinasikan kegiatan/aktivitas yang terjadi dalam ekosistem pariwisata dengan teknologi informasi. Ekosistem pariwisata yang dikembangkan melalui konsep SMART diharapkan dapat menjadikan destinasi wisata ramah muslim mampu memenuhi kebutuhan, keinginan dan pengalaman spesifik wisatawan muslim oleh karena terintegrasinya pihak-pihak yang ada di dalam ekosistem wisata secara sistematis. Oleh karena itu, implementasi konsep SMART pada gilirannya diharapkan mampu menciptakan *economic value*, *social value*, *functional value*, *emotional value* dan *knowledge value*.

Model SMART *Halal Destination* akan didukung oleh manajemen organisasi yang berbasis sinergi, integrasi, transaksi, investasi, dan edukasi (SITIE) dan konsep pengembangan wisata berkelanjutan. Manajemen organisasi berbasis SITIE akan mendorong pengelola wisata untuk bekerja secara profesional dan terukur dalam membangun sisi kelembagaan tanpa meninggalkan sisi ICT di dalam operasionalisasinya. Sinergi sebagai salah satu unsur dalam SITIE menuntut manajemen wisata ramah muslim untuk melakukan keselarasan di beberapa aspek, mulai dari keselarasan produk dan pemasaran, keselarasan program industri halal, hingga keselarasan sisi kelembagaan (*hexahelix*) dan kebijakan pariwisata di daerah. Model SITIE juga meliputi sisi bisnis (integrasi, transaksi dan investasi) dalam rangka penyediaan data sumber daya PRM yang didukung oleh *traceability system*, dan sistem komunikasi yang diperlukan dalam menggerakkan ekonomi dan mendukung penjualan produk lokal khas daerah serta menciptakan peluang pembiayaan bagi UMKM; dan meliputi sisi edukasi yang nantinya berkaitan dengan pengembangan SDM dari sisi pemahamannya terhadap wisata halal terapan dan teknologi digital yang akan digunakan dalam manajemen wisata halal. Di sisi lain, penerapan konsep *sustainability* dimaksudkan agar *pilot project* nantinya dapat

Gambar 5.10. Konsep Pengembangan Model Ekosistem Rantai Nilai Halal Pariwisata Ramah Muslim

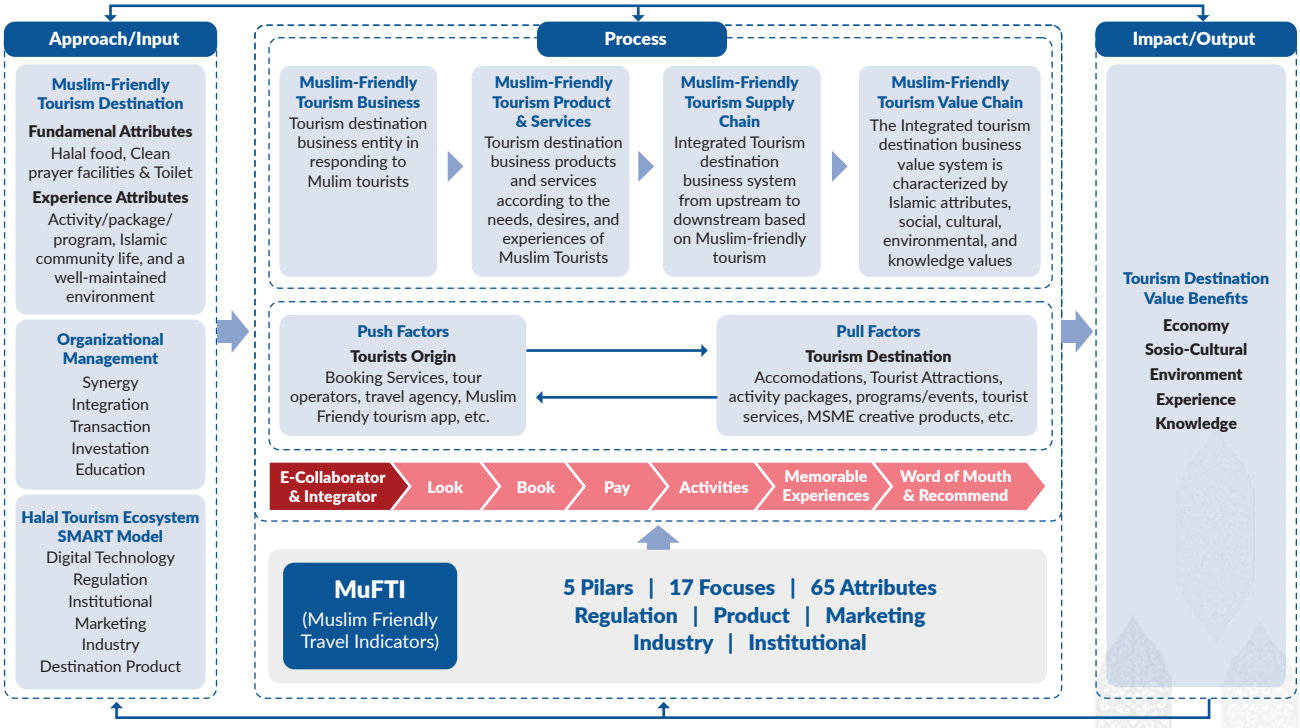

Sumber: Kajian Bank Indonesia & EHTC, 2022

memberikan dampak positif, tidak hanya terhadap alam dan lingkungan, tetapi juga berdampak pada sisi ekonomi masyarakat.

Konsep desa wisata ramah muslim tetap mengacu pada indikator atau ciri yang terkait dengan konsep desa wisata secara umum. Pengembangan desa wisata halal perlu memperhatikan konsep desa wisata yang secara umum telah dipahami. Sebagai contoh, UNWTO menentukan batasan syarat untuk desa wisata adalah yang memiliki kepadatan penduduk rendah dengan maksimal 15.000 jiwa, terletak di lanskap yang tersedia kegiatan tradisional seperti pertanian, kehutanan, peternakan atau perikanan, serta berbagi nilai dan gaya hidup komunitas masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, maka pengembangan desa wisata halal tetap harus berangkat dari keinginan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui sektor wisata, sehingga desa wisata dapat memiliki peran sebagai subjek (pengelola) sekaligus objek (daya tarik). Pengembangan desa wisata halal juga harus berupaya memberikan dampak positif, selain terhadap ekonomi dan lingkungan, juga terhadap pengetahuan, sosial dan budaya. Oleh karena itu, desa wisata ramah muslim sebaiknya dikembangkan secara tematik, dengan memperhatikan nilai dan gaya hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat desa. Melalui cara ini, desa wisata ramah muslim dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi pengunjungnya dan secara bersamaan tetap menjaga nilai dan budaya yang telah ada di masyarakat.

Di sisi lain, desa wisata ramah muslim perlu memperhatikan keunikan karakteristiknya. Salah satu karakteristik penting pengembangan pariwisata ramah muslim adalah tersedianya atribut Islami. Penyediaan atribut dimaksud dapat disajikan dalam bentuk produk dan layanan yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan muslim. Berdasarkan uraian singkat ini, maka desa wisata ramah muslim dapat didefinisikan sebagai desa wisata yang menyediakan produk dan layanan serta *experience* ramah muslim yang baik terhadap pengunjungnya. Oleh karena itu, sisi penyediaan atribut dasar (seperti ketersediaan makanan halal, sarana ibadah yang layak, dan toilet yang bersih) dan atribut pengalaman (seperti paket aktivitas dan program/*event*, kehidupan masyarakat yang Islami, dan lingkungan yang terpelihara) menjadi penting untuk menjadi bagian infrastruktur pengembangan desa wisata ramah muslim.

Untuk memastikan kualitas dari rangkaian proses bisnis rantai nilai halal dalam ekosistem pariwisata ramah muslim, program *pilot project* akan menggunakan metode penilaian MuFTI, CuSS dan CoSS. MuFTI adalah singkatan dari *Muslim Friendly Travel Indikator*; sedangkan CuSS adalah *Customer Satisfaction Survey*, dan CoSS adalah *Community Satisfaction Survey*. Ketiganya merupakan bagian dari tahap monitoring dan evaluasi atas capaian pengembangan ekosistem rantai nilai halal desa wisata ramah muslim. MuFTI suatu instrumen untuk menilai kondisi ekosistem pariwisata ramah muslim, yang dapat digunakan oleh pembuat

Gambar 5.11. Model Bisnis Ekosistem Rantai Nilai Halal Berbasis Desa

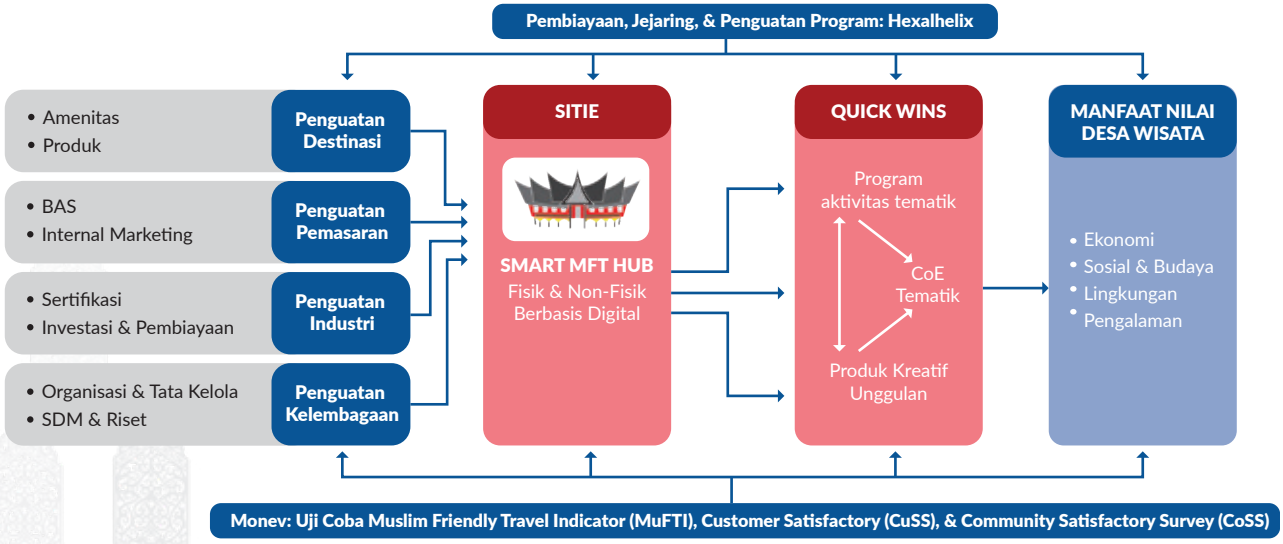

Sumber: Kajian Bank Indonesia & EHTC, 2022

kebijakan, industri, dan sektor pendukung dalam mengembangkan ekosistem *smart halal destination*. Indikator ini disusun berdasarkan penilaian mandiri dan eksternal yang dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan pengelola desa wisata, pemerintah daerah, tenaga pendamping dan *stakeholders* lainnya. Selain itu telah disesuaikan dengan karakteristik pariwisata ramah muslim Indonesia, dengan tetap melakukan penelaahan terhadap sistem penilaian sejenis, seperti *Global Muslim Travel Indikator, Global Islamic Economy Indikator*, dan *Travel and Tourism Competitiveness Index*. Sedangkan survei kepada pelanggan dan komunitas akan dilakukan dengan lebih sederhana dan menggunakan aplikasi yang mudah dipelajari seperti Google Form.

***Pilot project* desa wisata ramah muslim rencananya akan dikembangkan dalam periode 2021 s.d. 2026, sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.** Penyusunan *feasibility study*, termasuk pemilihan desa dan penjajakan kelembagaan telah dilakukan pada tahun 2021 s.d. 2022. Pada 2023 s.d. 2024, diharapkan pembangunan fisik *pilot project*, penguatan kapasitas pengelola desa wisata, penggunaan aplikasi SMART MFT Hub, beserta rangkaian *capacity building* kepada pengelola wisata telah mulai dilaksanakan. Pada tahun berkutnya, penjajakan kerja sama bisnis antar desa telah mulai dilakukan, termasuk dalam rangka memperluas kolaborasi klaster desa wisata halal di Sumatera Barat; diikuti oleh adanya dukungan pembangunan *guest house* dan *mushala* yang diharapkan dapat menunjang terbentuknya ekosistem rantai nilai halal secara lebih komprehensif. Paket aktivitas kegiatan juga mulai dikemas dalam *calendar of event* tematik yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Pada tahun 2026 *pilot project* desa pariwisata ramah muslim telah memasuki *phasing out*, sehingga diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan mandiri.

Selain pelaksanaan *pilot project* desa wisata ramah muslim, juga direncanakan implementasi konsep wakaf berjangka. Implementasi konsep wakaf berjangka -sebagai bagian dalam *pilot project* pengembangan desa wisata ramah muslim- diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan sumber daya *idle* milik masyarakat lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur wisata, sehingga pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Realisasi konsep ini memerlukan keterlibatan lembaga wakaf dan lembaga terkait yang dapat menjamin proses ikrar wakaf dapat terlaksana secara sempurna. Dengan demikian, ada perluasan cakupan *stakeholders* dan proses membangun sinergisitas serta komitmen dari para pihak, termasuk melakukan survei dalam rangka meninjau aset yang akan menjadi objek wakaf dari *wakif* dari berbagai aspek. Selain itu, skema pembagian hasil juga perlu menjadi perhatian, agar keuntungan dari pengelolaan desa wisata dapat dialokasikan bagi pengelola desa wisata dan *mauquf alaih*.

Gambar 5.12. *Roadmap* Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal PRM Berbasis Desa

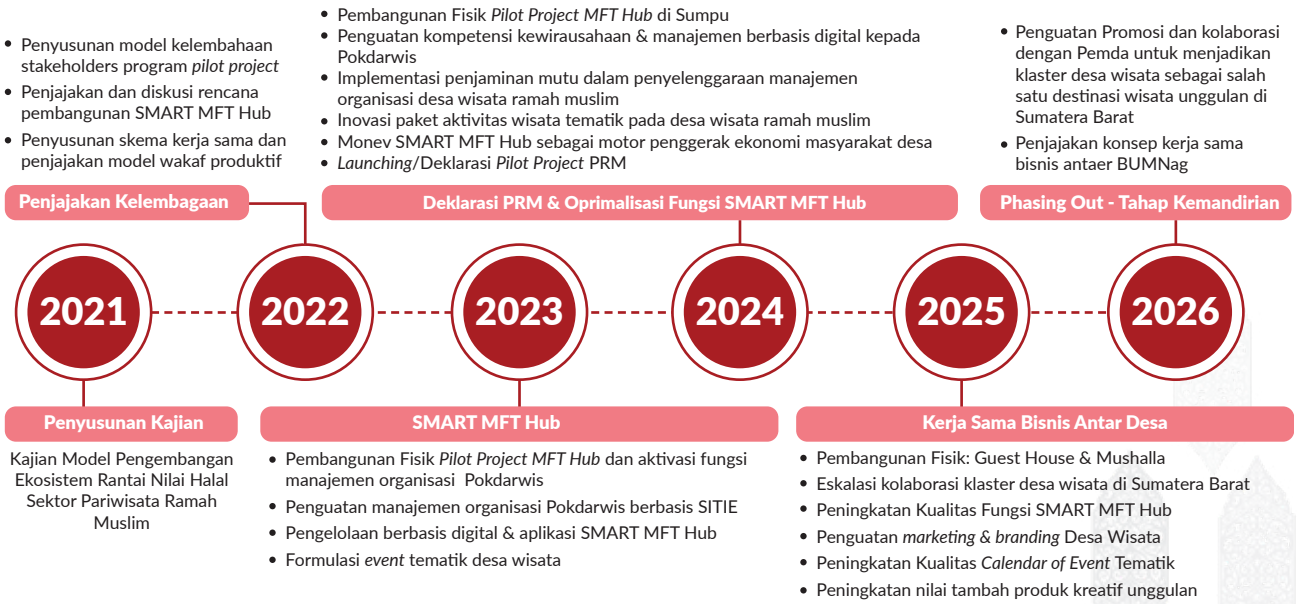

Sumber: Kajian Bank Indonesia & EHTC, 2022

Boks
5.1

Resolusi Pariwisata Ramah Muslim dalam rangka Mewujudkan Cita Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata Kelas Dunia (7 Oktober 2022)

Berdasarkan data GMTI 2021, pengeluaran umat muslim untuk berwisata akan mengalami peningkatan hingga 50% di tahun 2022 dengan nilai mencapai 154 miliar dolar AS, dan di tahun 2025 dapat menyentuh 189 miliar dolar AS. Melihat potensi yang besar ini, pengembangan ekosistem rantai nilai halal di sektor Pariwisata Ramah Muslim diperlukan untuk mengakselerasi industri wisata Indonesia, terlebih di masa pemulihan ekonomi. Beberapa hal tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan International Muslim Friendly Tourism Conference (IMFTC) yang dilakukan dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival 2022.

Konferensi tersebut membahas tentang penguatan landasan regulasi, penyediaan standar petunjuk atau *guideline* dari penerapan PRM, penguatan kesadaran masyarakat serta penguatan *branding* Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, pasca pembukaan IMFTC, Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia membacakan "Resolusi Pariwisata Ramah Muslim" yang memiliki isi sebagai berikut:

"*Pariwisata Ramah Muslim merupakan seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan pengalaman wisatawan muslim.*

Akselerasi pengembangan Pariwisata Ramah Muslim (PRM) dalam mewujudkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang dapat meningkatkan devisa dan pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga diperlukan:

1. *Memastikan kehadiran regulasi terkait dengan panduan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.*
2. *Mendorong terdapatnya regulasi terkait dengan instrumen penilaian pariwisata ramah muslim (IP-PRM/Muslim Friendly Travel Indicator).*
3. *Mendorong terdapatnya strategi penguatan indeks daya saing pariwisata ramah muslim.*
4. *Memastikan terciptanya inovasi dan kreasi produk yang mendukung pariwisata ramah muslim.*
5. *Memastikan terselenggaranya strategi peningkatan kualitas dan jumlah kunjungan wisatawan muslim.*
6. *Memastikan terselenggaranya strategi akselerasi peningkatan kualitas industri pariwisata ramah muslim.*
7. *Memastikan penerapan strategi optimalisasi performa kelembagaan pariwisata ramah muslim berbasis sinergi, integrasi, transaksi, investor pembiayaan dan edukasi.*

Boks
5.2

Kampung Kauman: Kuliner Wisata Halal Solo

Daya tarik pengembangan wisata halal berbasis kuliner saat ini telah merambah hingga ke pedesaan. Salah satu kampung yang sedang digerakkan menjadi *pilot project* adalah Kampung Kauman yang berlokasi di Surakarta. Wisata kuliner halal menjadi hal yang menarik oleh karena beberapa faktor, mulai dari permintaan yang semakin tinggi, hingga kedekatannya dengan persepsi produk yang sehat dan baik untuk dikonsumsi. Secara tidak langsung, konsep kuliner halal ini juga sejalan dengan tren pasca pandemi yang mampu merespon semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang aspek higienitas. Oleh karena itu, target pasar produk kuliner halal tidak hanya terbatas pada kalangan muslim, tetapi juga non-muslim.

Kampung Kauman sendiri sebenarnya tidak identik dengan kuliner halal, melainkan salah satu sentra industri batik. Bahkan citra Kauman sebagai kampung wisata batik telah terlebih dahulu terbentuk. Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa konsep halal dapat diimplementasikan secara fleksibel yang pada gilirannya dapat membentuk suatu ekosistem yang saling mendukung.

Konsep kuliner halal di Kampung Kauman sendiri telah dipastikan sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, keberadaan wisata kuliner halal di Kauman dapat menjadi penguat daya tarik wisatawan, sekaligus membentuk citra kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata halal. Untuk memperkuat cita-cita ini, pada awal Januari 2022 warga Kauman bersama Kantor Perwakilan BI Solo, MES, Syarikat Dagang Kauman, BSI, ICA Soloraya serta Mataya Art & Heritage menggelar Festival Kuliner Halal Kauman Solo.

Sumber: www.surakarta.go.id (diolah)

Boks 5.3

Pembangunan Masjid Di Kota Tua untuk Mendukung Pariwisata Ramah Muslim

Terletak sekitar 1,5 kilometer dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Kota Tua Jakarta telah menjadi satu dari 10 Destinasi Prioritas yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019. Pada abad ke-16, Kota Tua sempat mendapat julukan "Permata Asia" dan "Ratu dari Timur" oleh para pelayar dari Eropa. Dengan balutan nuansa khas nusantara tempo dulu, Kota Tua menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat ibu kota untuk melepaskan penat sejenak dari segala rutinitas harian. Pada saat itu, kondisi Kota Tua belum didukung dengan fasilitas wisata yang memadai. Sejalan dengan visi untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata Kota Tua serta keinginan mengembangkan layanan satu atap kepariwisataan (berupa pengembangan pusat kegiatan komunitas UMKM terpadu, pengembangan ruang MICE dan juga pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah, toilet, perpustakaan yang akan memberdayakan gedung bersejarah Kota Tua, Gedung Internationale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam), Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mendukung revitalisasi dan pengembangan Kota Tua. Selain melibatkan Pemerintah dan swasta, revitalisasi dan pengembangan Kota Tua juga melibatkan Komunitas Kota Tua yang *concern* terhadap pengembangan wilayah tersebut. Dalam upaya untuk menjadikan Kota Tua sebagai salah satu destinasi *halal tourism* di Jakarta, Bank Indonesia telah menginisiasi beberapa kali pertemuan untuk membangun *awareness* mengenai pentingnya revitalisasi dan pengembangan Kota Tua sebagai kawasan yang ikonik di Jakarta.

Untuk kepentingan revitalisasi Kota Tua, Pemerintah telah menunjuk PT. Pembangunan Kota Tua Jakarta yang terdiri dari sebuah konsorsium yang terdiri dari sembilan perusahaan. Untuk melakukan revitalisasi tersebut, salah satu fokus pengembangan dilakukan terhadap gedung-gedung yang berada disekitar Museum Fatahillah. Terkait dengan pengembangan destinasi *halal tourism*, strategi pengembangan akan mengacu pada strategi 3A2P. Amenitas dilakukan melalui pengadaan masjid/mushola, toilet layak dan mendorong dilakukannya sertifikasi halal untuk penyedia jasa makanan. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkontribusi melalui bantuan pembangunan masjid di Kota Tua Jakarta.

Lampiran

Lampiran 1 Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Sektor terkait Ekonomi Syariah Global

Sektor	Perkembangan sisi Konsumen	Perkembangan sisi Investasi	Perkembangan sisi Kebijakan dan Perdagangan (Domestik dan Global)
Makanan dan Minuman	1. Meningkatnya permintaan untuk makanan sehat (organik). 2. Meningkatnya permintaan untuk jasa pengantaran makanan (*food delivery*) berbasis digital.	1. Dukungan lembaga keuangan dan donor internasional untuk membiayai proyek terkait ketahanan pangan di negara-negara OKI. 2. Penetrasi perusahaan internasional di bidang pangan melalui investasi di negara-negara OKI.	1. Perhatian pemerintah pada isu ketahanan pangan meningkat sejak pandemi Covid-19 2. Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi halal dan memfasilitasi kawasan industri halal. 3. Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral, khususnya di Afrika untuk mendukung perdagangan pangan di intra-OKI.
Farmasi	1. Permintaan produk farmasi berbasis herbal meningkat. 2. Perkembangan *telemedicine* yang memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh.	1. Investasi di negara-negara OKI diarahkan pada produksi vaksin dan produk biologis lainnya (seperti gelatin). 2. Peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral yang meningkat di bidang farmasi khususnya di kawasan MENA.	1. Kebijakan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal kepada perusahaan farmasi, khususnya di Indonesia dan Malaysia. 2. Upaya pemerintah di negara-negara OKI membangun kemandirian farmasi.
Kosmetik	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko *transdermal* pada kosmetik yang berpengaruh pada kesehatan. 2. Diversifikasi lini produk kosmetik yang mencakup produk untuk laki-laki dan anak-anak. 3. Peningkatan permintaan kosmetik yang ramah lingkungan dan bersertifikasi halal.	Peningkatan investasi oleh *brand* kosmetik baik dari luar maupun dari dalam negara-negara oKI	Kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik untuk menjaga kualitas produk dan keamanan konsumen.

Sektor	Perkembangan sisi Konsumen	Perkembangan sisi Investasi	Perkembangan sisi Kebijakan dan Perdagangan (Domestik dan Global)
Fesyen	1. Digitalisasi transaksi fesyen yang terakselerasi akibat Covid-19. 2. Penyediaan produk fesyen bagi berbagai kebutuhan aktivitas konsumen. 3. Diversifikasi produk *modest fashion* yang juga mencakup lini difabel.	Perkembangan *e-Commerce* sektor fesyen yang menarik perhatian investor.	1. Inisiatif dari pemerintah berbagai negara untuk mengadakan kegiatan *expo* dan *fashion show* untuk promosi produk *modest fashion*. 2. Dukungan pemerintah seperti inkubasi dan *capacity building* untuk memperkuat pelaku usaha khususnya UMKM.
Pariwisata Ramah Muslim	Peningkatan aktivitas pariwisata seiring pelonggaran kebijakan terkait Covid-19	Sejumlah perusahaan jasa perjalanan *online* di sejumlah negara OKI berhasil mendapatkan pendanaan global.	1. Promosi pariwisata oleh pemerintah, baik di negara OKI maupun non-OKI yang mempromosikan PRM. 2. Kerja sama bilateral maupun multilateral di negara-negara OKI yang diarahkan pada sektor pariwisata, termasuk *medical tourism* dan *sustainable tourism*.
Media dan Rekreasi	Peningkatan produksi konten media bertema Islam, khususnya bagi segmen anak-anak	Peningkatan investasi media *streaming* di negara-negara OKI.	Penetrasi perusahaan media dan perfilman khususnya yang berasal dari negara-negara GCC pada berbagai *event* termasuk festival film berskala internasional.

Sumber: ICDT-OIC Annual Halal Report 2022, diolah

Lampiran 2 Keikutsertaan IKRA Indonesia pada Kegiatan Bertaraf Internasional

Kegiatan	Partisipasi	Keterangan
World Expo Dubai 2022	"*Special Week Bank Indonesia*" tanggal 11 - 17 Maret 2022 yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	*Rolling exhibition: showcasing* dan *trade show* terhadap produk unggulan dari 72 usaha syariah yang sebagian besar adalah anggota IKRA Indonesia *Business forum*: sosialisasi hasil kajian Indonesia Halal Market Reports 2021/2022 yang merupakan hasil kerja sama antara Bank Indonesia dengan Dinar Standard dan IHLC. *Muslim modest fashion show*: 13 desainer nasional yang terdiri dari 11 anggota IKRA Indonesia dan dua desainer papan atas Indonesia, serta 2 desainer Internasional yang berdomisili di Dubai. *Business linkage* serta *business penetration*: upaya penetrasi produk halal sektor makanan halal dan fesyen muslim di kawasan Timur Tengah bekerja sama dengan ITPC Dubai yang diikuti oleh 52 UMKM, serta *buyer/partner/aggregator* potensial.
Muffest	Bank Indonesia mengikutsertakan 13 (tiga belas) pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia sektor fesyen muslim.	Diselenggarakan tanggal 21-23 April 2022 di Jakarta, dengan total transaksi yang diperoleh pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia mencapai Rp215.824.500,-.
Halal Center Indonesia (HCI)	*Launching* Gerakan Ritel Modern Peduli Produk Halal Indonesia yang diinisiasi oleh Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).	HCI yang berlokasi di Lt 1 Thamrin City Jakarta, menyediakan *booth* sebagai *outlet* penjualan yang dijadikan ajang *showcase* bagi pelaku usaha syariah untuk proses inkubasi sebelum mengikuti proses kurasi masuk ke Pojok Halal Hypermart. Bank Indonesia mengikutsertakan 16 anggota IKRA Indonesia sejak 23 Mei sampai dengan 5 Juni 2022.
MIHAS	Berpartisipasi pada 3 (tiga) area *booth* MIHAS 2022 yang diisi oleh 5 (lima) pelaku usaha syariah yang hadir langsung dan 1 (satu) pelaku usaha syariah yang hanya mengirim produk.	Area *booth* Bank Indonesia dibuat tanpa sekat dan dalam area pavilion Indonesia yang dikelola oleh Atase Perdagangan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kegiatan	Partisipasi	Keterangan
1st ICWSC 2022	Inisiasi BI dalam rangka memperkuat ekosistem rantai nilai halal melalui penguatan kapasitas pelaku usaha syariah, kelembagaan yang berbasis komunitas perempuan, fasilitasi infrastruktur pendukung (dhi. Sertifikasi halal) dan pembentukan POKJA pelaku usaha syariah perempuan Indonesia.	Pelatihan, *workshop*, *business linkage*, *ministry talk*, *international-national conference*, *motivation talk show*, *mini exhibition* dan *fashion show* yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center. Adapun anggota IKRA Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berjumlah 11 pelaku usaha syariah yang terdiri dari 5 peserta *exhibition* dan 6 peserta *fashion show*.
Muslim Life Fest	*Exhibition/trade expo* dengan mengikutsertakan 9 pelaku usaha syariah anggota IKRA Indonesia dan 1 *guest exhibitior* sektor fesyen muslim dan makanan/minuman halal yang sudah dilengkapi sarana promosi termasuk logo Bank Indonesia, Road to ISEF 2022, dan IKRA Indonesia, serta berbagai kebutuhan pelaku usaha syariah dan Bank Indonesia dalam *booth*	Gelaran *event* bisnis produk halal dan industri syariah.

Lampiran 3 Penerbitan/Penyusunan Buku Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Tahun Terbit/ Penyusunan	Judul Buku	Ringkasan Isi Buku
1	2022	Buku Akuntansi Syariah	Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai akuntansi yang berdasarkan pada syariah, serta materi yang akan dibahas meliputi akuntansi dan nilai Islam, kerangka dasar laporan keuangan syariah dan perlakuan akuntansi berdasarkan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan akad lainnya, serta akuntansi untuk zakat dan wakaf antara lain mengacu kepada SAK Syariah
2	2022	Buku Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqqiyah	Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqqiyah pembentukan dan penetapan hukum ekonomi dan keuangan Islam. Pada buku tersebut membahas sumber hukum (dalil), hukum, kaidah yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan aktivitas muamalah, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana terbentuknya hukum yang berkaitan dengan muamalah.
3	2022	Buku Digitalisasi Transaksi Ekonomi Syariah (Perspektif Hukum dan Praktik)	Buku ini memberikan pemahaman mengenai perkembangan hukum digital, benda/aset digital menurut syariah, kepemilikan dan transaksi muamalah aset digital, legalitas akad/transaksi secara digital/*online*, kekuatan pembuktian dokumen digital, *cybersecurity* dan *cybercrime* dalam ekonomi digital (mencakup perlindungan privasi), serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara *online*.
4	2022	Buku Pengantar Hukum Digital dari Perspektif Ekonomi Syariah	Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai gambaran praktik digitalisasi transaksi ekonomi syariah dari perspektif hukum Islam/syariah, yang dapat digunakan sebagai buku referensi dan/atau pengayaan bahan ajar pada perkuliahan S1 maupun S2 pada Fakultas Hukum, disamping juga dapat menjadi pedoman para *stakeholders* baik pembuat kebijakan maupun praktisi dan komunitas terkait.
5	2022	Buku Ekonomi Syariah untuk Anak-Anak	Buku ini hadir dalam rangka mendorong melek literasi dan investasi dari usia dini serta menjadi bagian dari ekosistem solusi edukasi keuangan dan investasi. Buku literasi ekonomi syariah anak yang disusun terbagi dalam 3 (tiga) seri awal dengan topik pengenalan ekonomi dan keuangan syariah serta pada tahap selanjutnya diusulkan adanya kesinambungan buku untuk topik lanjutan

No	Tahun Terbit/ Penyusunan	Judul Buku	Ringkasan Isi Buku
6	2021	Buku Pengantar Ekonomi Islam	Buku ini memuat berbagai materi sebagai pengantar untuk mempelajari ekonomi Islam seperti konsep, paradigma, ruang lingkup, dan metodologi. Dijelaskan pula perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis dan sosialis, termasuk peran Pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi Islam.
7	2021	Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	Buku ini memuat materi terkait perkembangan pemikiran ekonomi Islam, mulai dari periode Rasulullah dan para sahabat, zaman keemasan Islam, zaman kesultanan Turki Utsmani, periode pemikiran kontemporer, hingga abad ke sembilan belas Masehi. Selain itu, pada buku ini dibahas pula sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia.
8	2021	Buku Ekonomi Pembangunan Islam	Buku ini memuat materi mengenai ekonomi pembangunan khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Beberapa cakupan materi meliputi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam termasuk indikatornya, kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif Islam, sumber daya pembangunan ekonomi Islam termasuk peran sektor keuangan sosial, dan strategi serta kebijakan pembangunan dalam Islam.
9	2021	Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1	Buku ini membahas ekonomi dan keuangan syariah dengan pendekatan hukum. Beberapa materi yang disajikan antara lain meliputi hukum ekonomi Islam, kaidah fiqih dan tujuan hukum Islam (Islamic legal maxim dan maqashid syariah), akad syariah, keuangan komersial dan sosial Islam, serta peran Pemerintah dan Bank Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah.
10	2021	Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2	Buku ini merupakan penajaman lebih lanjut dari buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1. Berbagai materi yang terdapat pada buku Strata 1 dibahas lebih detail pada buku ini untuk menyesuaikan kebutuhan informasi baik dari sisi teori maupun praktik pada jenjang Strata 2.

No	Tahun Terbit/ Penyusunan	Judul Buku	Ringkasan Isi Buku
11	2020	Buku Referensi Perguruan Tinggi: Ekosistem Industri Halal	Buku ini secara komprehensif memaparkan ekosistem industri halal yang diawali dengan landasan hukum syar'i dan hukum positif, lalu menjelaskan sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia serta pemetaan potensi dan pengembangan industri halal Indonesia. Selain itu memberikan gambaran pilar dan infrastruktur dan kebutuhan SDM industri halal yang didukung dengan pemaparan aspek pembiayaan atau layanan jasa keuangan. Selanjutnya memberikan informasi tentang edukasi dan promosi halal, sistem dan sertifikasi halal produk, komparasi penjaminan halal di beberapa negara serta peta jalan industri halal di Indonesia.
12	2019	Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik	Buku ini menjelaskan berbagai konsep dan dinamika keuangan publik dan sosial Islam secara teori dan praktik. Sebagai pelengkap buku ini menjelaskan praktik keuangan publik dan sosial Islam di berbagai negara termasuk Indonesia dan implikasinya terhadap perekonomian nasional.
13	2019	Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia	Buku ini memberikan gambaran variasi model bisnis yang dipraktikkan oleh sektor keuangan mikro syariah yang memiliki keunikannya tersendiri dari setiap institusi keuangan mikro syariah di Indonesia, serta mengulas peluang, tantangan, dan upaya untuk semakin memperkuat institusi keuangan mikro syariah di Indonesia.
14	2019	Berpetualang Bersama Keluarga Pak Maal Mengenal Ekonomi dan Keuangan Syariah	Buku serial anak-anak yang dikemas dalam bahasa sederhana dan mudah dipahami untuk mengenalkan ekonomi dan keuangan syariah. Buku ini diawali dengan pengenalan keluarga Muslim Indonesia yang pintar dan kekinian, kemudian menjelaskan fungsi uang sebagai amanah, berlomba-lomba dalam kebaikan serta mengenalkan ekonomi syariah beserta urgensinya. Kisah petualangan dalam buku serial ini juga mengenalkan lembaga keuangan syariah, anjuran untuk saling berbagi dari harta kekayaan yang dimiliki dan menghindari sifat boros atau berlebihan serta belajar berbisnis dari sifat teladan Nabi Muhammad Saw.
15	2018	Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia	Buku ini menjabarkan lebih rinci dan luas terkait kondisi dan potensi keuangan mikro syariah ke depan serta dilengkapi dengan kisah sukses aktual dari beberapa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

No	Tahun Terbit/ Penyusunan	Judul Buku	Ringkasan Isi Buku
16	2018	Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda Teori dan Praktik	Buku ini memaparkan secara lengkap teori dan praktik kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda, kemudian perbandingan sistem moneter syariah dan konvensional serta arah pengembangan kebijakan moneter syariah di Indonesia dan praktiknya di beberapa negara di dunia.
17	2017	Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia	Buku ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai teori keuangan syariah yang berawal dari landasan filosofi dan prinsip dasar ekonomi syariah, urgensi dan tujuan keuangan syariah dalam perekonomian beserta mekanisme operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.
18	2017	Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia	Buku ini diawali filosofi aplikasi keuangan mikro syariah, selanjutnya urgensi dan peran institusi keuangan mikro syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan serta memberikan gambaran karakteristik lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan memaparkan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.
19	2016	Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia	Buku ini menjabarkan teori dan praktik produk serta akad di industri keuangan syariah Indonesia, juga memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai kronologi variasi produk dan akad serta perkembangan dan perubahannya. Dengan penjelasan kronologi perkembangan dan perubahannya, pembaca diharapkan akan memahami bahwa perkembangan aplikasi keuangan syariah di Indonesia begitu dinamis. Artinya, perkembangan produk dan akad keuangan syariah di Indonesia juga mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan terkait keuangan syariah oleh otoritas, praktisi dan masyarakat secara luas, serta kelayakan aplikasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan industri keuangan syariah Indonesia. Buku ini juga menjelaskan perbandingan penggunaan produk dan akad antara beberapa negara.
20	2016	Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara	Buku ini sebagai referensi bahan ajar yang secara runtut menjelaskan konsep zakat dan pengentasan kemiskinan, kemudian keterkaitan zakat dengan konsep makroekonomi. Selain itu memberikan gambaran sejarah zakat serta isu fiqih zakat kontemporer yang dilanjutkan dengan penjelasan tata kelola zakat yang efektif, kemudian menguraikan sistem dan kelembagaan zakat seperti sistem pelaporan dan akuntansi zakat, kerangka regulasi dan pengawasan zakat, dan lain halnya serta mengkomparasikan praktik regulasi dan tata kelola zakat di berbagai negara.

No	Tahun Terbit/ Penyusunan	Judul Buku	Ringkasan Isi Buku
21	2016	Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif	Buku yang termasuk salah satu bahan ajar terkait wakaf dengan diawali pemaparan teori dan praktik wakaf di negara lain. Selanjutnya menjelaskan dasar hukum wakaf, pokok-pokok pengaturan wakaf dan tata kelola Nazir. Kemudian memberikan gambaran lengkap tentang sistem pendukung dan regulasi wakaf serta kerangka hukum wakaf di beberapa negara seperti Malaysia, Sudan, Kuwait, Pakistan, Bangladesh, Brunei Darussalam dan negara mayoritas Muslim lainnya.
22	2016	Usaha Mikro Islami	Buku serial bahan ajar yang memberikan pemahaman mendalam tentang usaha mikro dalam perekonomian Indonesia dengan dilengkapi bagaimana potret masyarakat Indonesia serta peran usaha mikro dalam mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya menjelaskan teori dan aplikasi kontrak usaha mikro yang menggambarkan pola hubungan antara pelaku usaha mikro. Selain itu buku ini memberikan kisah sukses usaha mikro dan juga memberikan pendekatan terintegrasi pengusaha mikro melalui *channel* spiritual, manajemen dan teknologi.
23	2015	Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan	Buku ini memaparkan langkah-langkah pengembangan perbankan syariah di Indonesia dari aspek hukum, infrastruktur, kebijakan, kelembagaan, pengaturan dan fasilitas lainnya. Secara runut dijelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia, dimulai dari inisiasi awal secara kelembagaan, kelengkapan pada perangkat hukum dan perundangan, pendirian infrastruktur, formulasi kebijakan strategis dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan berdasarkan kebutuhan dan target-target yang terencana, terukur dan sistematis. Selain itu buku ini juga menyediakan informasi terkait peran dan kontribusi Indonesia dalam pengembangan industri perbankan syariah secara khusus dan keuangan syariah di dunia internasional secara umum.

Lampiran 4 Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2022

No.	Topik/Judul	Keterangan
1	Kajian Indeksasi Return Sektor Riil Sebagai Alternatif Tingkat Pengembalian Instrumen Keuangan Syariah	*Reference rate* yang mencerminkan kinerja sektor riil sangat dibutuhkan oleh sektor keuangan syariah dalam *product pricing*, agar tingkat pengembalian *instrument*/produk keuangan syariah mencerminkan keadilan dan menciptakan stabilitas keuangan. Formulasi indeksasi return sektor riil menggunakan pendekatan CRR dan ROIC yang telah diteliti pada tahun 2021 cukup valid dan relevan pada beragam sektor ekonomi serta dikomparasi dengan negara-negara lain, baik negara maju maupun negara *emerging market*.
2	Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Hijau: Towards Green Economy Transformation Through Islamic Green Financing: Managing Risk and Fostering Sustainable Growth for the Real and Financial Sectors	Penelitian ini bertujuan untuk (1) menentukan prioritas *Benefit*, *Opportunity*, *Cost*, dan *Risk* dalam transformasi ekonomi hijau, beserta dengan (2) alternatif pembiayaan yang paling tepat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa "*Benefit*" adalah aspek BOCR yang paling diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam transformasi ekonomi hijau, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan dan pengurangan kerusakan, diikuti oleh *Opportunity* (sebagian besar terkait dengan pengembangan alternatif ramah lingkungan), *Cost* (biaya pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan biaya investasi), dan *Risk* (biaya transisi tinggi). Dengan menggunakan rumus standar, temuan kedua menunjukkan bahwa *Islamic asset management* merupakan instrumen keuangan Islam yang paling diprioritaskan untuk melakukan transisi ekonomi hijau. Temuan ketiga menunjukkan bahwa "*Islamic asset management*" lebih diprioritaskan dalam jangka pendek untuk transformasi ekonomi hijau, sementara itu, *Islamic corporate and investment banking* lebih diprioritaskan dalam jangka panjang untuk transformasi dimaksud.
3	Is Islamic Banks better than Conventional Banks in the time of Uncertainty?	Riset ini bertujuan untuk (1) meneliti bagaimana pengaruh ketidakpastian terhadap stabilitas bank Syariah dan konvensional di negara-negara OKI. Kemudian, riset ini juga (2) melihat *spillover effect* dari stabilitas perbankan di negara OKI Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa di negara-negara OKI, bank Syariah memiliki stabilitas yang lebih baik daripada bank konvensional di masa ketidakpastian. Kemudian, terdapat juga bukti yang kuat atas *spillover effect* stabilitas perbankan di masa ketidakpastian.

No.	Topik/Judul	Keterangan
4	Kajian Indikator Aktivitas Usaha Syariah sebagai Proksi PDB Syariah	Kajian tahun 2021 telah menghasilkan nilai kontribusi Aktivitas Usaha Syariah subsektor Makanan Minuman dan TPT berdasarkan pengukuran Dimensi Produk dan Dimensi Sumber Pembiayaan. Penelitian menunjukkan indikator aktifitas usaha syariah pada sektor pengolahan lainnya melanjutkan perhitungan pada sektor pertanian, makan-minum dan TPT, sehingga memiliki informasi yang lebih lengkap terkait aktivitas usaha pada sektor pertanian dan pengolahan yang mencerminkan implementasi nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah.
5	Kajian Model Bisnis Sustainable Food dengan Memanfaatkan Renewable Energy	Pengolahan pangan dari hulu hingga ke hilir membutuhkan energi yang cukup banyak yang berkontribusi pada 30% emisi gas rumah kaca, konsumsi 70% air tawar, penyebab eutrofikasi pada tanah, dan menyebabkan perubahan lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut. Berdasarkan World Research Institute (WRI) Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-8 sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 965,3 MtCO2e atau setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energy. Penelitian ini memotret bagaimana implementasi *sustainable food/ farming* di Eropa yang memanfaatkan teknologi *renewable energy* dan seperti apa model bisnis yang dapat diimplementasikan dengan kondisi Indonesia.
6	Kajian Masterplan Industri Halal Indonesia	Menyusun kajian pengembangan industri halal untuk menjadi masukan dalam perumusan masterplan industri halal Indonesia sebagai pedoman pengembangan industri halal Indonesia Merumuskan tantangan dan peluang industri halal Indonesia Mengidentifikasi subsektor industri halal yang dapat didorong untuk memperkuat industri halal Penelitian ini mempersiapkan usulan *roadmap* pengembangan industri halal Indonesia
7	Penyusunan Kajian Integrasi Keuangan komersial & sosial syariah: Kajian Dampak Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Studi Kasus SWR 001 dan SWR 002	Penelitian ini mengidentifikasi model instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah yang dapat memperkaya instrumen keuangan syariah. Penelitian ini melakukan analisis regulasi yang dibutuhkan bagi aplikasi instrumen integrasi tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan aplikasi keuangan komersial dan keuangan sosial secara bersama-sama.

No.	Topik/Judul	Keterangan
8	Kajian Model Bisnis Sustainable Food dengan Memanfaatkan Renewable Energy	Penelitian ini merangkum ruang lingkup *sustainable food/farming* dan mengidentifikasi model pemberdayaan usaha syariah berbasis energi baru terbarukan secara efisien dan optimal dengan responden Penelitian ini memberikan rekomendasi optimalisasi usaha syariah berbasis energi baru terbarukan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha syariah secara berkelanjutan
9	Kajian Penyempurnaan Mekanisme Transfer Imbalan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	Penelitian ini mengidentifikasi dan memahami prinsip syariah terkait imbalan dari pengelolaan dana wakaf, seperti instrumen CWLS Penelitian ini mengidentifikasi dan memahami ketentuan atau regulasi terkait mekanisme transfer imbalan CWLS yang ada pada K/L Penelitian ini mengelaborasi alternatif penyempurnaan mekanisme transfer imbalan CWLS Penelitian ini memberikan usulan atau rekomendasi implementasi mekanisme transfer imbalan CWLS secara langsung kepada nazir dan kesepakatan mengenai tahapannya.

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akad	Kesepakatan atas kedua belah pihak yang menetapkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perikatan berdasarkan ketentuan syariah
Akad *Al-Tahawwuth Al-Murakkab*	Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaski *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaski *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
Baitul Maal Wat Tamwil	Lembaga keuangan mikro syariah dengan fungsi *Baitul maal* yang lebih mengarah pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan fungsi *Baitul Tamwil* sebagai kegiatan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bauran Kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya
BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR)	Suku bunga kebijakan baru yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan *BI Rate* karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara *real time* dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Blueprint	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja
Business Coaching	Bimbingan teknis untuk pelaku usaha dalam bentuk *workshop*
Business Matching	Kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli baik di tingkat domestik maupun global
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	Instrumen penempatan dana wakaf (*cash waqf*) pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan sarana sosial
Countercyclical	Kecenderungan pergerakan berlawanan arah dengan pergerakan siklus ekonomi

Istilah	Arti
Countercyclical Capital Buffer (CCyB)	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019
Cross border	Lintas batas
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
Deposito Syariah	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disrupsi rantai pasok	Terjadinya perubahan secara masif pada rantai pasok
E-commerce	Transaksi perdagangan secara *online* atau menggunakan teknologi internet
Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sistem ekonomi dan keuangan yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
End-to-end	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
Excessive Credit Growth	Pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang berlebihan
Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI)	Penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	Fasilitas simpanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja

Istilah	Arti
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan *road to* ISEF
Financing to Value (FTV)	Rasio *Financing to Value* (FTV) digunakan untuk pembiayaan properti dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (*green financing*)
Financial technology/ Fintech	*Financial technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja
Giro Wajib Minimum (GWM)	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
Green Economy	Ekonomi berwawasan lingkungan
Green Sukuk	Sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim
G20	Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa
Haji	Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu
Halal Value Chains (HVC) / Rantai Nilai Halal	Rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen, yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah
Haram	Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Indeks Keyakinan	Indeks yang menunjukkan penilaian (keyakinan) pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi saat ini dan di masa mendatang
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Infak	Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
Inklusif	Kebijakan yang ditempuh agar berdampak secara luas kepada masyarakat

Istilah	Arti
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Instrumen PUAS)	Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu *Sharia Economic Forum* dan *Sharia Fair*. Kegiatan forum terdiri dari seminar/*workshop*, sedangkan *Sharia Fair* merupakan *outlet* bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga terkait
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investor	Suatu pihak baik perorangan atau lembaga/institusi yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan kegiatan investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)	Jurnal internasional ilmiah di bidang ekonomi, moneter dan keuangan syariah yang diterbitkan setiap triwulan oleh Bank Indonesia Institute
Kebijakan substitusi impor	Kebijakan Pemerintah untuk membuat industri domestik mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui impor
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
Konflik geopolitik	Perselisihan hubungan terkait politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf
Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah dalam usaha skala mikro
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)	Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
Lender of the Last Resort (LOLR)	Fungsi yang melekat pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral baik dalam kondisi normal maupun krisis, dimana Bank Indonesia dapat memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/ PLJPS) bagi perbankan nasional
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya

Istilah	Arti
Literasi Ekonomi Syariah	Pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*Economic* & *Financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
Maqashid Syariah	Tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat
Marketplace	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam *e-commerce*)
Milenial	Generasi yang lahir antara tahun 1980 - 2000
Mustahik	Orang yang berhak menerima zakat
Muzaki	Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
Nazir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Non Tunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, *mobile banking*, ataupun internet *banking*
Normalisasi kebijakan	Kebijakan yang ditempuh untuk mengembalikan kebijakan pada kondisi normal, setelah adanya langkah *extraordinary* kebijakan akibat kejadian tidak normal
Off-taker	Pihak yang menjadi penjamin pembelian atau penyalur hasil produksi dari para produsen
Online	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Operasi Moneter Syariah (OMS)	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah
Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah	Kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain
Outstanding	Posisi *cash*/kewajiban yang belum terselesaikan secara keuangan
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
Pariwisata Ramah Muslim (*Muslim-friendly Tourism)*	Tujuan wisata, fasilitas, dan layanan yang sejalan dengan syariat Islam
Pasar Keuangan Syariah	Pasar keuangan yang mencakup pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar modal syariah

Istilah	Arti
Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	Kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas masyarakat
Pembiayaan	Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil
Pendalaman Pasar Keuangan Syariah	Upaya meningkatkan likuiditas di Pasar Keuangan Syariah
Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI)	Instrumen baru injeksi likuiditas Operasi Moneter Syariah (OMS) yang baru ditransaksikan sejak awal Oktober 2020
Perbankan syariah	Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
Pesantren	Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pilot Project	Kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian dalam rangka untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari suatu pelaksanaan program
Platform	Program atau rencana kerja yang diidentikan dengan pemanfaatan teknologi digital
Prinsip Syariah	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
Penempatan langsung (*private placement*)	Kegiatan penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak pembeli, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan
Presidensi G20	Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun
Produk Domestik Produk (PDB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu negara tertentu
Produk Halal	Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam

Istilah	Arti
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan *scanning* kode tertentu melalui aplikasi *mobile* di *merchant*
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi
Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah)	Rasio hasil perbandingan antara Pembiayaan yang diberikan dan Surat berharga syariah korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki BUS/UUS terhadap DPK BUS/UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat (tidak termasuk dana antarbank), Surat berharga syariah yang diterbitkan, dan Pembiayaan yang diterima BUS/UUS
Repo	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati
Repo Financing Facility (Repo FF)	Transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Hal ini dalam rangka penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka Operasi Moneter dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja
Resiliensi	Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit
Riba	Penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
Scarring Effect	Dampak berkepanjangan dari suatu krisis akibat masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya
Sedekah	Harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
Sektor riil	Sektor produksi barang dan/atau layanan jasa di luar produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Standing Facilities Syariah	Kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia untuk OMS

Istilah	Arti
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Substitusi impor	Kemampuan industri domestik untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui impor
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia
Sulampua	Meliputi wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan Wilayah Papua
Surat Berharga Negara (SBN)	Surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara	Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah
Sustainable finance	Dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup
Teknologi finansial (*fintech*)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
Term Deposit (TD) Valas Syariah	Penempatan dana milik peserta Operasi Pasar Terbuka Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing
Transformasi	Perubahan struktur ekonomi yang dapat mendukung ekonomi tumbuh secara berkesinambungan dan mendukung pencapaian menuju negara maju
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Unit Usaha Syariah (UUS)	Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah
Usaha Syariah	Usaha yang dilakukan dengan menerapkan nilai dan prinsip dasar syariah dalam setiap proses kegiatan usaha
Virtual	Tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak melalui jaringan internet

Istilah	Arti
Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Waqf Core Principles (WCP)	Prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf yang terdiri dari 29 prinsip dan mencakup 6 dimensi
Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
Zakat Core Principles (ZCP)	Prinsip-prinsip pokok pengelolaan zakat yang berisi 18 prinsip dan mengatur 6 dimensi utama pengelolaan zakat

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIF-IsDB	Awqaf Properties Investment Fund – Islamic Development Bank
AUS	Aktifitas Usaha Syariah
ASIFA	Aceh Sharia Funding Agregator
ALUDI	Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BI	Bank Indonesia
BI-FAST	Bank Indonesia Fast Payment
BI7DRR	BI 7 Days Reverse Repo Rate
BMT	Baitul Maal Wat Tamwil
BPRS	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
BWI	Badan Wakaf indonesia
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CFP	Call For Paper
CPO	Crude Palm Oil
CWLS	Cash Waqf Linked Sukuk
DES	Daftar Efek Syariah
DEKS	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
EBT	Energi Baru Terbarukan
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FGD	Focus Group Discussion
FinTech	Financial Technology
FLiSBI	Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
FTV	Financing to Value

Singkatan	Kepanjangan
GIER	Global Islamic Economy Report
GWM	Giro Wajib Minimum
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GHH	Global Halal Hub
HEBITREN	Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren
HVC	Halal Value Chain
HCI	Halal Centre Indonesia
HET	Harga Eceran Tertinggi
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
IFSB	Islamic Financial Services Board
IIFM	International Islamic Financial Market
IILM	International Islamic Liquidity Management
IIMEFC	International Islamic Monetary Economics and Finance Conference
IKMS	Institusi Keungan Mikro Syariah
IKRA	Industri Kreatif Syariah Indonesia
IKDZ	Indeks Kesiapan Digital Zakat
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IMF	International Monetary Fund
INFRATANI	Integrated Farming with Technology and Information
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPO	Initial Public Offering
ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia
ISAK	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
IsDB	Islamic Development Bank
ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
In2MotionFest	Indonesia International Modest Fashion Festival
JIMF	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance
JUARA EKSPOR	Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor
JPH	Jaminan Produk Halal
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KESN	Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional
KTI	Kawasan Timur Indonesia
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Singkatan	Kepanjangan
K/L	Kementerian/ Lembaga
KDEKS	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LaR	Loan at Risk
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
LN	Luar Negeri
LPPOM MUI	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
MEKSI	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
MIHAS	Malaysia International Halal Showcase
MYDC	Modest Young Designer Competition
NPF	Non Performing Financing
NTE	Negara Tujuan Ekspor
OIC / OKI	*Organisation of Islamic Cooperation* / Organisasi Kerja Sama Islam
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OMS	Operasi Moneter Syariah
OPT	Operasi Pasar Terbuka
OPZ	Organisasi Pengelola Zakat
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PINTER	Program Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi
PBS	Project Based Sukuk
PDB	Produk Domestik Bruto
PDES	Pusat Data Ekonomi Syariah
PERLU	Penguatan Energi Ramah Lingkungan
PUMPI	Pemberdayaan UMKM Perempuan Indonesia
PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PP	Pembiayaan Properti
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPUMI	Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia
PRM	Pariwisata Ramah Muslim

Singkatan	Kepanjangan
PSPI	Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia
PSAK	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAS	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard
Repo	Repurchase agreement
RI	Republik Indonesia
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPH	Rumah Potong Hewan
RR	Reverse Repo
SANTRI	Standar Akuntansi Pesantren Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SBPI	Surat Berharga Pembiayaan Inklusif
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SESRIC	Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SIPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKSR	Survei Khusus Sektor Riil
SRO	Self Regulatory Organizations
SKALA	Sertifikasi Makanan dan Minuman Halal
SMART	Sustainable Muslim-Friendly and Attractive Tourism
SMA	Sekolah Menengah Atas
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SWR001	Sukuk Wakaf Ritel Seri 001
SWR002	Sukuk Wakaf Ritel Seri 002
SEHATI	Sertifikasi Halal Gratis
SOTS	Sistem Online Trading Syariah
TD	Term Deposit
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Singkatan	Kepanjangan
UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia
UIN	Universitas Islam Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
USD	United States Dollar
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah
Valas	Valuta Asing
YSSC	Youth Sharia Sociopreneur Competetition
WCP	Waqf Core Principles
WGI	World Giving Index
WIZSTREN	Wakaf, Infak, Zakat, Sodaqoh Pesantren
ZCP	Zakat Core Principles
ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

TIM PENYUSUN

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH 2022

Pengarah	Arief Hartawan
Editor	Prijono, Ita Rulina
Koordinator	Jardine Ariena Husman, Ali Sakti, Dahnila Dahlan, Ridwan Maulana Putra, Imam Wahyudi Indrawan
Penulis	Ahmad Zaky Darmawan, Arinda Dewi Nur Aini, Dien Mochammad Irvan Idris, Dinda Herfian Wardhani, Fadhil Akbar Purnama, Gt. Hafiz Anshari Azhar, Putri Almainda K., Rahmi Mabrury, Rina Lestari, Siti Nurfalinda, Wahyu Ega Nugraha, Yason Taufik Akbar, Zalika Nasser
Pengolah Data, Layout dan Produksi	Siti Rahmawati, Risa Sari Pertiwi, Taufik Nugroho, Ratu Ghifa Nazila Ramdiania
Kontributor	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Departemen Regional Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10350
www.bi.go.id